



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



DJPb
Indonesian Treasury



KAJIAN FISKAL REGIONAL

PROVINSI LAMPUNG

Tahun 2024

Kanwil DJPb Provinsi Lampung



TIM PENYUSUN



Pengarah

Mohammad Dody Fachrudin

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung

Penanggung Jawab

Farhan Fatnanto

Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

Ketua Tim

Gwen Adhitya Amalkhan

Kepala Seksi Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II C

Tim Penyusun

Silvi Yuniar

Romadhona Puspita Sari

Yossi Yulita

Lily Radhiya Ulfa

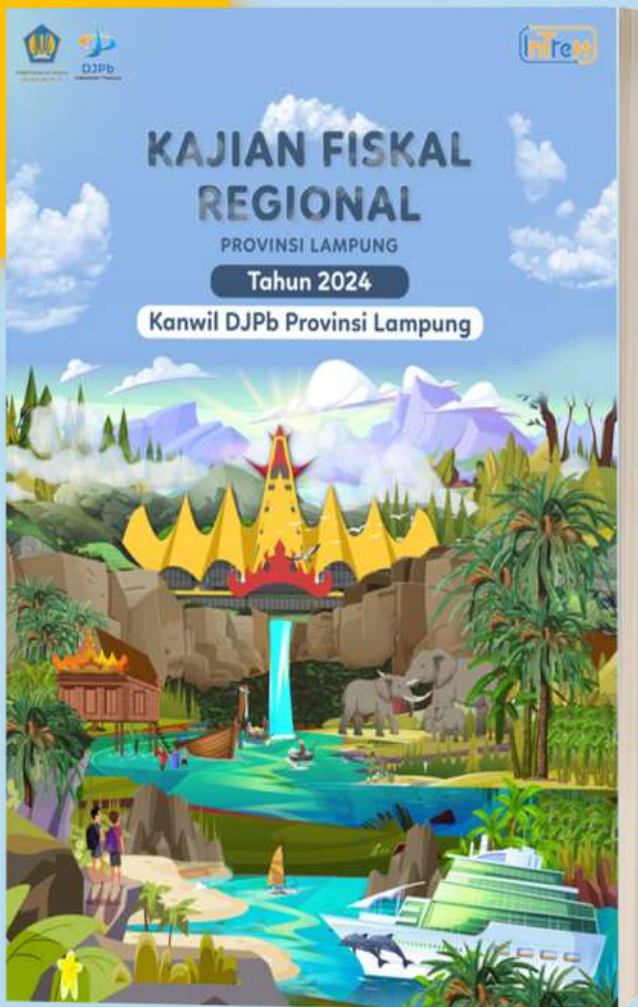
Grace R.M Hasibuan



new DJPb
in Town

HANDAL
Harmonis Amanah Digital Akuntabel Loyal

UNDUH KAJIAN FISKAL REGIONAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024 SECARA ONLINE



SCAN ME



Atau

Unduh Pada Tautan Berikut:

<https://bit.ly/KFRLampung>



KRITIK DAN SARAN:

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung

Email: Kanwildjpb.lampung@kemenkeu.go.id

Kata Pengantar

Tabik pun, Salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan semangat meningkatkan pembangunan di Lampung, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung telah menyusun Kajian Fiskal Regional (KFR) Tahunan 2024. KFR Tahunan 2024 merupakan komitmen kami dalam mendukung perkembangan kebijakan fiskal Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal ini dilakukan melalui analisis perkembangan ekonomi, fiskal, serta pembangunan di regional Lampung. KFR merupakan hasil dari upaya kami untuk menggali isu-isu terkini dan mengantisipasi risiko terkait pelaksanaan kebijakan fiskal dalam menghadapi dinamika tantangan ekonomi dan pembangunan di regional Lampung, serta ketidakpastian global.

Kami ucapkan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang berkontribusi, termasuk Gubernur Provinsi Lampung, Bupati/Walikota, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung, *Regional Economist*, dan *Local Experts* yang memberikan kolaborasi data dan *insights* dalam penyusunan KFR. Tak lupa juga, apresiasi kami sampaikan untuk para kolaborator utama Kemenkeu Satu Regional Lampung yaitu Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu Lampung, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat, serta Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu atas kontribusi dan perspektif berharga dalam menyusun KFR.



Kata Pengantar

Harapan kami, KFR dapat memberikan gambaran mendalam dalam perencanaan dan implementasi strategi kebijakan fiskal, menjadi sumber inspirasi, dan referensi bagi seluruh pemangku kepentingan. Kami menyadari potensi pengembangan dalam setiap kajian dan dengan tulus mengundang masukan, kritik konstruktif, dan pandangan progresif untuk memperkaya kualitas kajian kami.

Terakhir, dengan kerendahan hati, kami berdoa agar setiap langkah kita untuk berkontribusi positif bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan regional Lampung ke depan selalu diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga KFR Tahun Anggaran 2024 dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan regional Lampung ke depan.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Bandar Lampung, 28 Februari 2025
Kepala Kanwil DJPb
Perbendaharaan Provinsi Lampung



Ditandatangani secara elektronik
Mohammad Dody Fachrudin

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GRAFIK	iii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
EXECUTIVE SUMMARY.....	x
DASHBOARD MAKRO-FISKAL REGIONAL.....	xi
SUPLEMEN 1- A GLIMPSE OF LAMPUNG.....	1
SUPLEMEN 2- PELUANG INVESTASI LAMPUNG: WAY LAGA BIZPARK.....	2
BAB I SASARAN PEMBANGUNAN DAN TANTANGAN DAERAH	3
1.1 PENDAHULUAN	3
1.2 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	3
1.3 KESELARASAN RPJMN DENGAN RPJMD	7
1.4 CAPAIAN ATAS KESELARASAN RPJMN DENGAN RPJMD.....	9
1.4.1 Analisis Keselarasan Capaian Indikator Makro Utama Nasional dan Lampung	9
1.4.2 Analisis Keselarasan Capaian RPJMN dan RPJMD Lampung.....	11
1.5 TANTANGAN SASARAN PEMBANGUNAN	11
1.5.1 Tantangan Ekonomi Daerah	11
1.5.1.1 Tantangan dalam pengelolaan SDA, beserta penciptaan nilai tambah dari pengolahan SDA.	12
1.5.1.2 Tantangan dalam penciptaan iklim dan potensi investasi yang kondusif	12
1.5.1.3 Tantangan birokrasi dan pelayanan perizinan	12
1.5.1.4 Tantangan dukungan permodalan, infrastruktur ekonomi, dan akses teknologi.....	13
1.5.1.5 Tantangan reformasi struktural	13
1.5.2 Tantangan Sosial Kependudukan	14
1.5.2.1 Struktur, Jumlah, dan Demografi Penduduk	14
1.5.2.2 Kondisi kualitas SDM (prevalensi stunting dan kualitas pendidikan)	14
1.5.2.3 Karakteristik Masyarakat.....	14
1.5.2.4 Struktur Mata Pencaharian	15
1.5.3 Tantangan Lainnya.....	15
SUPLEMEN 3 - ANALISIS PENGEMBANGAN SEKTOR POTENSIAL: REVIEW PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA DI LAMPUNG	16
BAB II ANALISIS EKONOMI REGIONAL.....	17
2.1 ANALISIS INDIKATOR MAKRO EKONOMI	17
2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	17
2.1.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi	17
2.1.1.2 Nominal dan Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan Pengeluaran.....	20
2.1.1.3 Nominal dan Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan Lapangan Usaha	22
2.1.1.4 Kontribusi fiskal (pengeluaran pemerintah) terhadap pembentukan PDRB	24
2.1.2 Suku Bunga	25
2.1.3 Inflasi.....	26
2.1.3.1 Inflasi Bulanan	26
2.1.3.2 Inflasi Tahunan.....	28
2.1.3.3 Pengendalian Inflasi	31
2.1.4 Nilai Tukar	32
2.2 ANALISIS INDIKATOR KESEJAHTERAAN.....	33
2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	33
2.2.2 Tingkat Kemiskinan	37
2.2.3 Tingkat Ketimpangan (Rasio Gini).....	41
2.2.4 Kondisi Ketenagakerjaan dan Tingkat Pengangguran	43
2.2.5 Nilai Tukar Petani (NTP)	46
2.2.6 Nilai Tukar Nelayan (NTN)	49

2.3	REVIU CAPAIAN KINERJA MAKRO KESRA REGIONAL LAMPUNG	51
SUPLEMEN 4- ANALISIS DAMPAK SUBSIDI KREDIT KEPADA MASYARAKAT: ANALISIS PENGARUH BESARAN PINJAMAN KUR TERHADAP KENAIKAN OMZET DEBITUR DI PROVINSI LAMPUNG		53
BAB III ANALISIS FISKAL REGIONAL		54
3.1	PELAKSANAAN APBN	54
3.1.1	Pendapatan Negara.....	55
3.1.1.1	Penerimaan Perpajakan	55
3.1.1.2	Analisis <i>Tax Ratio</i>	57
3.1.1.3	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	58
3.1.2	Belanja Negara	59
3.1.2.1	Belanja Pemerintah Pusat (BPP)	59
3.1.2.2	Berdasarkan Jenis Belanja.....	59
3.1.2.3	Berdasarkan Kementerian Negara/ Lembaga	60
3.1.2.4	Berdasarkan Fungsi	61
3.1.2.5	Kontribusi BPP Terhadap PDRB.....	62
3.1.3	Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).....	62
3.1.3.1	Dana Transfer Umum (DTU).....	63
3.1.3.2	Dana Transfer Khusus (DTK).....	64
3.1.3.3	Dana Insentif Daerah/ Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan	65
3.1.3.4	Dana Desa (DD)	65
3.1.4	Surplus/ Defisit APBN.....	66
3.1.5	Pengelolaan BLU Pusat	67
3.1.5.1	Profil dan Jenis Layanan BLU Pusat	67
3.1.5.2	Perkembangan Pengelolaan Aset, PNBP, dan Belanja BLU	67
3.1.5.3	Tingkat Kemandirian BLU	69
3.1.5.4	Profil Satker PNBP Potensial Menjadi BLU	70
3.1.6	Pengelolaan Manajemen Investasi Pusat Kinerja Penyaluran Kredit Program Pemerintah	70
3.1.6.1	Penerusan Pinjaman	71
3.1.6.2	Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).....	71
3.1.6.3	Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)	72
3.1.7	Isu Strategis Pelaksanaan APBN di Daerah	72
3.1.7.1	Capaian Output Strategis APBN.....	72
3.1.7.2	Reviu Pelaksanaan Anggaran	73
SUPLEMEN 5- SUCCESS STORY: PEMANFAATAN DANA DESA PADA DESA HANURA		76
3.2	PELAKSANAAN APBD.....	77
3.2.1	Pendapatan Daerah.....	78
3.2.1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	78
3.2.1.2	Pendapatan Transfer	84
3.2.1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	84
3.2.1.4	Analisis Tingkat Kemandirian Daerah	85
3.2.1.5	Upaya Daerah dalam Peningkatan PAD	86
3.2.2	Belanja Daerah	88
3.2.2.1	Berdasarkan Jenis Belanja.....	88
3.2.2.2	Berdasarkan Fungsi	91
3.2.2.3	Berdasarkan Urusan	92
3.2.2.4	Kontribusi Belanja Terhadap PDRB	93
3.2.2.5	Analisis Belanja per Kapita	93
3.2.3	Perkembangan Surplus/Defisit APBD	94
3.2.4	Pembiayaan Daerah	95
3.2.5	Perkembangan BLU Daerah	96
3.2.5.1	Profil BLU Daerah	96
3.2.5.2	Analisis Tingkat Kemandirian BLUD	96
3.2.5.3	Perkembangan Aset BLUD	97
3.2.6	Isu Strategis Pelaksanaan APBD.....	98
3.3	ANALISIS KONSOLIDASI APBN DAN APBD	99

3.3.1 Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian	99
3.3.2 Pendapatan Konsolidasian	99
3.3.2.1 Proporsi dan Perbandingan	99
3.3.3 Belanja Konsolidasian	99
3.3.3.1 Proporsi dan Perbandingan	99
3.3.3.2 Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja	100
3.3.3.3 Belanja Perkapita Konsolidasi	100
3.3.4 Surplus Defisit Anggaran Konsolidasian	100
3.3.5 Pembiayaan Konsolidasian	101
SUPLEMEN 6 - ANALISIS DAMPAK BELANJA PEMERINTAH: ANALISIS BELANJA KONEKTIVITAS, BELANJA MODAL, DAN KEMANDIRIAN FISKAL TERHADAP PDRB DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018- 2022	102
BAB IV PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH: HARMONISASI BELANJA K/L DAN DAK FISIK DI LAMPUNG	103
4.1 PENDAHULUAN	103
4.2 GAMBARAN UMUM HARMONISASI BELANJA K/L DAK FISIK DI TINGKAT WILAYAH	104
4.2.1 Alokasi Belanja K/L yang Mendukung DAK Fisik	104
4.2.1.1 Perbandingan Belanja KL yang Mendukung DAK Fisik dan DAK Fisik	104
4.2.1.2 Alokasi Anggaran K/L Secara Umum	105
4.2.1.3 Alokasi Anggaran K/L Berdasarkan Bidang DAK Fisik	106
4.2.1.4 Capaian RO utama pada Belanja K/L berdasarkan Bidang DAK Fisik	107
4.3 KENDALA DAN TANTANGAN PELAKSANAAN HARMONISASI BELANJA K/L	113
4.4 KENDALA DAN TANTANGAN PELAKSANAAN DAK FISIK PADA 6 BIDANG	116
4.5 UPAYA SINKRONISASI DI DAERAH OLEH SATKER DAN PEMDA	116
SUPLEMEN 7 - ANALISIS EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN: ANALISIS KETIMPANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA SEKTORAL LAMPUNG	118
BAB V ANALISIS TEMATIK: REVIU ATAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN DI LAMPUNG	119
5.1 PENDAHULUAN	119
5.2 ANALISIS PERKEMBANGAN KONDISI KETAHANAN PANGAN REGIONAL LAMPUNG	120
5.2.1 Perkembangan Ketersediaan Pangan di Regional Lampung	120
5.2.1.1 Supply Dan Demand Padi/Beras Di Regional Lampung	120
5.2.1.2 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Regional Lampung	122
5.2.2 Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Lampung	123
5.3 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN	125
5.3.1 Belanja APBN terkait Ketahanan Pangan di Regional Lampung	125
5.3.1.1 Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Terkait Ketahanan Pangan di Regional Lampung	125
5.3.1.2 Belanja Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Non Fisik Terkait Ketahanan Pangan di Regional Lampung	126
5.3.2 Proyek Strategis Nasional (PSN) Terkait Ketahanan Pangan di Regional Lampung	127
5.3.2.1 Bendungan Way Sekampung	127
5.3.2.2 Bendungan Margatiga	128
5.3.2.3 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bandar Lampung	129
5.3.3 Belanja APBD Lampung terkait Ketahanan Pangan	130
5.4 ANALISIS KETERKAITAN ANTARA KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN DENGAN PENCAPAIAN INDIKATOR-INDIKATOR KETAHANAN PANGAN	132
5.4.1 Analisis Dampak Bendungan Way Sekampung terhadap Akses Air Bersih dan Produktivitas Pangan	132
5.4.1.1 Analisis Welch's T-test atas Akses Air Sebelum dan Sesudah Pembangunan Bendungan Way Sekampung	132
5.4.1.2 Analisis <i>Propensity Score Matching</i> (PSM) Dampak Bendungan Way Sekampung Terhadap Kualitas Air Bersih	133
5.4.1.3 Analisis Welch's T-test atas Produktivitas Pertanian Sebelum dan Sesudah Irigasi Bendungan Way Sekampung	134
5.4.2 Analisis Dampak Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap Indeks Pemanfaatan Pangan dan Prevalensi Stunting di Regional Lampung	135
5.4.2.1 Analisis Dampak Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap Indeks Pemanfaatan Pangan (IPP) di Regional Lampung Periode 2019-2023	136

5.4.2.2 Analisis Dampak Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap Prevalensi Stunting (PST) di Regional Lampung Periode 2019-2023	136
5.5 KEY TAKEAWAYS DAN POLICY RESPONSES KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN DI REGIONAL LAMPUNG	137
SUPLEMEN 8- ANALISIS DAMPAK BELANJA PEMERINTAH: ANALISIS DAMPAK BANTUAN PANGAN NON TUNAI TERHADAP PEMANFAATAN PANGAN DAN PREVALENSI STUNTING LAMPUNG 2019-2023.....	140
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	141
6.1 KESIMPULAN	141
6.1.1 Sasaran Pembangunan dan Tantangan Daerah	141
6.1.2 Outlook Makroekonomi Regional Lampung	141
6.1.3 Kinerja Fiskal Regional Lampung	143
6.1.3.1 Kinerja APBN.....	143
6.1.3.2 Kinerja APBD.....	144
6.1.3.3 Analisis Konsolidasi APBN dan APBD	145
6.1.4 Harmonisasi Belanja K/L dan DAK Fisik	145
6.1.5 Reviu Atas Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Regional Lampung	146
6.2 REKOMENDASI	147
DAFTAR PUSTAKA	151
DAFTAR ISTILAH.....	153

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan <i>C-to-C</i> Lampung, Sumatera, dan Nasional 2020 – 2024 (<i>ctc</i>)	17
Grafik 2.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan <i>Y-on-Y</i> Lampung, Sumatera, dan Nasional Triwulan I 2020 – Triwulan IV 2024.....	18
Grafik 2.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan <i>Q-to-Q</i> Lampung, Sumatera, dan Nasional Triwulan I 2020 – Triwulan IV 2024.....	19
Grafik 2.4. Pertumbuhan Ekonomi Lampung Triwulan IV 2024 Menurut Pengeluaran	20
Grafik 2.5. Kontribusi PDRB Pengeluaran Provinsi di Regional Sumatera dan Nasional Tahun 2024	21
Grafik 2.6. Distribusi dan Pertumbuhan (<i>ctc</i>) PDRB menurut Lapangan Usaha Tahun 2024.....	23
Grafik 2.7. Kontribusi Fiskal terhadap sektor riil ekonomi Lampung 2022 – 2024 (Rp Miliar)	24
Grafik 2.8. Perkembangan BI <i>7-Day Repo Rate</i> dan Inflasi Lampung Tahun 2020 – 2024 (Persen)	25
Grafik 2.9. Pergerakan Laju Inflasi Bulanan Lampung dan Nasional Tahun 2020 – 2024 (%)	26
Grafik 2.10. Pergerakan Laju Inflasi Tahunan Lampung dan Nasional Tahun 2022 – 2024.....	29
Grafik 2.11. Pergerakan Laju Inflasi Lampung, Provinsi di Regional Sumatera dan Nasional (<i>yoy</i>)	29
Grafik 2.12. Perkembangan Harga Beras di Lampung Tahun 2020 – 2024 (Rupiah)	30
Grafik 2.13. Tren Rata-Rata Kurs Tengah Rupiah terhadap US\$1 dan Neraca Perdagangan Luar Negeri Lampung (juta USD) per bulan (2022 – 2024).....	32
Grafik 2.14. Tren Ekspor, Impor (juta USD) Lampung Tahun 2022 – 2024.....	32
Grafik 2.15. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Lampung, Rata-rata Regional Sumatera, dan Nasional Tahun 2020 – 2024	33
Grafik 2.16. IPM Regional Sumatera Tahun 2022 – 2024	34
Grafik 2.17. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Lampung Cluster Pemerintah Daerah Tahun 2020 – 2024.....	35
Grafik 2.18. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Per Kabupaten/Kota di Lampung Tahun 2020 – 2024	35
Grafik 2.19. Dimensi Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten/Kota Lampung Tahun 2020 – 2024	36
Grafik 2.20. Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten/Kota Lampung Tahun 2020 – 2024	36
Grafik 2.21. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten/Kota Lampung Tahun 2020 – 2024.....	36
Grafik 2.22. Dimensi Pendapatan Per Kapita (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) Kabupaten/Kota Lampung Tahun 2020 – 2024 ..	36
Grafik 2.23. Persentase Penduduk Miskin di Lampung, Regional Sumatera, dan Nasional 2020 – 2024 (persen)	38
Grafik 2.24. Tingkat Kemiskinan Regional Sumatera Tahun 2020 – 2024 (persen)	38
Grafik 2.25. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Lampung Menurut Tempat Tinggal 2020 – 2024	38
Grafik 2.26. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 2020 – 2023 (persen)	39
Grafik 2.27. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 2020 – 2023 (persen)	39
Grafik 2.28. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Maret 2020 – Maret 2024....	40
Grafik 2.29. Perkembangan <i>Gini Ratio</i> Lampung, Regional Sumatera, dan Nasional 2020 – 2024 (persen)	41
Grafik 2.30. <i>Gini Ratio</i> Regional Sumatera Tahun 2020 s.d. 2024 (persen)	41
Grafik 2.31. Perkembangan <i>Gini Ratio</i> Lampung Menurut Tempat Tinggal Tahun 2020 – 2024.....	42
Grafik 2.32. Distribusi Pengeluaran Penduduk Lampung Tahun 2020 – 2024.....	42
Grafik 2.33. Perkembangan TPAK di Lampung, Regional Sumatera, dan Nasional Agustus 2020 – Agustus 2024 (%)	43

Grafik 2.34. Perkembangan Struktur Pekerja Formal dan Informal di Lampung Tahun Agustus 2020 – Agustus 2024	44
Grafik 2.35. Struktur Tenaga Kerja di Lampung berdasarkan Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan Agustus 2020 – Agustus 2024 (%)	44
Grafik 2.36. Perkembangan TPT di Lampung, Regional Sumatera, dan Nasional Februari 2020 – Februari 2024 (%).....	45
Grafik 2.37. TPT Regional Sumatera Agustus 2020 s.d. Agustus 2024 (%).....	45
Grafik 2.38. Perkembangan Rata-rata NTP Lampung, Regional Sumatera, dan Indonesia per triwulan Tahun 2020 – 2024	46
Grafik 2.39. Rata-rata NTP Regional Sumatera per Tahun 2020 – 2024	46
Grafik 2.40. Perkembangan Rata-Rata NTN Lampung, Regional Sumatera dan Indonesia per Triwulan 2020 – 2024	49
Grafik 2.41. Rata-Rata NTN Regional Sumatera per Tahun 2020 – 2024	49
Grafik 2.42. Perkembangan NTN Lampung Tahun 2020–2024	50
Grafik 3.1 Tren Kontribusi Komponen Penerimaan Perpajakan Tahun 2022-2024 (miliar rupiah).....	55
Grafik 3.2 Target, Realisasi, Pertumbuhan Penerimaan Perpajakan di Lampung Tahun 2022-2024 (miliar rupiah, persen).....	56
Grafik 3.3 Penerimaan Pajak Neto Kumulatif per Sektor di Lampung Tahun 2024 (persen)	57
Grafik 3.4 Pertumbuhan Kumulatif PNBPN Tahun 2024 (miliar rupiah)	58
Grafik 3.5 Tren PNBPN Provinsi Lampung Tahun 2022-2024	58
Grafik 3.6 Tren Belanja Negara Tahun 2022 s.d. 2024 Provinsi Lampung (miliar rupiah)	59
Grafik 3.7. Proporsi Belanja Pemerintah Pusat 2024 (miliar rupiah).....	59
Grafik 3.8 Growth Belanja Pemerintah Pusat per Jenis Belanja 2024 (miliar rupiah)	60
Grafik 3.9 Perbandingan Pagu dan Realisasi pada Lima Belas K/L Pagu Terbesar 2024 (miliar rupiah)	60
Grafik 3.10 Pertumbuhan Realisasi Belanja pada Lima Belas K/L Pagu Terbesar 2024 (persen)	61
Grafik 3.11. Realisasi BPP Berdasarkan Fungsi 2024 (miliar rupiah)	61
Grafik 3.12. Tren Pertumbuhan BPP Berdasarkan Fungsi 2024.....	61
Grafik 3.13. Perkembangan BPP Per Kapita s.d. Desember 2024 (rupiah, orang).....	62
Grafik 3.14. Perkembangan Kontribusi BPP Terhadap PDRB 2022-2024 (miliar rupiah).....	62
Grafik 3.15. Pagu Realisasi dan Pertumbuhan Realisasi Penyaluran TKD s.d. Desember 2024 per Jenis (miliar rupiah, %) ..	62
Grafik 3.16. Tren Realisasi TKD berdasarkan DTU, DTK, Dana IF, dan Dana Desa Tahun 2022-2024 (miliar rupiah)	62
Grafik 3.17. Pagu Realisasi dan Pertumbuhan Realisasi Penyaluran TKD s.d. Desember 2024 per Pemerintah Daerah (%) ..	63
Grafik 3.18 Pagu Realisasi DTU 2022- 2024 (miliar rupiah).....	63
Grafik 3.19 Tren Penyaluran DAU Lampung 2022-2024 (miliar rupiah).....	63
Grafik 3.20 Tren Penyaluran DBH Lampung 2022-2024 (miliar rupiah).....	64
Grafik 3.21 Pagu Realisasi DTK s.d. Desember 2022-2024 (miliar rupiah).....	64
Grafik 3.22 Tren Penyaluran DAK Fisik Lampung 2022-2024 (miliar rupiah)	64
Grafik 3.23 Tren Penyaluran DAK Non Fisik Lampung 2022-2024 (miliar rupiah)	65
Grafik 3.24 Tren Penyaluran Dana Insentif Fiskal Lampung 2022-2024 (miliar rupiah)	65
Grafik 3.25 Tren Penyaluran Dana Insentif Fiskal Lampung 2022-2024 (miliar rupiah)	65
Grafik 3.26 Perkembangan Surplus/Defisit APBN Regional Lampung Tahun 2022-2024 (miliar rupiah)	66
Grafik 3.27 Tren Perkembangan Aset Tetap BLU per 31 Desember Tahun 2022-2024 (miliar rupiah)	67
Grafik 3.28 Perkembangan Realisasi Belanja RM dan PNBPN BLU di Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2022-2024 (miliar Rp)	68

Grafik 3.29. Perkembangan Kontribusi PNPB BLU terhadap Total Belanja pada Satker BLU Provinsi Lampung Tahun 2020-2024.....	68
Grafik 3.30. Proporsi PNPB BLU per Satuan Kerja di Provinsi Lampung Tahun 2022-2024.....	69
Grafik 3.31 <i>Maturity Rating</i> BLU Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2022-2024	70
Grafik 3.32 Tren Penyaluran KUR di Provinsi Lampung Tahun 2022-2024 (miliar rupiah, debitor).....	71
Grafik 3.33 Penyaluran UMi di Provinsi Lampung Tahun 2022-2024.....	72
Grafik 3.34. Perbandingan Pagu dan Realisasi Pendapatan daerah (miliar rupiah) dan Pertumbuhannya (%) 2022-2024 ...	78
Grafik 3.35. Perbandingan Komposisi PAD Lampung Tahun 2022-2024 (miliar rupiah)	78
Grafik 3.36. Perkembangan Realisasi Pajak Daerah per Jenis di Lampung 2022-2024 (miliar rupiah).....	79
Grafik 3.37. Perkembangan Realisasi Pajak Daerah per Pemda di Lampung 2022-2024 (miliar rupiah)	80
Grafik 3.38. Perkembangan Realisasi Retribusi Daerah per Jenis di Lampung 2022-2024 (miliar rupiah).....	81
Grafik 3.39. Perkembangan Realisasi Retribusi Daerah per Pemda di Lampung 2022-2024 (miliar rupiah)	81
Grafik 3.40. Perkembangan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lampung Tahun 2022-2024 (miliar rupiah)	82
Grafik 3.41. Perkembangan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per Pemda di Lampung Tahun 2022-2024 (miliar rupiah)	83
Grafik 3.42. Perkembangan Realisasi 5 Teratas Jenis LLPADyS Lampung Tahun 2022-2024 (miliar rupiah)	83
Grafik 3.43. Perkembangan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah per Pemda di Lampung 2022-2024 (miliar rupiah)	84
Grafik 3.44. Perbandingan Komposisi Realisasi Pendapatan Transfer Lampung Tahun 2022-2024 (miliar rupiah).....	84
Grafik 3.45. Perkembangan Realisasi LLPADyS Lampung Tahun 2022-2024 (miliar rupiah)	85
Grafik 3.46. Perkembangan Rasio Kemandirian Fiskal dan Rasio Ketergantungan Fiskal Lampung Tahun 2022-2024	85
Grafik 3.47. Rasio Kemandirian Fiskal Daerah per Pemda Tahun 2024.....	86
Grafik 3.48. Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah per Pemda Tahun 2024 (miliar rupiah)	86
Grafik 3.49. Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Daerah (miliar rupiah) dan Pertumbuhannya (yoy) s.d. Triwulan 2022-2024.....	88
Grafik 3.50. Komposisi Belanja Daerah per Pemda, Rasio Belanja Pegawai, dan Rasio Belanja Modal Tahun 2024 (miliar rupiah)	88
Grafik 3.51. Realisasi Belanja Operasi tahun 2022-2024 (miliar rupiah)	89
Grafik 3.52. Perkembangan Realisasi Belanja Modal Lampung Tahun 2022-2024 (miliar rupiah)	89
Grafik 3.53. Perkembangan Realisasi Belanja Modal Lampung per Pemda Tahun 2022-2024 (miliar rupiah).....	90
Grafik 3.54. Realisasi Belanja Tidak Terduga per Pemda 2022-2024 (miliar).....	91
Grafik 3.55. Realisasi Belanja Transfer tahun 2022-2024 per komponen dan pertumbuhannya	91
Grafik 3.56. Perkembangan Realisasi Belanja Transfer per Pemda Tahun 2022-2024 (miliar rupiah).....	91
Grafik 3.57. Perkembangan Realisasi dan Pertumbuhan Belanja per Fungsi Tahun 2022-2024 (miliar)	92
Grafik 3.58. Perbandingan Realisasi Belanja Transfer Berdasarkan Urusan 2023-2024 (miliar rupiah)	92
Grafik 3.59. Realisasi Belanja Daerah per Kapita Kabupaten/Kota 2024 (juta rupiah)	93
Grafik 3.60. Realisasi Belanja Modal per Kapita Kabupaten/Kota Tahun 2024 (juta rupiah)	93
Grafik 3.61. Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah Lampung Tahun 2022-2024 (miliar rupiah).....	95
Grafik 3.62. Perkembangan Realisasi Pendapatan BLUD, Belanja BLUD, (miliar rupiah) dan Rasio Kemandirian BLUD Regional Lampung Tahun 2022-2024	97
Grafik 3.63. Surplus Defisit Anggaran Konsolidasian tahun 2022-2024 (miliar rupiah)	100

Grafik 4.1. Porsi Pagu DAK Fisik Pemda Per Bidang Tahun 2024 (dalam miliar rupiah)	105
Grafik 5.1. Produksi Padi, Produksi Beras, Konsumsi Beras, dan Surplus Beras Lampung 2020-2024	120
Grafik 5.2. Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di Provinsi Lampung 2019-2023 Berdasarkan Komponen.....	124
Grafik 5.3. Tren Akses Air Bersih Sebelum dan Sesudah Pembangunan Bendungan Way Sekampung (Dalam persen)	132
Grafik 5.4. Tren Produktivitas Pertanian Sebelum dan Sesudah Irigasi Bendungan Way Sekampung (Dalam Ton/Ha)	134

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung 2019-2024	4
Tabel 1.2. Sasaran Indikator Makro Provinsi Lampung Tahun 2019-2024	5
Tabel 1.3. Sasaran Makro pada RKPD Provinsi Lampung 2024.....	6
Tabel 1.4. Sasaran Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2024.....	6
Tabel 1.5. Capaian Keselarasan atas Sasaran Makro Utama pada RKPD Provinsi Lampung 2024	9
Tabel 2.1. Perkembangan PDRB Pengeluaran Lampung Triwulan IV 2020 – 2024	20
Tabel 2.2. Perkembangan PDRB Lapangan Usaha Lampung Tahun 2020 – 2024.....	22
Tabel 2.3. Andil Inflasi Bulanan Menurut Kelompok Pengeluaran Lampung Tahun 2024 (Persen).....	27
Tabel 2.4. Sepuluh Komoditas Dengan Frekuensi Andil Inflasi Bulanan Terbanyak di Lampung Selama Tahun 2024	27
Tabel 2.5. Sepuluh Komoditas Dengan Frekuensi Andil Deflasi Bulanan Terbanyak di Lampung Selama Tahun 2024	28
Tabel 2.6. Sepuluh Komoditas Dengan Frekuensi Andil Inflasi Tahunan Terbanyak di Lampung Selama Tahun 2024	30
Tabel 2.7. Komponen Pembentuk IPM Lampung, Rata-rata Regional Sumatera, dan Nasional Tahun 2020 – 2024	34
Tabel 2.8. Perkembangan Serapan Tenaga Kerja Sektoral di Lampung 2020 – 2024 (%).....	44
Tabel 2.9. Perkembangan Rata-Rata Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung per Subsektor 2020 – 2024	47
Tabel 2.10. Perkembangan Rata-Rata NTUP Lampung per Subsektor Periode 2020 s.d. 2024	48
Tabel 2.11. Hasil Reviu Efektivitas Kebijakan Makro Ekonomi dan Kesejahteraan Provinsi Lampung Tahun 2024.....	51
Tabel 3.1 <i>I-Account</i> APBN di Provinsi Lampung Realisasi Tahun 2024 (dalam miliar rupiah)	54
Tabel 3.2 Capaian Penerimaan Perpajakan s.d. Desember 2024 terhadap Target APBN dan Perpres 206/2024 (miliar rupiah)	55
Tabel 3.3 <i>Tax Ratio</i> Penerimaan Pajak 2022-2024 di Lampung (miliar rupiah)	58
Tabel 3.4 Profil BLU di Wilayah Provinsi Lampung	67
Tabel 3.5 Institut Teknologi Sumatera sebagai Satker PNPB Potensial menjadi BLU.....	70
Tabel 3.6 Rincian Jumlah Penerusan Pinjaman Per 31 Desember 2024 (miliar rupiah)	71
Tabel 3.7 Capaian Program Prioritas Nasional di Lampung 2024.....	73
Tabel 3.8 <i>I-Account</i> Realisasi APBD Regional Lampung Tahun 2022-2024 (miliar rupiah).....	77
Tabel 3.9. Perbandingan <i>Local Tax Ratio</i> Lampung Tahun 2022-2024	81
Tabel 3.10 Klasifikasi Kondisi Fiskal Daerah	86
Tabel 3.11. Kontribusi Belanja Daerah terhadap PDRB 2022-2024.....	93
Tabel 3.12. Perkembangan Surplus/Defisit APBD Regional Lampung 2022-2024.....	94
Tabel 3.13. Perkembangan Keseimbangan Umum dan Primer Regional Lampung Tahun 2022-2024 (miliar rupiah).....	95
Tabel 3.14. Profil BLUD Lampung Tahun 2022-2024.....	96
Tabel 3.15. Kemandirian Keuangan 10 BLUD di Lampung Tahun 2022-2024.....	97
Tabel 3.16. Perkembangan Aset 10 BLUD di Lampung Tahun 2022-2024	98
Tabel 3.17. <i>I-Account</i> Konsolidasian APBN dan APBD Regional Lampung 2022-2024 (miliar rupiah).....	99
Tabel 3.18. Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja Konsolidasian Tahun 2022-2024	100
Tabel 3.19. Belanja Perkapita Konsolidasian Tahun 2022-2024	100
Tabel 4.1. Perbedaan DAK Fisik dan Belanja K/L RO Harmonis	104

Tabel 4.2. Alokasi Anggaran K/L Berdasarkan Bidang DAK Fisik (Miliar Rp)	106
Tabel 4.3. Capaian Output Utama Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik Bidang Kesehatan	108
Tabel 4.4. Capaian Output Utama Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik Bidang Pendidikan	109
Tabel 4.5. Capaian Output Utama Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik Bidang Air Minum.....	111
Tabel 4.6. Capaian Output Utama Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik Bidang Sanitasi.....	111
Tabel 4.7. Capaian Output Utama Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik Bidang Pertanian	112
Tabel 5.1. Neraca Beras (Produksi – Konsumsi) Lampung 2020-2024	121
Tabel 5.2. Margin Perdagangan dan Pengangkutan Total (MPPT) Beras di Interregional Sumatera	122
Tabel 5.3. Pola Margin Perdagangan dan Pengangkutan Total (MPPT) Di Regional Lampung.....	123
Tabel 5.4. Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Lampung 2019-2023 Berdasarkan Kab/Kota.....	123
Tabel 5.5. Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Terkait Ketahanan Pangan 2023-2024	125
Tabel 5.6. Dana Alokasi Khusus (DAK) Terkait Ketahanan Pangan di Regional Lampung 2023-2024	126
Tabel 5.7. Realisasi APBD Lampung 2023-2024 Terkait Ketahanan Pangan Per Pemda.....	131
Tabel 5.8. Realisasi APBD Lampung 2023-2024 Terkait Ketahanan Pangan Per Program	131
Tabel 5.9. Hasil Uji Statistik Welch's T-test atas Dampak Sebelum dan Sesudah Pembangunan Bendungan Way Sekampung Terhadap Akses Air Bersih	132
Tabel 5.10. Hasil Uji Statistik Welch's T-test atas Dampak Sebelum dan Sesudah Pembangunan Bendungan Way Sekampung Terhadap Produktivitas Pertanian	135
Tabel 5.11. Hasil ANOVA Regresi Log-Linear Dampak Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap Indeks Pemanfaatan Pangan (IPP)	136
Tabel 5.12. Hasil ANOVA Regresi Log-Linear Dampak Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap Prevalensi Stunting (PST)	136

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. <i>Mapping</i> Keselarasan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Provinsi Lampung	7
Gambar 2.1. Laju Pertumbuhan Triwulanan Y-on-Y dan Kontribusi PDRB	18
Gambar 5.1. Luas Lahan Baku Sawah 2019 dan 2024 Lampung	121
Gambar 5.2. Bendungan Way Sekampung	127
Gambar 5.3. Bendungan Margatiga	128
Gambar 5.4. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bandar Lampung	129
Gambar 5.5. Uji T Kualitas Air Bersih	133
Gambar 5.6. Hasil Kernel Matching	134
Gambar 5.7. Hasil Nearest Neighbor Matching	134

EXECUTIVE SUMMARY

Kajian Fiskal Regional Tahunan 2024 Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung

Sasaran Pembangunan dan Tantangan Daerah

Keselarasan antara RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Lampung mencerminkan fokus pada ekonomi dan pengembangan lokal. Meskipun beberapa indikator makro telah melampaui target, masih terdapat tantangan seperti pelambatan pertumbuhan ekonomi dan lemahnya investasi. Ketergantungan pada ekspor komoditas primer dan kualitas tenaga kerja yang rendah juga menjadi tantangan dalam pencapaian pertumbuhan inklusif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Lampung menunjukkan keselarasan dalam visi, misi, dan prioritas pembangunan. Secara khusus, RPJMN menekankan pembentukan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing, sementara RPJMD Lampung fokus pada pengembangan ekonomi lokal berbasis pertanian dan wilayah pedesaan. Keselarasan ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan di Lampung berkontribusi optimal terhadap tujuan nasional, sambil tetap responsif terhadap kebutuhan dan potensi lokal. Keselarasan capaian indikator makro utama Lampung pada 2024 menunjukkan stabilisasi daya beli masyarakat, namun perlu penguatan kapasitas pembangunan daerah. Beberapa indikator, seperti inflasi (1,57 persen), PDRB per kapita (Rp51,37 juta), dan penurunan emisi gas rumah kaca (15,86 persen), berhasil melampaui target. Namun, pertumbuhan ekonomi (4,57 persen), tingkat pengangguran

terbuka (4,19 persen), dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (6,58 persen) masih perlu dikuatkan. Selain itu, prevalensi stunting di daerah terluar dan dominasi tenaga kerja di sektor informal menunjukkan perlunya upaya besar dalam meningkatkan pemerataan pembangunan.

Tantangan utama Provinsi Lampung mencakup beberapa aspek, di antaranya adalah ketergantungan pada ekspor komoditas primer yang rentan terhadap fluktuasi harga global, serta dampak perubahan iklim yang signifikan terhadap produktivitas sektor pertanian. Selain itu, ketimpangan infrastruktur perkotaan-pedesaan, kualitas tenaga kerja mayoritas berpendidikan rendah, serta stigmatisasi kondisi keamanan di Lampung masih menjadi tantangan dalam menarik investasi teknologi tinggi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Outlook Ekonomi Provinsi Lampung

Ekonomi Lampung pada 2024 menegaskan resiliensinya di tengah dinamika global. Untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan, dibutuhkan sektor ekonomi yang lebih kokoh dan adaptif. Penguatan sektor pertanian dan industri pengolahan menjadi kunci, tidak hanya sebagai motor pertumbuhan, tetapi juga sebagai benteng ketahanan ekonomi yang mampu menavigasi ketidakpastian dan memperkuat daya saing.

Ekonomi Lampung tumbuh sebesar 4,75 persen (ctc) pada 2024, mencerminkan

ketahanan ekonomi daerah di tengah ketidakpastian global, meskipun masih tertinggal dari pertumbuhan nasional sebesar 5,03 persen (ctc). Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan mobilitas angkutan penumpang dan barang yang naik masing-masing sebesar 18,5 persen dan 12,3 persen (yoy), serta aktivitas industri yang meningkat, terutama di sektor manufaktur yang tumbuh 5,21 persen (ctc). Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada turut mendorong konsumsi domestik, terutama dalam industri percetakan dan usaha konveksi, yang mengalami lonjakan pesanan hingga 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sektor pertanian, yang berkontribusi 27,9 persen terhadap PDRB Lampung, mengalami perlambatan dengan pertumbuhan hanya 1,21 persen (ctc), jauh di bawah rata-rata sektor lainnya. Faktor utama yang menyebabkan perlambatan ini adalah penurunan produksi tanaman pangan sebesar 2,75 persen (ctc), terutama beras yang mengalami kontraksi akibat pergeseran pola tanam dan dampak El Niño yang menurunkan produktivitas lahan. Sementara itu, subsektor hortikultura dan perkebunan rakyat menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 3,85 persen dan 4,02 persen (ctc), didukung oleh harga komoditas unggulan seperti kopi dan lada yang relatif stabil. Sektor perikanan, yang mencatat pertumbuhan 5,12 persen (ctc), memiliki potensi besar sebagai sumber diversifikasi ekonomi, tetapi masih menghadapi kendala dalam akses bahan bakar.

Inflasi di Lampung tetap terkendali dalam rentang sasaran $2,5 \pm 1$ persen, dengan tingkat inflasi Desember 2024 sebesar 1,57 persen (yoy), menjadikannya yang terendah dalam empat tahun terakhir. Namun, meskipun inflasi keseluruhan menurun, terdapat tekanan harga pada beberapa komoditas strategis. Beras

mengalami kenaikan harga 4,5 persen (yoy) akibat penurunan produksi, sementara harga cabai merah melonjak 17,2 persen (yoy) akibat gangguan cuaca. Efektivitas kebijakan pengendalian harga terlihat dari penurunan inflasi kelompok transportasi sebesar -1,9 persen (yoy) setelah implementasi kebijakan subsidi angkutan barang dan optimalisasi jalur distribusi.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung pada 2024 mencapai 73,13, meningkat dari 72,72 pada tahun sebelumnya, tetapi masih menjadi yang terendah di Sumatera. Kabupaten Mesuji mencatat IPM terendah di provinsi ini, hanya mencapai 67,84, menandakan kesenjangan signifikan dalam akses pendidikan dan kesehatan. Harapan Lama Sekolah (HLS) di Lampung tercatat 12,8 tahun, lebih rendah dari rata-rata nasional 13,4 tahun, sedangkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) hanya 8,5 tahun. Sektor kesehatan juga menghadapi tantangan, dengan rasio dokter per 1.000 penduduk hanya 0,21, jauh di bawah standar WHO sebesar 1 dokter per 1.000 penduduk.

Tingkat kemiskinan Lampung pada September 2024 tercatat sebesar 10,62 persen, masih lebih tinggi dari rata-rata Sumatera (9,84 persen) dan nasional (9,36 persen). Kemiskinan di perdesaan mencapai 14,89 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 7,32 persen, menunjukkan kesenjangan spasial yang masih besar. Faktor utama penyebab kemiskinan adalah keterbatasan akses infrastruktur dan minimnya diversifikasi sumber penghidupan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 4,19 persen, tetapi jumlah pengangguran bertambah 12.300 orang akibat pertumbuhan angkatan kerja yang lebih tinggi dari penyerapan tenaga kerja. Sektor pertanian, yang biasanya menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, mengalami penurunan daya serap

sebesar 1,75 persen poin. Rasio Gini Lampung berada di angka 0,301, lebih baik dari nasional (0,381), tetapi masih menunjukkan kesenjangan distribusi pendapatan, terutama di sektor informal.

Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Lampung

Kinerja APBN Regional Lampung tahun 2024 menunjukkan kinerja yang konsisten dan positif, yang mencerminkan dukungan kebijakan fiskal dalam mendukung perekonomian daerah. Pendapatan Negara melampaui target di tengah ketidakpastian global dan tantangan ekspor. Di sisi lain, Belanja Negara terealisasi secara akseleratif, mendorong pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan.

Realisasi Pendapatan Negara sebesar Rp12.366,11 miliar, tercapai 104,68 persen dari target, dan berhasil tumbuh 21,15 persen (yoy). Hal ini utamanya didorong oleh pertumbuhan kinerja Penerimaan Perpajakan (16,11 persen, yoy) yang mengalami pertumbuhan pada Pajak Dalam Negeri (11,63 persen, yoy) dan Pajak Perdagangan Internasional (52,82 persen, yoy). Di sisi lain, PNPB juga mencatatkan pertumbuhan 0,24 persen (yoy) sejalan dengan pertumbuhan Pendapatan BLU.

Realisasi Belanja Negara sebesar Rp33.419,85 miliar, tercapai 98,45 persen dari pagu, tumbuh 5,41 persen (yoy) didukung oleh kinerja penyerapan anggaran Belanja K/L dan penyaluran Dana TKD. Belanja Pegawai dan Belanja Barang mendorong pertumbuhan kinerja Belanja K/L sebesar 6,89 persen (yoy). Dari sisi penyaluran TKD mencatatkan pertumbuhan positif 4,70 persen (yoy) didorong oleh seluruh komponen DBH, DAU, DAK Fisik, DAK Non Fisik, Dana Desa, dan Insentif Fiskal. Sementara, penyaluran Hibah menunjukkan perlambatan.

Defisit Anggaran regional Lampung s.d. 31 Desember 2024 sebesar Rp21.053,74 miliar, menyempit 0,75 persen dari tahun sebelumnya. Penurunan defisit ini sejalan dengan kinerja positif penerimaan negara dan pengendalian belanja yang berkualitas. Defisit menandakan bahwa APBN berusaha keras menjadi *shock absorber* dalam menjaga daya beli masyarakat tengah tantangan fluktuasi harga komoditas global dan ketidakpastian geopolitik yang juga mempengaruhi ekonomi regional Lampung.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) di regional Lampung hingga 31 Desember 2024 telah mencapai Rp10,350,45 miliar, tumbuh 21,57 persen (yoy), dan telah disalurkan kepada 208.614 debitur. Peningkatan ini didorong oleh dominasi pelaku usaha di sektor pertanian dan perdagangan sebagai pengguna manfaat KUR, komitmen perbankan dalam mendukung UMKM, serta pertumbuhan ekonomi.

Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Lampung

Kinerja APBD Regional Lampung 2024 menunjukkan pertumbuhan positif pada Belanja Daerah, terutama didorong oleh kontribusi Belanja Operasi, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga. Di sisi lain, Pendapatan Daerah juga menunjukkan pertumbuhan positif yang didukung oleh peningkatan PAD, Dana Transfer, dan Pendapatan Lainnya. Namun demikian, dominasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mencerminkan rendahnya tingkat kemandirian fiskal Lampung.

Realisasi Belanja Daerah tercatat Rp30.314,84 miliar, atau 88,96 persen dari pagu, tumbuh 5,60 persen (yoy). Realisasi Belanja Operasi mencapai Rp21.517,99 miliar atau 89,99 persen dari pagu, tumbuh 5,85 persen (yoy). Kontribusi Belanja Operasi terhadap total Belanja Daerah mencapai 70,98

persen. Realisasi Belanja Modal Daerah di Lampung tahun 2024 kontraksi 0,98 persen (yoy) tercatat Rp3.711,52 miliar atau 80,30 persen dari pagu. Pertumbuhan didorong utamanya oleh peningkatan Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan, serta Gedung dan Bangunan.

Realisasi Pendapatan Daerah Lampung tahun 2024 mencapai Rp30.720,16 miliar atau 91,47 persen dari target APBD-P, tumbuh 6,58 persen (yoy) seiring dengan kinerja positif seluruh komponen pendapatan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat sebesar Rp6.710,77 miliar atau 78,05 persen dari target, meningkat 5,46 persen (yoy) yang didorong oleh pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah (2,92 persen, yoy), Retribusi Daerah (953,89 persen, yoy), serta Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (114,24 persen, yoy). Di sisi lain, Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah masing-masing tumbuh 5,70 persen dan 25,07 persen (yoy), sedangkan Lain-lain Pendapatan yang Sah melonjak signifikan sebesar 129,39 persen (yoy). Meskipun *local tax ratio* mengalami peningkatan, capaian 1,17 persen masih tergolong rendah, mengindikasikan potensi Pendapatan Daerah yang Belum Teroptimalkan (PDRD) yang dapat menjadi ruang penguatan fiskal daerah ke depan.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat masih berkontribusi dominan terhadap Pendapatan Daerah, menyumbang 72,92 persen dari total Pendapatan Daerah. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat di Lampung tercatat Rp24.414,34 miliar atau 98,33 persen dari pagu, tumbuh 5,70 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Rasio PAD terhadap total pendapatan, serta rasio Transfer Pemerintah Pusat (TPP) terhadap total pendapatan menunjukkan variasi tingkat kemandirian daerah di regional Lampung. Provinsi Lampung menunjukkan rasio kemandirian tertinggi dengan indeks 0,54.

Keseimbangan umum dan primer APBD di regional Lampung pada tahun 2024

menunjukkan surplus, mengindikasikan kebijakan fiskal yang lebih konservatif, di mana belanja daerah lebih rendah daripada pendapatannya. Peningkatan belanja perlu diakselerasi agar dapat mendorong daya beli masyarakat, namun dengan tetap memastikan kapasitas fiskal daerah dan keberlanjutan fiskal.

**Pengembangan Ekonomi Daerah:
Harmonisasi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik**

Belanja K/L, melalui Rincian Output (RO) Harmonis yang teridentifikasi sinergis mendukung DAK Fisik di regional Lampung menunjukkan fokus peningkatan pembangunan dan pengembangan pada sektor-sektor strategis seperti jalan, kesehatan, pendidikan, pertanian, air minum dan sanitasi.

Harmonisasi belanja K/L yang mendukung DAK Fisik dengan DAK Fisik menunjukkan realisasi dan capaian output yang memuaskan. Sampai dengan 31 Desember 2024, realisasi DAK Fisik yang selaras dengan RO Harmonis mencapai Rp1.238,16 miliar atau 96,33 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 1.285,31 miliar yang dialokasikan di regional Lampung, sementara Belanja K/L yang selaras dengan DAK Fisik tersebut mencapai Rp513,68 miliar atau 98,13 persen dari pagu anggaran sebesar Rp523,45 miliar.

Belanja K/L yang harmonis dengan DAK Fisik pembangunan selaras dengan program nasional. Melalui RO Harmonis Bidang Jalan yang bertujuan meningkatkan konektivitas daerah dalam bentuk pembangunan, pemeliharaan dan rekonstruksi jalan dan jembatan, menunjukkan pola alokasi proyek yang cukup merata di seluruh regional Lampung. Dukungan pada bidang kesehatan, pendidikan, pertanian, air minum dan sanitasi juga menjadi prioritas dengan alokasi anggaran yang signifikan di berbagai daerah regional Lampung

untuk berbagai kegiatan seperti pelatihan tenaga kesehatan, penyaluran benih, peningkatan mutu pendidikan melalui pelatihan guru, dan pengembangan akses air minum layak dan layanan sanitasi. Hal ini menunjukkan upaya harmonis pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta menjaga stabilitas, pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat di regional Lampung.

Analisis Tematik: Reviu Atas Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Regional Lampung

Lampung memiliki ketahanan pangan sangat baik, namun masih dibayangi penurunan luas lahan sawah, inflasi beras akibat margin pedagang perantara yang tinggi, keterbatasan kapasitas fiskal daerah, dan perlunya optimalisasi lanjutan atas infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN).

Lampung mengalami surplus beras rata-rata 724.884 ton/tahun selama 2020–2024, dengan pertumbuhan yang menyusut 7,38 persen. Selain itu, penurunan luas lahan baku sawah di dari 361.699 hektare (2019) menjadi 337.284 hektare (2024). Meskipun surplus beras, beras masih sering menjadi penyumbang inflasi di Lampung. Lampung memiliki rantai distribusi beras cukup panjang, dengan Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPPT) rata-rata 14,48 persen, dengan range 5,98 persen - 26,31 persen tergantung pedagang perantara yang terlibat. Tantangan lainnya adalah adanya pengangkutan gabah basah ke Pulau Jawa, serta lemahnya kapasitas penggilingan di Lampung.

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Lampung meningkat pada 2019-2023, dengan kategori ‘sangat tahan’ pada 2023. Meskipun demikian, rendahnya Indeks pemanfaatan (IP) masih mencerminkan perlunya konsumsi domestik efektif bagi kesehatan di Lampung.

Penurunan alokasi belanja APBN dan rendahnya kapasitas fiskal pemerintah daerah melalui APBD membayangi alokasi anggaran terkait ketahanan pangan. Pada APBN 2024, alokasi belanja K/L di Lampung terkait Ketahanan Pangan sebesar Rp675,52 M, meningkat 0,85 persen (yoy), Sementara itu, alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) terkait ketahanan pangan menurun 3,62 persen (yoy) menjadi Rp213,82 M, didominasi oleh bidang jalan, bidang irigasi, dan bidang pertanian (86,02 persen). Sedangkan realisasi belanja APBD 2024 untuk ketahanan pangan sebesar Rp152,07 miliar, menurun 43,46 persen (yoy).

Terdapat tiga Proyek Strategis Nasional (PSN) di Lampung yang mendukung ketahanan pangan yaitu Bendungan Way Sekampung (Rp2,13 triliun), Bendungan Margatiga (Rp886,15 miliar), dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bandar Lampung (Rp1,30 triliun). Bendungan Way Sekampung berkontribusi pada irigasi dan suplai air baku, dengan perlunya optimalisasi pemanfaatan. Bendungan Margatiga berperan dalam irigasi, namun masih terdapat tantangan dalam pembebasan lahan. Sementara, SPAM Bandar Lampung berpotensi meningkatkan akses air bersih, dengan Sambungan Rumah yang masih perlu ditingkatkan guna memperluas cakupan.

Hasil analisis *Propensity Score Matching* (PSM) menunjukkan Bendungan Way Sekampung dapat meningkatkan kualitas air bersih rumah tangga sekitar 6,77 persen – 19,42 persen pasca pembangunan bendungan, namun belum terdapat dampak optimal bagi peningkatan produktivitas pertanian. Analisis lanjutan menggunakan *Welch's T-test* terhadap peningkatan produktivitas pertanian setelah beroperasinya Bendungan Way Sekampung menunjukkan hasil tidak signifikan secara statistik. Kendala struktural seperti masih adanya penguasaan lahan di hulu yang membatasi sambungan

irigasi lanjutan serta adanya kerusakan sekitar 37 persen saluran irigasi di Lampung menghambat penerusan pemanfaatan air dari bendungan tersebut untuk mendukung produktivitas pertanian di regional Lampung.

Hasil analisis regresi log-linear menunjukkan bahwa peningkatan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar 1 persen dapat meningkatkan Indeks Pemanfaatan Pangan sebesar 0,03 persen dan dapat menurunkan Prevalensi Stunting sebesar 0,18 persen di Lampung pada 2019-2023. Temuan ini mengindikasikan bahwa program BPNT dapat memiliki dampak positif terhadap ketahanan pangan daerah, terutama dalam meningkatkan akses rumah tangga miskin terhadap pangan yang lebih bergizi. Penurunan stunting yang lebih signifikan menunjukkan bahwa bantuan pangan tidak hanya meningkatkan ketersediaan makanan, tetapi juga dapat memengaruhi pola konsumsi dan kualitas gizi rumah tangga miskin.

Policy Responses

Berdasarkan analisis ekonomi, fiskal, harmonisasi belanja pusat-daerah, dan ketahanan pangan di Lampung, dapat disampaikan *policy responses* berikut:

- 1) Dinas Pariwisata, BPKAD, Bappeda agar memasukan sektor pariwisata sebagai sasaran prioritas pembangunan, yang diterjemahkan ke dalam penyusunan KUA-PPAS dan RKPD guna meningkatkan diversifikasi ekonomi dari sektor basis pertanian yang pertumbuhannya terus menurun. Hal ini juga dapat diperkuat dengan sinergi perencanaan pemerintah pusat dan daerah melalui diimplementasikan dengan baik sesuai PP 1/2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (HKFN).
- 2) Bappeda Lampung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Investasi/BKPM agar

membangun kawasan industri terpadu di wilayah strategis seperti Bandar Lampung dan Lampung Selatan; selain itu, membentuk klaster industri berbasis komoditas unggulan (misalnya, klaster industri makanan dan minuman berbasis kopi dan kelapa) dengan target peningkatan rata-rata kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB per tahun dari 19,69 persen menjadi di atas 25 persen dalam 5 tahun.

- 3) Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi Lampung agar meningkatkan cakupan dan alokasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), mengingat dampaknya yang signifikan dalam meningkatkan Indeks Pemanfaatan Pangan (IPP) dan menurunkan Prevalensi Stunting (PST). Serta, mengembangkan program pelengkap seperti edukasi gizi bagi penerima manfaat untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan. Hal lainnya yaitu mendorong skema penyediaan BPNT yang berbasis produk lokal guna mendukung pasar petani lokal dan memastikan distribusi pangan lebih efisien.
- 4) Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Badan Pangan Nasional agar memfasilitasi pembentukan lebih banyak *Rice Milling Unit* (RMU) dan klaster penggilingan padi di Lampung yang berbasis kawasan agar lebih efisien dan terintegrasi dengan produksi petani setempat.
- 5) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar mengalokasikan anggaran perbaikan irigasi, terutama pada 37% saluran irigasi yang rusak, untuk meningkatkan efektivitas suplai air dari Bendungan Way Sekampung dan Margatiga. Serta, memanfaatkan skema pembiayaan inovatif seperti Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

untuk pengembangan infrastruktur ketahanan pangan.

- 6) Guna mendukung kapasitas sektor basis pertanian di Lampung, Dinas Perdagangan Provinsi Lampung dapat mengkaji kembali untuk menambah Gudang Skema Resi Gudang (SRG), agar akses UMKM kepada Subsidi Skema Resi Gudang (SSRG) sebagai pembiayaan bersubsidi meningkat, serta mendukung penyimpanan 22 komoditas strategis untuk produktivitas Lampung (gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan, garam, gambir, teh, kopra, timah, bawang merah, ikan, pala, ayam karkas beku, gula kristal putih, kedelai, tembakau, dan kayu manis).
- 7) Biro Perekonomian bersama dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) agar dapat mendorong perluasan skema pembiayaan dengan bunga rendah tersubsidi, serta meningkatkan sosialisasi tentang program Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Ultra Mikro (UMi), dan Fasilitas Dana Bergulir (FDB) kepada UMKM rintisan serta kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS).
- 8) Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi/Kab/Kota di Lampung perlu memitigasi penurunan kontribusi pada sektor pertanian dengan mendorong pengembangan sektor-sektor lain seperti pariwisata dan industri kreatif, guna meningkatkan basis pajak daerah khususnya Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas hotel, restoran, hiburan, listrik, dan parkir.
- 9) Guna menanggulangi keterbatasan SDM pengelola keuangan pemerintah kabupaten/kota, Badan Kepegawaian Daerah terkait dapat meningkatkan kapasitas SDM aparatur perpajakan daerah di Bapenda melalui skema kerja sama rekrutmen dan pelatihan melalui jalur

pendidikan tinggi kedinasan seperti PKN-STAN.

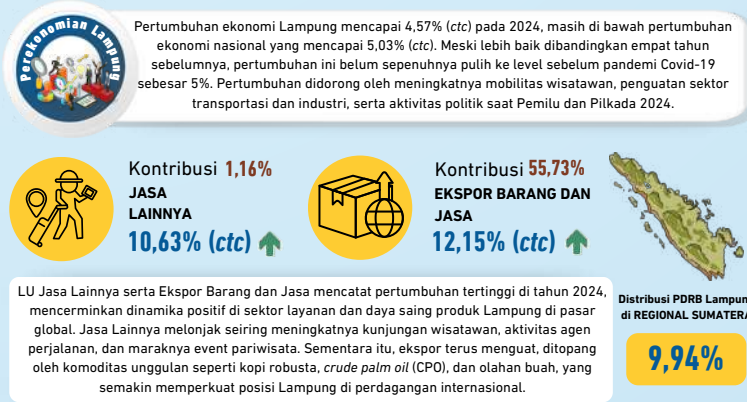
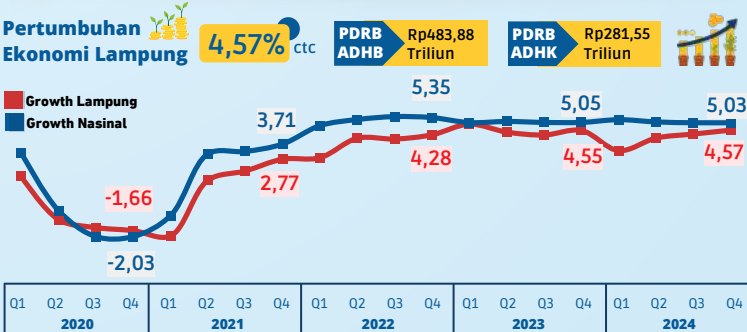
- 10) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Pemerintah Provinsi Lampung agar meningkatkan alokasi DAK Fisik dan DAK Non Fisik sektor pertanian untuk perbaikan irigasi, penyediaan benih unggul, dan rehabilitasi lahan sawah guna mengatasi penurunan luas lahan.
- 11) Tim Pengendali Inflasi Daerah Pusat dan Daerah agar mendorong program intervensi harga tidak hanya melalui operasi pasar, namun juga menstabilkan stok beras daerah, menguatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan, dan menekan Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPPT).
- 12) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM mendorong pemberdayaan ekonomi melalui program padat karya desa untuk menyediakan pekerjaan maupun menyediakan akses modal usaha kepada pelaku UMKM desa melalui program KUR dengan bunga rendah, serta menyediakan pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.
- 13) Pemerintah daerah Lampung agar mengoptimalkan *creative financing* melalui *Special Mission Vehicle* (SMV) Kementerian Keuangan untuk mendukung pembangunan daerah. PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan infrastruktur melalui *Project Development Facility* (PDF) dan *Regional Infrastructure Financing* (RIF), sementara PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) menyediakan skema penjaminan bagi proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF) dapat mendukung pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), sedangkan PT Lembaga Pembiayaan Ekspor

Indonesia (PT LPEI) membantu akses pembiayaan bagi usaha ekspor, khususnya sektor pertanian dan perikanan. Pemanfaatan PT Geo Dipa Energi juga dapat diijazkan untuk pengembangan energi panas bumi. Untuk itu, Pemda perlu memperkuat kapasitas dalam menyusun studi kelayakan,

membangun skema pembiayaan berkelanjutan, dan meningkatkan koordinasi dengan SMV serta sektor swasta.

Rekomendasi kebijakan fiskal dan strategi pembangunan lainnya dapat diakses pada Bab VI

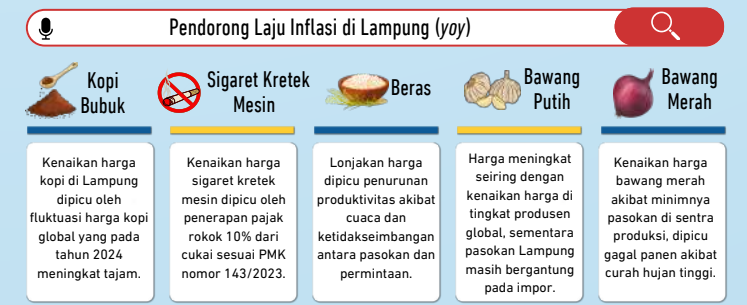
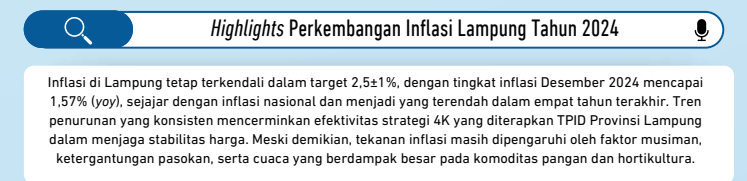
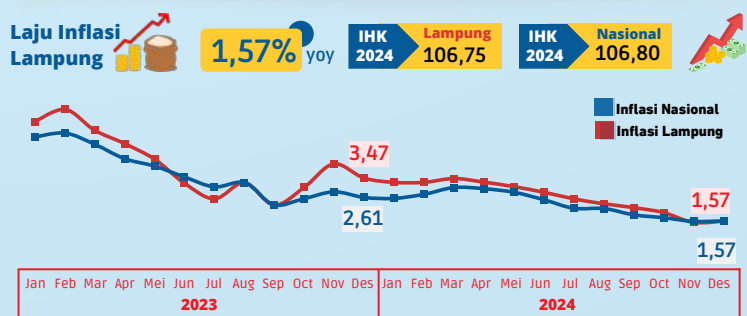
Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2024 (ctc)



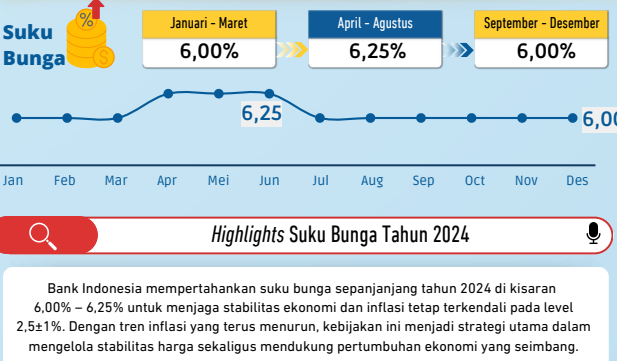
Struktur PDRB Tahun 2024 (ctc)



Perkembangan Inflasi Provinsi Lampung



Suku Bunga



Nilai Tukar

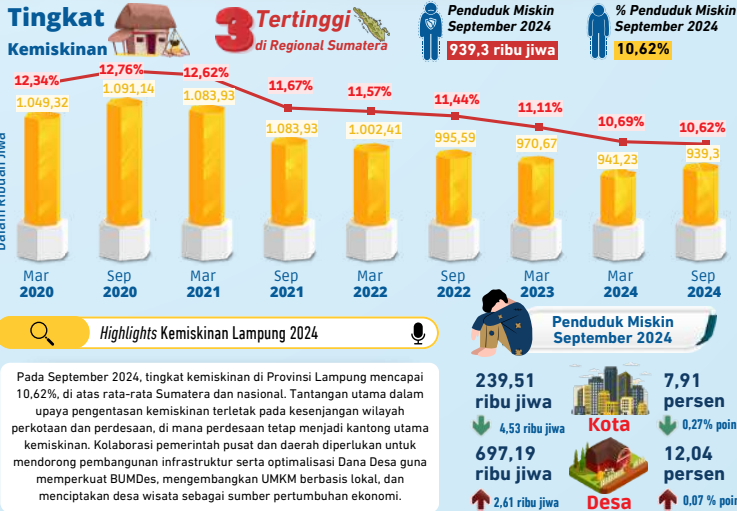




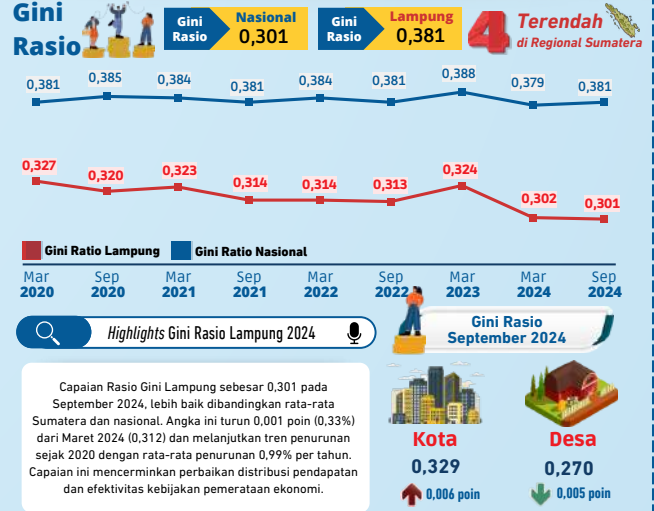
Indikator Kesejahteraan

DASHBOARD MAKRO-FISKAL PROVINSI LAMPUNG

Tingkat Kemiskinan



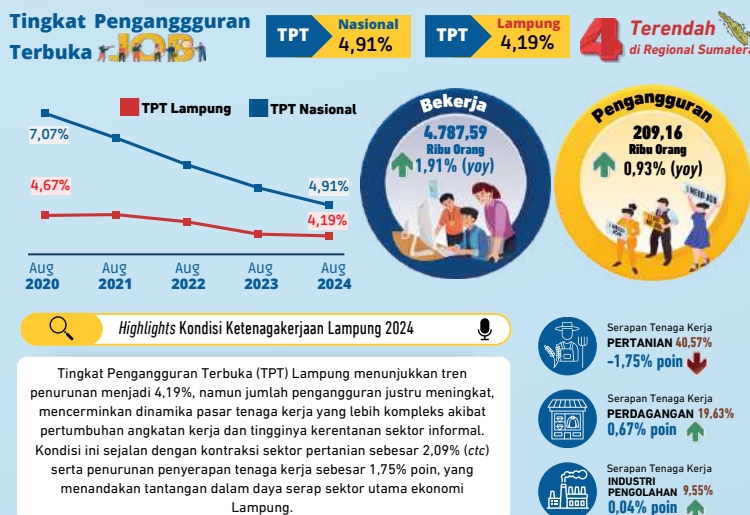
Gini Rasio



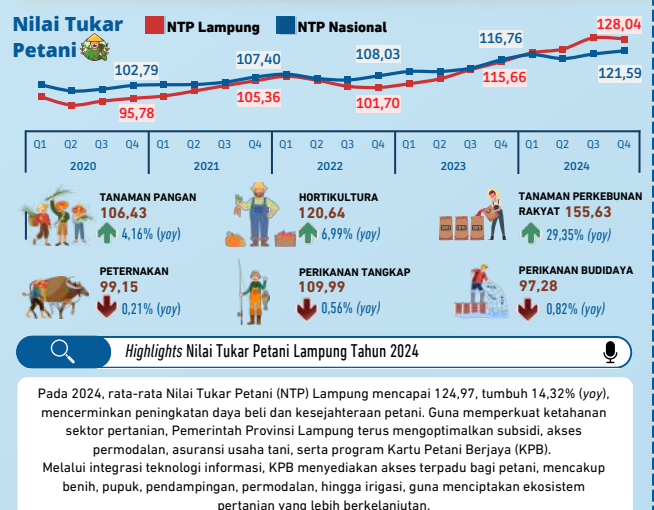
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

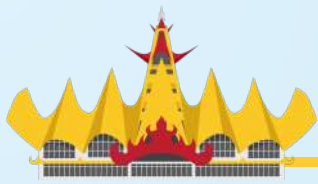


Kondisi Ketenagakerjaan



Nilai Tukar Petani (NTP)





Kinerja Fiskal Provinsi Lampung

DASHBOARD MAKRO-FISKAL PROVINSI LAMPUNG

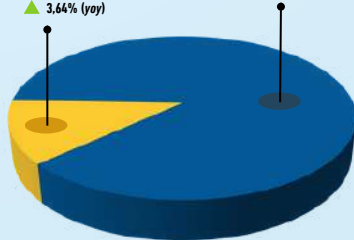
Realisasi Pendapatan Negara

Realisasi
Penerimaan Negara Bukan Pajak
1.526,35 Miliar

145,20% dari target
▲ 3,64% (yoy)

Realisasi
Penerimaan Perpajakan
10.839,76 Miliar
100,72% dari target
▲ 16,11% (yoy)

Total Realisasi
Pendapatan Negara **104,68%**
dari target
Rp12.366,11 Miliar



Realisasi Pendapatan Negara di Lampung

Sepanjang 2024, Pendapatan Negara mencatat pertumbuhan impresif sebesar 21,51% (yoy), dengan realisasi mencapai Rp12.366,11 miliar atau 104,68% dari target. Pencapaian ini terutama didorong oleh Penerimaan Perpajakan, yang menyumbang 87,66% dari total Pendapatan Negara.

Pajak Penghasilan

Rp3.948,16 Miliar

Cukai

Rp13,92 Miliar

Bea Keluar

Rp981,97 Miliar

Pajak Pertambahan Nilai

Rp5.009,21 Miliar

Pajak Lainnya

Rp161,98 Miliar

PNBP Lainnya

Rp785,01 Miliar

Pajak Bumi dan Bangunan

Rp153,18 Miliar

Bea Masuk

Rp571,35 Miliar

Pendapatan BLU

Rp741,35 Miliar

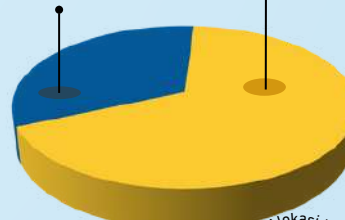
Realisasi Belanja Negara

Realisasi
Belanja Pemerintah Pusat
Rp10.939,23 Miliar

97,75% dari target
▲ 6,89% (yoy)

Realisasi
Transfer Ke Daerah
Rp22.480,62 Miliar
98,79% dari pagu
▲ 4,70% (yoy)

Total Realisasi
Belanja Negara **98,45%**
dari pagu
Rp33.419,85 Miliar



Realisasi Belanja Negara di Lampung

Di Tahun 2024, Belanja Negara di Lampung mencapai Rp33.419,85 miliar, tumbuh 5,41% (yoy). Realisasi Belanja Negara didominasi oleh Transfer ke Daerah (TKD) dengan kontribusi 67,27%, tumbuh 4,70% (yoy), sementara Belanja Pemerintah Pusat menyumbang 32,73%, tumbuh 6,89% (yoy).

Belanja Pegawai

Rp4.335,70 Miliar

Belanja Barang

Rp5.247,57 Miliar

Belanja Modal

Rp1.312,19 Miliar

Belanja Bansos

Rp43,77 Miliar

Dana Alokasi Umum

Rp13.829,07 Miliar

Dana Bagi Hasil

Rp630,10 Miliar

DAK Fisik

Rp1.376,06 Miliar

DAK NonFisik

Rp4.057,71 Miliar

Insentif Fiskal

Rp253,93 Miliar

Dana Desa

Rp2.331,93 Miliar

Hibah

Rp1,82 Miliar

Terdapat

hibah kepada

Pemerintah

Daerah

Kabupaten

Lampung

Tengah

Realisasi Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah

78,05%

5,46%
(yoy) ▲

Rp6.710,77 Miliar

Pendapatan Transfer (Pusat)

98,33%

5,70%
(yoy) ▲

Rp22.414,34 Miliar

Transfer Antar Daerah

75,28%

25,07%
(yoy) ▲

Rp1.534,66 Miliar

Lain-lain Pendapatan yang Sah

39,21%

129,39%
(yoy) ▲

Rp60,40 Miliar

Total Realisasi
Pendapatan Daerah **91,47%**
dari target
Rp30.720,16 Miliar



PAD Lampung mencapai 78,05% dari target, utamanya dari Pajak Daerah yang mencerminkan stabilitas dalam penerimaan pajak.



Pendapatan Transfer (Pusat) menjadi kontributor utama yaitu sebesar 72,96% dari total Pendapatan Daerah.



Total Realisasi Transfer Antar Daerah sebesar Rp1.534,66 M atau 75,28% dari target, tumbuh 25,07% (yoy).



Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah tercatat sebesar Rp60,40 M, didominasi Pendapatan Hibah yang mencapai Rp21,76 M.

Realisasi Belanja Daerah

Belanja Operasional

89,99%

5,85%
(yoy) ▲

Rp21.517,99 Miliar

Belanja Modal

80,30%

0,98%
(yoy) ▼

Rp3.711,52 Miliar

Belanja Tidak Terduga

40,59%

34,91%
(yoy) ▲

Rp44,98 Miliar

Belanja Transfer

92,78%

9,61%
(yoy) ▲

Rp5.040,34 Miliar

Total Realisasi
Belanja Daerah **88,96%**
dari pagu
Rp30.314,84 Miliar



Belanja Operasional telah terealisasi 89,99% dari pagu, dengan Belanja Pegawai yang masih mendominasi Belanja Operasi dengan andil sebesar 54,28%.



Belanja Modal telah terealisasi 80,30% dari pagu, mengalami penurunan sebesar 0,98% (yoy), utamanya akibat penurunan belanja modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan.



Belanja Tidak Terduga terealisasi 40,59% dari pagu, Belanja ini juga mencakup pengembalian atas kelebihan pembayaran penerimaan daerah dari tahun-tahun sebelumnya.



Belanja Transfer terealisasi 92,78% dari pagu, dengan porsi terbesar berupa Belanja Bantuan Keuangan ke Desa sebesar 61,38% dari total realisasi.

Snapshot Harmonisasi Belanja dan Analisis Tematik



Harmonisasi Belanja K/L dan DAK Fisik

PENDIDIKAN

DAK Fisik RO Harmonis

Rp552,18 M Rp107,49 M

SANITASI

DAK Fisik RO Harmonis

Rp0,00 M Rp1,79 M

KESEHATAN

DAK Fisik RO Harmonis

Rp250,49 M Rp2,08 M

AIR MINUM

DAK Fisik RO Harmonis

Rp14,75 M Rp12,40 M

JALAN

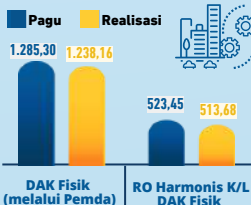
DAK Fisik RO Harmonis

Rp374,92 M Rp365,19 M

PERTANIAN

DAK Fisik RO Harmonis

Rp45,81 M Rp24,77 M



Highlights Harmonisasi Belanja K/L dan DAK Fisik

Program belanja K/L melalui RO Harmonis dan DAK Fisik di Lampung mencakup 6 bidang yang menjadi kebutuhan regional dan prioritas pembangunan. Realisasi anggaran dan output yang tinggi menunjukkan komitmen yang kuat oleh K/L dalam mendukung peningkatan aksesibilitas, konektivitas, dan kualitas hidup melalui DAK Fisik di regional Lampung.

Ketahanan Pangan di Provinsi Lampung

Overview Ketahanan Pangan Lampung

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Lampung meningkat pada 2019-2023, mencapai kategori "sangat tahan" di 2023, mencerminkan ketahanan pangan yang terjaga

- Penurunan luas lahan sawah yang berkelanjutan
- Inflasi akibat margin pedagang perantara tinggi
- Pengangkutan gabah ke Jawa dan lemahnya penggilingan menghambat distribusi beras

PSN terkait Ketahanan Pangan di Lampung

Bandungan Way Sekampung dibangun dengan anggaran Rp2,13 T untuk mendukung irigasi dan suplai air baku, namun optimalisasi pemanfaatannya masih diperlukan

Bandungan Margatiga, dengan biaya Rp886,15 M, berperan dalam irigasi, namun pemanfaatannya masih terkendala oleh proses pembebasan lahan.

SPAM Bandar Lampung dibangun dengan nilai investasi Rp1,30 triliun untuk meningkatkan akses air bersih, namun cakupan Sambungan Rumah perlu diperluas.

Kapasitas Fiskal Ketahanan Pangan

Penurunan alokasi belanja APBN dan rendahnya kapasitas fiskal daerah membatasi anggaran ketahanan pangan.

Alokasi Belanja K/L Rp675,52 Miliar ▲ 0,85% (yoy)

Alokasi DAK Rp213,82 Miliar ▼ 3,62% (yoy)

Realisasi APBD Rp152,07 Miliar ▼ 43,46% (yoy)

Dampak PSN terhadap Produktivitas

Analisis Propensity Score Matching (PSM)

Hasil analisis Propensity Score Matching (PSM) menunjukkan bahwa pembangunan Bandungan Way Sekampung berkontribusi dalam meningkatkan kualitas air bersih rumah tangga dengan peningkatan 6,77% hingga 19,42% setelah bandungan mulai beroperasi. Meskipun demikian, dampak yang diharapkan terhadap peningkatan produktivitas pertanian belum sepenuhnya optimal.



Halaman ini sengaja dikosongkan

SUPLEMEN 1

A Glimpse of Lampung



Provinsi Lampung terletak di ujung selatan Pulau Sumatera, dikenal sebagai gerbang Sumatera dengan posisi strategis yang menghubungkan Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni.

Secara administratif, Lampung terdiri dari 15 Kabupaten/Kota, dengan Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota sekaligus pusat ekonomi. Luas wilayah Lampung mencapai 33.575,41 km², sebagian besar terdiri dari dataran rendah, pegunungan, dan kawasan pesisir.

Secara ekonomi, Lampung merupakan salah satu penghasil utama komoditas pertanian, seperti kopi dan singkong, yang menjadi bagian penting dari ekspor Indonesia.

SUPLEMEN 2

Peluang Investasi Regional Lampung

Way Laga Bizpark



Kota Bandar Lampung menawarkan peluang investasi Kawasan Industri dan Pergudangan Terpadu Way Laga dengan estimasi kebutuhan investasi mencapai Rp4 triliun. Investasi ini berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus memperkuat sektor industri dan logistik.



Lokasi yang Strategis

- ✓ 5 menit (2 km) ke Gerbang Tol Trans Sumatera
- ✓ 10 menit (4 km) ke Pelabuhan Panjang (Ekspor – Impor)
- ✓ 15 menit (6 km) ke Pusat Kota Bandar Lampung
- ✓ 40 menit (25 km) ke Bandar Udara Radin Intan



Kondisi saat ini

Way Laga Bizpark adalah Kawasan Industri dan Pergudangan Terpadu seluas 50,7 Hektar di Bandar Lampung yang telah memperoleh IUKI (Izin Usaha Kawasan Industri). Lokasinya yang strategis menarik minat perusahaan internasional berskala besar seperti PT. Nippon Indosari Corpindo dan PT. Yakult Indonesia Persada.



Key Investment Highlights Way Laga Bizpark

Location	Way Laga Bizpark – Jl. Ir. Sutami Km 7, Way Laga, Sukabumi, Bandar Lampung.
Estimated Investment Value	2.781Billion USD (4 triliun rupiah)
Total Area/Land Status	Total area covers ± 50.7Ha; the land status is HGB (Hak Guna Bangunan)
Business Scheme	• Selling and renting ready to use Industrial and Warehousing Lots • Land Price: ±IDR 2,500,000,-/m² • Warehouse Rent Fee: ±IDR 240,000,-/m²/year
Potential Industries	Food and Beverages, Electronics, natural resources, warehouses, cold storage, etc.



BAB I



SASARAN PEMBANGUNAN DAN TANTANGAN DAERAH



“ Indonesia akan bercahaya karena lilin-lilin di Desa ”

-Mohammad Hatta-



BAB I SASARAN PEMBANGUNAN DAN TANTANGAN DAERAH

1.1 PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan. Dalam konteks desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengelola sumber daya dan merancang kebijakan pembangunan yang selaras dengan rencana pembangunan nasional. Sasaran pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan kemiskinan, dan penciptaan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan usaha. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan fiskal daerah menjadi kunci utama dalam menentukan keberhasilan pembangunan.

Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan keselarasan antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta dokumen perencanaan daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Keselarasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal daerah dapat berjalan secara efektif dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan nasional. Selain itu, dengan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan berbagai tantangan pembangunan dapat diatasi secara lebih komprehensif dan efisien. Provinsi Lampung sebagai salah satu daerah strategis di Sumatera menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai sasaran pembangunannya. Meskipun memiliki potensi ekonomi yang besar, seperti sektor pertanian, industri, dan pariwisata, tantangan seperti ketimpangan ekonomi antarwilayah, keterbatasan

infrastruktur, dan rendahnya daya saing tenaga kerja masih menjadi isu yang perlu diatasi. Selain itu, dinamika global dan nasional, seperti fluktuasi harga komoditas serta perubahan kebijakan fiskal nasional, turut mempengaruhi kondisi ekonomi daerah. Oleh karena itu, analisis terhadap tantangan pembangunan daerah menjadi langkah penting dalam merumuskan kebijakan fiskal yang tepat sasaran dan berbasis bukti.

Bab ini akan membahas secara rinci sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD serta sejauh mana keselarasan antara perencanaan pembangunan daerah dengan RPJMN. Selain itu, akan dilakukan identifikasi terhadap tantangan utama yang dihadapi Provinsi Lampung dalam aspek ekonomi, sosial, kependudukan, serta aspek lainnya. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi fiskal daerah serta rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan secara efektif dan berkelanjutan.

1.2 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan suatu daerah atau negara memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan perencanaan yang matang, pembangunan bertujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memastikan keberlanjutan lingkungan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan yang berfungsi sebagai pedoman strategis dalam mengarahkan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Dengan mengusung visi "*Rakyat*

Lampung Berjaya", RPJMD menjadi acuan utama dalam mewujudkan cita-cita Kepala dan Wakil Kepala Daerah untuk periode 2019-2024. Visi tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui misi, tujuan, serta sasaran yang terukur dan konkret.

Dalam menghadapi perubahan dan tantangan yang muncul, Pemerintah Provinsi Lampung melakukan pengintegrasian beberapa indikator menjadi satu indikator yang lebih komprehensif sebagai sasaran pembangunan. Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap dinamika perubahan yang terus berkembang, khususnya akibat dampak luas pandemi Covid-19 terhadap aspek sosial, ekonomi, dan pembangunan di Provinsi Lampung. Faktor eksternal seperti ketegangan geopolitik, kenaikan suku bunga, penurunan permintaan global, serta

inflasi perlu turut menjadi pertimbangan dalam proses adaptasi tersebut.

Langkah tersebut diambil untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan di Lampung tetap adaptif terhadap dinamika yang terjadi, dengan tetap mempertimbangkan keterbatasan anggaran yang tersedia, juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pencapaian sasaran pembangunan, meskipun dihadapkan pada tantangan dan ketidakpastian yang muncul.

Dengan demikian, RPJMD Provinsi Lampung yang telah disesuaikan, diharapkan mampu menjawab tantangan ekonomi dan sosial secara lebih adaptif serta memastikan pencapaian target pembangunan yang berkelanjutan bagi masyarakat Provinsi Lampung.

Tabel 1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung 2019-2024

TUJUAN	SASARAN
MISI 1 : Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman, dan damai	
1 Terwujudnya kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya dan demokratis	1 Meningkatnya kerukunan antar umat beragama 2 Meningkatnya kualitas demokrasi di daerah 3 Meningkatnya pelestarian dan pemanfaatan budaya
MISI 2 : Mewujudkan <i>Good Governance</i> untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik	
2 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	1 Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi
MISI 3 : Meningkatkan kualitas SDM, mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan penyandang disabilitas	
3 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 2 Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan menengah 3 Meningkatnya pengarusutamaan gender 4 Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan anak
MISI 4 : Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah	
4 Meningkatnya infrastruktur untuk konektivitas wilayah, pelayanan dasar dan energi	1 Meningkatnya kemantapan jalan provinsi 2 Penguatan sarana dan prasarana dasar wilayah 3 Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi
MISI 5 : Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan	
5 Meningkatkan perekonomian daerah	1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi 2 Meningkatnya kesejahteraan petani 3 Menjaga stabilitas harga 4 Menurunnya kemiskinan
ISI 6 : Mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama	
6 Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan	1 Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 2 Menurunnya tingkat emisi Gas Rumah Kaca 3 Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana

Sumber: Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, Bappeda Lampung (diolah)

Evaluasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah dilakukan secara sistematis melalui pengukuran target serta capaian indikator yang telah ditetapkan. Setiap tahun, target pembangunan disusun secara realistis agar dapat

dicapai dan dievaluasi secara berkala. Indikator kinerja makro menjadi instrumen utama dalam menilai keberhasilan pembangunan di Provinsi Lampung serta memberikan kontribusi signifikan

terhadap pencapaian target pembangunan nasional.

Selain sebagai alat ukur keberhasilan, indikator tersebut juga berperan sebagai pedoman bagi pemerintah Kabupaten/Kota dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan di tingkat

lokal. Dengan adanya keselarasan indikator antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, diharapkan pembangunan di berbagai tingkatan dapat terintegrasi secara optimal, sehingga memperkuat pencapaian visi pembangunan Provinsi Lampung secara keseluruhan.

Tabel 1.2. Sasaran Indikator Makro Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

Sasaran Makro Kesra	Tahun ke-1 (<i>baseline</i>)	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
Pertumbuhan ekonomi (%)	5,27	2,5 – 3,5	3 – 4	3,5 – 4,5	4,5 – 5,5
PDRB Perkapita	45,54	40 – 41	42-43	43 – 44	45 – 46
Inflasi (%)	3.0 – 3.5	3 ± 1	3 ± 1	3 ± 1	3 ± 1
IPM	69,57	69,69 – 70	70 – 70,3	70,3 – 70,6	70,6 – 70,9
Kemiskinan (%)	11,1	12,76 – 12,4	12,4 – 11,9	11,9 – 11,4	11,4 – 10,9
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3.85	4,5 – 4,0	4,4 – 4,3	4,3 – 4,0	4,0 – 3,8
Gini Ratio	0,32	0,310 – 0,334	0,308 – 0,324	0,302 – 0,319	0,293 – 0,314
Nilai Tukar Petani (NTP)	106,98	101 – 102	102 – 103	104-105	105 – 106
Tingkat Kemantapan Jalan (%)	79	74	76	77	78
Persentase Peningkatan PAD (%)	2,79	1,37	3,87	4,74	8,47
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	6,86	6,74	6,915	7,066	7,29

Sumber: Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, Bappeda Lampung (diolah)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran RPJMD dan menggunakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional sebagai acuannya, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk satu tahun. RKPD juga menggambarkan permasalahan pembangunan daerah serta indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode satu tahun ke depan secara terencana melalui sumber pendanaan baik APBD Kabupaten, APBD Provinsi, maupun APBN.

Selaras dengan RPJMD 2019-2024, rencana pembangunan Provinsi Lampung tahun 2024 yang bertema “Pemantapan Transformasi Ekonomi dan Kualitas SDM Menuju Rakyat Lampung Berjaya” ditransmisikan ke dalam enam jalur prioritas pembangunan, sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan;
- 2) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;
- 3) Pembangunan Infrastruktur;
- 4) Reformasi Birokrasi;

- 5) Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya; dan
- 6) Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana.

Dalam rangka meninjau perkembangan terkini di wilayah Provinsi Lampung, Pemerintah Daerah secara komprehensif memperhatikan tantangan dan prospek pembangunan, serta mempertimbangkan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selain itu, evaluasi terhadap capaian kinerja tahun sebelumnya turut menjadi perhitungan dalam merumuskan sasaran makro pembangunan yang lebih realistis dan terukur. Dengan demikian, sasaran makro ekonomi dalam RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024 dirumuskan berdasarkan proyeksi dan berorientasi pada pencapaian pembangunan yang berkelanjutan serta optimalisasi kesejahteraan masyarakat.

Tujuan implementasi kebijakan ekonomi makro yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan tertuang dalam RKPD Lampung 2024 mencakup:

- 1) Menciptakan kesempatan kerja yang tinggi guna mengurangi kemiskinan;

- 2) Meningkatkan kapasitas perekonomian daerah;
- 3) Meningkatkan pendapatan per kapita dan daya beli masyarakat;
- 4) Mewujudkan kondisi perekonomian daerah yang stabil;
- 5) Mendorong pemerataan distribusi pendapatan.

Berdasarkan kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta merujuk pada sasaran utama dalam Perubahan RPJMD Provinsi Lampung 2019–2024, prioritas pembangunan tahun 2024 diarahkan untuk menjaga konsistensi dan sinergi dalam pencapaian target pembangunan daerah dan nasional. Fokus pembangunan ini mendukung pencapaian sasaran dalam RKP 2024 serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Tabel 1.3. Sasaran Makro pada RKPD Provinsi Lampung 2024

Indikator Makro	Sasaran RKPD 2024
Pertumbuhan ekonomi (%)	5.0 – 5.3
Inflasi (%)	3.0 ± 1
PDRB per Kapita ADHB (juta)	45- 46
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4.0 – 3.8
Kemiskinan (%)	10.9 – 10.4
IPM	70.6 – 71.1
Gini Ratio	0.293 – 0.314
Nilai Tukar Petani (NTP)	105- 106
Tingkat Kemantapan Jalan (%)	78
Persentase Peningkatan PAD (%)	8.47
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	7.29

Sumber: RKPD Provinsi Lampung 2024

Sasaran makro ekonomi dan sasaran prioritas dalam RKPD memiliki keterkaitan erat dalam perencanaan pembangunan daerah. Sasaran makro ekonomi merupakan indikator utama yang mencerminkan kondisi perekonomian suatu daerah secara keseluruhan yang bersifat umum dan digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan. Sedangkan, sasaran prioritas adalah target yang dirancang untuk mendukung pencapaian sasaran makro ekonomi melalui program dan kegiatan strategis. Sasaran prioritas difokuskan pada sektor

yang menjadi perhatian utama pemerintah daerah dalam periode perencanaan RKPD.

Sasaran prioritas berperan sebagai instrumen untuk mencapai sasaran makro ekonomi. Oleh karena itu, perumusan sasaran prioritas dalam RKPD harus selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah agar menghasilkan dampak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang optimal.

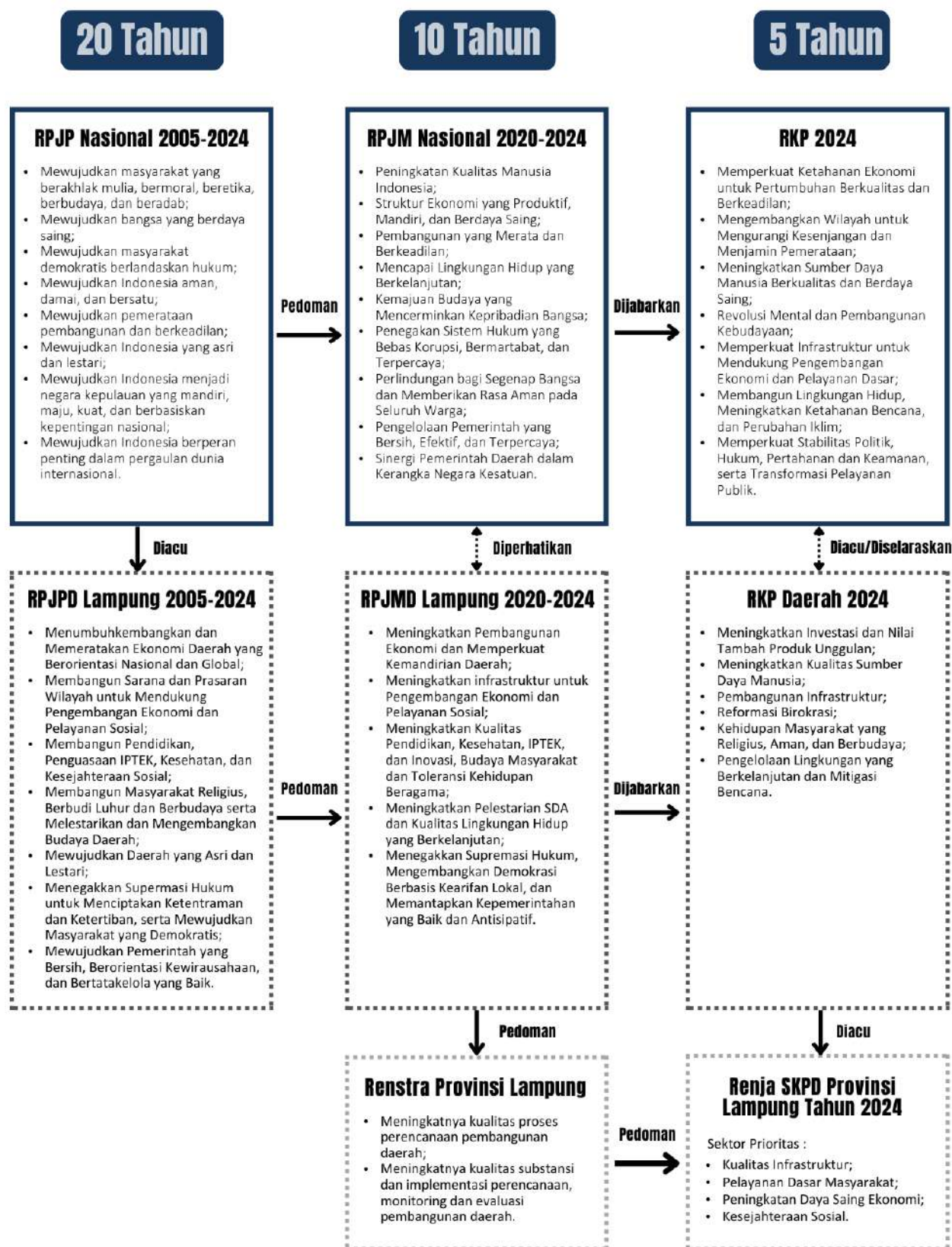
Tabel 1.4. Sasaran Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2024

PRIORITAS 1 : Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	▪ Meningkatnya pertumbuhan ekonomi ▪ Meningkatkan kesejahteraan petani ▪ Menurunnya angka kemiskinan ▪ Menjaga stabilitas harga
PRIORITAS 2 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	▪ Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan menengah ▪ Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan anak ▪ Penyerapan tenaga kerja ▪ Meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat ▪ Meningkatnya peran serta pemuda dan prestasi di bidang olahraga ▪ Meningkatnya pengarusutamaan gender
PRIORITAS 3 : Pembangunan Infrastruktur	▪ Meningkatnya Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi ▪ Penguatan Sarana dan Prasarana dasar wilayah ▪ Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi
PRIORITAS 4 : Reformasi Birokrasi	▪ Meningkatnya kualitas Implementasi reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pemerataan pelayanan publik
PRIORITAS 5 : Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	▪ Meningkatnya kerukunan antar umat beragama ▪ Meningkatnya kualitas demokrasi di daerah ▪ Meningkatnya pelestarian dan pemanfaatan budaya
PRIORITAS 6 : Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	▪ Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) ▪ Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca ▪ Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana

Sumber : RKPD Provinsi Lampung 2024, Bappeda Lampung. (diolah)

1.3 KESELARASAN RPJMN DENGAN RPJMD

Gambar 1.1. Mapping Keselarasan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Provinsi Lampung



Sumber: Bappenas, Bappeda Lampung (diolah)

Keselarasan perencanaan pembangunan antara nasional dan Provinsi Lampung dimulai dari visi jangka panjang yang tertuang dalam RPJP Nasional 2005-2024 dan RPJPD Lampung 2005-2024. Kedua dokumen ini memiliki visi yang saling melengkapi, yaitu mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berdaya saing, dan berkeadilan. RPJP Nasional menekankan pembentukan bangsa yang mandiri dan berperan aktif di tingkat global, sementara RPJPD Lampung fokus pada pengembangan ekonomi daerah yang merata dan berorientasi global. Keselarasan ini menunjukkan adanya pemahaman bersama mengenai pentingnya pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Pada tingkat perencanaan jangka menengah, RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Lampung 2020-2024 menunjukkan prioritas yang harmonis. Kedua dokumen ini sama-sama menekankan peningkatan kualitas manusia, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan ekonomi yang produktif. RPJMN menyoroti pentingnya struktur ekonomi yang mandiri dan berdaya saing, serta lingkungan hidup yang berkelanjutan. RPJMD Lampung, di sisi lain, menggarisbawahi peningkatan kemandirian daerah melalui pengembangan ekonomi dan infrastruktur, serta peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan inovasi. Keselarasan ini mencerminkan adanya arah kebijakan yang konsisten antara pemerintah pusat dan daerah, untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, pada tingkat implementasi tahunan, RKP 2024, RKP Daerah 2024, dan Renja SKPD Provinsi Lampung Tahun 2024 menunjukkan adanya koherensi dalam pelaksanaan program pembangunan. Ketiga dokumen ini memiliki fokus yang sejalan, yaitu penguatan ketahanan ekonomi, pengembangan wilayah, dan peningkatan kualitas SDM. RKP Nasional menekankan revolusi mental dan transformasi pelayanan publik, sementara RKP Daerah Lampung fokus pada peningkatan investasi dan reformasi birokrasi. Renja SKPD Provinsi Lampung mengarahkan pada sektor prioritas yang

mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah. Keselarasan ini menunjukkan adanya upaya yang terkoordinasi dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam program-program pembangunan yang efektif di tingkat daerah.

Pedoman dan Renstra Provinsi Lampung berperan sebagai kerangka kerja yang mendukung keselarasan perencanaan pembangunan di tingkat daerah. Pedoman memberikan arahan strategis, sementara Renstra Provinsi Lampung menekankan peningkatan kualitas proses perencanaan, substansi, implementasi, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah. Kedua elemen ini memastikan bahwa perencanaan pembangunan di Provinsi Lampung tidak hanya selaras dengan kebijakan nasional, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan dan potensi daerah.

Secara keseluruhan, analisis terhadap Gambar 1.1 menunjukkan adanya harmonisasi antara perencanaan pembangunan nasional dan Provinsi Lampung. Keselarasan ini tercermin dalam visi, misi, prioritas kebijakan, dan implementasi program yang konsisten di semua tingkatan perencanaan. Harmonisasi ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan di Provinsi Lampung memberikan kontribusi yang optimal terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Meskipun secara umum terdapat keselarasan, penting untuk memitigasi risiko ketidakeselarasan dalam interpretasi dan implementasi di lapangan. Misalnya, penekanan pada "kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa" dalam RPJMN bisa diartikan berbeda di tingkat daerah, berisiko memunculkan kebijakan yang kurang inklusif atau tidak sesuai dengan keragaman budaya lokal di Lampung. Selain itu, kecepatan perubahan teknologi dan dinamika ekonomi global seringkali tidak sepenuhnya tercermin dalam dokumen perencanaan. Sehingga, penjabaran indikator kinerja yang lebih spesifik dan terukur di setiap tahapan perencanaan, terutama pada tingkat Renja SKPD Provinsi Lampung menjadi krusial.

1.4 CAPAIAN ATAS KESELARASAN RPJMN DENGAN RPJMD

Tabel 1.5. Capaian Keselarasan atas Sasaran Makro Utama pada RKPD Provinsi Lampung 2024

Indikator Makro	Benchmark Nasional 2024	Sasaran RKPD 2024	Capaian Lampung 2024
Pertumbuhan ekonomi (%)	5,03	5,0 – 5,3	4,57
Inflasi (%)	2,5 ± 1	3,0 ± 1	1,57
PDB/ PDRB per Kapita ADHB (juta)	78,6	45 – 46	51,37
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,91	4,0 – 3,8	4,19
Kemiskinan (%)	6,5 – 7,5	10,9 – 10,4	10,62
IPM	75,02	70,6 – 71,1	73,13
Gini Ratio	0,373	0,293 – 0,314	0,301
Nilai Tukar Petani (NTP)	122,78	105 – 106	124,97
Tingkat Kemantapan Jalan (%)	-	78	78,08
Persentase Peningkatan PAD (%)	-	8,47	6,58
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	58,3	7,29	15,86

Sumber: RKPD Provinsi Lampung 2024

1.4.1 Analisis Keselarasan Capaian Indikator Makro Utama Nasional dan Lampung

Mengukur capaian atas keselarasan antara perencanaan nasional dan regional menjadi krusial untuk memastikan efektivitas kebijakan pembangunan, terutama dalam menghadapi tantangan struktural di daerah guna menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif, stabilitas sosial, dan keberlanjutan fiskal. Ketidakesesuaian capaian daerah dengan sasaran regional dan benchmark nasional dapat mengindikasikan adanya *lag* sinergi kebijakan di lapangan yang dapat memperlebar kesenjangan antarwilayah.

Secara keseluruhan, capaian indikator makro utama Lampung pada 2024 menunjukkan hasil yang beragam dalam keselarasan dengan target RKPD dan benchmark nasional. Beberapa indikator, seperti inflasi, PDRB per kapita, IPM, rasio Gini, NTP, dan penurunan emisi gas rumah kaca melampaui target, mencerminkan stabilitas harga, peningkatan kesejahteraan, dan keberhasilan kebijakan lingkungan. Namun, pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan PAD masih di bawah ekspektasi, menunjukkan perlunya strategi lebih agresif dalam akselerasi pertumbuhan, pengurangan pengangguran, serta optimalisasi pendapatan daerah untuk pembangunan berkelanjutan.

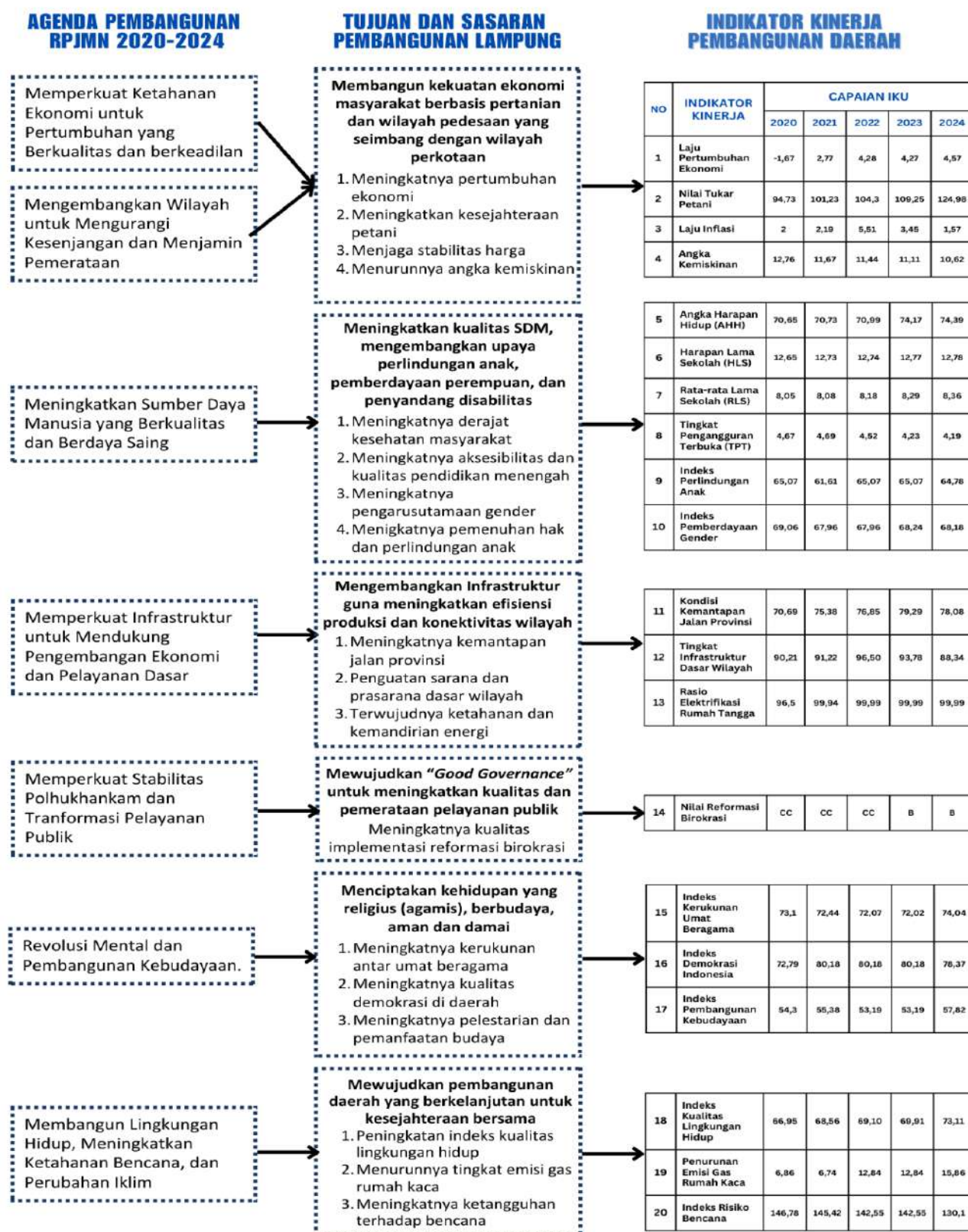
Pertumbuhan ekonomi Lampung sebesar 4,57 persen masih di bawah target RKPD 5,0–5,3 persen dan benchmark nasional 5,03 persen, menandakan pemulihan yang belum optimal. Faktor utama meliputi menurunnya kontribusi sektor pertanian, keterbatasan investasi, serta ketidakpastian global yang berdampak pada permintaan dan harga komoditas utama seperti Crude Palm Oil (CPO). Sementara itu, inflasi sebesar 1,57 persen berada dalam batas aman dan lebih rendah dari target RKPD dan nasional, mencerminkan stabilitas harga di tengah tantangan pasokan.

Dari aspek kesejahteraan ekonomi, PDRB per kapita mencapai Rp51,37 juta, melampaui target Rp45–46 juta, mengindikasikan perbaikan daya beli masyarakat. Tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,19 persen, lebih baik dari nasional (4,91 persen) tetapi masih di atas target 3,8 persen. Tingkat kemiskinan 10,62 persen sudah berada dalam sasaran RKPD, namun upaya pengentasan tetap diperlukan untuk mencapai tingkat yang lebih rendah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung mencapai 73,13, lebih tinggi dari target RKPD namun masih di bawah benchmark nasional 75,02. Rasio Gini sebesar 0,301 menunjukkan ketimpangan pendapatan yang relatif terkendali dibandingkan nasional (0,373), meskipun pemerataan pertumbuhan ekonomi masih menjadi tantangan, terutama bagi kelompok rentan.

Sektor pertanian menunjukkan kinerja positif dengan NTP mencapai 124,97, jauh di atas target RKPD dan nasional, mencerminkan peningkatan daya beli petani. Infrastruktur jalan juga mengalami peningkatan dengan tingkat kemantapan mencapai 78,08 persen. Namun, pertumbuhan PAD hanya 6,58 persen, lebih rendah dari target 8,47 persen, mengindikasikan perlunya penguatan strategi penerimaan daerah. Sementara itu, penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 15,86 persen, jauh melebihi target 7,29 persen, mencerminkan keberhasilan kebijakan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim.

Gambar 1.2. Capaian atas Keselarasan RPJMN dan RPJMD 2020-2024



Sumber : Bappenas, Bappeda Provinsi Lampung (data diolah)

1.4.2 Analisis Keselarasan Capaian RPJMN dan RPJMD Lampung

Secara lebih komprehensif, keselarasan capaian RPJMN dan RPJMD Lampung Tahun 2020–2024 dapat dilihat melalui konstruksi enam tujuan dan sasaran pembangunan daerah, yang merepresentasikan visi dan misi kepala daerah tanpa mengurangi esensi tujuan serta prioritas pembangunan nasional. Tujuan dan sasaran tersebut selanjutnya diukur melalui dua puluh indikator kinerja pembangunan, yang berfungsi sebagai parameter dalam menilai dinamika dan capaian pembangunan di Provinsi Lampung.

Pertama, keselarasan pembangunan ekonomi dievaluasi berdasarkan empat indikator utama, yang ditandai dengan peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi hingga 4,57 persen, peningkatan Nilai Tukar Petani mencapai 124,98 persen, penurunan Angka Kemiskinan menjadi 10,62 persen, serta Laju Inflasi yang tetap terkendali pada level 1,57 persen.

Kedua, keselarasan pembangunan tercermin dalam kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) daerah, yang meningkat dalam lima tahun terakhir meskipun masih di bawah rata-rata nasional. Indikator utama mencakup peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) sebesar 3,74 poin, Harapan Lama Sekolah (HLS) mencapai 12,78 tahun, dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 8,36 tahun pada 2024. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun menjadi 4,19 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional. Namun, tantangan masih ada, terutama pada Indeks Perlindungan Anak (IPA) yang turun ke angka 64,78 persen dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di angka 68,16 persen.

Ketiga, keselarasan komitmen dalam peningkatan infrastruktur ditunjukkan melalui Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi mencapai 78,08 persen dan Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga sebesar 99,99 persen pada 2024. Sementara itu, Tingkat Infrastruktur Dasar Wilayah dengan sasaran akses

terhadap perumahan dan permukiman layak mengalami penurunan hingga 88,34 persen.

Keempat, keselarasan atas Reformasi Birokrasi, ditandai dengan capaian nilai B untuk Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah Lampung untuk mengubah sistem penyelenggaraan pemerintahan memiliki nilai di antara 60–70 dan memiliki predikat Cukup Baik yang perlu terus ditingkatkan.

Kelima, keselarasan atas kehidupan masyarakat yang religius, aman, dan berbudaya dielaborasi oleh Indeks Kerukunan Umat Beragama yang meningkat hingga 74,04 persen, Indeks Demokrasi Indonesia mencapai 78,37 persen, dan Indeks Pembangunan Kebudayaan naik menjadi 57,82 persen. Peningkatan ini menunjukkan progres pembangunan karakter masyarakat dan kebudayaan di Lampung.

Terakhir, keselarasan pengelolaan lingkungan berkelanjutan dan mitigasi bencana ditunjukkan oleh Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang mencapai kategori Baik dengan angka 73,11 persen, sedangkan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca tercatat 15,86 persen. Namun demikian, Indeks Mitigasi Bencana menurun menjadi 130,1 persen dimana masih mencerminkan perlunya peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana. Secara keseluruhan, pembangunan di Lampung menunjukkan kemajuan di berbagai sektor, meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi.

1.5 TANTANGAN SASARAN PEMBANGUNAN

1.5.1 Tantangan Ekonomi Daerah

Untuk mencapai target pembangunan Lampung pada tahun 2024, terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi, baik dari sisi ekonomi, sosial kependudukan, maupun aspek strategis lainnya. Tantangan-tantangan ini mencerminkan hambatan struktural dan operasional yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

1.5.1.1 Tantangan dalam pengelolaan SDA, beserta penciptaan nilai tambah dari pengolahan SDA.

Lampung memiliki keunggulan komparatif dalam sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, namun tantangan dalam pengelolaan SDA masih menjadi isu utama, antara lain:

- 1) Ketergantungan pada ekspor komoditas primer, sehingga Lampung rentan terhadap fluktuasi harga global. Lampung sangat bergantung pada ekspor komoditas primer seperti kopi, nanas, rempah-rempah. Kelapa sawit dan turunannya juga merupakan andalan Lampung, dimana produk tersebut sangat dipengaruhi oleh volatilitas harga Crude Palm Oil (CPO) dunia akibat tensi geopolitik, peningkatan permintaan dari India dan Tiongkok, penurunan produksi akibat kemarau yang panjang, serta meningkatnya sentimen energi terbarukan.
- 2) Dampak perubahan iklim terhadap produktivitas sektor pertanian dan perkebunan. Perubahan iklim telah berdampak signifikan pada produksi pertanian di Lampung. Penelitian menunjukkan bahwa perubahan pola curah hujan dan suhu telah mengurangi produktivitas tanaman pangan dan perkebunan di Lampung. Penelitian oleh Walhi Lampung menemukan bahwa terdapat empat pulau di Lampung yang telah terdampak Pemanasan global dan kenaikan air laut (KBRN Lampung, 2024). Pada Triwulan I 2024, kinerja sektor pertanian Lampung sempat turun sekitar -10,97 persen (yoy) akibat fenomena El Nino.
- 3) Ketidakpastian global dan pelambatan ekonomi memberikan tantangan dalam peningkatan hilirisasi industri Lampung. Meskipun Lampung memiliki potensi besar dalam industri berbasis sumber daya alam, hilirisasi industri masih menghadapi tantangan. Berdasarkan laporan Direktori Perusahaan Industri Besar dan Sedang Provinsi Lampung 2024, jumlah perusahaan industri besar yang tercatat aktif mengalami penurunan cukup signifikan, dari 420

perusahaan pada tahun 2023 menjadi 392 pada tahun 2024 (BPS, 2024).

1.5.1.2 Tantangan dalam penciptaan iklim dan potensi investasi yang kondusif

Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendukung perkembangan dunia usaha. Salah satunya adalah melalui sinergi lintas sektoral berupa FOILA (Forum Investasi Lampung) yang dibentuk untuk memfasilitasi promosi dan akses investor dalam negeri dan luar negeri ke potensi Lampung.

Namun, masih terdapat tantangan, antara lain:

- 1) Ketimpangan infrastruktur antarwilayah, khususnya ketimpangan konsentrasi pembangunan pada daerah-daerah terluar di Lampung. Indeks Williamson menunjukkan ketimpangan rendah hingga sedang, dengan nilai berkisar antara 0,26 hingga 0,32 pada tahun 2016-2021 (Asy'ariati, 2022).
- 2) Terbatasnya SDM berkualitas juga menyebabkan tantangan dalam menarik industri berbasis teknologi tinggi. Misalnya, keterbatasan SDM dalam proyek energi baru terbarukan padahal potensi energi terbarukan di Lampung mencapai sekitar 7,579 GW (Laporan EBTKE KESDM, 2024).

1.5.1.3 Tantangan birokrasi dan pelayanan perizinan

Sebagai upaya optimalisasi birokrasi dalam pelayanan perizinan dan kemudahan berusaha di Provinsi Lampung, pemerintah telah menyusun Standar Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non-Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi Lampung. Standar ini mencakup 11 sektor dengan 903 jenis layanan perizinan dan non-perizinan, yang bertujuan untuk menciptakan proses perizinan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Selain penyusunan standar pelayanan, pemerintah daerah juga telah mengimplementasikan sistem perizinan berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses bagi masyarakat dan

pelaku usaha. Platform yang digunakan meliputi *Online Single Submission* (OSS), Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terintegrasi untuk Publik (Si Cantik Cloud), serta mekanisme manual bagi layanan yang belum sepenuhnya terdigitalisasi. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi hambatan birokrasi dan mempercepat proses perizinan.

Namun, dalam implementasinya, masih terdapat keterbatasan kapasitas SDM serta sumber daya keuangan pemerintah daerah akibat terbatasnya kapasitas fiskal, yang tetap menjadi faktor krusial dalam mendukung penerapan sistem. Selain itu, promosi, kualitas layanan, transparansi, dan akuntabilitas birokrasi daerah perlu terus ditingkatkan guna membangun kepercayaan masyarakat dan investor.

1.5.1.4 Tantangan dukungan permodalan, infrastruktur ekonomi, dan akses teknologi

Dukungan permodalan, infrastruktur, dan teknologi berperan krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung. Namun, beberapa tantangan masih menghambat optimalisasi potensi daerah, antara lain:

- 1) Meskipun akses permodalan bersubsidi semakin banyak diberikan dan diakses oleh pelaku usaha, namun masih terdapat kesulitan UMKM tahap rintisan untuk berkembang serta masih terdapat keterbatasan peluang bidang usaha. Hal ini dikonfirmasi oleh penyaluran KUR di Lampung s.d. Desember 2024 yang tumbuh 20,89 persen (yoy), namun dengan kinerja pembiayaan beberapa sektor lapangan usaha selain sektor pertanian dan sektor perdagangan besar yang melambat (SIKP 2024, diolah).
- 2) Keterbatasan infrastruktur transportasi masih menghambat konektivitas serta efisiensi rantai pasok. Capaian indikator konektivitas di regional Lampung belum menunjukkan peningkatan signifikan, indeks kemantapan jalan stagnan pada angka 45 persen jalan Kabupaten dan 85 persen jalan kota. Lampung juga belum memiliki Dermaga Khusus Kenavigasian serta jumlah penerbangan adalah

kedua terendah di regional. Indeks infrastruktur dan keahlian TIK juga menurun dalam 2 tahun terakhir (BPS 2024, diolah).

- 3) Kesenjangan akses internet, terutama di daerah pedesaan dan terpencil, masih perlu diperhatikan. Tingkat penetrasi internet di Lampung adalah 75,86 persen, dimana dapat mengindikasikan bahwa masih ada keterbatasan daerah terluar untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital (APJII, 2024).

1.5.1.5 Tantangan reformasi struktural

Reformasi struktural merupakan serangkaian kebijakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas ekonomi. Reformasi ini dilakukan melalui perubahan fundamental pada sistem ekonomi, regulasi, dan infrastruktur.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah melakukan percepatan reformasi struktural melalui berbagai legislasi, antara lain: Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Undang-Undang Cipta Kerja, Pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI), Penerapan sistem *Online Single Submission* (OSS) yang berbasis risiko, dan akselerasi hilirisasi sumber daya alam.

Namun demikian, masih terdapat beberapa hambatan dalam mendukung reformasi struktural di Lampung, antara lain:

- 1) Masih terdapat disparitas kapasitas dan kesiapan pemerintah daerah dalam implementasi UU HKPD, yang berisiko menimbulkan *potential loss* pendapatan daerah dalam transisi administrasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pasca UU HKPD.
- 2) Keterbatasan daya tarik investasi akibat faktor struktural, seperti pangsa pasar yang relatif kecil, pertumbuhan ekonomi yang masih tertinggal dari Pulau Jawa, serta infrastruktur yang belum sepenuhnya mendukung investasi berskala besar.

- 3) UU Cipta Kerja yang masih belum cukup optimal di Lampung, meskipun tingkat upah kompetitif (Upah Minimum Provinsi Lampung merupakan urutan kedua terendah di Sumatera pada 2024), daya saing daerah masih perlu ditingkatkan melalui perbaikan kepastian, infrastruktur, dan insentif investasi yang lebih menarik investor.

1.5.2 Tantangan Sosial Kependudukan

Selain tantangan ekonomi, aspek sosial kependudukan juga menjadi faktor penting dalam pembangunan Lampung. Beberapa tantangan utama meliputi:

1.5.2.1 Struktur, Jumlah, dan Demografi Penduduk

Jumlah penduduk Provinsi Lampung pada Juni 2024 adalah 9,05 juta jiwa. Lebih dari setengah penduduk Lampung (68,56 persen) berada dalam kelompok usia produktif (15-64 tahun). Sedangkan, sebesar 31,44 persen penduduk terdiri dari penduduk usia muda (0-14 tahun) dan usia lanjut (65 tahun ke atas) (BPS, 2024). Struktur demografi ini mengindikasikan bahwa Lampung masih mengalami bonus demografi, yaitu kondisi di mana proporsi penduduk usia produktif lebih tinggi dibandingkan kelompok non-produktif. Hal ini dapat menjadi peluang bagi pertumbuhan ekonomi daerah, terutama dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja dan pengembangan sektor industri serta jasa.

1.5.2.2 Kondisi kualitas SDM (prevalensi stunting dan kualitas pendidikan)

Kedalaman kualitas SDM merupakan faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Hal ini dapat dilihat dari dua hal yaitu:

- 1) Prevalensi Stunting. Angka stunting terus menurun mendekati target nasional, namun beberapa kabupaten masih perlu menjadi fokus pengawalan. Provinsi Lampung tahun 2024 berhasil menurunkan angka prevalensi stunting menjadi 14,09 persen, namun pada semester pertama tahun 2024, terdapat lima kabupaten/kota di Lampung yang mengalami

peningkatan angka prevalensi stunting, yaitu Kabupaten Way Kanan, Lampung Barat, Lampung Tengah, Lampung Selatan, dan Kota Bandar Lampung (Bappeda Lampung, 2024).

- 2) Tingkat pendidikan mencerminkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja di suatu daerah. Pada Agustus 2024, sebanyak 35,53 persen penduduk bekerja di Lampung hanya berpendidikan SD ke bawah, sedangkan pekerja dengan pendidikan tinggi (Diploma atau Sarjana) hanya mencapai 9,33 persen. Distribusi ini masih serupa dengan Agustus 2023 (BPS Lampung, 2024), mengindikasikan bahwa mayoritas tenaga kerja memiliki keterampilan terbatas, yang dapat menghambat daya saing dan produktivitas, terutama di sektor industri bernilai tambah tinggi.

Keterbatasan tenaga kerja terampil menjadi tantangan bagi transformasi ekonomi Lampung. Sektor industri dan jasa modern yang membutuhkan tenaga kerja berkualifikasi tinggi belum sepenuhnya berkembang karena minimnya SDM yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi daerah masih bertumpu pada sektor-sektor dengan produktivitas rendah, seperti pertanian dan sektor informal.

1.5.2.3 Karakteristik Masyarakat

Suku dan etnis di Provinsi Lampung mencakup, diantaranya, suku Lampung Pepadun dan Saibatin (sebagai dua golongan suku asli Lampung), serta etnis Jawa yang merupakan salah satu etnis terbanyak di Provinsi Lampung. Masyarakat Lampung sendiri memiliki ciri-ciri budaya dan kearifan lokal yang cukup kuat. Tradisi lisan mereka, termasuk mitos, mencerminkan sifat-sifat yang gigih, menghargai diri sendiri, dan berpikiran terbuka (Margareta, 2017). *Piil Pesenggiri*, nilai budaya inti, membentuk karakter masyarakat Lampung, menumbuhkan motivasi tinggi, keterbukaan, gotong royong, menghormati orang lain, dan toleransi (Pranoto & Wibowo, 2018). Misalnya, dalam pengelolaan hutan, karakteristik

masyarakat seperti usia produktif dan tingkat pendidikan secara positif memengaruhi persepsi pengelolaan Hutan Kemasyarakatan sebagai sumber daya (Viani et al., 2020).

Namun, masyarakat Lampung menghadapi tantangan, termasuk tingkat kejahatan sosial yang masih tinggi, yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya luhur mereka (Pranoto & Wibowo, 2018). Hal ini berimplikasi pada tantangan dalam pembangunan sosial dan ekonomi di Lampung, terutama dalam membangun citra daerah yang kondusif bagi investasi dan pariwisata. Stigma tingkat kejahatan sosial yang masih tinggi dapat menghambat masuknya investasi dan mengurangi daya tarik daerah bagi pelaku usaha, meskipun secara budaya masyarakat Lampung menjunjung tinggi nilai-nilai kehormatan, gotong royong, dan toleransi.

1.5.2.4 Struktur Mata Pencarian

Struktur tenaga kerja di Lampung masih didominasi oleh sektor tradisional, terutama Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang menyerap 40,57 persen tenaga kerja, diikuti oleh sektor Perdagangan Reparasi Kendaraan (19,63 persen) serta Pertambangan dan Industri Pengolahan (9,55 persen) (BPS Lampung, 2024). Pola ini belum mengalami perubahan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, mengindikasikan bahwa transformasi ekonomi menuju sektor industri dan jasa bernilai tambah tinggi masih berjalan lambat.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang meningkat menjadi 70,41 persen pada Agustus 2024, naik 0,38 persen poin dari tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa lebih banyak penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi (BPS Lampung, 2024). Namun, dengan pola distribusi lapangan pekerjaan yang tidak mengalami perubahan signifikan dari tahun sebelumnya, peningkatan partisipasi tenaga kerja ini belum sepenuhnya mencerminkan pergeseran struktural yang kuat ke arah sektor dengan produktivitas lebih tinggi.

Kuatnya ketergantungan pada sektor primer dapat membatasi peningkatan daya saing tenaga kerja dan

pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan ketenagakerjaan dan pendidikan vokasi untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja, mendorong transisi ke sektor industri dan jasa yang lebih produktif. Selain itu, diversifikasi ekonomi dan penguatan daya saing sektor manufaktur dan jasa menjadi langkah strategis agar struktur ketenagakerjaan di Lampung lebih berorientasi pada sektor bernilai tambah tinggi.

1.5.3 Tantangan Lainnya

Lampung memiliki potensi pariwisata yang besar, mencakup keindahan alam, kekayaan budaya, dan nilai historis yang dapat menjadi daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Destinasi wisata alamnya beragam, mulai dari pantai berpanorama indah seperti Pantai Pasir Putih dan Pantai Tanjung Setia, hingga ekowisata di Taman Nasional Way Kambas yang terkenal dengan konservasi gajah. Selain itu, kawasan perbukitan di Bukit Barisan Selatan, keindahan Air Terjun Curup Tujuh, serta pesona bahari di Pulau Sebuku, Pulau Teluk Hantu, Pulau Wayang, dan Teluk Kiluan semakin memperkaya daya tarik wisata Lampung. Dengan pengelolaan yang optimal, potensi ini dapat dikembangkan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan mendorong perekonomian daerah secara berkelanjutan.

Namun demikian, tantangan utama pariwisata Lampung meliputi minimnya dukungan promosi dan pemasaran yang efektif, kurangnya pusat penjualan cinderamata, serta keterbatasan aksesibilitas akibat infrastruktur jalan yang belum optimal dan transportasi umum yang terbatas. Selain itu, ketersediaan fasilitas pendukung seperti akomodasi, sanitasi, dan layanan informasi wisata masih perlu ditingkatkan. Faktor eksternal seperti fluktuasi jumlah wisatawan akibat perubahan tren perjalanan, masalah logistik dalam distribusi produk wisata, serta ketidakpastian cuaca juga menjadi kendala yang memengaruhi daya tarik dan keberlanjutan sektor ini.

SUPLEMEN 3

Analisis Pengembangan Sektor Potensial

Review Pengembangan Sektor Pariwisata Lampung



Sumber: Radar Lampung, 2024

Sumber: Sahabatbahari.com

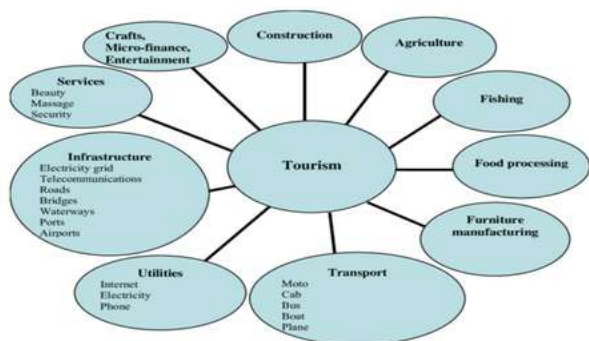
Lampung menawarkan beragam destinasi wisata yang memadukan keindahan alam, sejarah, dan budaya. Sebagai pintu gerbang Sumatera dengan 1.105 km garis pantai, provinsi ini memiliki pulau-pulau dan pantai-pantai eksotis seperti Pulau Wayang, Pantai Teluk Hantu, Pantai Mutun, Pantai Sari Ringgung, dan Pantai Tanjung Setia yang terkenal dengan pasir putih dan aktivitas snorkeling. Untuk wisata alam dan edukasi, Taman Nasional Way Kambas (Lampung Timur) menjadi habitat gajah sumatera, sementara Cagar Alam Laut Pulau Anak Krakatau (Lampung Selatan) menawarkan fenomena vulkanik unik.

LITERATURE REVIEW - DAMPAK PARIWISATA LAMPUNG

Penelitian tentang pengembangan pariwisata di Lampung, Indonesia, menunjukkan dampak positif yang signifikan terhadap ekonomi regional. Sektor pariwisata, termasuk hotel, restoran, transportasi, dan objek wisata budaya, berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Lampung (Anggarini, 2021). Pengembangan pariwisata halal telah diidentifikasi sebagai strategi potensial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan tetap berpegang pada prinsip ekonomi Islam (Sari et al., 2024). Studi pada destinasi pantai tertentu, seperti Pantai Embe dan Pantai Mutun, mengungkapkan bahwa pengembangan pariwisata telah menyebabkan peningkatan kesempatan kerja, kegiatan kewirausahaan, dan pendapatan bagi masyarakat lokal (Anggraeni, 2018; Wibowo et al., 2019).

Namun, beberapa dampak negatif telah diamati, termasuk perubahan dinamika sosial dan hilangnya kepercayaan antara masyarakat lokal dan otoritas (Wibowo et al., 2019). Secara keseluruhan, pengembangan pariwisata di Lampung telah menunjukkan potensi pertumbuhan ekonomi dan pengembangan masyarakat, tetapi perencanaan yang cermat diperlukan.

MULTIPLIER EFFECT CHANNEL SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PEREKONOMIAN



Sumber: Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, 2024

TANTANGAN PENGEMBANGAN

- Akses wisata masih terkendala jalan rusak, transportasi minim, dan kurangnya fasilitas.
- Promosi wisata kurang efektif, terutama di media sosial, sehingga banyak destinasi belum dikenal.
- Kekurangan tenaga kerja terampil, pelaku usaha butuh peningkatan kapasitas.
- Pembangunan pariwisata berisiko merusak lingkungan akibat limbah dan tekanan wisatawan.
- Lampung kalah saing dengan provinsi lain yang memiliki promosi dan sumber daya lebih baik.
- Isu keamanan dan sosial dapat memengaruhi minat wisatawan meski Lampung relatif aman.
- Alokasi APBN/APBD untuk pariwisata masih minim.

REKOMENDASI

- **Pengembangan promosi terpadu dan masif.** Dapat ditingkatkan anggaran promosi pariwisata melalui kampanye digital dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lokal untuk meningkatkan kesadaran wisatawan.
- **Strategi pariwisata berkelanjutan.** Yaitu, dengan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan lingkungan di destinasi wisata dan jalin kerjasama dengan organisasi konservasi nasional dan internasional.
- **Pengembangan wisata berbasis komunitas.** Pemerintah mendorong pengembangan destinasi wisata yang melibatkan masyarakat lokal, memfasilitasi kerjasama antara pemerintah, komunitas, dan investor. Optimalisasi Pokdarwis regional Lampung.

BAB II

ANALISIS EKONOMI REGIONAL



“ Melalui #UangKita untuk berbagai stimulus ekonomi, setiap keluarga mendapat kesempatan yang lebih adil untuk kesejahteraan ”
-@ditjenperbendaharaan-



BAB II ANALISIS EKONOMI REGIONAL

2.1 ANALISIS INDIKATOR MAKRO EKONOMI

Indikator makro ekonomi berfungsi untuk membantu dan memprediksi perkembangan kinerja perekonomian suatu daerah. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa indikator makro ekonomi, antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); Suku Bunga; Inflasi; dan Nilai Tukar.

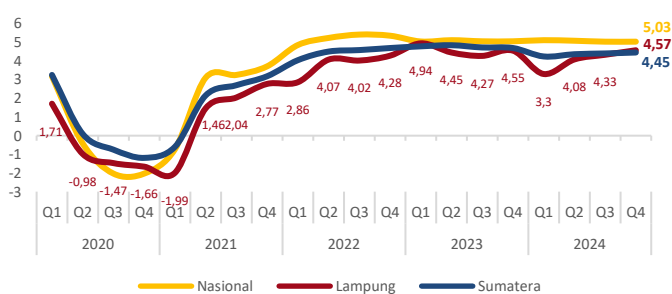
2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah

2.1.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Dalam analisis pertumbuhan ekonomi, data yang digunakan berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) guna memberikan gambaran pertumbuhan ekonomi yang sesungguhnya, tidak dipengaruhi oleh perubahan harga.

Grafik 2.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan C-to-C Lampung, Sumatera, dan Nasional 2020 – 2024 (ctc)



Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Secara *Cumulative-to-Cumulative* (ctc), Kinerja Ekonomi Provinsi Lampung tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,57% (ctc), dari 0,02 persen poin dibandingkan tahun 2023, dimana saat itu tumbuh sebesar 4,55% (ctc). Di sisi lain, ekonomi nasional mampu tumbuh sebesar 5,03% (ctc), menurun 0,02 persen poin dibandingkan tahun 2023 yang tumbuh 5,05% (ctc) sebagaimana tampak pada grafik 2.1. Meskipun ekonomi

Lampung menunjukkan tren yang sedikit lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, masih ada tantangan dalam mengejar ketertinggalan dari pertumbuhan nasional. Namun demikian, capaian ekonomi Lampung berada di atas capaian ekonomi Sumatera yang tumbuh 4,45% (ctc). Ekonomi Sumatera 2024 menurun 0,24 persen poin dibandingkan tahun 2023 yang tumbuh 4,69% (ctc).

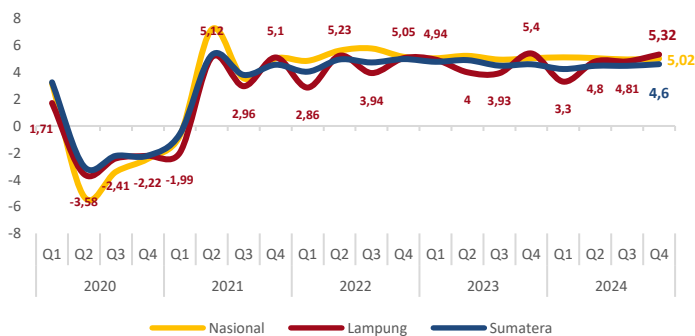
Pertumbuhan ekonomi Lampung sepanjang tahun 2024 mengalami peningkatan yang didorong oleh beberapa sektor utama. Sektor Jasa Lainnya mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 10,63% (ctc), diikuti oleh Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh 10,04% (ctc), Jasa Perusahaan tumbuh 9,23% (ctc), serta Industri Pengolahan meningkat 9,09% (ctc). Pertumbuhan positif ini didorong oleh meningkatnya kunjungan wisatawan, peningkatan aktivitas agen dan biro perjalanan wisata, serta menguatnya mobilitas angkutan penumpang dan barang. Industri Pengolahan dan Perdagangan, sebagai salah satu sektor dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Lampung, mencatat pertumbuhan positif seiring dengan meningkatnya aktivitas industri dan usaha konveksi untuk pengadaan alat peraga kampanye Pemilu dan Pilkada 2024. Di sisi lain, sektor Pertanian mengalami kontraksi sebesar 2,09% (ctc), dipengaruhi oleh penurunan produktivitas hasil tanaman pangan akibat faktor cuaca.

Dari sisi pengeluaran, Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR) mencatat pertumbuhan signifikan sebesar 11,91% (ctc), didorong oleh meningkatnya aktivitas politik dalam rangka Pemilu Februari 2024 dan Pilkada November 2024. Sementara itu, ekspor tumbuh sebesar 12,15% (ctc), mencerminkan peningkatan permintaan eksternal, meskipun diiringi oleh kenaikan impor sebesar 10,14% (ctc), yang mengindikasikan tingginya kebutuhan barang di

Lampung. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) juga menunjukkan pertumbuhan sebesar 4,85% (*ctc*), terutama didukung oleh peningkatan belanja bantuan sosial dalam APBN serta penyesuaian gaji ASN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024. Di sisi lain, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami kenaikan sebesar 1,78% (*ctc*), didorong oleh peningkatan aktivitas konstruksi pada sektor bangunan dan non-bangunan.

Perekonomian Lampung masih bergantung pada konsumsi rumah tangga, yang berkontribusi 63,21% terhadap PDRB 2024 dan tumbuh 4,84% (*ctc*), didukung oleh peningkatan pengeluaran untuk makanan dan minuman, transportasi dan komunikasi, serta kesehatan dan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat tetap terjaga, meskipun terdapat tekanan eksternal terhadap ekonomi regional.

Grafik 2.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan Y-on-Y Lampung, Sumatera, dan Nasional Triwulan I 2020 – Triwulan IV 2024



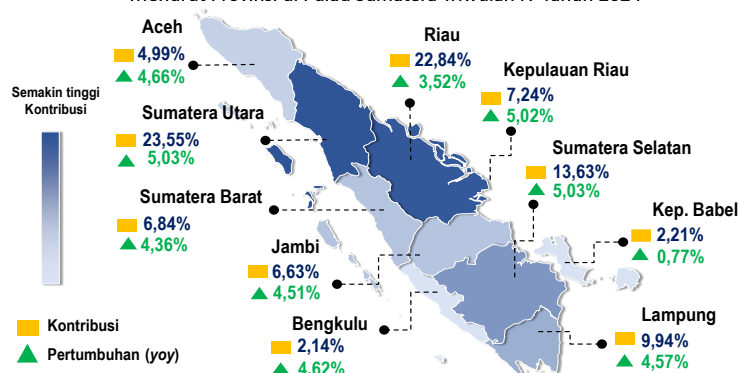
Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Secara *year-on-year* (*yoy*), Kinerja ekonomi Lampung pada Triwulan IV 2024 menunjukkan penguatan dibandingkan triwulan sebelumnya, meskipun masih berada di bawah capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pada triwulan ini, ekonomi Lampung tumbuh sebesar 5,32% (*yoy*), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,81% (*yoy*). Capaian tersebut juga lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02% (*yoy*) dan rata-rata pertumbuhan Sumatera yang mencapai 4,60% (*yoy*) sebagaimana tampak pada grafik 2.2.

Pertumbuhan ekonomi Lampung pada Triwulan IV 2024 didorong oleh kinerja positif di berbagai sektor. Sektor industri pengolahan mencatat pertumbuhan signifikan sebesar 14,16% (*yoy*), didukung oleh meningkatnya aktivitas industri makanan, baik pada skala usaha besar dan menengah maupun industri mikro dan kecil. Selain itu, sektor jasa lainnya tumbuh sebesar 13,85% (*yoy*), yang utamanya dipacu oleh meningkatnya kunjungan ke tempat rekreasi dan hiburan, sejalan dengan maraknya penyelenggaraan *event* pariwisata yang mendorong pergerakan ekonomi di daerah. Sementara itu, sektor informasi dan komunikasi mengalami pertumbuhan sebesar 9,54% (*yoy*), seiring dengan meningkatnya *traffic* seluler dan internet, mencerminkan semakin tingginya ketergantungan masyarakat terhadap layanan digital.

Dari sisi pengeluaran, ekspansi pada komponen ekspor barang dan jasa, yang tumbuh sebesar 12,31% (*yoy*) didorong peningkatan volume ekspor komoditas utama, seperti lemak dan minyak hewan serta kopi, teh dan rempah memberikan kontribusi penting terhadap stabilitas ekonomi daerah. Selain itu, Konsumsi LNPRRT juga tumbuh 6,58% (*yoy*), didorong oleh penyelenggaraan Pilkada pada November 2024.

Gambar 2.1. Laju Pertumbuhan Triwulanan Y-on-Y dan Kontribusi PDRB Menurut Provinsi di Pulau Sumatera Triwulan IV Tahun 2024



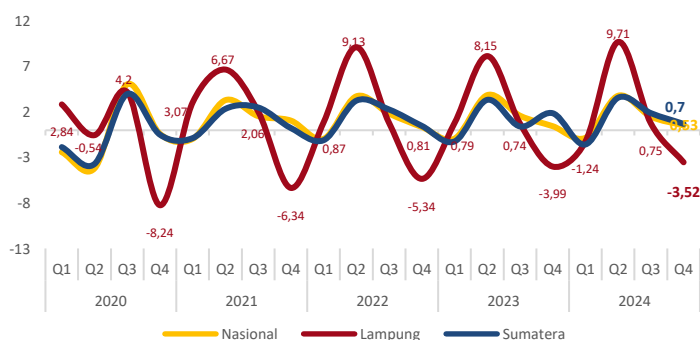
Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Lampung mempertahankan posisi strategis dalam struktur perekonomian Sumatera, menempati peringkat ke-4 pada Triwulan IV 2024. Meskipun kontribusinya masih berada di bawah beberapa provinsi besar seperti Sumatera Utara, Sumatera

Selatan, dan Riau, pertumbuhan ekonomi Lampung tetap solid, didukung oleh kinerja kuat sektor Industri Pengolahan. Sektor ini berkontribusi 19,69% terhadap total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Lampung, atau mencapai Rp23,93 triliun, dimana mencerminkan perannya yang vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Lampung masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan daya saing dan mendiversifikasi sektor unggulan. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menjadi andalan ekonomi Lampung pada triwulan IV 2024 berkontribusi sebesar 24,40% terhadap total PDRB ADHB, mencapai Rp 121,55 triliun. Namun, sektor ini hanya mampu tumbuh 3,62% (yoy), mencerminkan perlunya peningkatan produktivitas dan nilai tambah untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi. Sebagai perbandingan, Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Selatan mampu mencatat pertumbuhan lebih kompetitif meskipun menghadapi berbagai dinamika ekonomi, menunjukkan kapasitas adaptasi dan diversifikasi sektor ekonomi yang lebih kuat. Ke depan, optimalisasi sektor unggulan, terutama melalui peningkatan efisiensi, inovasi, dan hilirisasi produk, menjadi kunci bagi Lampung untuk memperkuat perannya dalam perekonomian regional Sumatera serta meningkatkan daya saing di tingkat nasional.

Grafik 2.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan Q-to-Q Lampung, Sumatera, dan Nasional Triwulan I 2020 – Triwulan IV 2024



Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Secara *quarter-to-quarter* (qtq), pertumbuhan ekonomi Lampung pada Triwulan IV 2024 mengalami kontraksi, sesuai dengan tren yang

biasanya terjadi pada triwulan yang sama di tahun-tahun sebelumnya. Namun, kontraksi yang terjadi kali ini lebih ringan dibandingkan dengan periode yang sama dalam empat tahun terakhir sebagaimana tampak pada grafik 2.3. Ekonomi Lampung mengalami kontraksi 4,52% (qtq), sementara ekonomi nasional tumbuh 0,53% (qtq) dan Sumatera mencatat pertumbuhan 0,70% (qtq).

Kontraksi terdalam berasal dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang terkontraksi 14,80% (qtq) disebabkan penurunan produksi tanaman pangan dan hortikultura serta penurunan produksi perikanan disebabkan cuaca ekstrem (La Nina, angin kencang, dan gelombang tinggi), serta sektor industri pengolahan yang turun 2,97% (qtq) disebabkan penurunan kinerja industri gula akibat beberapa perusahaan tidak memproduksi. Di sisi lain, kontraksi ekonomi Lampung tidak semakin dalam berkat pertumbuhan di sektor jasa lainnya 5,26% (qtq) didorong penyelenggaraan berbagai festival budaya Lampung dan sektor konstruksi yang meningkat 3,84% (qtq) didorong peningkatan nilai konstruksi pembangunan proyek infrastruktur. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Lampung pada Triwulan IV 2024 tertekan oleh kontraksi pada komponen ekspor barang dan jasa 3,58% (qtq), sementara impor justru tumbuh signifikan 11,39% (qtq).

Kinerja ekonomi Lampung menunjukkan pola musiman sehingga memerlukan sektor yang stabil untuk ekonomi Lampung yang berkelanjutan. Mengingat perekonomian Lampung masih sangat bergantung pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, diperlukan strategi untuk meningkatkan ketahanan dan stabilitas sektor ini guna mengurangi *volatilitas* yang terjadi akibat faktor eksternal, seperti cuaca dan fluktuasi harga komoditas. Untuk mencapai stabilitas di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, diperlukan langkah-langkah strategis seperti diversifikasi produk, penerapan teknologi, penguatan infrastruktur, peningkatan akses permodalan, pemberdayaan petani dan nelayan, hilirisasi agrobisnis, serta penguatan regulasi.

2.1.1.2 Nominal dan Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan Pengeluaran

Struktur perekonomian Provinsi Lampung pada tahun 2024 masih didominasi oleh permintaan domestik, terutama dari Konsumsi Rumah Tangga (RT) dan Investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Konsumsi RT tetap menjadi kontributor utama dengan porsi mencapai 63,21% dari total

PDRB, atau setara dengan Rp170,59 triliun. Sementara itu, investasi PMTB berperan signifikan dengan kontribusi sebesar 31,10% atau senilai Rp88,93 triliun. Dominasi konsumsi domestik ini menegaskan bahwa daya beli masyarakat serta investasi dalam sektor produktif masih menjadi motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi di Lampung. Perkembangan PDRB berdasarkan pengeluaran dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1. Perkembangan PDRB Pengeluaran Lampung Triwulan IV 2020 – 2024

Pengeluaran	Triwulan IV 2020				Triwulan IV 2021				Triwulan IV 2022				Triwulan IV 2023				Triwulan IV 2024																						
	Dist	qtq	yoy	ctc	Dist	qtq	yoy	ctc	Dist	qtq	yoy	ctc	Dist	qtq	yoy	ctc	Dist	qtq	yoy	ctc																			
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	62,58	↓	-0,08	↓	-3,95	↓	-1,62		61,96	↑	1,49	↑	3,69	↑	1,68		61,29	↑	1,36	↑	4,67	↑	4,74		62,35	↑	0,81	↑	4,64	↑	5,15		63,21	↑	0,91	↑	5,05	↑	4,84
Pengeluaran Konsumsi LNPR	1,70	↑	1,52	↓	-1,02	↓	-4,16		1,72	↑	10,34	↑	9,80	↑	3,63		1,63	↑	1,80	↓	-4,36	↑	1,22		1,72	↑	10,08	↑	17,36	↑	10,59		1,83	↑	7,32	↑	6,58	↑	11,91
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8,16	↑	38,13	↓	-1,97	↓	-3,49		7,90	↑	34,75	↓	-0,91	↑	0,32		6,84	↑	38,47	↓	-5,06	↓	-4,97		6,60	↑	47,45	↑	3,36	↑	2,01		6,57	↑	46,51	↑	2,16	↑	4,85
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	33,03	↓	-0,15	↓	-8,47	↓	-4,85		33,81	↑	2,10	↑	5,99	↑	3,96		32,46	↑	3,80	↑	2,83	↑	2,42		32,33	↑	6,49	↑	7,08	↑	4,14		31,10	↑	5,49	↑	0,34	↑	1,78
Perubahan Inventori	0,55	→	0,00	→	0,00	→	0,00		0,22	→	0,00	→	0,00	→	0,00		0,26	→	0,00	→	0,00	→	0,00		0,25	→	0,00	→	0,00	→	0,00		-0,24	→	0,00	→	0,00	→	0,00
Ekspor Barang dan Jasa	13,64	↑	10,94	↑	2,31	↓	-4,29		19,69	↓	-3,77	↑	9,12	↑	17,21		21,62	↓	-4,66	↑	8,89	↑	6,63		16,41	↓	-0,86	↑	4,44	↑	5,89		55,73	↓	-3,58	↑	12,31	↑	12,15
Impor Barang dan Jasa	5,99	↑	37,27	↓	-3,35	↓	-5,72		9,24	↑	18,42	↑	5,84	↑	14,56		9,82	↑	15,22	↑	4,69	↑	4,38		7,64	↑	19,09	↑	4,80	↑	6,18		58,19	↑	11,39	↑	5,96	↑	10,14
PDRB	100,00	↓	-8,24	↓	-2,25	↓	-1,66		100,00	↓	-6,34	↑	5,10	↑	2,77		100,00	↓	-5,34	↑	5,05	↑	4,28		100,00	↓	-3,99	↑	5,40	↑	4,55		100,00	↓	-3,52	↑	5,32	↑	4,57

Keterangan: Nilai distribusi ditabel yaitu sepanjang tahun 2024

Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Konsumsi Rumah Tangga

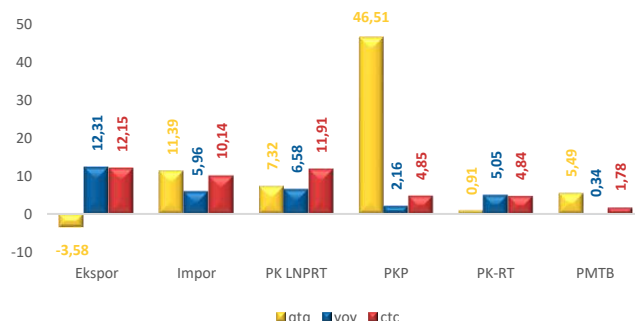
Pada triwulan IV 2024, konsumsi rumah tangga tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi, meskipun secara tahunan menunjukkan perlambatan. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,05% (yoy), meningkat dibandingkan dengan 4,95% (yoy) pada triwulan sebelumnya dan 4,64% (yoy) pada periode yang sama tahun lalu. Namun, jika dilihat secara keseluruhan tahun 2024, pertumbuhan konsumsi rumah tangga tercatat sebesar 4,84% (ctc), lebih rendah dibandingkan dengan 5,15% (ctc) pada tahun 2023. Perlambatan ini mencerminkan adanya tekanan daya beli masyarakat, dinamika harga barang dan jasa, serta faktor eksternal lainnya yang memengaruhi pola konsumsi.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Sementara itu, investasi dalam Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami pelemahan signifikan, dengan pertumbuhan hanya 0,34% (yoy) pada triwulan IV 2024, jauh lebih rendah

dibandingkan 3,30% (yoy) pada triwulan sebelumnya dan 7,08% (yoy) pada periode yang sama tahun lalu. Sepanjang tahun 2024, investasi hanya tumbuh 1,78% (ctc), melambat dari 4,14% (ctc) pada tahun 2023. Pelemahan ini terutama disebabkan oleh penurunan investasi pada sektor bangunan, serta sikap "wait and see" investor swasta di tengah ketidakpastian politik ekonomi akibat penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

Grafik 2.4. Pertumbuhan Ekonomi Lampung Triwulan IV 2024 Menurut Pengeluaran



Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Ekspor

Di sisi eksternal, ekspor menunjukkan performa yang positif, didorong oleh komoditas unggulan seperti kopi robusta, *crude palm oil* (CPO), dan olahan buah. Ekspor tumbuh sebesar 12,31% (yoy) dan 12,15% (ctc), mencerminkan permintaan global yang masih kuat terhadap produk-produk tersebut.

Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT)

Pengeluaran Konsumsi LNPRT turut mengalami pertumbuhan positif sebesar 6,58% (yoy), sejalan dengan meningkatnya aktivitas politik menjelang Pilkada serentak pada November 2024. Bahkan, sepanjang tahun 2024, PK-LNPRT tumbuh sebesar 11,91% (ctc), yang turut terdorong oleh belanja politik pada Pemilu Februari 2024. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika politik memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap pola konsumsi dan pengeluaran di daerah.

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP)

Di sisi lain, konsumsi pemerintah (PKP) tetap berupaya memberikan kontribusi stimulasi investasi dan konsumsi serta efek pengganda bagi perekonomian. Pada 2024, kontribusi PKP terhadap PDRB tercatat sebesar 6,57%, sedikit lebih rendah dibandingkan 6,60% pada 2023. PKP tumbuh sebesar 4,85% (ctc), didukung peningkatan belanja pegawai serta belanja barang dan jasa.

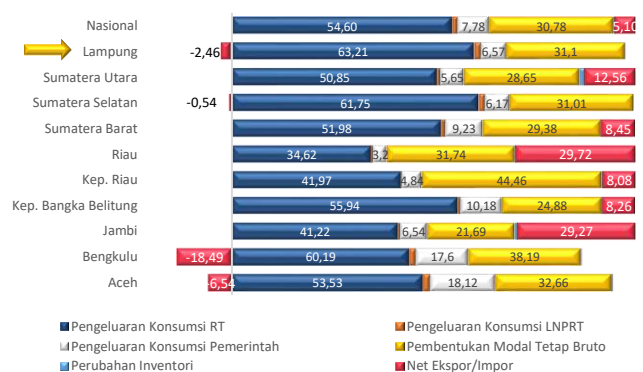
Secara *year-on-year* (yoy), pengeluaran konsumsi pemerintah tumbuh sebesar 2,16% pada triwulan IV 2024, mengalami perlambatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 3,35% (yoy). Perlambatan ini sebagian besar disebabkan oleh penyesuaian belanja modal dalam APBN yang lebih ketat pada triwulan IV 2024 sebagai upaya menjaga kesinambungan fiskal.

Meskipun terjadi perlambatan dalam belanja modal, pemerintah tetap memprioritaskan keberlanjutan bantuan sosial guna menjaga kesejahteraan masyarakat dan mendukung pemerataan pendapatan. Ke depan, kontribusi nominal PKP terhadap perekonomian Lampung diperkirakan akan lebih efisien seiring dengan

implementasi Instruksi Presiden (Inpres) RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, yang mengarahkan kebijakan fiskal ke arah pengelolaan belanja yang lebih selektif dan efisien.

Secara struktur keseluruhan, konsumsi rumah tangga tetap menjadi motor utama perekonomian Lampung dengan kontribusi sebesar 63,21% terhadap total PDRB. Sementara itu, komponen permintaan domestik lainnya, seperti konsumsi pemerintah dan PK-LNPRT, memberikan kontribusi masing-masing sebesar 6,57% dan 1,83%. Di sisi eksternal, impor masih memiliki peran yang signifikan dalam menekan PDRB Lampung dengan kontribusi sebesar 58,19%, sedangkan ekspor hanya menyumbang 55,73%. Akibatnya, terjadi net impor sebesar 2,46%, yang mencerminkan ketergantungan ekonomi terhadap barang dan jasa dari luar daerah. Ketimpangan ini menyoroti pentingnya peningkatan daya saing produk lokal guna memperkuat ketahanan ekonomi Lampung. Oleh karena itu, strategi penguatan ekspor perlu lebih dioptimalkan melalui diversifikasi produk unggulan, peningkatan efisiensi produksi, serta *business matching* perluasan akses pasar global.

Grafik 2.5. Kontribusi PDRB Pengeluaran Provinsi di Regional Sumatera dan Nasional Tahun 2024



Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Dibandingkan dengan tingkat nasional dan provinsi lain di Sumatera, pola konsumsi RT dan Investasi PMTB di Lampung menunjukkan tren yang sama. Namun, dalam konteks eksternal, Lampung menghasilkan net impor, sebagaimana yang terjadi di Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Aceh.

Sebaliknya, nasional dan sebagian besar provinsi lainnya di Sumatera, kinerja ekspor yang lebih dominan sehingga berhasil menghasilkan net ekspor yang positif.

2.1.1.3 Nominal dan Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan Lapangan Usaha

Struktur perekonomian Provinsi Lampung pada tahun 2024 masih didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yang berkontribusi sebesar 26,21% terhadap total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), atau senilai Rp68,23 triliun, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.2. Posisi berikutnya ditempati oleh sektor Industri Pengolahan serta sektor Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan, dengan kontribusi masing-masing sebesar 18,93% dan 14,25%. Ketiga sektor utama ini menyumbang 59,39% dari total PDRB, menegaskan peran sentralnya dalam struktur ekonomi Lampung.

Meskipun sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi tulang punggung

perekonomian daerah, tren kontribusinya menunjukkan kecenderungan menurun dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2024, porsi sektor ini terhadap total PDRB lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan ini tidak terlepas dari berbagai tantangan struktural maupun eksternal, termasuk dampak perubahan iklim yang memengaruhi produktivitas pertanian. Fenomena El Niño pada awal tahun 2024 mengakibatkan perubahan pola musim, mengganggu siklus tanam, serta berkontribusi pada penurunan hasil panen sejumlah komoditas unggulan. Selain itu, volatilitas harga komoditas global akibat ketegangan geopolitik di berbagai negara semakin memperberat tekanan terhadap sektor ini.

Di sisi lain, sektor Industri Pengolahan dan sektor Perdagangan Besar serta Reparasi Kendaraan mengalami peningkatan kontribusi dibandingkan tahun 2023. Kenaikan ini mencerminkan pemulihan aktivitas manufaktur dan distribusi, didukung oleh meningkatnya permintaan pasar.

Tabel 2.2. Perkembangan PDRB Lapangan Usaha Lampung Tahun 2020 – 2024

Lapangan Usaha	Triwulan IV 2020				Triwulan IV 2021				Triwulan IV 2022				Triwulan IV 2023				Triwulan IV 2024																							
	Dist	qtd	yoy	ctc	Dist	qtd	yoy	ctc	Dist	qtd	yoy	ctc	Dist	qtd	yoy	ctc	Dist	qtd	yoy	ctc																				
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	29,78	↓	-25,34	↓	0,30	↑	0,68		28,39	↓	-22,40	↓	2,07	↓	-0,40		27,88	↓	-17,32	↓	6,01	↑	1,98		27,30	↓	-18,69	↓	-0,40	↑	0,54		26,21	↓	-14,80	↓	3,62	↓	-2,09	
Pertambangan dan Penggalian	5,01	↓	-7,12	↓	-8,44	↓	-3,72		5,58	↑	0,66	↓	-1,40	↓	-5,28		5,89	↑	1,80	↓	-2,18	↓	-3,73		5,25	↑	3,08	↑	8,28	↑	2,97		5,11	↑	0,26	↓	-0,04	↑	4,85	
Industri Pengolahan	19,42	↑	3,98	↑	1,29	↓	-5,27		19,65	↓	-0,81	↑	2,17	↑	4,57		18,55	↓	-8,18	↓	-5,98	↑	0,38		18,01	↓	-5,94	↓	2,94	↑	1,43		18,93	↓	-2,97	↑	14,16	↑	9,09	
Pengadaan Listrik, Gas	0,16	↑	-15,14	↓	-10,17	↓	-0,60		0,14	↑	2,33	↑	8,13	↑	-6,80		0,14	↑	1,34	↑	2,79	↑	6,26		0,13	↓	-9,25	↓	-7,74	↑	1,36		0,10	↑	0,60	↑	4,71	↓	-6,66	
Pengadaan Air	0,11	↑	-0,46	↑	5,16	↑	5,06		0,11	↑	1,71	↑	9,55	↑	6,94		0,10	↑	-0,38	↓	-0,21	↑	3,72		0,10	↑	-1,89	↓	-0,70	↑	0,51		0,10	↑	-0,48	↑	1,59	↓	-0,31	
Konstruksi	9,38	↑	5,43	↓	-3,14	↓	-2,05		9,89	↑	3,05	↑	5,48	↑	6,95		9,75	↑	2,84	↑	2,59	↑	3,86		9,86	↑	8,16	↑	15,16	↑	7,02		9,47	↑	3,84	↓	-3,38	↑	2,78	
Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan	11,18	↓	-5,70	↓	-9,84	↓	-6,59		11,70	↓	-0,07	↑	16,80	↑	8,26		13,20	↑	1,09	↑	17,51	↑	15,42		13,98	↑	2,04	↑	8,16	↑	9,80		14,25	↑	1,23	↑	7,02	↑	7,19	
Transportasi dan Pergudangan	5,03	↓	-7,80	↓	-12,84	↓	-5,61		4,97	↑	4,85	↑	15,30	↑	2,27		5,98	↑	8,11	↑	26,28	↑	20,31		7,16	↑	6,17	↑	11,03	↑	16,51		7,44	↑	0,15	↑	4,06	↑	10,04	
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,57	↓	-5,13	↓	-13,10	↓	-5,01		1,48	↑	5,61	↑	8,29	↓	-1,54		1,52	↑	2,56	↑	14,85	↑	12,61		1,61	↑	0,67	↑	9,78	↑	13,38		1,61	↑	1,30	↑	6,22	↑	5,54	
Informasi dan Komunikasi	4,32	↑	-0,83	↑	8,47	↑	8,02		4,26	↑	-9,88	↓	-0,38	↑	6,17		3,89	↑	0,45	↑	9,40	↑	0,48		3,88	↑	2,12	↑	6,31	↑	7,50		3,90	↑	2,28	↑	9,54	↑	8,62	
Jasa Keuangan	2,19	↑	3,03	↑	4,56	↑	3,76		2,22	↑	0,31	↓	-1,41	↑	2,00		2,08	↓	-8,48	↓	-11,01	↓	-3,65		2,02	↓	-1,72	↑	13,26	↑	3,19		1,99	↓	-5,12	↓	-0,35	↑	4,83	
Real Estate	3,00	↑	-0,24	↓	-5,34	↓	-1,73		2,91	↑	3,68	↑	7,98	↑	1,31		2,75	↑	3,62	↑	3,68	↑	3,42		2,61	↑	3,46	↑	0,92	↑	0,86		2,63	↑	0,40	↑	4,01	↑	6,76	
Jasa Perusahaan	0,15	↓	-2,52	↓	-3,80	↓	-1,43		0,15	↑	6,68	↑	8,69	↑	1,05		0,16	↑	4,07	↑	18,49	↑	17,49		0,16	↑	2,89	↑	4,06	↑	5,79		0,17	↑	2,36	↑	8,53	↑	9,23	
Administrasi Pemerintahan dan Lainnya	3,63	↓	-2,75	↑	3,53	↑	4,94		3,58	↑	1,49	↑	9,23	↑	4,21		3,24	↑	0,29	↓	-0,12	↓	-1,26		3,03	↑	6,81	↓	-2,33	↑	0,12		3,09	↑	2,12	↑	0,74	↑	7,06	
Jasa Pendidikan	3,10	↓	-7,36	↓	-1,27	↑	4,11		3,05	↓	-1,99	↑	5,94	↑	1,22		2,89	↓	-2,82	↑	1,24	↑	2,68		2,82	↓	-0,27	↑	3,47	↑	2,23		2,84	↑	0,04	↑	1,19	↑	1,49	
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,07	↑	-2,29	↑	14,26	↑	10,93		1,08	↓	-1,49	↑	2,13	↑	3,89		0,99	↓	-1,38	↓	-3,59	↓	-0,10		0,98	↑	3,52	↑	8,55	↑	3,87		1,00	↑	1,05	↑	6,63	↑	7,29	
Jasa lainnya	0,91	↑	1,42	↓	-7,92	↓	-4,59		0,85	↑	8,49	↑	2,20	↓	-2,15		1,00	↑	2,52	↑	30,92	↑	25,45		1,11	↑	1,24	↑	11,80	↑	15,38		1,16	↑	5,26	↑	13,85	↑	10,63	
PDRB	100,00	↓	-8,24	↓	-2,22	↓	-1,67		100,00	↓	-6,34	↓	5,10	↓	2,79		100,00	↓	-5,34	↓	5,05	↓	4,28		100,00	↓	-3,99	↓	5,40	↓	4,55		100,00	↓	-3,52	↓	5,32	↓	4,57	

Keterangan: Nilai distribusi di tabel yaitu sepanjang tahun 2024

Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Sektor dengan Pertumbuhan Tertinggi

Sektor jasa lainnya mencatat pertumbuhan yang impresif di tahun 2024, dengan laju pertumbuhan tertinggi sebesar 10,63% (ctc). Kinerja positif ini

didorong peningkatan kunjungan ke berbagai tempat rekreasi dan hiburan, sejalan dengan meningkatnya pelaksanaan event pariwisata serta pembukaan destinasi wisata baru di Provinsi Lampung.

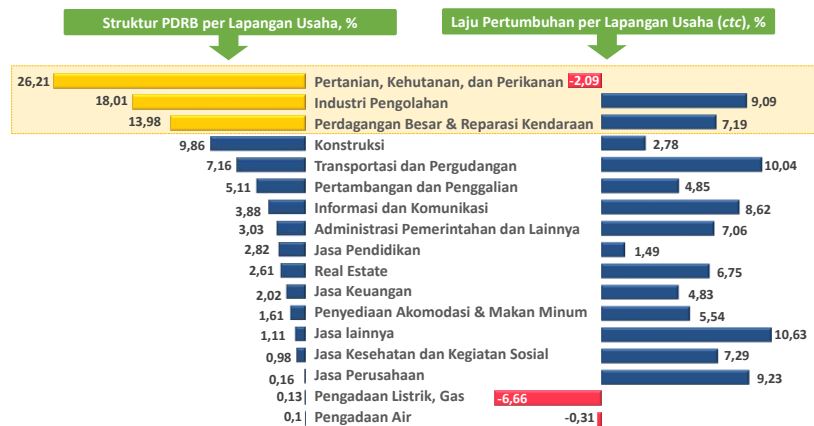
Pada triwulan IV 2024, sektor ini tumbuh signifikan sebesar 13,85% (yoy) dan 5,26% (q_{tq}). Peningkatan ini terutama didorong oleh meningkatnya aktivitas pariwisata yang bertepatan dengan penyelenggaraan berbagai festival budaya di Lampung, seperti Krakatau Festival dan Pekan Raya Lampung. *Event-event* ini tidak hanya meningkatkan jumlah wisatawan, tetapi juga memberikan *multiplier effect* terhadap sektor terkait, seperti transportasi, akomodasi, serta industri kreatif.

Dampak positif ini juga tercermin dalam pertumbuhan sektor transportasi dan perdagangan, yang mencatat laju pertumbuhan tertinggi kedua dengan kenaikan sebesar 10,04% (ctc). Peningkatan ini didorong oleh meningkatnya

arus penumpang seiring dengan momentum libur nasional. Faktor lainnya adalah bertambahnya rute baru angkutan darat (DAMRI) dan udara dari serta menuju Provinsi Lampung, yang semakin memperkuat konektivitas wilayah.

Sektor dengan pertumbuhan tertinggi ketiga adalah jasa perusahaan, yang tumbuh sebesar 9,23% (ctc). Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh peningkatan layanan agen dan biro perjalanan wisata yang mengalami lonjakan seiring dengan tingginya permintaan selama libur nasional. Selain itu, meningkatnya aktivitas periklanan yang bertepatan dengan momentum Pemilu dan Pilkada 2024 juga memberikan kontribusi signifikan terhadap ekspansi sektor ini.

Grafik 2.6. Distribusi dan Pertumbuhan (ctc) PDRB menurut Lapangan Usaha Tahun 2024



Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Sektor dengan Kontraksi Terdalam

Sektor Listrik dan Gas mengalami kontraksi terdalam pada tahun 2024, dengan penurunan sebesar 6,66% (ctc). Pelemahan ini terutama dipicu oleh menurunnya distribusi gas kota, yang semakin jarang digunakan oleh masyarakat. Pergeseran ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan infrastruktur jaringan gas serta perubahan preferensi konsumen yang lebih memilih sumber energi alternatif seperti LPG dan listrik. Selain lebih mudah diakses, kedua opsi tersebut dianggap lebih praktis dan sesuai dengan kebutuhan rumah tangga maupun industri saat ini.

Selain itu, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan juga mengalami kontraksi sebesar 2,09%

(ctc), yang utamanya dipicu oleh penurunan produksi tanaman pangan. Bahkan, secara kuartalan, sektor ini mengalami kontraksi lebih dalam sebesar 14,80% (q_{tq}), yang disebabkan oleh berbagai faktor eksternal, termasuk penurunan produksi tanaman pangan dan hortikultura. Kondisi ini diperburuk oleh dampak cuaca ekstrem yang terjadi sepanjang tahun 2024, seperti fenomena El Nino, El Nina, angin kencang, dan gelombang tinggi, yang menghambat aktivitas pertanian dan perikanan. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian dan perikanan di Lampung masih rentan terhadap perubahan iklim dan kondisi cuaca yang tidak menentu, sehingga memerlukan strategi mitigasi risiko yang lebih adaptif.

Leading Sector Lampung

Sektor Pertanian dan Kehutanan mengalami kontraksi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Di sisi lain, sektor Industri Pengolahan sepanjang tahun 2024 mencatat pertumbuhan yang sebesar 9,09% (*ctc*) bahkan di triwulan IV 2024 tumbuh 14,16% (*yoy*), didorong kinerja industri makanan, khususnya pada skala usaha besar dan menengah yang mengalami ekspansi produksi seiring dengan peningkatan permintaan domestik dan ekspor. Selain itu, industri mikro dan kecil juga menunjukkan perkembangan positif, mengindikasikan penguatan ekosistem usaha yang lebih inklusif.

Sektor Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan tumbuh sebesar 7,19% (*ctc*). Momentum libur nasional turut mendorong peningkatan transaksi perdagangan. Selain itu, strategi promosi yang agresif dari pelaku usaha serta digitalisasi perdagangan semakin memperkuat daya saing sektor ini, menjadikannya salah satu motor penggerak utama dalam perekonomian Lampung.

Prospek dan Tantangan Ke Depan

Secara keseluruhan, perekonomian Provinsi Lampung masih menghadapi tantangan besar dengan pertumbuhan yang melambat dan belum pulih sepenuhnya, masih berada di bawah 5%. Pertumbuhan yang terjadi cenderung bersifat musiman, bergantung pada momen tertentu, sehingga rentan mengalami penurunan kembali setelahnya. Oleh karena itu, Lampung membutuhkan sektor ekonomi yang stabil dan terus meningkat, seperti pertanian dan industri pengolahan, untuk menjadi fondasi pertumbuhan yang lebih kuat.

Sektor pertanian, yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Lampung, terus mengalami tekanan. Stabilitas sektor ini menjadi krusial untuk menjaga ketahanan ekonomi daerah. Untuk itu, penguatan agrobisnis melalui hilirisasi perlu menjadi prioritas, termasuk optimalisasi lahan yang kurang subur, regenerasi SDM pertanian, peningkatan akses permodalan, dan penguatan

strategi pemasaran. Sektor perikanan juga dapat menjadi alternatif yang potensial dalam mendukung diversifikasi ekonomi daerah. Ke depan, Lampung harus mendorong transformasi pertanian menuju sistem yang lebih modern dengan peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi produk. Selain itu, kemudahan berbisnis, khususnya dalam mendukung ekspor hasil pertanian, perlu terus ditingkatkan agar Lampung dapat membangun ekonomi yang lebih tahan terhadap fluktuasi siklus ekonomi dan memiliki daya saing yang lebih kuat.

2.1.1.4 Kontribusi fiskal (pengeluaran pemerintah) terhadap pembentukan PDRB

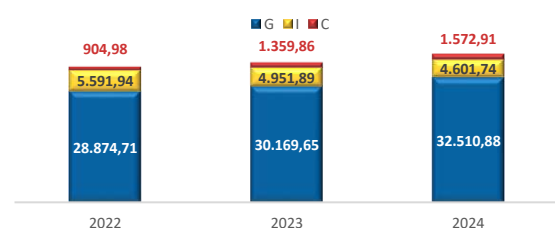
Pengeluaran pemerintah memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memengaruhi berbagai sektor produktif. Dalam teori Keynesian, pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh besarnya pengeluaran konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan net ekspor. Pendekatan pengeluaran dalam perhitungan pendapatan nasional dinyatakan dalam persamaan:

$$Y = C + I + G + NX$$

Dimana Y mewakili pendapatan nasional sekaligus penawaran agregat, C adalah konsumsi, I adalah investasi, G adalah pengeluaran pemerintah, dan NX (X-M) adalah net ekspor.

Di Provinsi Lampung, realisasi belanja pemerintah, baik melalui APBN maupun APBD, menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2024, total belanja pemerintah mencapai Rp38.685,53 miliar, meningkat dari Rp36.481,39 miliar pada 2023 dan Rp35.371,63 miliar pada 2022. Kenaikan ini menegaskan semakin besarnya peran fiskal dalam menopang perekonomian daerah.

Grafik 2.7. Kontribusi Fiskal terhadap sektor riil ekonomi Lampung 2022 – 2024 (Rp Miliar)



Sumber: ALCo Regional Lampung, 2025 (diolah)

Secara lebih rinci, konsolidasi belanja pemerintah di Lampung mencerminkan kontribusinya terhadap berbagai komponen dalam pendekatan pengeluaran sebagai berikut:

- Kontribusi dalam Pengeluaran Pemerintah (G)

Alokasi untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bantuan sosial, belanja tak terduga, serta transfer ke daerah berperan dominan dalam mendukung pengeluaran pemerintah. Total belanja dalam kategori ini mencapai Rp32.510,88 miliar, atau setara dengan 84,04% dari total belanja konsolidasi. Besarnya porsi ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki dampak luas terhadap keberlanjutan operasional sektor publik dan kesejahteraan masyarakat.

- Kontribusi dalam Investasi (I)

Pengeluaran untuk belanja barang dan jasa serta belanja modal berperan dalam mendorong investasi, khususnya dalam pembangunan infrastruktur dan penguatan sektor produktif. Kontribusi belanja ini tercatat sebesar Rp4.601,74 miliar, atau 11,90% dari total belanja. Hal ini menegaskan pentingnya belanja modal dalam meningkatkan kapasitas ekonomi daerah dan mendorong pertumbuhan jangka panjang..

- Kontribusi dalam Konsumsi Pemerintah (C)

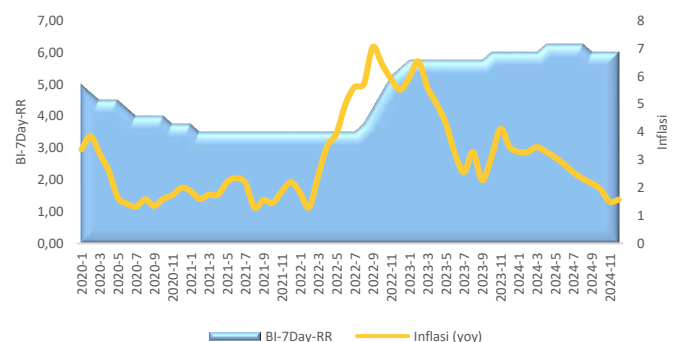
Belanja barang dan jasa, belanja subsidi, serta belanja bantuan sosial turut menopang konsumsi pemerintah, yang berperan dalam menjaga stabilitas perekonomian. Total belanja dalam kategori ini mencapai Rp1.572,91 miliar, atau 4,07% dari total belanja konsolidasi. Alokasi ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program bantuan dan subsidi.

2.1.2 Suku Bunga

BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) adalah instrumen operasi pasar terbuka Bank Indonesia yang bertujuan untuk mengendalikan inflasi,

memperkuat transmisi kebijakan moneter, dan mengatur jumlah uang beredar. Dengan menetapkan suku bunga acuan yang sesuai dengan tingkat inflasi, Bank Indonesia dapat mempengaruhi perilaku kreditur dan debitur. Suku bunga yang tinggi akan menekan permintaan kredit dan mendorong tabungan, sehingga mengurangi uang beredar dan konsumsi, yang pada akhirnya akan menurunkan inflasi dan melambatkan ekonomi. Sebaliknya, suku bunga yang rendah akan meningkatkan permintaan kredit dan mengurangi tabungan, sehingga menambah uang beredar dan konsumsi, yang pada akhirnya akan meningkatkan inflasi dan mempercepat ekonomi. Bank Indonesia (BI) juga memiliki kebijakan makroprudensial yang berorientasi pada pertumbuhan sehingga akan terus mendorong penyaluran kredit meskipun suku bunga mengalami kenaikan. Sebagai contoh, BI memberikan insentif kepada lembaga perbankan yang menyalurkan kredit pada sektor-sektor prioritas. Dalam menetapkan suku bunga acuan, BI juga berkoordinasi dengan pemerintah untuk mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Grafik 2.8. Perkembangan BI 7-Day Repo Rate dan Inflasi Lampung Tahun 2020 – 2024 (Persen)



Sumber: Bank Indonesia dan BPS, 2025 (diolah)

BI-Rate cenderung mengalami tren penurunan yang sejak tahun 2020 sampai dengan triwulan III 2022. Penurunan ini mencerminkan kebijakan moneter akomodatif Bank Indonesia untuk mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi. Namun, memasuki triwulan IV 2024, BI-Rate menunjukkan peningkatan tajam sebagai respons lonjakan inflasi. Sepanjang 2024, BI-Rate bergerak di level 6,00% (Januari–Maret), naik menjadi 6,25% (April–

Agustus), lalu kembali ke 6,00% (September–Desember). Kebijakan ini bertujuan menjaga inflasi dalam kisaran target $2,5 \pm 1$ persen untuk 2024–2025. Meskipun inflasi terus menunjukkan tren penurunan, Bank Indonesia tetap mempertahankan BI-Rate di level tersebut. Langkah ini menegaskan komitmen Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2.1.3 Inflasi

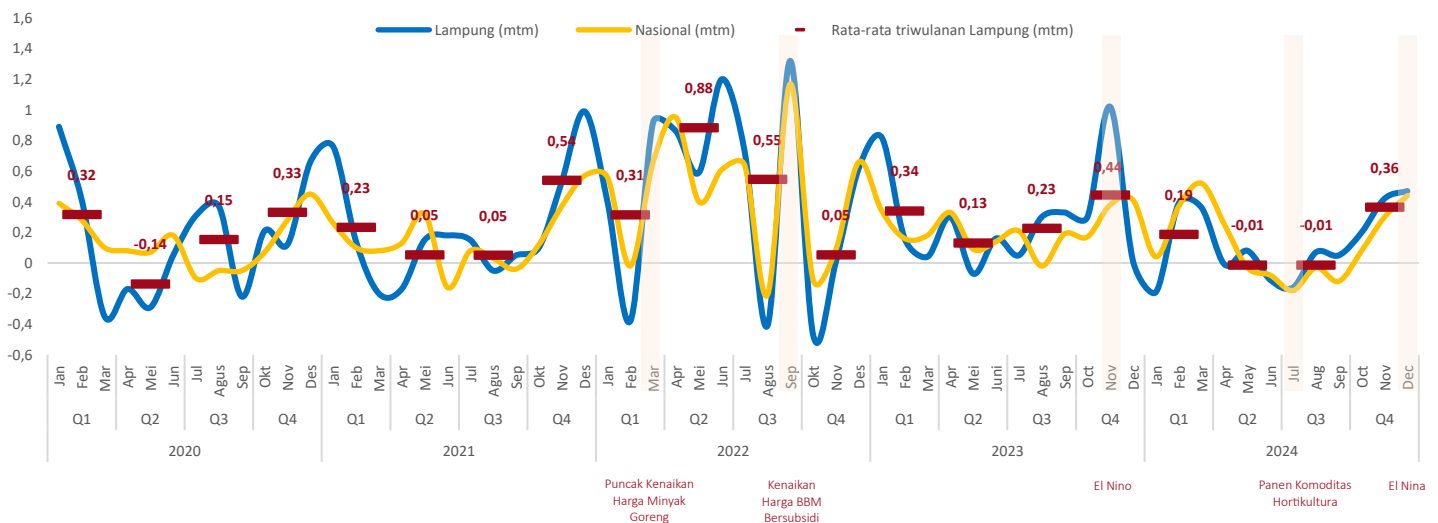
Inflasi merupakan fenomena kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang terjadi secara berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu, sementara penurunan harga barang dan jasa secara umum dalam jangka waktu tertentu disebut deflasi. Pada tahun 2024, perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Lampung mengalami perluasan cakupan wilayah yakni Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Mesuji, Kota Bandar Lampung, dan Kota Metro. Sebelumnya, hanya Kota Bandar Lampung dan Kota Metro yang menjadi dasar penghitungan IHK di provinsi ini. Perluasan wilayah survei ini bertujuan untuk meningkatkan

akurasi dalam menggambarkan tren inflasi di Lampung dengan mempertimbangkan perbedaan karakteristik antara kawasan perkotaan dan perdesaan. Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Mesuji dipilih sebagai representasi wilayah perdesaan berdasarkan hasil Survei Potensi Desa (PODES) tahun 2021, yang menunjukkan bahwa kedua kabupaten tersebut memiliki proporsi daerah perdesaan tertinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Lampung.

2.1.3.1 Inflasi Bulanan

Pergerakan inflasi bulanan di Provinsi Lampung dan nasional selama periode 2020–2024 menunjukkan pola yang fluktuatif, sebagaimana ditampilkan pada grafik 2.9. Rata-rata inflasi bulanan Lampung pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,13% (*mtm*), lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 0,29% (*mtm*) dan tahun 2022 sebesar 0,45% (*mtm*). Penurunan inflasi bulanan ini terutama dipengaruhi oleh tren deflasi yang terjadi pada triwulan II dan III. Namun, pada triwulan IV, inflasi kembali meningkat seiring dengan naiknya permintaan menjelang akhir tahun.

Grafik 2.9. Pergerakan Laju Inflasi Bulanan Lampung dan Nasional Tahun 2020–2024 (%)



Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Secara historis, tekanan inflasi bulanan tertinggi dalam periode 2020–2024 terjadi pada September 2022, dengan tingkat inflasi mencapai 1,32% (*mtm*). Kenaikan ini terutama dipicu oleh kelompok transportasi (*administered price*) yang memberikan

andil 0,96% (*mtm*) terhadap inflasi bulanan. Dari sisi komoditas, bensin menjadi penyumbang utama dengan andil sebesar 0,81% (*mtm*), yang mencerminkan dampak langsung dari kebijakan penyesuaian harga energi terhadap inflasi

Pada tahun 2024, pola inflasi menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh faktor musiman dan kebijakan harga. Deflasi yang terjadi pada triwulan II dan III disebabkan oleh peningkatan pasokan komoditas hortikultura akibat musim panen serta kebijakan pembukaan impor bawang putih, yang menekan harga di pasar domestik. Namun, pada triwulan IV, khususnya Desember

2024, inflasi kembali meningkat sejalan dengan lonjakan permintaan menjelang perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru 2025. Selain itu, intensitas hujan yang tinggi pada akhir tahun berdampak pada terbatasnya pasokan beberapa komoditas, yang turut mendorong kenaikan harga.

Tabel 2.3. Andil Inflasi Bulanan Menurut Kelompok Pengeluaran Lampung Tahun 2024 (Persen)

	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24
Kelompok Pengeluaran	Andil Inflasi	Andil Inflasi	Andil Inflasi	Andil Inflasi	Andil Inflasi	Andil Inflasi	Andil Inflasi	Andil Inflasi	Andil Inflasi	Andil Inflasi	Andil Inflasi	Andil Inflasi
Umum	-0,19	0,39	0,36	-0,01	0,08	-0,11	-0,16	0,07	0,05	0,20	0,42	0,47
Makanan, Minuman, dan Tembakau	-0,21	0,39	0,28	-0,08	0,03	-0,15	-0,26	-0,10	-0,27	0,17	0,35	0,43
Pakaian dan Alas Kaki	0,02	0,01	0,05	0,02	0,00	0,01	0,00	0,04	0,01	0,02	0,01	0,00
Perumahan, Air, Listrik, & Bahan Bakar Rumah	0,04	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02	0,00	0,02	0,04	0,01	0,00	-0,01
Perlengkapan, Peralatan, & Pemeliharaan Rutin RT	-0,01	-0,01	-0,01	0,01	0,02	0,01	0,02	-0,04	0,01	0,00	0,00	-0,01
Kesehatan	0,00	0,01	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,03	0,01	0,01	0,01	-0,01
Transportasi	-0,04	-0,01	0,01	0,06	-0,05	0,01	0,02	0,01	-0,02	-0,05	0,00	0,02
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,00	0,01	0,02	-0,02	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,08	0,26	0,00	0,00	0,00
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
Perawatan Pribadi dan Jasa lainnya	0,01	-0,01	0,00	0,02	0,09	0,01	0,04	0,03	0,00	0,04	0,04	0,03

Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Sepanjang tahun 2024, Provinsi Lampung mengalami deflasi pada Januari, April, Juni, dan Juli, sementara pada bulan lainnya terjadi inflasi. Deflasi terdalam tercatat pada Januari 2024, dengan tingkat deflasi sebesar 0,19% (*mtm*), terutama dipengaruhi oleh penurunan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, yang memberikan andil deflasi sebesar 0,21% (*mtm*). Sebaliknya, inflasi tertinggi terjadi pada Desember 2024, dengan kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama sebagaimana tampak pada tabel 2.3. Pola inflasi di Provinsi Lampung sepanjang tahun 2024 menunjukkan bahwa pergerakan harga beberapa komoditas pangan strategis memiliki andil yang cukup signifikan dalam menentukan tingkat inflasi maupun deflasi bulanan.

Berdasarkan Tabel 2.4, terdapat sepuluh komoditas utama yang paling sering berkontribusi terhadap inflasi, di mana bawang merah, beras, cabai merah, daging ayam ras, dan cabai rawit menjadi penyumbang dominan.

Bawang merah menjadi komoditas dengan frekuensi andil tertinggi, yakni sebanyak 6 bulan dalam setahun, dengan rata-rata andil inflasi sebesar 0,210% (*mtm*). Harga bawang merah yang

fluktuatif disebabkan oleh faktor musiman, pasokan yang terganggu akibat kondisi cuaca, serta keterbatasan produksi Lampung yang sering kali memerlukan pasokan tambahan dari daerah lain, seperti Brebes.

Tabel 2.4. Sepuluh Komoditas Dengan Frekuensi Andil Inflasi Bulanan Terbanyak di Lampung Selama Tahun 2024

No	Komoditas Inflasi	Frekuensi Top 10 Andil Inflasi(<i>mtm</i>)	Rata-rata Andil Inflasi (<i>mtm</i>)
1.	Bawang Merah 	6	0,210%
2.	Beras 	5	0,128%
3.	Cabai Merah 	5	0,100%
4.	Daging Ayam Ras 	5	0,054%
5.	Cabai Rawit 	5	0,044%
6.	Kopi Bubuk 	5	0,054%
7.	Bawang Putih 	4	0,053%
8.	Telur Ayam Ras 	4	0,068%
9.	Tomat 	3	0,063%
10.	Sigaret Kretek Mesin 	3	0,030%

Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Komoditas lain yang juga dominan dalam menyumbang inflasi adalah beras, cabai merah, daging ayam ras, dan cabai rawit. Beras sebagai bahan pangan pokok, mengalami kenaikan harga yang cukup sering dalam setahun, mencerminkan pengaruh dari musim panen, distribusi, dan fluktuasi produksi. Sementara itu, cabai merah dan

cabai rawit cenderung memiliki harga yang sangat volatil akibat ketergantungan pada faktor cuaca dan pola panen yang tidak merata.

Selain itu, kenaikan harga kopi bubuk turut berkontribusi terhadap inflasi, yang sebagian besar dipengaruhi oleh meningkatnya harga global. Di samping itu, bawang putih, telur ayam ras, tomat, dan sigaret kretek mesin juga memberikan andil terhadap inflasi dalam beberapa periode. Hal ini mengindikasikan bahwa selain bahan pangan pokok, produk-produk konsumsi lainnya, termasuk rokok, turut berperan dalam dinamika pergerakan harga di Lampung.

Sebaliknya, dari sisi deflasi, cabai merah menjadi komoditas dengan frekuensi andil terbanyak, yakni 6 bulan, dengan rata-rata andil deflasi sebesar 0,168% (*mtm*) sebagaimana tampak pada tabel 2.5. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun cabai merah sering menjadi penyebab inflasi, pada saat panen raya, harganya dapat mengalami penurunan signifikan akibat meningkatnya pasokan di pasar.

Tabel 2.5. Sepuluh Komoditas Dengan Frekuensi Andil Deflasi Bulanan Terbanyak di Lampung Selama Tahun 2024

No	Komoditas Deflasi	Frekuensi Top 10 Andil Deflasi(<i>mtm</i>)	Rata-rata Andil Deflasi (<i>mtm</i>)
1.	Cabai Merah 🌶️	6	0,168%
2.	Cabai Rawit 🌶️	5	0,055%
3.	Tomat 🍅	5	0,062%
4.	Beras 🍚	5	0,172%
5.	Daging Ayam Ras 🍗	4	0,049%
6.	Telur Ayam Ras 🥚	4	0,049%
7.	Bawang Putih 🧄	4	0,025%
8.	Bawang Merah 🧄	4	0,215%
9.	Kacang Panjang 🥜	3	0,017%
10.	Cumi-cumi 🦑	2	0,025%

Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Komoditas lain yang sering mengalami deflasi adalah cabai rawit, tomat, beras, dan daging ayam ras. Penurunan harga beras yang terjadi dalam beberapa bulan menandakan adanya fase panen yang mampu menekan harga, meskipun di bulan-bulan lain komoditas ini berkontribusi terhadap inflasi. Hal serupa juga terjadi pada bawang merah, yang menunjukkan bahwa harga bawang merah

cenderung naik saat pasokan terbatas, tetapi mengalami deflasi yang cukup dalam ketika memasuki fase surplus pasokan.

Pergerakan harga di Provinsi Lampung sangat dipengaruhi oleh dinamika pasokan dan permintaan terhadap komoditas pangan strategis. Komoditas dengan tingkat volatilitas tinggi, seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan beras, kerap menjadi faktor utama dalam mendorong inflasi maupun deflasi bulanan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang terencana dan efektif guna mengendalikan fluktuasi harga serta menjaga stabilitas inflasi di wilayah ini.

2.1.3.2 Inflasi Tahunan

Pada Desember 2024, tingkat inflasi di Provinsi Lampung tercatat sebesar 1,57% (*yoy*), sejajar dengan inflasi nasional yang berada pada level yang sama. Sepanjang tahun 2024, inflasi di Lampung tetap berada dalam kisaran sasaran yang ditetapkan, yaitu $2,5 \pm 1\%$. Tren penurunan inflasi yang konsisten dalam beberapa bulan terakhir mencerminkan efektivitas berbagai kebijakan pengendalian harga yang telah diterapkan, khususnya melalui langkah-langkah yang dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung.

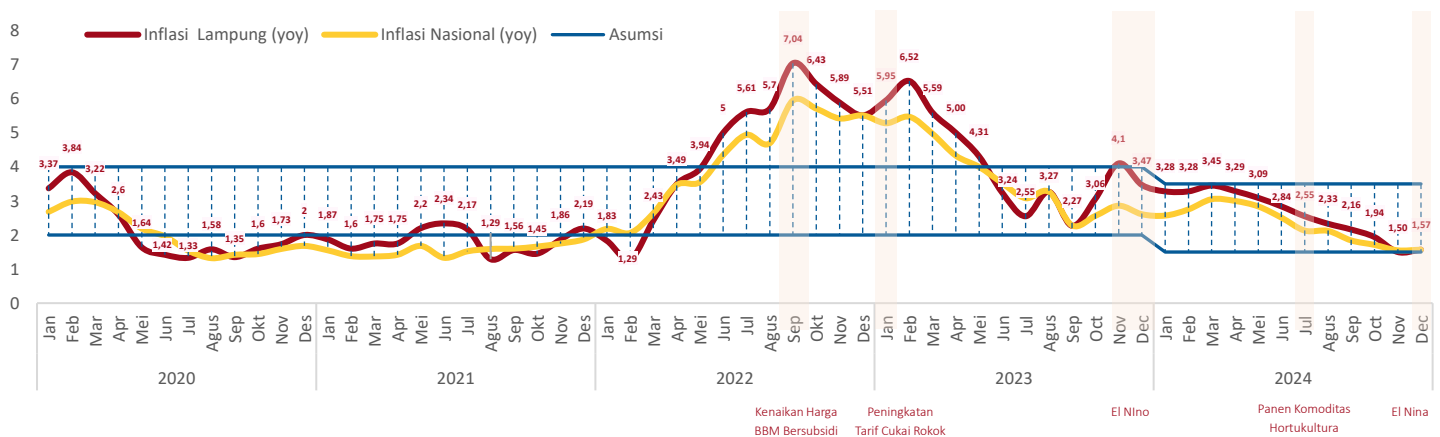
Meskipun stabilitas harga menunjukkan keberhasilan dalam mengendalikan inflasi, kondisi ini tetap perlu dicermati lebih lanjut. Inflasi pada Desember 2024 tercatat lebih rendah dibandingkan dengan bulan yang sama dalam empat tahun terakhir. Di satu sisi, tren inflasi yang terkendali menunjukkan bahwa upaya stabilisasi harga berjalan efektif. Namun, di sisi lain, inflasi yang terlalu rendah dapat mengindikasikan adanya potensi pelemahan daya beli masyarakat atau perlambatan aktivitas ekonomi. Salah satu indikator yang menguatkan analisis ini adalah pertumbuhan konsumsi rumah tangga (RT) tahun 2024 yang tercatat sebesar 4,84% (*ctc*), lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 5,15% (*ctc*). Perlambatan ini dapat mencerminkan kehati-hatian masyarakat dalam melakukan konsumsi,

keterbatasan peningkatan pendapatan, atau dampak dari kondisi ekonomi yang masih menyesuaikan dengan berbagai faktor eksternal dan domestik.

Memasuki tahun 2023, tekanan inflasi masih berlanjut dengan faktor pemicu yang berbeda. Pada Jika melihat tren historis inflasi dalam periode 2020 – 2024, inflasi tertinggi tercatat pada tahun 2022. Kenaikan inflasi pada tahun tersebut didorong oleh beberapa faktor utama, antara lain tekanan harga global, kebijakan pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM), serta peningkatan permintaan

masyarakat seiring pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Salah satu faktor signifikan yang berkontribusi terhadap lonjakan inflasi di tahun 2022 adalah penyesuaian harga BBM berdasarkan Keputusan Menteri ESDM. Kebijakan ini menyebabkan harga pertalite naik sebesar 30,72%, harga solar meningkat 32,04%, dan harga pertamax (non-subsidi) mengalami kenaikan 16,0%. Dampak dari kebijakan ini tidak hanya terbatas pada sektor energi, tetapi juga berimbas pada harga komoditas lainnya akibat meningkatnya biaya distribusi barang dan jasa, yang selanjutnya mendorong inflasi secara lebih luas.

Grafik 2.10. Pergerakan Laju Inflasi Tahunan Lampung dan Nasional Tahun 2022 – 2024



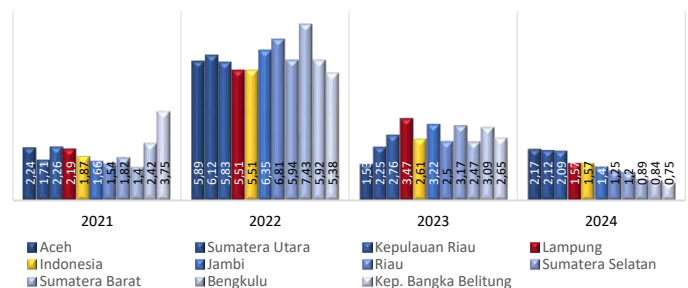
Sumber: BPS dan Bank Indonesia, 2025 (diolah)

Memasuki tahun 2023, tekanan inflasi masih berlanjut dengan faktor pemicu yang berbeda. Pada triwulan I 2023, lonjakan inflasi terutama disebabkan oleh kenaikan tarif cukai rokok sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 192/PMK.010/2022. Sementara itu, di penghujung tahun 2023, inflasi menghadapi tantangan tambahan dari fenomena El Niño, yang berdampak pada produksi komoditas pertanian dan berpotensi mengganggu stabilitas harga pangan.

Secara regional, inflasi di Lampung pada Desember 2024 menempati peringkat keempat tertinggi di Pulau Sumatera sebagaimana tampak pada Grafik 2.11. Sementara itu, enam provinsi lainnya di wilayah Sumatera mencatat tingkat inflasi yang lebih rendah, bahkan berada di bawah rentang sasaran inflasi $2,5 \pm 1\%$. Perbedaan dinamika inflasi

antarprovinsi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ketersediaan pasokan, pola konsumsi masyarakat, serta efektivitas kebijakan pengendalian harga yang diterapkan di masing-masing daerah.

Grafik 2.11. Pergerakan Laju Inflasi Lampung, Provinsi di Regional Sumatera dan Nasional (yoy)



sepanjang tahun 2024 didominasi oleh bahan pangan utama dan barang konsumsi strategis. Kopi bubuk dan sigaret kretek mesin tercatat sebagai komoditas dengan frekuensi andil inflasi tertinggi, masing-masing sebanyak 9 kali dalam setahun, dengan rata-rata andil inflasi sebesar 0,248% (yoy) dan 0,203% (yoy). Kenaikan harga kopi dipengaruhi oleh lonjakan harga kopi global yang meningkat tajam, sementara kenaikan harga sigaret kretek mesin didorong oleh penerapan tarif pajak rokok sebesar 10% dari cukai rokok sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 143/PMK/2023.

Tabel 2.6. Sepuluh Komoditas Dengan Frekuensi Andil Inflasi Tahunan Terbanyak di Lampung Selama Tahun 2024

No	Komoditas Inflasi	Frekuensi Top 10 Andil Inflasi(yoy)	Rata-rata Andil Inflasi (yoy)
1.	Kopi Bubuk 🍵	9	0,248%
2.	Sigaret Kretek Mesin 🚬	9	0,203%
3.	Beras 🍚	8	0,639%
4.	Bawang Putih 🧄	6	0,242%
5.	Bawang Merah 🧄	6	0,372%
6.	Emas Perhiasan 💎	6	0,187%
7.	Cabai Merah 🌶️	4	0,193%
8.	Gula Pasir 🍬	4	0,128%
9.	Akademi/Perguruan Tinggi 🎓	4	0,268%
10.	Tomat 🍅	2	0,140%

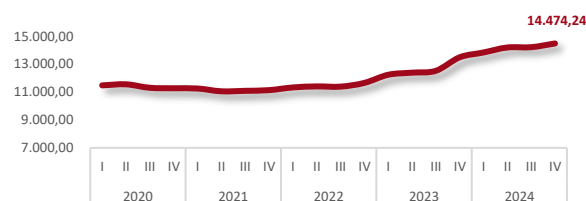
Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Beras, sebagai bahan pangan pokok, memberikan tekanan inflasi yang signifikan dengan frekuensi andil inflasi sebanyak 8 kali dalam setahun dan rata-rata andil inflasi sebesar 0,639% (yoy), tertinggi di antara komoditas lainnya. Kenaikan harga beras pada tahun 2024 melanjutkan tren tahun sebelumnya, yang dipicu oleh dampak El Niño yang menyebabkan penurunan produktivitas di beberapa wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa fluktuasi harga beras, baik yang dipengaruhi oleh faktor produksi domestik, distribusi, maupun impor, memiliki dampak besar terhadap stabilitas inflasi di Lampung.

Pada triwulan IV 2024, rata-rata harga beras mencapai Rp14.474,24, mencerminkan kenaikan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Tren ini selaras dengan tekanan inflasi yang tinggi dari komoditas beras, sebagaimana ditunjukkan oleh frekuensi andil inflasi tahunan yang cukup dominan.

Grafik 2.12. Perkembangan Harga Beras di Lampung Tahun 2020 – 2024 (Rupiah)



Sumber: PIHPS Bank Indonesia Regional Lampung (diolah)

Lonjakan harga beras terutama disebabkan oleh penurunan produktivitas di beberapa wilayah akibat faktor cuaca, serta ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan. Kondisi ini juga tercermin dalam kontraksi pertumbuhan lapangan usaha pertanian sebesar 2,09% (ctc).

Meskipun Lampung merupakan salah satu lumbung padi nasional, tingginya harga beras menunjukkan adanya tantangan dalam distribusi dan stabilitas pasokan di tingkat lokal. Hal ini menegaskan perlunya kebijakan yang lebih efektif dalam menjaga keseimbangan pasar dan mendukung ketahanan pangan di daerah.

Selain itu, beberapa komoditas hortikultura seperti bawang putih, bawang merah, cabai merah, dan tomat juga berkontribusi terhadap inflasi tahunan dengan frekuensi andil antara 2 hingga 6 kali dalam setahun. Fluktuasi harga komoditas ini umumnya disebabkan oleh pola panen musiman, ketergantungan pasokan dari luar daerah, serta faktor cuaca yang memengaruhi produktivitas. Misalnya, bawang merah memiliki rata-rata andil inflasi sebesar 0,372%, menandakan adanya tekanan harga yang cukup besar sepanjang tahun.

Di sisi lain, kenaikan harga emas perhiasan yang menyumbang inflasi sebanyak 6 kali dalam setahun menunjukkan pengaruh faktor eksternal, seperti pergerakan harga emas global dan preferensi masyarakat terhadap investasi berbasis emas sebagai lindung nilai (*hedging*). Sementara itu, biaya pendidikan tinggi yang masuk dalam daftar 10 besar komoditas penyumbang inflasi dengan frekuensi

andil sebanyak 4 kali mencerminkan dampak dari kenaikan biaya pendidikan terhadap tingkat inflasi di Lampung.

Pada September–Desember 2024, inflasi di kelompok Pendidikan melonjak, dipengaruhi faktor musiman dan struktural. Pada Desember, inflasi sektor ini mencapai 5,67% (yoy) dengan andil 0,36% (yoy), mencerminkan meningkatnya pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kenaikan SPP dan UKT menjadi pemicu utama, menegaskan kontribusi signifikan sektor pendidikan terhadap inflasi.

Stabilitas inflasi di Provinsi Lampung sepanjang tahun 2024 menunjukkan efektivitas berbagai kebijakan pengendalian harga, meskipun masih terdapat tantangan dalam beberapa komoditas strategis, terutama tanaman pangan dan hortikultura. Dinamika inflasi yang dipengaruhi oleh faktor musiman, ketergantungan pasokan, serta kondisi cuaca ekstrem menegaskan perlunya strategi pengendalian yang lebih adaptif dan terintegrasi. Dalam jangka panjang, optimalisasi produksi pangan lokal, perbaikan sistem distribusi, serta penguatan koordinasi antar instansi menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan. Dengan langkah-langkah strategis yang tepat, diharapkan inflasi di Lampung tetap terkendali, daya beli masyarakat terjaga, dan pertumbuhan ekonomi daerah dapat terus berlanjut secara berkelanjutan.

2.1.3.3 Pengendalian Inflasi

Dalam rangka menjaga inflasi di Lampung berada pada level sasaran $2,5 \pm 1$ % di tahun 2024, adapun beberapa langkah yang telah dilakukan dan opsi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Regional Lampung dan *counterparts* Kemenkeu Satu regional Lampung, BI, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk mengendalikan inflasi, antara lain:

- Bank Indonesia mempertahankan *BI 7-day Repo Rate* atau suku bunga acuan pada level 6,00% – 6,25% di tahun 2024. Kebijakan ini diambil

sebagai langkah strategis untuk memastikan inflasi tetap berada dalam kisaran target yang telah ditetapkan.

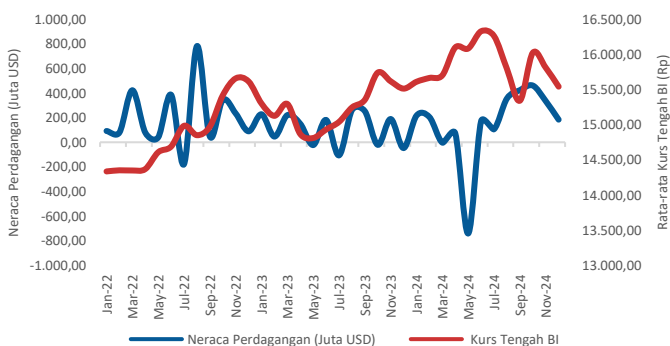
- Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Provinsi Lampung memiliki peran strategis melalui strategi 4K, yaitu Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif.
 - a. Ketersediaan Pasokan: Mengoptimalkan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga;
 - b. Keterjangkauan Harga: Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh Bulog, operasi pasar, bantuan sosial, serta inisiatif Toko Operasi Pasar (TOP) sebagai langkah strategis dalam menjaga keseimbangan harga komoditas dan memperkuat ketahanan pangan di daerah;
 - c. Kelancaran Distribusi: mendorong kemitraan industri-petani, memperluas KAD, serta mengoptimalkan infrastruktur transportasi dan logistik daerah
 - d. Komunikasi yang efektif: Penguatan koordinasi antara TPID dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), koordinasi dengan TPIP, pemantauan harga pangan, dan sistem *early warning* untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah..
- Pengendalian inflasi pada komoditas tanaman pangan dan hortikultura memerlukan koordinasi antara Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, dan Biro Perekonomian Provinsi Lampung dalam menerapkan kebijakan diversifikasi komoditas untuk menjaga stabilitas harga. Selain itu, kerja sama dengan BMKG diperlukan untuk memitigasi dampak cuaca ekstrem melalui pemanfaatan data cuaca guna mendukung strategi adaptasi, seperti penyesuaian pola tanam, pengelolaan sumber daya air, dan penggunaan teknologi pertanian berbasis iklim.
- Sebagai salah satu lumbung padi nasional, tingginya harga beras di Lampung menunjukkan

perlunya penguatan kebijakan dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga di tingkat lokal. Pemerintah daerah perlu meningkatkan koordinasi antara Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, dan Bulog untuk memastikan ketersediaan beras yang stabil sepanjang tahun, terutama saat terjadi gangguan produksi akibat faktor cuaca. Selain itu, optimalisasi rantai pasok melalui perbaikan infrastruktur distribusi dapat membantu menekan biaya logistik dan mencegah disparitas harga antarwilayah. Peningkatan produktivitas petani juga menjadi langkah strategis yang dapat ditempuh, misalnya melalui penyediaan akses terhadap teknologi pertanian modern, pupuk bersubsidi, serta irigasi yang lebih efisien.

2.1.4 Nilai Tukar

Nilai tukar adalah sejumlah uang dari suatu mata uang tertentu yang dapat dipertukarkan dengan unit mata uang negara lain. Analisis nilai tukar dilakukan untuk mengetahui nilai mata uang Rupiah terhadap mata uang asing (dalam hal ini dolar AS) yang mempengaruhi indikator ekonomi salah satunya yaitu Neraca Perdagangan Luar Negeri di Provinsi Lampung. Data Ekspor dan Impor Lampung dalam USD tersedia untuk tahun 2022 sampai dengan 2024, untuk tahun sebelumnya terdapat keterbatasan untuk pengambilan data.

Grafik 2.13. Tren Rata-Rata Kurs Tengah Rupiah terhadap US\$1 dan Neraca Perdagangan Luar Negeri Lampung (juta USD) per bulan (2022 – 2024)

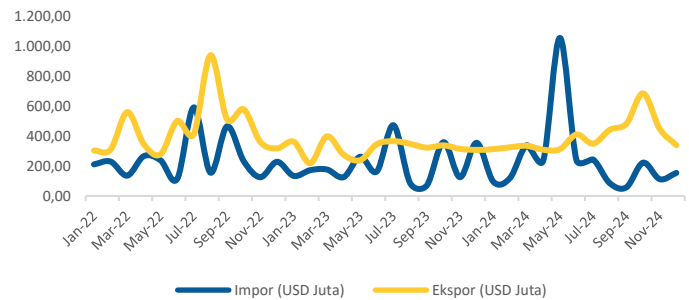


Sumber: Bank Indonesia dan DJBC Sumbagbar, 2025 (diolah)

Pada periode 2022–2023, nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS bergerak dalam rentang Rp14.335,24 hingga Rp15.741,23, sebagaimana

ditampilkan pada grafik 2.13. Memasuki Triwulan IV 2024, nilai tukar Rupiah rata-rata berada di Rp15.792,40, terapresiasi terhadap dolar AS dibandingkan Triwulan III 2024 yang tercatat sebesar Rp15.798,69. Sementara itu, rata-rata nilai tukar sepanjang 2024 mencapai Rp15.855,45, mengalami kenaikan 4,06% (yoy) dibandingkan dengan 2023 yang tercatat sebesar Rp15.236,89.

Grafik 2.14. Tren Ekspor, Impor (juta USD) Lampung Tahun 2022 – 2024



Sumber: Bank Indonesia dan DJBC Sumbagbar, 2025 (diolah)

Pada triwulan IV 2024, total ekspor Lampung sebesar 1.467,49 juta USD (rata-rata kurs tengah rupiah sebesar Rp15.792,40) naik 53,37% (yoy) dibandingkan triwulan IV 2024 yang tercatat sebesar 956,80 juta USD (rata-rata kurs tengah rupiah sebesar Rp15.624,00), dan meningkat 15,57% (mtm) dibandingkan triwulan III 2024 yang sebesar 1.269,78 juta USD (rata-rata kurs tengah rupiah sebesar Rp15.798,69).

Apresiasi nilai tukar Rupiah pada Triwulan IV 2024 berpotensi menekan daya saing ekspor, karena harga produk dalam negeri menjadi relatif lebih mahal di pasar global. Namun, faktor lain seperti permintaan global dan fluktuasi harga komoditas juga berperan dalam menentukan kinerja ekspor. Pada periode ini, ekspor Lampung tetap tumbuh, didorong oleh peningkatan ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) dan Kopi Robusta. Kenaikan harga kedua komoditas tersebut di pasar global menjadi faktor utama yang menopang nilai ekspor, mengimbangi dampak dari pergerakan nilai tukar.

Pada Triwulan IV 2024, total impor Lampung tercatat sebesar 486,82 juta USD, mengalami penurunan 41,78% (yoy) dibandingkan Triwulan IV 2023, yang mencapai 836,16 juta USD. Namun, secara bulanan (mtm), impor menunjukkan

peningkatan sebesar 26,65% dibandingkan Triwulan III 2024, yang tercatat sebesar 384,39 juta USD.

Pergerakan nilai tukar dapat berdampak pada impor, baik meningkatkan maupun menurunkan nilainya, tergantung pada dinamika harga dan permintaan. Peningkatan impor pada Triwulan IV 2024 dibandingkan Triwulan III 2024 terutama didorong oleh kenaikan impor bahan baku penolong, barang konsumsi, dan barang modal. Namun, secara tahunan, penurunan impor yang signifikan terutama disebabkan oleh turunnya impor bahan baku penolong sebesar 51,00% (yoy). Pada Triwulan IV 2023, impor bahan baku penolong mencapai 767,37 juta USD, sementara pada Triwulan IV 2024, angkanya hanya 376,03 juta USD. Hal ini mengindikasikan berkurangnya kebutuhan industri terhadap bahan baku tertentu, yang bisa disebabkan oleh faktor seperti perlambatan produksi atau substitusi dengan bahan lokal.

2.2 ANALISIS INDIKATOR KESEJAHTERAAN

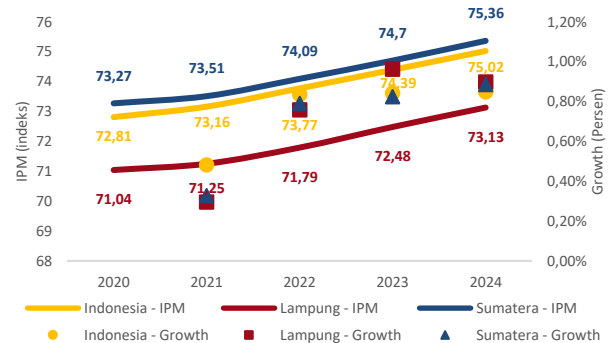
Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama pembangunan ekonomi dan cita-cita negara, sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.. Bagian ini akan menjelaskan beberapa indikator kesejahteraan, antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Kemiskinan, Tingkat Ketimpangan (Gini Rasio), Kondisi Ketenagakerjaan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Nilai Tukar Petani (NTP), serta Nilai Tukar Nelayan (NTN).

2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. IPM terbentuk dari tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup yang layak. Data yang akan dibahas pada bagian ini yaitu *data time series* dari tahun 2020 s.d. 2024 yang mana komponen Umur

Harapan Hidup (UHH) disesuaikan menggunakan UHH dari hasil *Long Form* SP2020.

Grafik 2.15. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Lampung, Rata-rata Regional Sumatera, dan Nasional Tahun 2020 – 2024



Sumber: BPS, 2024 (diolah)

Kemajuan IPM di Provinsi Lampung dari tahun 2020 hingga 2024 mencerminkan upaya berkelanjutan dalam peningkatan kualitas hidup. Dengan pencapaian IPM tahun 2024 yang mencapai 73,13, terjadi peningkatan signifikan sebesar 0,90% dibandingkan tahun sebelumnya. Kategori “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$) yang telah dicapai menunjukkan bahwa Lampung sedang berada dalam jalur yang tepat. Rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 0,73% selama periode tersebut memberikan harapan untuk terus mengakselerasi pembangunan manusia.

Jika dilihat berdasarkan grafik 2.15, IPM Provinsi Lampung mencatatkan angka yang lebih rendah jika dibandingkan level regional Sumatera dan nasional, dengan IPM Sumatera sedikit lebih tinggi daripada nasional. Walaupun demikian, *growth* IPM Lampung terus mengalami percepatan dari tahun sebelumnya yang menandakan pembangunan manusia di Lampung terus mengalami kemajuan.

Dalam periode 2020 hingga 2024, salah satu komponen utama Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Lampung, yaitu Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH), mencatat capaian yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional maupun regional Sumatera sebagaimana tampak pada tabel 2.7. Pencapaian ini mencerminkan peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan di daerah. Namun, beberapa indikator lainnya masih menunjukkan tantangan yang perlu mendapat perhatian. Rata-

rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Lampung masih berada di bawah rata-rata nasional dan regional Sumatera, yang dapat disebabkan oleh keterbatasan akses pendidikan di beberapa wilayah, terutama daerah terpencil dan faktor lainnya. Demikian pula, Pengeluaran per Kapita di Lampung yang masih lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional dan regional Sumatera menunjukkan bahwa daya beli masyarakat relatif lebih lemah. Hal ini dapat disebabkan oleh struktur ekonomi daerah yang masih didominasi oleh sektor pertanian dengan nilai tambah yang terbatas, sehingga pendapatan masyarakat cenderung lebih rendah dibandingkan daerah dengan sektor industri dan jasa yang lebih berkembang.

Tabel 2.7. Komponen Pembentuk IPM Lampung, Rata-rata Regional Sumatera, dan Nasional Tahun 2020 – 2024

Wilayah	Periode	UHH	HLS	RLS	Pengeluaran per Kapita (Juta Rp/Orang/Tahun)
Sumatera	2020	73,35	13,12	8,85	10,98
	2021	73,42	13,2	8,9	11,04
	2022	73,67	13,21	8,99	11,41
	2023	73,9	13,28	9,09	11,75
	2024	74,12	13,35	9,18	12,19
	Rata-rata	73,69	13,23	9,00	11,47
Lampung	2020	73,66	12,65	8,05	9,98
	2021	73,73	12,73	8,08	10,04
	2022	73,95	12,74	8,18	10,34
	2023	74,17	12,77	8,29	10,77
	2024	74,39	12,78	8,36	11,26
	Rata-rata	73,98	12,73	8,19	10,48
Indonesia	2020	73,37	12,98	8,48	11,01
	2021	73,46	13,08	8,54	11,16
	2022	73,7	13,1	8,69	11,48
	2023	73,93	13,15	8,77	11,90
	2024	74,15	13,21	8,85	12,34
	Rata-rata	73,7	13,1	8,7	11,58

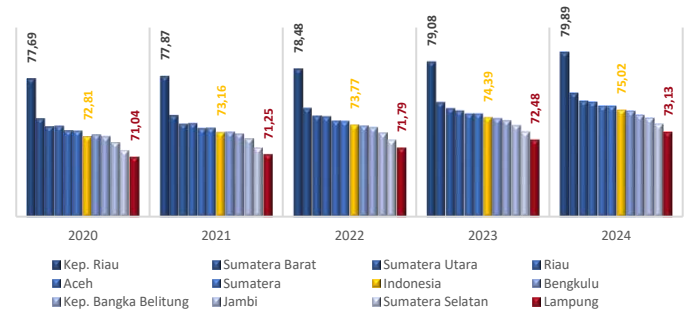
Sumber: BPS, 2024 diolah

Dicermati berdasarkan angka IPM masing-masing Provinsi di Regional Sumatera sebagaimana dapat dilihat pada grafik 2.16, secara nilai Lampung tercatat sebagai provinsi dengan IPM terendah di wilayah ini sepanjang periode 2020 hingga 2024. Namun demikian, capaian tersebut tetap berada dalam kategori tinggi, sejajar dengan provinsi lain di Sumatera.

Selama periode 2020 hingga 2024, rata-rata laju pertumbuhan IPM Lampung tertinggi ke-2 setelah Sumatera Selatan. Tren pertumbuhan yang positif ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat, yang jika terus berlanjut secara

konsisten, berpotensi membawa Lampung menyusul capaian IPM provinsi lain di Sumatera dalam beberapa tahun ke depan.

Grafik 2.16. IPM Regional Sumatera Tahun 2022 – 2024



Sumber: BPS, 2024 (diolah)

IPM Lampung tahun 2024 yang meningkat dibanding dari tahun 2023 didorong pada semua dimensi IPM, baik kualitas Kesehatan, Pendidikan, maupun Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan.

Pencapaian Umur Harapan Hidup (UHH) di Lampung menunjukkan bahwa kesehatan masyarakat mengalami perbaikan yang nyata. UHH di Lampung meningkat dari 73,66 tahun pada tahun 2020 menjadi 74,39 tahun pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,25% per tahun. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan inisiatif kesehatan yang telah dilakukan, tetapi juga menyoroti perlunya perhatian lebih terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan masyarakat. Upaya terus-menerus untuk meningkatkan fasilitas kesehatan di daerah terpencil akan menjadi langkah kunci dalam menjaga momentum positif ini.

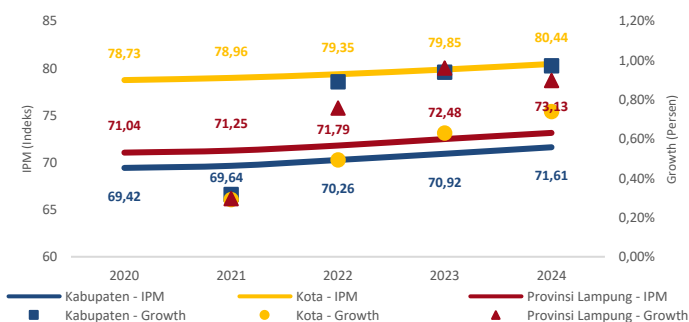
Dimensi pengetahuan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan aspek yang perlu mendapat perhatian serius guna mendorong kemajuan yang lebih menyeluruh. Meskipun Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) terus meningkat, capaian keduanya masih berada di bawah rata-rata nasional dan regional Sumatera.

Pada tahun 2020, HLS tercatat sebesar 12,65 tahun dan meningkat menjadi 12,78 tahun pada tahun 2024, sementara RLS naik dari 8,05 tahun menjadi 8,36 tahun dalam periode yang sama. Tren ini menunjukkan adanya progres, namun tantangan

tetap ada, terutama dalam disorientasi tujuan pendidikan di tingkat menengah dan tinggi. Tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan masih harus ditingkatkan. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung akses dan kualitas pendidikan, serta upaya peningkatan kesadaran masyarakat, sangat diperlukan untuk mendorong perubahan pola pikir dan meningkatkan partisipasi pendidikan di jenjang yang lebih tinggi.

Peningkatan pengeluaran riil per kapita menjadi indikator positif kualitas hidup masyarakat Lampung. Pada tahun 2024, pengeluaran riil mencapai Rp11,26 juta per tahun, naik 4,53% dari tahun sebelumnya, mencerminkan pemulihan ekonomi dan perbaikan standar hidup. Namun, capaian ini juga menunjukkan tantangan dalam distribusi pendapatan yang adil, dengan disparitas kemiskinan yang masih menjadi isu utama. Tingginya angka kemiskinan dapat berdampak pada pendapatan per kapita serta menghambat akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, yang merupakan aspek fundamental dalam pembangunan manusia.

Grafik 2.17. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Lampung Cluster Pemerintah Daerah Tahun 2020 – 2024



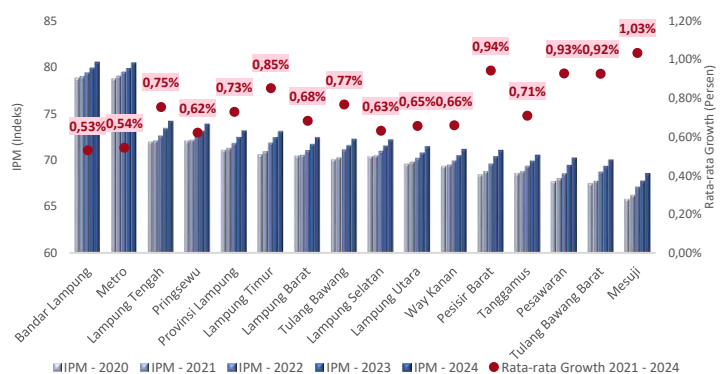
Sumber: BPS, 2024 (diolah)

Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara kabupaten dan kota di Lampung menunjukkan dinamika yang menarik dalam pembangunan regional. Secara keseluruhan, IPM di kota cenderung lebih tinggi dibandingkan IPM di kabupaten, sebagaimana ditampilkan dalam grafik 2.17. Namun, jika dilihat dari sisi pertumbuhan, laju pertumbuhan IPM di kabupaten justru lebih tinggi dibandingkan kota. Hal ini mengindikasikan adanya

upaya perbaikan kualitas hidup di wilayah kabupaten yang semakin progresif, meskipun masih terdapat kesenjangan dibandingkan dengan kota.

Seiring dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi, seluruh kabupaten/kota di Lampung juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2024, terdapat 2 kota yang mengalami perubahan status capaian IPM, yakni Kota Bandar Lampung dan Kota Metro, yang naik ke kategori “sangat tinggi”. Selain itu, tiga Kabupaten yakni Tanggamus, Pesawaran, dan Tulang Bawang Barat berhasil meningkat ke kategori “tinggi”.

Grafik 2.18. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Per Kabupaten/Kota di Lampung Tahun 2020 – 2024

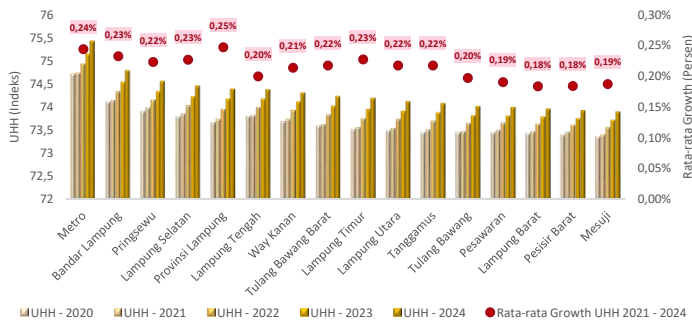


Sumber: BPS, 2024 (diolah)

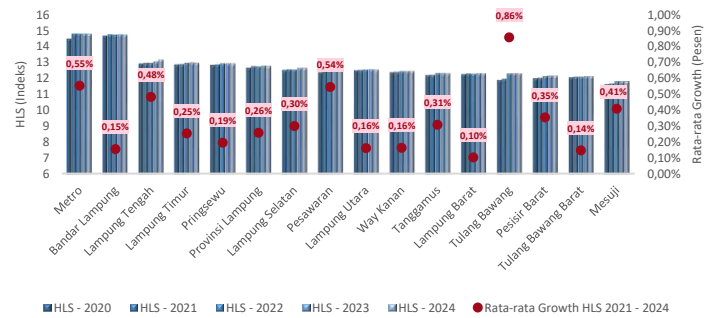
Dengan demikian, jumlah Kabupaten/Kota dengan status “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$) pada tahun 2024 mencapai 12 daerah. Sementara itu, Kabupaten Mesuji menjadi satu-satunya Kabupaten yang masih berada dalam kategori “sedang” ($60 \leq \text{IPM} < 70$). Perkembangan IPM Kabupaten/Kota Lampung dapat dilihat pada grafik 2.18.

Meskipun IPM Kabupaten Mesuji merupakan yang terendah di Provinsi Lampung, rata-rata pertumbuhan IPM di Kabupaten ini pada periode 2020 hingga 2024 menunjukkan kinerja yang paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Lampung, yaitu mencapai 1,03%. Hal ini mencerminkan adanya upaya yang signifikan dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat Mesuji, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan dalam pembangunan sosial dan ekonomi.

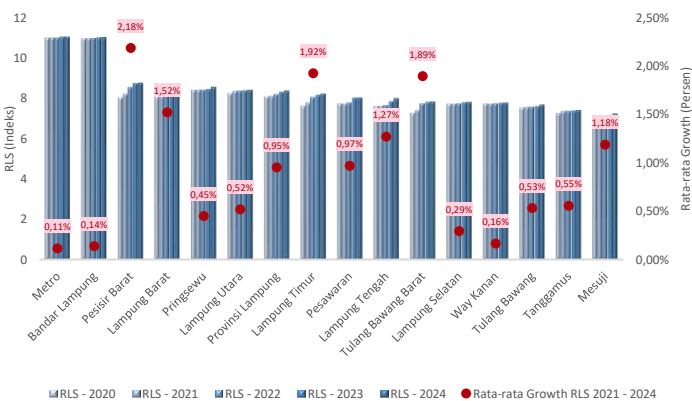
Grafik 2.19. Dimensi Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten/Kota Lampung Tahun 2020 – 2024



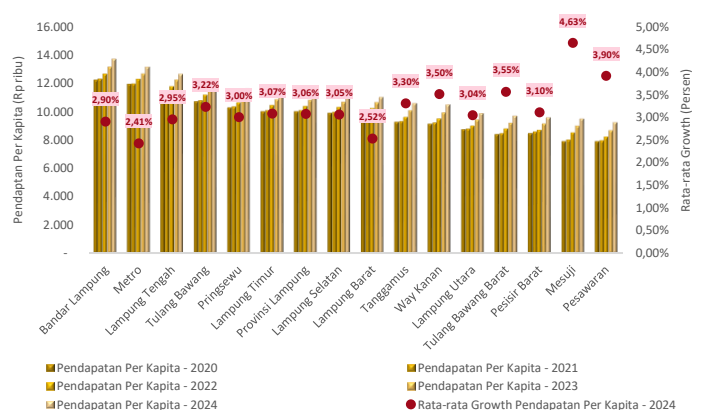
Grafik 2.20. Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten/Kota Lampung Tahun 2020 – 2024



Grafik 2.21. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten/Kota Lampung Tahun 2020 – 2024



Grafik 2.22. Dimensi Pendapatan Per Kapita (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) Kabupaten/Kota Lampung Tahun 2020 – 2024



Sumber: BPS, 2024 (diolah)

Kota Metro mencatat capaian Umur Harapan Hidup (UHH) tertinggi di Provinsi Lampung, sementara Kabupaten Mesuji memiliki capaian terendah. Daerah dengan UHH di atas rata-rata provinsi meliputi Kota Metro, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pringsewu, dan Kabupaten Lampung Tengah. Untuk meningkatkan UHH secara merata, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pemerataan fasilitas kesehatan, khususnya di wilayah dengan capaian UHH yang masih rendah. Selain penguatan infrastruktur kesehatan, ketersediaan tenaga medis dan tenaga pendukung juga harus ditingkatkan baik dari segi jumlah maupun distribusinya agar layanan kesehatan dapat diakses secara lebih luas oleh masyarakat.

Di sektor pendidikan, Harapan Lama Sekolah (HLS) tertinggi juga dicapai oleh Kota Metro, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Mesuji. Beberapa daerah dengan HLS di atas rata-rata provinsi

mencakup Kota Metro, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, dan Kabupaten Pringsewu. Sementara itu, pertumbuhan HLS tertinggi pada periode 2020–2024 tercatat di Kabupaten Tulang Bawang dengan 0,86%, disusul oleh Kabupaten Mesuji dengan pertumbuhan 0,41% meskipun masih memiliki capaian HLS terendah di provinsi.

Untuk Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Kota Metro kembali menempati posisi tertinggi, sedangkan Kabupaten Mesuji memiliki capaian terendah. Beberapa daerah yang memiliki RLS di atas rata-rata provinsi meliputi Kota Metro, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pringsewu, dan Kabupaten Lampung Utara. Adapun pertumbuhan RLS tertinggi pada periode 2020–2024 dicapai oleh Kabupaten Pesisir Barat dengan 2,18%.

Peningkatan HLS dan RLS dapat didorong melalui kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan produktif, terutama dalam alokasi anggaran pendidikan. Pemerintah daerah diharapkan terus mendukung pembangunan infrastruktur pendidikan yang merata, termasuk peningkatan sarana dan prasarana pendidikan formal maupun nonformal seperti program kejar paket A, B, dan C. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan harus diperkuat melalui sosialisasi program wajib belajar 12 tahun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Di Kabupaten Mesuji, yang masih memiliki angka HLS dan RLS rendah dibandingkan daerah lain, pemerintah akan bekerja sama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk mempercepat program kejar paket A, B, dan C guna meningkatkan RLS. Selain itu, pemerintah akan menyusun *By Name By Address* (BNBA) per keluarga untuk memperkuat data HLS serta memastikan anak usia 7 hingga 25 tahun tetap bersekolah. Jika terdapat kasus putus sekolah, pemerintah akan mendorong upaya re-integrasi pendidikan bagi mereka.

Dari segi ekonomi, Kota Bandar Lampung mencatat Pendapatan Per Kapita tertinggi di Provinsi Lampung, sementara Kabupaten Pesawaran memiliki capaian terendah. Kabupaten/kota dengan Pendapatan Per Kapita di atas rata-rata provinsi meliputi Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Pringsewu, dan Kabupaten Lampung Timur. Menariknya, rata-rata pertumbuhan Pendapatan Per Kapita tertinggi pada periode 2020 – 2024 justru dicapai oleh Kabupaten Mesuji dengan pertumbuhan sebesar 4,63%, menunjukkan adanya peningkatan daya beli dan aktivitas ekonomi yang lebih dinamis di daerah tersebut.

Dengan berbagai capaian ini, sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kualitas hidup, akses pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi di Provinsi Lampung. Langkah-langkah

strategis dan kebijakan yang berbasis data akan sangat menentukan keberlanjutan pembangunan.

2.2.2 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan pada dasarnya berkaitan erat dengan rendahnya taraf hidup, yang mencerminkan kondisi di mana penduduk mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Berdasarkan *Basic Needs Approach* yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mengukur kemiskinan, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan secara ekonomi untuk mencukupi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan, yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

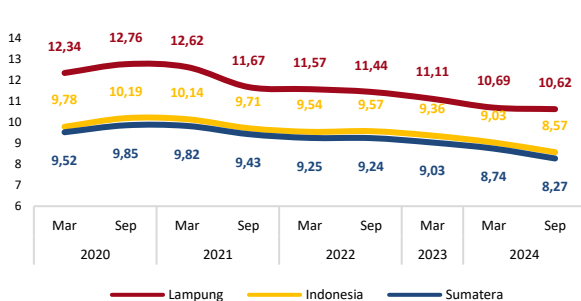
Pada bagian ini, pembahasan akan difokuskan pada tingkat kemiskinan berdasarkan data terbaru yang tersedia, yaitu hingga September 2024. Perhitungan tingkat kemiskinan untuk tahun 2023 hanya dilakukan pada periode Maret 2023, sehingga data tingkat kemiskinan untuk periode September 2023 tidak tersedia.

Pada September 2024, Garis Kemiskinan di Lampung mengalami kenaikan, menunjukkan tekanan ekonomi yang lebih besar pada masyarakat. Garis Kemiskinan tercatat sebesar Rp599.018 per kapita per bulan, meningkat 2,13% dibandingkan Maret 2024 dan meningkat 7,16% dibandingkan Maret 2023. Dari jumlah tersebut, 74,64 persen merupakan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan 25,36% persen merupakan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), yang berarti bahwa komoditas makanan memiliki dampak besar terhadap kenaikan garis kemiskinan. Beras tetap menjadi komoditas utama yang berkontribusi, memberikan sumbangan sebesar 18,95% di perkotaan dan 23,18% di perdesaan.

Pada September 2024, jumlah penduduk miskin (Penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Lampung mencapai 939,30 ribu orang atau 10,62%. Sementara itu, tingkat kemiskinan nasional 8,57% dan tingkat kemiskinan regional Sumatera 8,27%,

sedikit di bawah nasional. Persentase penduduk miskin di Lampung masih berada di atas tingkat regional Sumatera dan Nasional sebagaimana tampak pada grafik 2.23.

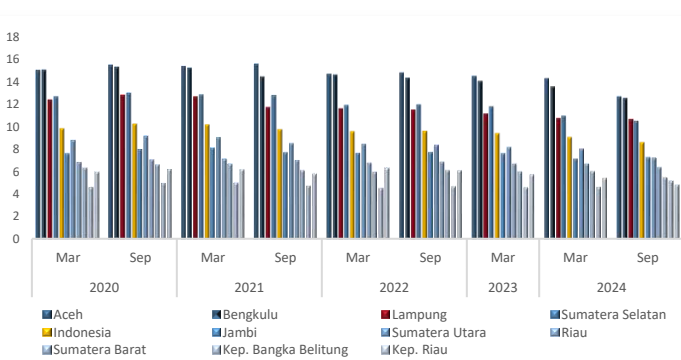
Grafik 2.23. Persentase Penduduk Miskin di Lampung, Regional Sumatera, dan Nasional 2020 – 2024 (persen)



Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Dicermati berdasarkan tingkat kemiskinan masing-masing Provinsi di Regional Sumatera sebagaimana dapat dilihat pada grafik 2.24, Lampung menempati posisi ketiga dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatera pada periode September 2024, naik dari peringkat keempat pada periode sebelumnya. Kondisi ini mencerminkan capaian yang belum optimal dalam upaya penanggulangan kemiskinan dibandingkan wilayah lainnya di regional Sumatera.

Grafik 2.24. Tingkat Kemiskinan Regional Sumatera Tahun 2020 – 2024 (persen)

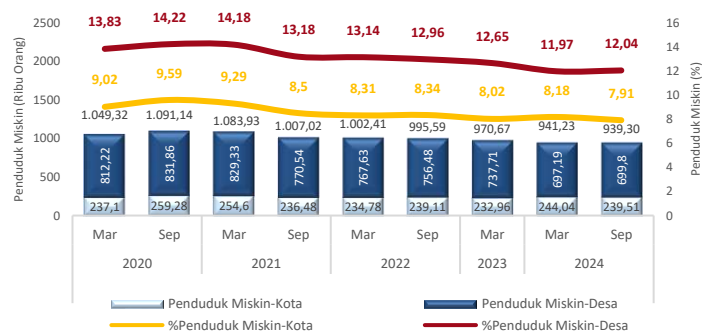


Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Tingkat kemiskinan di Lampung turun, baik dari sisi jumlah maupun persentase penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin pada September 2024 939,30 ribu orang, menurun sebesar 1,9 ribu orang dibandingkan dengan kondisi pada Maret 2024 yang mencapai 941,23 ribu orang sebagaimana tampak pada grafik 2.25. Dari periode Maret 2020 hingga September 2024, jumlah penduduk miskin di

Lampung telah mengalami penurunan sebesar 110,02 ribu orang.

Grafik 2.25. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Lampung Menurut Tempat Tinggal 2020 – 2024



Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Ketimpangan dalam distribusi kemiskinan antara daerah perkotaan dan perdesaan di Lampung menjadi cerminan nyata dari perbedaan kondisi sosial ekonomi di wilayah tersebut. Di kawasan perdesaan, jumlah penduduk miskin tercatat lebih tinggi, mencapai 699,80 ribu orang atau 12,04 persen dari total penduduk perdesaan. Angka ini jauh melampaui jumlah penduduk miskin di perkotaan, yang berada pada angka 239,51 ribu orang atau 7,91 persen dari total penduduk perkotaan.

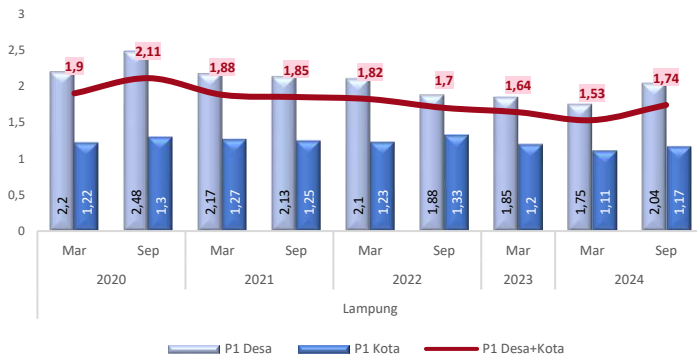
Lebih lanjut, jumlah penduduk miskin di perdesaan bahkan menunjukkan peningkatan sebesar 2,60 ribu orang, dari 697,19 ribu pada Maret 2024 menjadi 699,80 ribu pada September 2024. Persentase kemiskinan di perdesaan juga mengalami kenaikan sebesar 0,07 persen dalam periode yang sama. Kondisi ini menggarisbawahi adanya tantangan yang lebih kompleks dalam penanggulangan kemiskinan di wilayah perdesaan dibandingkan perkotaan.

Kondisi ini mencerminkan perbedaan tantangan yang dihadapi perkotaan dan pedesaan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pemerintah diharapkan dapat memperluas cakupan program-program penanggulangan kemiskinan, terutama di wilayah pedesaan yang masih mengalami keterbatasan akses terhadap peluang ekonomi. Kolaborasi yang harmonis antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi

kunci untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

Persoalan kemiskinan tidak hanya terbatas pada jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi juga mencakup aspek yang lebih mendalam, seperti tingkat kedalaman dan keparahannya. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengukur seberapa

Grafik 2.26. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 2020 – 2023 (persen)



jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan, sebagaimana ditampilkan pada grafik 2.26. Sementara itu, Indeks Keparahannya (P2) menggambarkan tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin yang dapat dilihat pada grafik 2.27.

Grafik 2.27. Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) 2020 – 2023 (persen)



Sumber: BPS, 2025 (diolah)

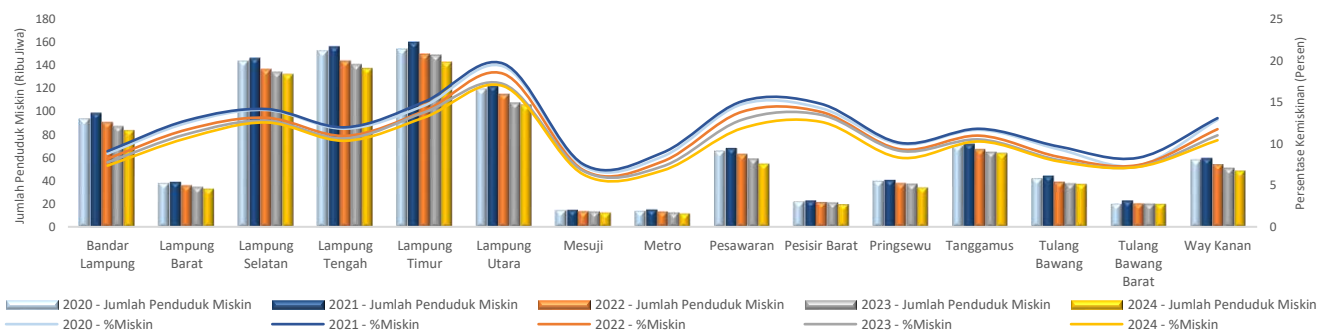
Semakin tinggi nilai P1, semakin besar jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari Garis Kemiskinan, sehingga semakin besar pula upaya yang dibutuhkan untuk mengangkat mereka keluar dari kondisi tersebut. Sementara itu, semakin tinggi nilai P2, semakin parah tingkat kemiskinan yang terjadi, sehingga intervensi kebijakan yang lebih terukur dan tepat sasaran menjadi semakin krusial, terutama dalam menentukan alokasi dana yang dibutuhkan bagi setiap daerah untuk mengatasi kemiskinan.

Dengan memahami tidak hanya jumlah penduduk miskin, tetapi juga nilai P1 dan P2 di setiap wilayah, pemerintah dapat merumuskan strategi pengentasan kemiskinan yang lebih efektif. Data ini menjadi landasan penting bagi pembuat kebijakan dalam mengalokasikan anggaran secara lebih efisien, memastikan bahwa intervensi yang dilakukan benar-benar memberikan dampak yang signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat.

Pada September 2024, P1 di wilayah perdesaan meningkat menjadi 2,041% dan wilayah perkotaan juga terjadi kenaikan menjadi 1,173% sehingga secara keseluruhan P1 Lampung naik menjadi 1,744%. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan, mencerminkan kesenjangan ekonomi yang semakin besar di kalangan masyarakat miskin.

Sementara itu, P2 menunjukkan dinamika yang berbeda. Di wilayah perdesaan, P2 meningkat sebesar 0,112% menjadi 0,484% yang menandakan bahwa distribusi pengeluaran di antara penduduk miskin di perdesaan semakin tidak merata, dengan kelompok termiskin mengalami beban yang lebih berat. Sebaliknya, P2 di wilayah perkotaan justru mengalami penurunan sebesar 0,024% menjadi 0,227% yang menunjukkan adanya perbaikan dalam distribusi pengeluaran di kalangan penduduk miskin perkotaan.

Grafik 2.28. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Maret 2020 – Maret 2024



Sumber: BPS, 2024 (diolah)

Disclaimer: Data kemiskinan pada tingkat Kabupaten/Provinsi tersedia hanya untuk periode Maret setiap tahunnya.

Tantangan dalam menurunkan angka kemiskinan di Lampung tercermin dari variasi tingkat kemiskinan antar Kabupaten/Kota, dengan beberapa daerah menunjukkan perbaikan yang signifikan. Kabupaten Mesuji, Kota Metro, dan Kabupaten Tulang Bawang Barat menjadi wilayah dengan tingkat kemiskinan terendah, masing-masing sebesar 6,31%; 6,78%; dan 7,22%. Sebaliknya, Kabupaten Lampung Utara mencatat persentase kemiskinan tertinggi, yakni 16,92%, sebagaimana ditampilkan pada grafik 2.28.

Meskipun demikian, dalam periode Maret 2020 hingga Maret 2024, Kabupaten Lampung Utara berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 2,38% poin, menjadikannya sebagai daerah dengan penurunan tingkat kemiskinan terdalam ketiga di Provinsi Lampung. Capaian ini menunjukkan adanya upaya yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Dalam upaya mengatasi kemiskinan, Pemerintah Provinsi Lampung telah menerapkan berbagai strategi, salah satunya melalui penggunaan aplikasi berbasis web bernama Simnangkis (Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan). Aplikasi ini dirancang untuk memfasilitasi proses monitoring, evaluasi, dan pelaporan terkait penanggulangan kemiskinan di Lampung. Dengan adanya Simnangkis, diharapkan kualitas data kemiskinan dapat lebih akurat dan tepat sasaran, sehingga intervensi yang dilakukan menjadi lebih efektif.

Salah satu tantangan utama dalam pengentasan kemiskinan adalah kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan, di mana wilayah pedesaan masih menjadi kantong utama kemiskinan. Untuk mengatasi ketimpangan ini, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan infrastruktur pedesaan agar desa dapat berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, optimalisasi penggunaan Dana Desa menjadi langkah strategis yang dapat diarahkan untuk program pemberdayaan masyarakat, seperti pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengembangan UMKM berbasis potensi lokal, serta pembentukan desa wisata di wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi. Sebagai langkah konkret, pemerintah daerah dapat mencanangkan satu desa percontohan di setiap kecamatan setiap tahunnya, yang selanjutnya dapat menjadi model bagi desa lain pada tahun berikutnya sesuai dengan keunggulan yang dimiliki masing-masing desa.

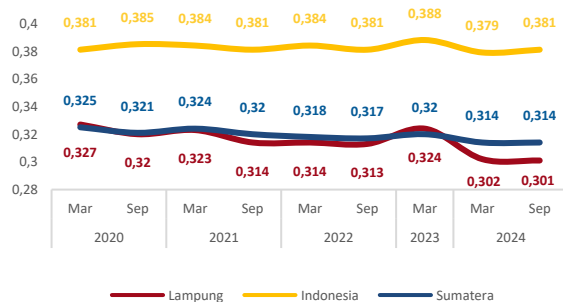
Selain itu, sektor unggulan Provinsi Lampung, yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan, memerlukan dukungan melalui berbagai program strategis, seperti hilirisasi. Peningkatan produksi komoditas pertanian berpotensi menekan kenaikan harga, sehingga dapat memperkuat daya beli masyarakat. Dengan demikian, petani dapat memperoleh harga jual yang layak untuk produknya, yang tidak hanya mampu menutupi biaya produksi tetapi juga memberikan keuntungan yang lebih besar. Upaya ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam menekan angka kemiskinan di Lampung.

Kemiskinan memiliki faktor penyebab yang kompleks, sehingga memerlukan intervensi lintas sektor yang disesuaikan dengan karakteristik spesifik setiap wilayah. Dalam hal ini, peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) menjadi sangat penting, terutama dalam memetakan sumber utama kemiskinan serta mengidentifikasi potensi sumber daya yang dapat mempercepat pengentasan kemiskinan secara efektif.

2.2.3 Tingkat Ketimpangan (Rasio Gini)

Rasio Gini atau *Gini Ratio* merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan atau pengeluaran penduduk dalam suatu wilayah. Indikator ini menggambarkan derajat ketimpangan dengan rentang nilai antara 0 hingga 1, di mana 0 mencerminkan pemerataan sempurna, sementara 1 menunjukkan ketidakmerataan yang ekstrem. Semakin rendah nilai *Gini Ratio*, semakin baik tingkat pemerataan ekonomi, yang menandakan distribusi pendapatan yang lebih adil serta berkurangnya kesenjangan ekonomi di suatu daerah. Selain itu, menurunnya tingkat ketimpangan juga mencerminkan meningkatnya kesempatan yang setara bagi masyarakat dalam mengakses berbagai sumber daya ekonomi dan sosial.

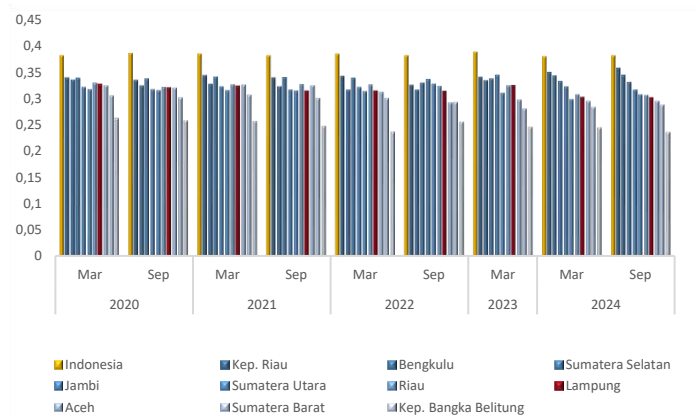
Grafik 2.29. Perkembangan *Gini Ratio* Lampung, Regional Sumatera, dan Nasional 2020 – 2024 (persen)



Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Pada 2024 *Gini Ratio* di Provinsi Lampung menunjukkan tren yang lebih baik dibandingkan dengan rata-rata Regional Sumatera dan nasional sebagaimana tampak pada grafik 2.29. Pencapaian ini mencerminkan peningkatan yang baik dalam upaya mengurangi ketimpangan ekonomi.

Grafik 2.30. *Gini Ratio* Regional Sumatera Tahun 2020 s.d. 2024 (persen)



Sumber: BPS, 2025 (diolah)

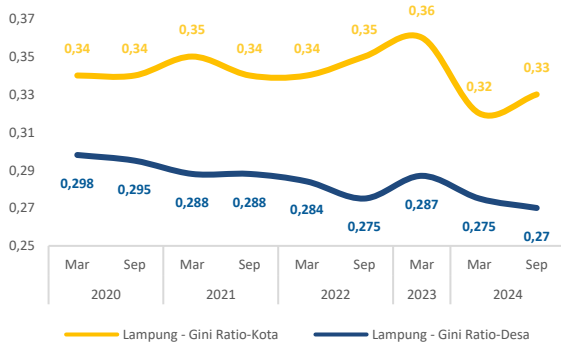
Secara lebih luas, dibandingkan dengan level nasional, *Gini Ratio* di seluruh provinsi di Regional Sumatera berada di bawah rata-rata nasional sebagaimana ditunjukkan dalam grafik 2.30. Pada September 2024, Lampung bahkan berhasil masuk dalam jajaran empat provinsi dengan *Gini Ratio* terendah di Sumatera, bersama Bangka Belitung (0,235), Sumatera Barat (0,287), dan Aceh (0,294). Capaian ini semakin menguatkan indikasi bahwa Lampung terus menunjukkan keberhasilan dalam mengatasi kesenjangan ekonomi.

Penurunan capaian *Gini Ratio* Provinsi Lampung pada September 2024 memperlihatkan progres nyata dalam kebijakan pengentasan ketimpangan. Pada September 2024, *Gini Ratio* tercatat sebesar 0,301, turun 0,33% atau 0,001 poin dibandingkan Maret 2024 yang berada di angka 0,312. Penurunan ini konsisten dengan tren penurunan tahunan sejak 2020, dengan rata-rata penurunan sebesar 0,99% per tahun. Ini menandakan bahwa meskipun masih fluktuatif, upaya pemerintah dalam menekan ketimpangan mulai memberikan hasil yang lebih nyata dan berkelanjutan.

Distribusi ketimpangan di Lampung juga menunjukkan perbedaan yang signifikan antara daerah perkotaan dan perdesaan sebagaimana tampak pada grafik 2.31, dengan tren penurunan di wilayah perdesaan tetapi tren meningkat di wilayah perkotaan. Pada September 2024, *Gini Ratio* di perkotaan tercatat sebesar 0,329, naik 0,006 poin

dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, di daerah perdesaan, *Gini Ratio* mencapai 0,27, turun 0,005 poin dari Maret 2024. Ini menandakan adanya penurunan kesenjangan pendapatan di wilayah perdesaan, di mana distribusi pendapatan menjadi lebih merata dibandingkan dengan wilayah perkotaan.

Grafik 2.31. Perkembangan *Gini Ratio* Lampung Menurut Tempat Tinggal Tahun 2020 – 2024



Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Namun demikian, penurunan indikator *Gini Ratio* di wilayah perdesaan diiringi P0 (persentase penduduk miskin), P1 (kedalaman kemiskinan), dan P2 (keparahan kemiskinan) yang meningkat, mengindikasikan penurunan kesenjangan pendapatan lebih banyak terjadi di kelompok non-miskin, sementara kelompok miskin mengalami peningkatan beban. Kelompok non-miskin atau menengah mungkin mengalami redistribusi pendapatan yang lebih merata, sehingga *Gini Ratio* menurun. Namun, kelompok miskin menghadapi kondisi yang memburuk, baik dari segi jumlah maupun tingkat keparahan.

Indikator lain yang relevan untuk mengukur ketimpangan adalah persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah, yang menunjukkan distribusi pendapatan secara lebih spesifik. Berdasarkan indikator ini, ketimpangan dibagi menjadi tiga kategori: tinggi (di bawah 12 persen), sedang (12-17 persen), dan rendah (di atas 17 persen). Provinsi Lampung mencatat persentase sebesar 22,12 persen pada kelompok 40 persen terbawah, masuk dalam kategori ketimpangan rendah sebagaimana tampak pada grafik 2.32. Capaian ini memperkuat bukti bahwa pemerataan

pendapatan di Lampung semakin baik, dengan akses ekonomi yang lebih inklusif bagi lapisan masyarakat berpenghasilan rendah.

Grafik 2.32. Distribusi Pengeluaran Penduduk Lampung Tahun 2020 – 2024



Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Meskipun menunjukkan perbaikan, ketimpangan di Lampung masih dipengaruhi oleh sejumlah faktor struktural yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Perbedaan sumber daya alam antar kabupaten, kondisi demografis yang tidak merata, dan keterbatasan mobilitas barang dan jasa di daerah terpencil adalah beberapa faktor utama yang menyebabkan ketimpangan. Selain itu, konsentrasi kegiatan ekonomi di kota besar seperti Bandar Lampung dan ketidakseimbangan alokasi dana pembangunan di berbagai wilayah juga berkontribusi pada tingginya ketimpangan antarwilayah di Provinsi Lampung.

Sebagai respons terhadap masalah ketimpangan, Pemerintah Provinsi Lampung telah mengambil sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pemerataan ekonomi. Salah satu upaya utama adalah pembangunan sektor pertanian dan perdesaan, yang dirancang untuk meningkatkan perekonomian di wilayah perdesaan dan mengurangi kesenjangan dengan wilayah perkotaan. Selain itu, program Kartu Petani Berjaya (KPB) memberikan kemudahan bagi petani dalam mengakses sarana dan prasarana pertanian, serta memfasilitasi pembiayaan dan pemasaran hasil pertanian, yang pada akhirnya berdampak positif pada pengurangan ketimpangan.

Pengalokasian anggaran hingga ke tingkat desa juga menjadi salah satu langkah penting dalam upaya pemerataan pembangunan di Lampung. Melalui pengalokasian anggaran yang lebih merata, pembangunan dapat menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil yang sering kali tertinggal. Namun, perlu ada pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dan penggunaan anggaran memberikan *multiplier effect* yang signifikan dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Perluasan program bantuan sosial dan peningkatan pelayanan publik di daerah tertinggal juga menjadi langkah penting untuk mengurangi ketimpangan dan memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat menikmati manfaat dari pertumbuhan ekonomi Lampung.

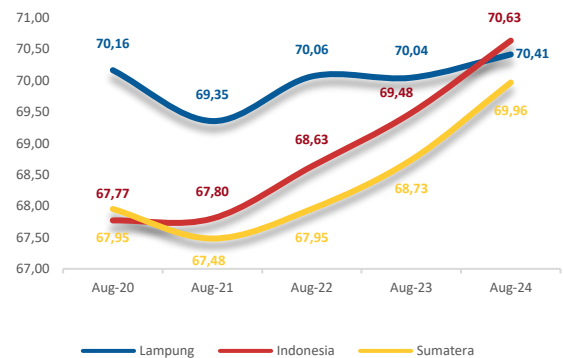
2.2.4 Kondisi Ketenagakerjaan dan Tingkat Pengangguran

Pada Agustus 2024, Peningkatan jumlah Angkatan Kerja di Lampung meningkat lebih besar dibandingkan Bukan Angkatan Kerja, mencerminkan pergeseran kebutuhan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pasar kerja. Angkatan Kerja mencapai 4.996,75 ribu orang, naik 91,85 ribu orang (1,87% yoy), dengan 4.787,59 ribu orang di antaranya bekerja, bertambah 89,93 ribu orang (1,91% yoy). Namun, jumlah pengangguran juga meningkat sebesar 1,92 ribu orang (0,93% yoy) menjadi 209,16 ribu orang. Sementara itu, Bukan Angkatan Kerja mencapai 2.099,47 ribu orang, naik 1,08 ribu orang (0,05% yoy). Meskipun ada peningkatan jumlah penduduk yang bekerja, jumlah pengangguran juga bertambah yang mengindikasikan bahwa penciptaan lapangan kerja belum cukup untuk mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dapat diartikan sebagai perbandingan antara jumlah Angkatan Kerja dengan Penduduk Usia Kerja (PUK). TPAK merupakan indikator yang dapat mengukur besarnya penyerapan tenaga kerja. TPAK mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja

yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (*Labour Supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Semakin tinggi nilai TPAK berarti semakin banyak penduduk usia kerja yang aktif berpartisipasi dalam perekonomian.

Grafik 2.33. Perkembangan TPAK di Lampung, Regional Sumatera, dan Nasional Agustus 2020 – Agustus 2024 (%)



Sumber: BPS, 2024 (diolah)

Pada bulan Agustus 2024, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Lampung mencapai 70,41 %, lebih tinggi dari rata-rata regional Sumatera (69,76 %), tetapi masih di bawah nasional (70,63 %) sebagaimana terlihat pada grafik 2.33. TPAK Lampung menunjukkan peningkatan sebesar 0,37 % poin dibandingkan dengan Agustus 2023. ini mengindikasikan semakin banyaknya penduduk usia produktif yang terlibat dalam aktivitas ekonomi di Provinsi Lampung.

Disparitas gender dalam partisipasi angkatan kerja di Lampung tetap menjadi perhatian, seiring dengan pergeseran peran gender di pasar kerja Provinsi Lampung. Data menunjukkan bahwa TPAK laki-laki menurun sebesar 0,37% poin menjadi 85,61%, sementara TPAK perempuan meningkat sebesar 2,57% poin menjadi 54,58%. Kenaikan TPAK perempuan ini mengindikasikan bahwa kesenjangan gender di pasar tenaga kerja mulai menyempit, meskipun TPAK laki-laki masih jauh lebih tinggi. Kondisi ini mencerminkan perlunya kebijakan yang lebih inklusif untuk mendorong partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi di Lampung.

Tabel 2.8. Perkembangan Serapan Tenaga Kerja Sektoral di Lampung 2020 – 2024 (%)

Lapangan Pekerjaan Utama	Aug-20	Aug-21	Aug-22	Aug-23	Aug-24	Tren Aug-23 s.d Aug-24	Perubahan Aug-23 s.d Aug-24	Perubahan Aug-2020 s.d Aug-24
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	44,76	43,03	43,62	42,32	40,57		↓ -1,75	↓ -4,19
Pertambangan dan Pengalihan; Industri Pengolahan	9,69	9,85	9,73	9,51	9,55		↑ 0,04	↓ -0,14
Pengadaan Listrik, Gas; Pengadaan Air	0,33	0,4	0,58	0,48	0,56		↑ 0,08	↑ 0,23
Konstruksi	5,63	5,86	4,94	5,56	5,25		↓ -0,31	↓ -0,38
Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan	18,86	19,36	19,74	18,96	19,63		↑ 0,67	↑ 0,77
Transportasi & Pergudangan; Informasi & Komunikasi	3,78	3,86	3,79	4,51	4,63		↑ 0,12	↑ 0,85
Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum	3,94	4,55	4,18	5,11	5,31		↑ 0,2	↑ 1,37
Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan	1,44	1,18	1,54	1,77	1,87		↑ 0,1	↑ 0,43
Administrasi Pemerintahan	2,88	3,09	2,75	3,08	3,13		↑ 0,05	↑ 0,25
Jasa Pendidikan	4,22	4,33	4,37	4,17	4,31		↑ 0,14	↑ 0,09
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,06	1,43	1,44	1,04	1,2		↑ 0,16	↑ 0,14
Jasa Lainnya	3,39	3,06	3,33	3,5	3,99		↑ 0,49	↑ 0,6

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024 (diolah)

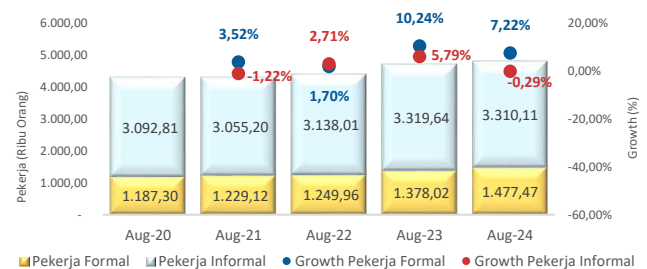
Perkembangan Serapan Tenaga Kerja Sektoral di Lampung dapat dilihat pada tabel 2.8 Struktur ekonomi Lampung, yang didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan turut mempengaruhi komposisi tenaga kerja. Pada Agustus 2024, sektor pertanian berkontribusi terbesar dalam penyerapan tenaga kerja, menyerap 40,57% dari total tenaga kerja. Sektor perdagangan menyerap 19,63%, sementara sektor industri pengolahan dan pertambangan menyerap 9,55%. Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sektor perdagangan mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja tertinggi, yaitu sebesar 0,67%. Hal ini mengindikasikan meningkatnya daya beli dan permintaan barang atau jasa di pasar lokal yang mendorong pertumbuhan UMKM Lampung.

Tren penyerapan tenaga kerja mencerminkan perubahan dalam distribusi tenaga kerja, dengan peralihan yang jelas menuju sektor perdagangan dan jasa. Serapan tenaga kerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terus menurun. Sebagian besar sektor jasa, seperti informasi dan komunikasi, serta jasa kesehatan dan sosial, terus mengalami peningkatan, yang menandakan pergeseran struktural dari sektor primer ke sektor tersier.

Dominasi sektor informal di pasar tenaga kerja Lampung terus berlanjut, meskipun ada pergeseran

kecil ke sektor formal. Pada Agustus 2024, sekitar 69,14% tenaga kerja masih berada di sektor informal, mencerminkan tantangan struktural yang signifikan dalam hal perlindungan tenaga kerja, upah rendah, dan kondisi kerja yang kurang ideal. Namun, terjadi penurunan 0,29% (yoy) dalam jumlah pekerja informal dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sementara pekerja formal meningkat sebesar 7,22% (yoy). Tren ini menunjukkan adanya perbaikan lapangan kerja formal, seiring dengan pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

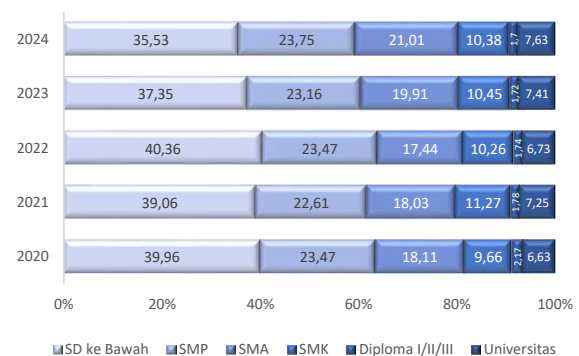
Grafik 2.34. Perkembangan Struktur Pekerja Formal dan Informal di Lampung Tahun Agustus 2020 – Agustus 2024



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024 (diolah)

Tingkat pendidikan merupakan indikator penting yang dapat mencerminkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Selaras dengan struktur tenaga kerja di Provinsi Lampung pada Agustus 2024 yang masih didominasi oleh pekerja informal, ditinjau dari tingkat Pendidikan tercatat bahwa Sebagian besar pekerja berada pada kategori Pendidikan rendah.

Grafik 2.35. Struktur Tenaga Kerja di Lampung berdasarkan Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan Agustus 2020 – Agustus 2024 (%)



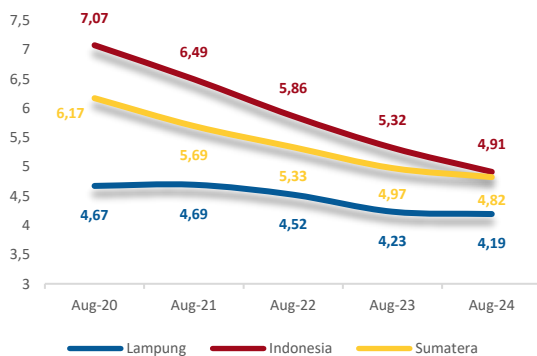
Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024 (diolah)

Pada Agustus 2024, struktur tenaga kerja di Provinsi Lampung masih didominasi oleh penduduk dengan tingkat Pendidikan SD ke bawah yang mencakup

35,53% dari total tenaga kerja atau sekitar 1.700,90 ribu orang. Di sisi lain, tenaga kerja dengan tingkat Pendidikan tinggi yaitu Diploma hanya mencakup 1,70% dan Universitas mencakup 7,63% dari total tenaga kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah perbandingan antara jumlah pengangguran dalam jumlah penduduk angkatan kerja. TPT merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar tenaga kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Pengangguran terjadi karena jumlah penawaran tenaga kerja lebih kecil dari pada permintaan tenaga kerja.

Grafik 2.36. Perkembangan TPT di Lampung, Regional Sumatera, dan Nasional Februari 2020 – Februari 2024 (%)



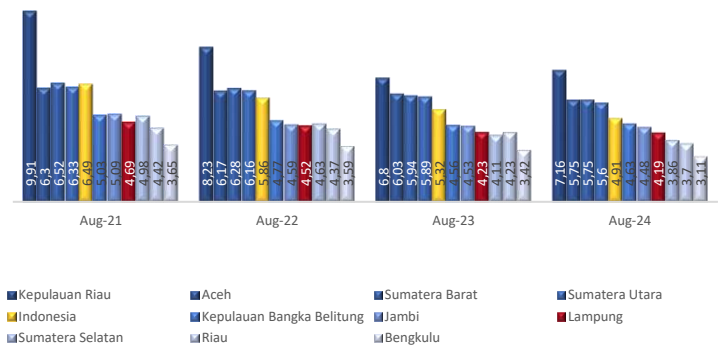
Sumber: BPS, 2024 (diolah)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Lampung terus mengalami penurunan, mengindikasikan pemulihan ekonomi yang stabil. Pada Agustus 2024, TPT Lampung tercatat sebesar 4,19%, turun dari 4,23% pada tahun sebelumnya dan jauh lebih rendah dari tingkat nasional yang mencapai 4,91%. Penurunan ini menunjukkan bahwa pemulihan pasca-pandemi semakin memperkuat pasar tenaga kerja, dengan konsistensi penurunan TPT sejak Agustus 2022.

Meskipun TPT Lampung periode Agustus 2024 mengalami penurunan, namun jumlah pengangguran meningkat menunjukkan adanya pengaruh pertumbuhan angkatan kerja dan dinamika pasar tenaga kerja. Pemerintah dapat mengatasi peningkatan pengangguran di Lampung dengan meningkatkan pelatihan keterampilan

berbasis kebutuhan pasar, mengembangkan sektor padat karya, memperbaiki sistem data ketenagakerjaan, memperkuat layanan pencocokan kerja, serta menarik investasi daerah. Langkah ini bertujuan menciptakan lapangan kerja baru dan menyesuaikan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar yang dinamis.

Grafik 2.37. TPT Regional Sumatera Agustus 2020 s.d. Agustus 2024 (%)



Sumber: BPS, 2024 (diolah)

Lampung menempati posisi strategis dalam konteks regional Sumatera dengan TPT yang relatif rendah. Pada Agustus 2024, Lampung menempati urutan keempat dengan TPT terendah di Sumatera, hanya berada di bawah Bengkulu, Riau, dan Sumatera Selatan. Hal ini menegaskan bahwa kondisi ketenagakerjaan Lampung masih lebih baik dibandingkan dengan banyak provinsi lain di Sumatera, mengindikasikan kemampuan Provinsi ini dalam peningkatan kualitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan juga lebih inklusif.

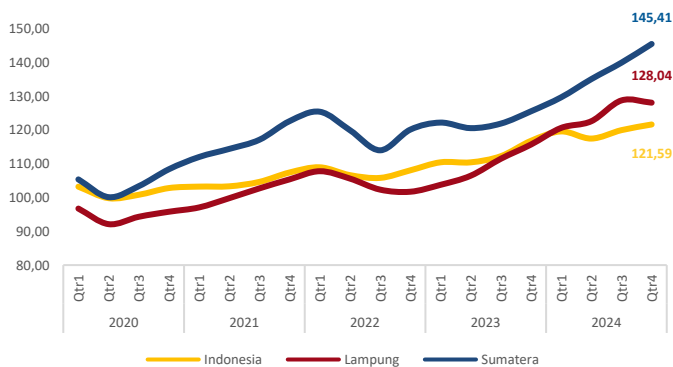
Pemerintah Provinsi Lampung secara aktif mendorong pengurangan pengangguran melalui berbagai inisiatif strategis. Salah satu langkah penting adalah penguatan daya saing UMKM melalui berbagai insentif fiskal dan non-fiskal, kemudahan perizinan, serta dukungan permodalan. Selain itu, pemerintah juga berfokus pada peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui program pelatihan, *job fair*, serta penempatan tenaga kerja melalui aplikasi Sigajahlampung. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan mendorong pertumbuhan lapangan kerja di sektor formal dan informal.

Peningkatan kualitas tenaga kerja juga menjadi fokus utama untuk mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi di Lampung. Dengan sektor informal yang masih mendominasi, maka diperlukan perhatian pada jenjang tingkat Pendidikan yang lebih tinggi. Pada Agustus 2024, sekitar 35,53% tenaga kerja di Lampung masih berada pada kategori pendidikan SD ke bawah, sementara hanya 9,33% yang memiliki pendidikan tinggi (Diploma dan Universitas). Hal ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci dalam memperbaiki daya saing dan produktivitas tenaga kerja di Provinsi Lampung.

2.2.5 Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan antara Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib). Indikator ini mencerminkan daya tukar (*terms of trade*) petani terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi maupun yang digunakan sebagai biaya produksi. Konsep NTP didasarkan pada peran ganda petani sebagai produsen dan konsumen, di mana hasil pertanian dijual, sementara barang dan jasa dibeli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta mendukung proses produksi. Semakin tinggi nilai NTP dalam suatu periode, semakin besar selisih positif antara pendapatan yang diterima petani dan pengeluaran yang dilakukan, yang pada akhirnya mencerminkan peningkatan daya beli serta kesejahteraan petani.

Grafik 2.38. Perkembangan Rata-rata NTP Lampung, Regional Sumatera, dan Indonesia per triwulan Tahun 2020 – 2024

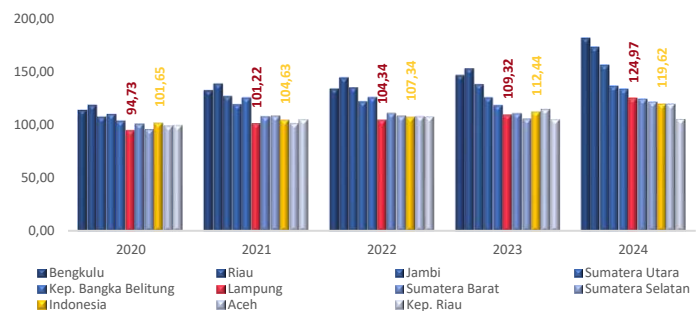


Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Grafik 2.38 menyajikan perkembangan rata-rata Nilai Tukar Petani (NTP) di Lampung, Regional

Sumatera, dan Indonesia secara triwulanan. Berdasarkan grafik tersebut, NTP Lampung selama periode 2020 hingga 2023 cenderung berada di bawah rata-rata nasional maupun regional Sumatera. Namun, memasuki tahun 2024, NTP Lampung menunjukkan peningkatan yang signifikan, berhasil melampaui NTP nasional, meskipun masih berada di bawah rata-rata NTP Regional Sumatera.

Grafik 2.39. Rata-rata NTP Regional Sumatera per Tahun 2020 – 2024



Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Grafik 2.39 menampilkan perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) di 10 provinsi di Regional Sumatera serta rata-rata nasional selama periode 2020 hingga 2024 yang mencerminkan disparitas dan tren perkembangan kinerja sektor pertanian antar provinsi di Sumatera. Pada periode 2020 hingga 2023, Provinsi Riau konsisten mencatatkan NTP tertinggi di Regional Sumatera. Namun, pada tahun 2024, posisi tersebut diambil alih oleh Provinsi Bengkulu, yang berhasil mencatatkan capaian NTP tertinggi di wilayah tersebut. Di sisi lain, Provinsi Kepulauan Riau berada di posisi terendah pada tahun 2024.

NTP Lampung menunjukkan tren yang menarik dengan peningkatan signifikan pada tahun 2024. Hal ini menjadi pencapaian yang menonjol, mengingat pada tahun 2020 Lampung tercatat sebagai provinsi dengan capaian NTP terendah di Regional Sumatera. Pada tahun 2024, Lampung berhasil melampaui rata-rata NTP nasional, meskipun masih berada di bawah rata-rata NTP Regional Sumatera. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan yang nyata dalam kinerja sektor pertanian di provinsi tersebut.

NTP Lampung pada tahun 2024 meningkat sebesar 14,32% (yoy). Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya NTP pada periode sebelumnya, tingkat kemampuan atau daya beli petani di Lampung menguat, sehingga nilai kesejahteraan petani secara umum di tahun 2024 mengalami peningkatan. Peningkatan NTP Lampung tahun 2024 utamanya didorong oleh pertumbuhan signifikan pada beberapa subsektor Kinerja Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) mencatatkan

peningkatan sebesar 4,16% (yoy), diikuti oleh Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH) yang tumbuh 6,99% (yoy), serta Lonjakan Nilai Tukar Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) yang mencapai 29,35% (yoy). Namun, kinerja NTP secara keseluruhan tertahan oleh kontraksi pada subsektor Peternakan (NTPT) sebesar 0,21% (yoy), Perikanan Tangkap sebesar 0,56% (yoy), dan Perikanan Budidaya (NTPi) sebesar 0,82% (yoy), sebagaimana terlihat pada tabel 2.9.

Tabel 2.9. Perkembangan Rata-Rata Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung per Subsektor 2020 – 2024

Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP)	2020					2021					2022					2023					2024					Tren	Perubahan
	I	II	III	IV	Tahunan	I	II	III	IV	Tahunan	I	II	III	IV	Tahunan	I	II	III	IV	Tahunan	I	II	III	IV	Tahunan	20-24	%yoy
Nilai Tukar Petani																											
Tanaman Pangan	97,55	93,64	93,90	91,96	94,26	90,90	90,54	93,43	94,44	92,33	96,79	94,31	93,10	94,47	94,67	97,81	98,33	103,42	109,18	102,19	112,68	101,25	106,43	105,38	106,43	↑	4,16%
Hortikultura	97,58	95,10	95,06	97,63	96,34	99,92	95,45	94,81	96,70	96,72	97,96	105,67	118,99	107,16	107,45	105,68	105,87	112,65	126,82	112,76	130,49	127,66	117,04	107,36	120,64	↑	6,99%
Tanaman Perkebunan Rakyat	94,51	87,70	92,31	98,38	93,22	102,85	110,21	114,03	119,70	111,70	123,12	119,00	110,38	109,56	115,52	111,99	117,92	124,21	127,15	120,32	136,29	153,95	165,73	166,55	155,63	↑	29,35%
Peternakan	99,58	98,05	100,84	99,73	99,55	99,01	102,10	104,25	104,24	102,40	104,37	104,58	102,61	100,48	103,01	98,46	100,06	100,36	98,53	99,35	96,28	99,83	100,49	99,98	99,15	↓	-0,21%
Perikanan Tangkap	101,45	99,79	101,50	102,63	101,35	103,57	104,95	106,22	108,14	105,72	109,23	110,04	108,26	106,28	108,45	108,25	110,85	111,61	111,74	110,61	110,24	109,11	109,51	111,08	109,99	↓	-0,56%
Perikanan Budidaya	100,78	99,73	100,09	100,89	100,37	100,57	101,68	101,40	101,28	101,23	100,98	100,02	98,98	99,65	99,91	96,88	97,17	98,86	99,42	98,08	97,347	97,33	96,93	97,50	97,28	↓	-0,82%
Gabungan																											
Nilai Tukar Petani	96,72	92,11	94,29	95,78	94,73	97,05	99,79	102,69	105,36	101,22	107,77	105,59	102,32	101,70	104,34	103,74	106,42	111,45	115,66	109,32	120,58	122,56	128,71	128,04	124,97	↑	14,32%
Indeks Harga yang diterima Petani (%)	101,93	97,38	99,74	101,89	100,23	104,58	107,74	111,00	114,16	109,37	118,74	119,11	117,43	117,17	118,11	120,99	124,77	131,31	137,85	128,73	145,45	149,53	156,31	155,90	151,80	↑	17,92%
Indeks Harga yang dibayar Petani (%)	105,39	105,71	105,77	106,38	105,81	107,75	107,97	108,10	108,34	108,04	110,17	112,82	114,78	115,20	113,25	116,63	117,24	117,82	119,18	117,72	120,62	122,01	121,44	121,76	121,46	↑	3,18%

Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Pada tahun 2024, subsektor Tanaman Pangan mencatatkan kenaikan indeks Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi 106,43, meningkat dari 102,19 pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh kenaikan indeks pada kelompok penyusun subsektor Tanaman Pangan, khususnya pada kelompok padi. Faktor utama yang berkontribusi terhadap peningkatan ini adalah kenaikan harga penjualan gabah, yang mencerminkan perbaikan kondisi pasar dan meningkatnya daya tawar petani. Tren positif ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan petani di subsektor Tanaman Pangan serta potensi penguatan sektor pertanian di Provinsi Lampung.

Subsektor Hortikultura juga mengalami pertumbuhan yang signifikan, dengan indeks NTP mencapai 120,64 pada tahun 2024, naik dari 112,76 pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini didorong oleh naiknya harga pada kelompok sayur-sayuran, terutama aneka cabai.

Sementara itu, subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat mencatatkan pertumbuhan tertinggi di antara subsektor lainnya, dengan indeks NTP

mencapai 155,63, meningkat dari 120,32 pada tahun sebelumnya. Kenaikan ini dipicu oleh meningkatnya harga kopi dan kakao, yang sejalan dengan tren kenaikan harga di pasar global.

Di sisi lain, subsektor Peternakan mengalami penurunan, dengan indeks NTP tercatat sebesar 99,15, turun dari 99,35 pada tahun sebelumnya. Dengan nilai NTP di bawah 100, hal ini menunjukkan bahwa petani mengalami defisit, di mana indeks harga yang diterima petani lebih rendah dibandingkan indeks harga yang dibayarkan. Kondisi ini mencerminkan penurunan daya beli peternak serta pendapatan yang lebih kecil dibandingkan pengeluarannya.

Subsektor Perikanan Tangkap juga mengalami penurunan, dengan indeks NTP mencapai 109,99, lebih rendah dibandingkan 110,61 pada tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya indeks harga pada kelompok penyusun Nilai Tukar Nelayan (NTN), terutama pada penangkapan laut, khususnya ikan teri, akibat melimpahnya pasokan selama musim tangkap.

Serupa dengan subsektor Perikanan Tangkap, subsektor Perikanan Budidaya mencatatkan indeks NTP sebesar 97,28 pada tahun 2024, turun dari 98,08 pada tahun sebelumnya. Capaian NTP subsektor ini telah berada di bawah 100 sejak tahun 2022 hingga 2024, yang menunjukkan bahwa pendapatan petani ikan masih lebih rendah dibandingkan pengeluaran mereka. Komoditas utama yang menyebabkan penurunan NTP Perikanan Budidaya adalah udang payau, yang terdampak oleh fluktuasi harga akibat kondisi cuaca.

Dinamika pasar dan variabilitas cuaca menjadi tantangan utama dalam pengelolaan pasokan komoditas pertanian di Provinsi Lampung. Oleh karena itu, strategi pengelolaan pasokan yang lebih adaptif dan responsif sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas harga serta ketahanan pangan. Langkah-langkah adaptasi yang efektif tidak hanya berperan dalam meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi juga memperkuat kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian daerah.

Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih akurat terkait keseimbangan antara pendapatan

dan pengeluaran usaha pertanian. Berbeda dengan NTP yang mencakup seluruh pengeluaran rumah tangga petani, termasuk biaya produksi, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari. NTUP hanya memperhitungkan biaya produksi serta penambahan barang modal (BPPBM). Oleh karena itu, NTUP dianggap lebih relevan dalam mengevaluasi efisiensi dan keberlanjutan usaha pertanian.

Berdasarkan data pada tabel 2.10, NTUP Provinsi Lampung pada tahun 2024 mencapai 127,62, mencatatkan peningkatan sebesar 15,77% secara tahunan (yoy). Peningkatan terbesar terjadi pada subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat, yang melonjak sebesar 31,54% (yoy). Subsektor Hortikultura menyusul dengan kenaikan sebesar 8,04% (yoy), sementara subsektor Tanaman Pangan mengalami pertumbuhan sebesar 5,06% (yoy). Perkembangan positif ini mencerminkan efisiensi yang meningkat di berbagai subsektor pertanian, meskipun masih diperlukan langkah-langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan di masa mendatang.

Tabel 2.10. Perkembangan Rata-Rata NTUP Lampung per Subsektor Periode 2020 s.d. 2024

Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP)	2020				2021				2022				2023				2024				Tren	Perubahan						
	I	II	III	IV	Tahunan	I	II	III	IV	Tahunan	I	II	III	IV	Tahunan	I	II	III	IV	Tahunan	I	II	III	IV	Tahunan	20-24	%yoy	
Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP)	97,63	93,15	95,10	96,87	95,69	98,55	101,10	103,67	104,63	101,99	108,53	107,26	104,03	101,40	105,30	103,96	107,01	112,31	117,65	110,23	123,19	125,77	131,00	130,50	127,62		↑	15,77%
Tanaman Pangan	98,66	94,83	94,96	93,22	95,41	92,61	92,22	94,68	95,31	93,71	97,89	96,31	95,54	95,09	96,21	98,74	99,57	104,91	111,55	103,69	115,08	104,25	108,74	107,70	108,94		↑	5,06%
Hortikultura	99,77	97,13	97,01	100,04	98,49	102,75	98,10	97,31	104,06	100,56	100,70	109,87	123,64	110,25	111,12	109,04	109,68	117,19	133,28	117,30	137,12	134,59	122,57	112,63	126,73		↑	8,04%
Tanaman Perkebunan Rakyat	94,98	88,35	92,62	99,10	93,76	103,99	110,90	114,48	115,70	111,27	123,09	120,12	111,16	107,46	115,46	110,68	117,03	123,62	128,06	119,85	138,57	156,90	166,99	168,12	157,65		↑	31,54%
Peternakan	100,59	99,29	101,73	100,62	100,56	100,05	102,83	104,70	103,24	102,70	104,71	104,96	102,70	100,16	103,13	98,81	100,57	101,02	100,08	100,12	98,56	101,87	102,49	102,36	101,32		↑	1,20%
Perikanan Tangkap	102,53	100,79	102,28	103,51	102,28	104,82	105,99	107,22	108,68	106,68	110,60	111,91	76,48	106,03	101,26	108,44	111,29	112,32	113,09	111,29	112,32	111,57	111,77	113,50	112,29		↑	0,90%
Perikanan Budidaya	102,26	101,46	101,72	102,65	102,02	102,76	103,86	103,39	102,57	103,14	102,83	102,76	102,06	101,94	102,40	99,58	100,17	102,10	103,09	101,24	101,16	102,09	101,25	101,91	101,60		↑	0,36%

Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani, Pemerintah Provinsi Lampung telah melaksanakan kewenangannya sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Ketentuan ini memberikan ruang bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk menyediakan berbagai bentuk dukungan, seperti subsidi benih atau bibit

tanaman, bibit ternak, pupuk, serta alat dan mesin pertanian, disesuaikan dengan kebutuhan petani. Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung juga mengupayakan kemudahan akses permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), dukungan asuransi usaha tani, berbagai fasilitas program sosial dari pemerintah atau swasta, serta memastikan ketersediaan pupuk, baik subsidi maupun non-

subsidi, untuk tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

Salah satu program unggulan yang diinisiasi adalah Kartu Petani Berjaya (KPB), yang dirancang untuk mengintegrasikan seluruh kebutuhan sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi informasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani serta semua pihak yang terlibat dalam proses pertanian, dengan memastikan berbagai aspek pendukung tersedia, seperti benih, bibit, dan pupuk; penanganan panen dan pascapanen; pendampingan budidaya; teknologi pertanian; akses permodalan; manajemen risiko usaha tani; jadwal tanam; hingga penyaluran air irigasi. Program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk *supplier*, distributor, perbankan, petani, pembeli, dan Pemerintah Provinsi, guna menciptakan sinergi yang kuat dalam ekosistem pertanian.

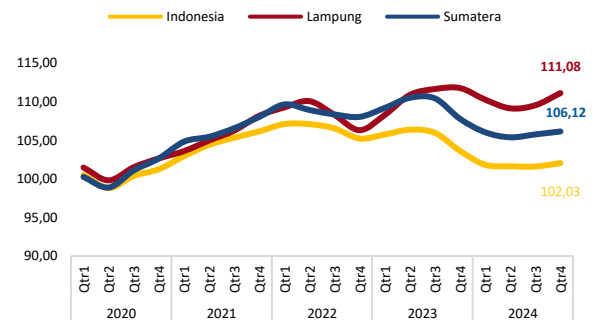
Pemerintah Provinsi Lampung terus melakukan penyempurnaan terhadap program Kartu Petani Berjaya (KPB) untuk memperluas cakupan dan mendukung lebih banyak aspek dalam sektor pertanian. Berdasarkan data Sensus Pertanian 2023 (ST2023), jumlah petani di Provinsi Lampung mencapai 1.340.261 orang, dengan 857.145 orang di antaranya, atau sekitar 66,95%, telah terdaftar dalam sistem e-KPB. Langkah ini diharapkan mampu mendorong capaian Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Lampung agar melampaui rata-rata NTP nasional dalam beberapa tahun mendatang. Upaya ini merupakan strategi penting dalam mewujudkan pertanian yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan petani di provinsi tersebut.

2.2.6 Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur daya beli nelayan terhadap barang dan jasa, baik yang dibutuhkan dalam proses produksi maupun untuk konsumsi rumah tangga. NTN mencerminkan keseimbangan antara pendapatan yang diperoleh dari hasil tangkapan ikan dengan biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan produksi

serta kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, NTN menjadi salah satu parameter penting dalam menilai kesejahteraan nelayan dan ketahanan ekonomi sektor perikanan.

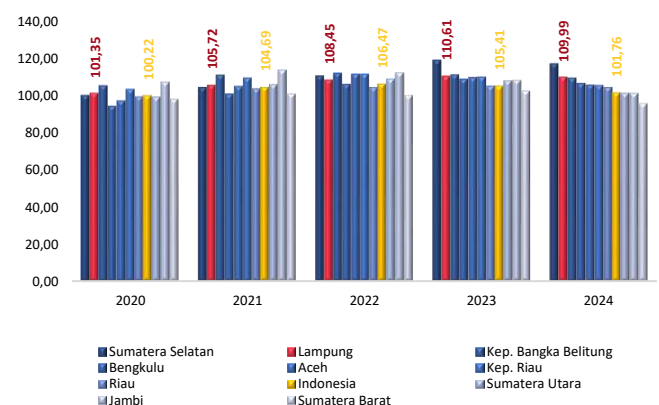
Grafik 2.40. Perkembangan Rata-Rata NTN Lampung, Regional Sumatera dan Indonesia per Triwulan 2020 – 2024



Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Pada triwulan IV 2024, Lampung mencapai rata-rata NTN tertinggi sebesar 11,08, diikuti oleh Sumatera sebesar 10,612, dan Indonesia sebesar 10,203. Tren pertumbuhan di semua wilayah menunjukkan pola fluktuasi, dengan Lampung mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan wilayah lainnya. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan daya beli nelayan di Lampung yang relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata nasional dan regional Sumatera.

Grafik 2.41. Rata-Rata NTN Regional Sumatera per Tahun 2020 – 2024



Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Pada tahun 2024, Nilai Tukar Nelayan (NTN) di Provinsi Lampung mencapai 109,99, menempatkannya pada posisi kedua tertinggi di regional Sumatera dari 10 provinsi, setelah Sumatera Selatan yang mencatatkan nilai 117,43. Pencapaian ini menunjukkan kinerja yang

mengesankan, mengingat nilai tersebut berada jauh di atas rata-rata nasional yang hanya sebesar 101,76, sebagaimana ditampilkan pada grafik 2.41. Hal ini mencerminkan daya beli nelayan Lampung yang relatif kuat, sekaligus menegaskan posisi strategis provinsi ini dalam mendukung sektor perikanan regional.

Grafik 2.42 menggambarkan tren perkembangan Nilai Tukar Nelayan (NTN) di Provinsi Lampung dari Januari 2020 hingga Desember 2024. Nilai Tukar Nelayan (NTN) di Provinsi Lampung sepanjang tahun 2024 menunjukkan tren yang lebih rendah dibandingkan tahun 2023. Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap fluktuasi NTN adalah perubahan harga ikan teri, yang sangat dipengaruhi oleh kondisi musim dan cuaca.

Grafik 2.42. Perkembangan NTN Lampung Tahun 2020–2024



Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Sebaliknya, NTN terendah tercatat pada Mei 2024, yaitu sebesar 107,79. Pada periode ini, pasokan ikan teri melimpah karena kondisi musim yang mendukung peningkatan hasil tangkapan. Akibatnya, harga ikan teri mengalami penurunan, yang berdampak pada melemahnya nilai tukar nelayan. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap faktor musim dapat menyebabkan volatilitas pendapatan bagi nelayan, yang pada akhirnya memengaruhi kesejahteraan.

Fluktuasi NTN akibat harga ikan teri berdampak pada stabilitas ekonomi nelayan di Lampung. Saat harga tinggi, daya beli naik, tetapi saat turun, pendapatan melemah. Untuk menjaga stabilitas, pemerintah dapat memperkuat pengelolaan stok, hilirisasi produk, optimalisasi subsidi, serta memperluas akses pasar dan distribusi.

Pemerintah Provinsi Lampung terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui berbagai inisiatif strategis yang berdampak nyata. Salah satu langkah signifikan yang dilakukan adalah mendorong penambahan jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBN) untuk memudahkan akses nelayan terhadap bahan bakar, yang merupakan kebutuhan vital dalam mendukung aktivitas melaut. Hingga saat ini, terdapat empat SPBN yang aktif beroperasi di Lempasing, Kalianda, Labuan Maringgai, dan Kota Agung. Pemerintah juga terus berupaya memperluas jaringan SPBN dengan membangun fasilitas baru di beberapa lokasi yang saat ini masih dalam proses pengerjaan. Menariknya, pembangunan SPBN ini tidak menggunakan anggaran dari APBN maupun APBD, melainkan sepenuhnya didukung oleh investasi dari pihak swasta, namun untuk izinnya dan pengambilan minyak bersubsidi melalui UPTD DKP Lampung. Langkah ini menunjukkan sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam memastikan kelancaran operasional nelayan serta mendukung keberlanjutan sektor perikanan di Lampung.

Selain mempermudah akses terhadap bahan bakar, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Kelautan dan Perikanan juga berupaya meningkatkan perlindungan bagi nelayan. Salah satu bentuk nyata dari upaya tersebut adalah program Pemberian Asuransi Nelayan yang telah berjalan sejak tahun 2020 bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Pada tahun 2024 ini, sebanyak 1.150 kartu asuransi telah diterbitkan untuk nelayan dari 14 kabupaten/kota. Program asuransi ini memberikan jaminan perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja yang mungkin terjadi saat melaut. Dengan adanya perlindungan ini, diharapkan nelayan merasa lebih aman dan dapat menjalankan usaha perikanannya secara berkelanjutan.

Selain akses bahan bakar dan perlindungan asuransi, pemerintah juga mendukung nelayan dalam hal permodalan. Melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), nelayan diberikan kemudahan

untuk memperoleh modal kerja di sektor perikanan. Dengan adanya akses kredit yang lebih mudah, diharapkan nelayan dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka. Secara keseluruhan, kombinasi dari berbagai kebijakan ini menunjukkan upaya pemerintah dalam membangun ekosistem yang mendukung keberlanjutan sektor perikanan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan di Provinsi Lampung.

2.3 REVIU CAPAIAN KINERJA MAKRO KESRA REGIONAL LAMPUNG

Dalam rangka mengevaluasi efektivitas kebijakan makroekonomi dan kesejahteraan di Provinsi Lampung, perbandingan antara target yang

ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2024 dengan realisasi capaian menjadi indikator penting. Pencapaian yang sesuai atau bahkan melampaui target mencerminkan kebijakan yang efektif, sementara indikator yang belum tercapai menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang.

Berdasarkan hasil reviu terhadap indikator-indikator utama, sebagian besar target yang ditetapkan dalam RKPD 2024 berhasil tercapai, bahkan beberapa indikator menunjukkan capaian yang melampaui ekspektasi sebagaimana tampak pada tabel 2.11.

Tabel 2.11. Hasil Reviu Efektivitas Kebijakan Makro Ekonomi dan Kesejahteraan Provinsi Lampung Tahun 2024

No.	Sasaran Makro Kesra	Target RKPD 2024	Realisasi 2024	Proyeksi RKPD 2025	Hasil Reviu
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,55 – 5,5	4,57 (ctc)	4,9 – 5,3	Pertumbuhan ekonomi Lampung pada tahun 2024 menunjukkan kinerja yang solid, berhasil mencapai target dan tetap berada dalam rentang yang ditetapkan dalam RKPD. Pencapaian ini didorong oleh meningkatnya aktivitas industri serta semakin kuatnya mobilitas angkutan penumpang dan barang, yang mencerminkan peningkatan konektivitas dan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.
2.	Inflasi (%)	3±1	1,57	1,5 – 3,5	Inflasi di Lampung pada tahun 2024 menunjukkan tren penurunan dan mendekati batas bawah rentang inflasi yang ditetapkan dalam RKPD, meskipun masih berada di bawahnya. Kondisi ini mencerminkan efektivitas kebijakan pengendalian harga yang telah diterapkan, khususnya melalui berbagai langkah strategis yang dijalankan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung. Secara keseluruhan, inflasi di Provinsi Lampung sepanjang tahun 2024 mencerminkan keberhasilan berbagai kebijakan pengendalian harga. Meskipun demikian, tantangan masih tetap ada, terutama dalam menjaga stabilitas harga komoditas strategis seperti beras dan hortikultura, yang memerlukan perhatian lebih dalam kebijakan ke depan.
3.	IPM (Indeks)	70,6 – 70,9	73,13	72,97	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung pada tahun 2024 berhasil melampaui target yang ditetapkan dalam RKPD, mencerminkan tren positif dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Capaian ini didorong oleh perbaikan di seluruh dimensi utama penyusun IPM, yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Namun, tantangan tetap ada. Meskipun mengalami peningkatan, IPM Lampung masih berada di bawah rata-rata nasional dan beberapa provinsi lain di regional Sumatera. Hal ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih intensif dan terarah untuk mengejar ketertinggalan dan memastikan pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
4.	Kemiskinan (%)	11,4 – 10,9	10,62	10,0 – 9,5	Tingkat kemiskinan Provinsi Lampung pada September 2024 berhasil melampaui target RKPD, didorong oleh penurunan angka kemiskinan di perkotaan. Tren positif ini mencerminkan efektivitas peningkatan akses dan kualitas lapangan kerja serta program pemberdayaan masyarakat di wilayah perkotaan. Namun, di sisi lain, angka kemiskinan di perdesaan September 2024 justru mengalami peningkatan dibandingkan Maret 2024, menandakan perlunya optimalisasi pemanfaatan Dana Desa agar lebih berdampak pada pengentasan kemiskinan. Diperlukan <i>extra effort</i> dalam menekan angka kemiskinan di perdesaan. Selain itu, secara keseluruhan, tingkat kemiskinan di Lampung masih berada di atas rata-rata nasional dan regional Sumatera, sehingga memerlukan intervensi lintas sektor.
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,0 – 3,8	4,19	4,0 – 3,86	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung pada Agustus 2024 belum mencapai target yang ditetapkan dalam RKPD. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi kondisi ini adalah struktur tenaga kerja yang masih didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan SD ke bawah, yang mencakup 35,53% dari total angkatan kerja. Hal ini menjadi tantangan dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas tenaga kerja agar selaras dengan kebutuhan pasar kerja yang semakin dinamis.
6.	Rasio Gini (nilai)	0,293 – 0,314	0,301	0,321 – 0,318	Rasio Gini Provinsi Lampung pada September 2024 berhasil mencapai target RKPD, menunjukkan kemajuan nyata dalam upaya pengurangan ketimpangan, terutama di wilayah perdesaan. Distribusi pendapatan di perdesaan yang lebih merata mencerminkan bahwa kebijakan pembangunan semakin inklusif dan mampu menjangkau seluruh lapisan

No.	Sasaran Makro Kesra	Target RKPD 2024	Realisasi 2024	Proyeksi RKPD 2025	Hasil Reviu
					masyarakat, termasuk daerah terpencil yang selama ini rentan terhadap kesenjangan ekonomi
7.	NTP (nilai)	105 – 1106	124,97	116 – 117	Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Lampung pada tahun 2024 berhasil melampaui target maksimal RKPD, mencerminkan peningkatan kesejahteraan petani. Capaian ini terutama didorong oleh kenaikan NTP pada subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat, khususnya komoditas kopi, yang mendapat manfaat dari tren harga global yang tinggi. Selain itu, dukungan Pemerintah Daerah melalui program e-KPB semakin memperkuat sektor pertanian dengan mengintegrasikan berbagai kebutuhan petani melalui pemanfaatan teknologi informasi, sehingga meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas dalam ekosistem pertanian.
8.	PDRB Perkapita ADHB (Juta Rp)	45 – 46	51,37	52,6 – 54,6	PDRB Perkapita ADHB tahun 2024 melampaui target maksimal pada RKPD, mencerminkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi yang semakin inklusif. Capaian ini mencerminkan efektivitas kebijakan pembangunan dan penguatan sektor-sektor produktif di Lampung, yang berkontribusi pada peningkatan pendapatan per kapita.

Sumber: RKPD dan BPS, 2024 dan 2025 (diolah)

Overall, capaian indikator makroekonomi dan kesejahteraan di Provinsi Lampung menunjukkan mencerminkan resiliensi di tengah berbagai tantangan. Pemerintah daerah perlu terus mempertahankan kebijakan yang telah terbukti efektif sekaligus mengantisipasi tantangan di masa depan, terutama dalam mengatasi ketimpangan

ekonomi dan menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan strategi yang tepat, pembangunan di Lampung dapat terus berjalan *on track* menuju target yang lebih tinggi di tahun 2025. Berdasarkan hasil tersebut, maka penetapan target indikator makro ekonomi di 2024 sudah *proved reasonable*.



SUPLEMEN 4

Analisis Dampak Subsidi Kredit Kepada Masyarakat

Analisis Pengaruh Besaran Pinjaman KUR Terhadap Kenaikan Omzet Debitur di Provinsi Lampung

Penelitian ini menganalisis pengaruh besaran pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap kenaikan omzet debitur dengan regresi linear. Data yang digunakan adalah hasil Survei Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kredit Program Semester II Tahun 2024. Hasil analisis menunjukkan hubungan positif sedang antara pinjaman KUR dan kenaikan omzet debitur, dengan korelasi (R) sebesar 0,5513. Persamaan regresi menunjukkan bahwa peningkatan pinjaman sebesar 1% meningkatkan omzet sebesar 0,8075%. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 30,4% menunjukkan bahwa variabilitas kenaikan omzet debitur dijelaskan oleh besaran pinjaman KUR, sementara 69,6% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Uji signifikansi model dengan P -value sebesar 0,00959 (kurang dari $\alpha = 0,05$) menunjukkan bahwa model regresi signifikan secara statistik. Analisis residual mengungkapkan bahwa data memenuhi asumsi kenormalan dengan uji Shapiro-Wilk sebesar 0,3218.



Model regresi

$$\ln(\text{Omzet}) = 0,9826 + 0,8075 \ln(\text{KUR})$$

Setiap kenaikan 1% dalam KUR dapat meningkatkan omzet sebesar 0,8075%, dengan asumsi faktor lain tetap konstan.

Koefisien positif menunjukkan hubungan linier antara jumlah KUR yang diambil dengan omzet debitur. Dengan kata lain, semakin besar KUR yang diambil, semakin tinggi omzet debitur.



Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besaran pinjaman KUR berkontribusi terhadap peningkatan omzet debitur, meskipun pengaruhnya tidak dominan. Ini menandakan perlunya kebijakan pelengkap, seperti pelatihan manajerial, akses pasar yang lebih luas, dan diversifikasi produk bagi debitur. Pendekatan holistik dapat meningkatkan dampak KUR secara keseluruhan terhadap performa usaha debitur.



Rekomendasi Kebijakan

- **Optimalisasi KUR:** Perbaiki skema pembiayaan dengan memperhatikan kebutuhan spesifik debitur.
- **Pendampingan Usaha:** Penyediaan pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan kapasitas manajerial.
- **Penguatan Ekosistem Usaha:** Kolaborasi dengan lembaga keuangan, pemerintah daerah, dan mitra strategis untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM.

BAB III

ANALISIS FISKAL REGIONAL

“ Sinergi antara APBN dan APBD sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional **”**

-Sri Mulyani Indrawati -



BAB III ANALISIS FISKAL REGIONAL

3.1 PELAKSANAAN APBN

Kinerja APBN Regional Lampung hingga 31 Desember 2024 menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dan positif. Pendapatan Negara melampaui target, sementara Belanja Negara akseleratif mendukung pembangunan daerah.

Realisasi Pendapatan Negara sebesar Rp12.366,11 miliar, tercapai 104,68 persen dari target, dan berhasil tumbuh 14,41 persen (yoy). Hal ini utamanya didorong oleh pertumbuhan kinerja Penerimaan Perpajakan (16,11 persen, yoy) yang mengalami pertumbuhan pada Pajak Dalam Negeri (11,63 persen, yoy) dan Pajak Perdagangan Internasional (52,82 persen, yoy). Di sisi lain, PNBP juga mencatatkan pertumbuhan 0,24 persen (yoy) sejalan dengan pertumbuhan Pendapatan BLU.

Realisasi Belanja Negara sebesar Rp33.419,85 M, tercapai 98,45 persen dari pagu, tumbuh 5,41 persen (yoy) didukung oleh kinerja penyerapan anggaran Belanja K/L dan penyaluran Dana TKD.

Belanja Pegawai dan Belanja Barang mendorong pertumbuhan kinerja Belanja K/L sebesar 6,89 persen (yoy). Dari sisi penyaluran TKD mencatatkan pertumbuhan positif 4,70 persen (yoy) didorong oleh seluruh komponen DBH, DAU, DAK Fisik, DAK Non Fisik, Dana Desa, dan Insentif Fiskal. Sementara, penyaluran Hibah menunjukkan perlambatan.

Defisit Anggaran regional Lampung s.d. 31 Desember 2024 sebesar Rp21.053,74 miliar, menyempit 0,75 persen dari tahun sebelumnya. Penurunan defisit ini sejalan dengan kinerja positif penerimaan negara dan pengendalian belanja yang berkualitas. Defisit menandakan bahwa APBN berusaha keras menjadi *shock absorber* dalam menjaga daya beli masyarakat tengah tantangan fluktuasi harga komoditas global dan ketidakpastian geopolitik yang juga mempengaruhi ekonomi regional Lampung.

Tabel 3.1 I-Account APBN di Provinsi Lampung Realisasi Tahun 2024 (dalam miliar rupiah)

I-Account (Miliar Rupiah)	T.A. 2022			T.A. 2023			T.A. 2024			% Growth 2023-2024
	Pagu-P	Realisasi	% Real	Pagu-P	Realisasi	% Real	Pagu	Realisasi	% Real	
A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	9.670,84	10.912,00	112,83	10.229,84	10.808,31	105,65	11.813,41	12.366,11	104,68	14,41
1. Pendapatan Perpajakan	8.794,52	9.714,49	110,46	9.267,37	9.335,50	100,74	10.762,21	10.839,76	100,72	16,11
a. Pajak Dalam Negeri	6.600,93	7.189,20	108,91	8.054,66	8.319,05	103,28	9.273,35	9.286,44	100,14	11,63
i. Pajak Penghasilan	3.508,37	3.223,60	91,88	3.557,99	3.703,50	104,09	3.892,64	3.948,16	101,43	6,61
ii. Pajak Pertambahan Nilai	2.802,46	3.686,55	131,55	4.180,11	4.293,42	102,71	5.084,81	5.009,21	98,51	16,67
iii. Pajak Bumi dan Bangunan	155,03	143,70	92,69	160,43	172,32	107,41	135,55	153,18	113,00	(11,11)
v. Cukai	0,03	3,42	11.178,34	2,93	3,55	121,35	7,03	13,92	197,97	291,53
vi. Pajak Lainnya	135,03	131,93	97,70	153,20	146,25	95,46	153,32	161,98	105,65	10,76
b. Pajak Perdagangan Internasional	2.193,59	2.525,29	115,12	1.212,71	1.016,45	83,82	1.488,86	1.553,32	104,33	52,82
i. Bea Masuk	287,75	350,15	121,69	285,08	504,16	176,85	559,83	571,35	102,06	13,33
ii. Bea Keluar	1.905,84	2.175,13	114,13	927,63	512,29	55,23	929,03	981,97	105,70	91,68
2. Pendapatan Negara Bukan Pajak	876,32	1.197,51	136,65	962,47	1.472,81	153,02	1.051,20	1.526,35	145,20	3,64
a. PNBP Lainnya	409,06	578,78	141,49	477,33	820,69	171,93	423,41	785,01	185,40	(4,35)
b. Pendapatan Badan Layanan Umum	467,26	618,73	132,42	485,14	652,11	134,42	627,80	741,35	118,09	13,68
B. BELANJA NEGARA	30.716,55	29.956,47	97,53	32.186,18	31.705,41	98,51	33.946,54	33.419,85	98,45	5,41
1. Belanja Pemerintah Pusat (BPP)	9.151,31	8.822,40	96,41	10.586,76	10.234,02	96,67	11.191,14	10.939,23	97,75	6,89
a. Belanja Pegawai	3.791,56	3.754,41	99,02	3.828,89	3.782,84	98,80	4.293,53	4.335,70	100,98	14,61
b. Belanja Barang	3.404,28	3.264,86	95,90	5.060,35	4.901,78	96,87	5.479,14	5.247,57	95,77	7,05
c. Belanja Modal	1.923,35	1.771,01	92,08	1.659,35	1.511,22	91,07	1.374,70	1.312,19	95,45	(13,17)
d. Bantuan Sosial	32,11	32,11	100,00	38,18	38,18	100,00	43,77	43,77	100,00	14,66
2. Transfer Ke Daerah (TKD)	21.565,25	21.134,07	98,00	21.599,42	21.471,39	99,41	22.755,41	22.480,62	98,79	4,70
a. Dana Transfer Umum (DTU)	13.108,79	13.121,87	100,10	13.649,87	13.647,60	99,98	14.584,63	14.459,17	99,14	5,95
i. Dana Alokasi Umum	12.021,11	12.021,11	100,00	12.701,28	12.700,98	100,00	13.954,49	13.829,07	99,10	8,88
ii. Dana Bagi Hasil	1.087,68	1.100,76	101,20	948,59	946,62	99,79	630,14	630,10	99,99	(33,44)
b. Dana Transfer Khusus (DTK)	6.016,88	5.573,83	92,64	5.389,96	5.269,62	97,77	5.580,96	5.435,59	97,40	3,15
i. Dana Alokasi Khusus Fisik	1.920,27	1.777,88	92,58	1.232,35	1.193,40	96,84	1.453,58	1.376,06	94,67	15,31
ii. Dana Alokasi Khusus Nonfisik	4.096,61	3.795,95	92,66	4.147,62	4.075,30	98,26	4.125,51	4.057,71	98,36	(0,43)
iii. Hibah Daerah	-	-	0,00	9,99	0,92	9,16	1,87	1,82	97,75	99,22
c. Insentif Fiskal	112,75	112,75	100,00	255,96	253,05	98,86	253,93	253,93	100,00	0,35
d. Dana Desa	2.326,83	2.325,62	99,95	2.303,63	2.301,13	99,89	2.335,89	2.331,93	99,83	1,34
C. SURPLUS (DEFISIT)	(21.045,72)	(19.044,47)	90,49	(21.956,34)	(20.897,11)	95,18	(22.133,13)	(21.053,74)	95,12	0,75
D. PEMBIAYAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E. SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)	(21.045,72)	(19.044,47)	90,49	(21.956,34)	(20.897,11)	95,18	(22.133,13)	(21.053,74)	95,12	0,75

Sumber: OM-SPAN, Simtrada, Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Kanwil DJBC Sumbagbar, ALCO, 2025 (data diolah)

3.1.1 Pendapatan Negara

Hingga akhir 2024, Pendapatan Negara mencapai Rp12.366,11 miliar atau 104,68 persen dari target Rp11.813,41 miliar, tumbuh 14,41 persen (yoy). Pertumbuhan ini terutama didorong oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang meningkat seiring dengan naiknya konsumsi, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta ekspor komoditas utama seperti kopi, teh, dan kakao. Perpajakan Dalam Negeri terus menunjukkan tren positif, didukung oleh optimalisasi layanan perpajakan dan penguatan sektor ekonomi domestik.

Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga melampaui target, yang ditopang oleh peningkatan layanan di sektor Pendidikan dan Kesehatan, serta perbaikan tata kelola Badan Layanan Umum (BLU) yang semakin efektif dalam memberikan pelayanan.

3.1.1.1 Penerimaan Perpajakan

Pada awal Tahun 2024 Penerimaan Perpajakan di Lampung ditetapkan sebesar Rp10.357,74 miliar, kemudian berdasarkan Perpres 206 Tahun 2024 terdapat penyesuaian target penerimaan pajak menjadi Rp10.762,21 miliar pada akhir tahun 2024. Penyesuaian target ini meningkat 3,90 persen dari target awal tahun 2024.

Tabel 3.2 Capaian Penerimaan Perpajakan s.d. Desember 2024 terhadap Target APBN dan Perpres 206/2024 (miliar rupiah)

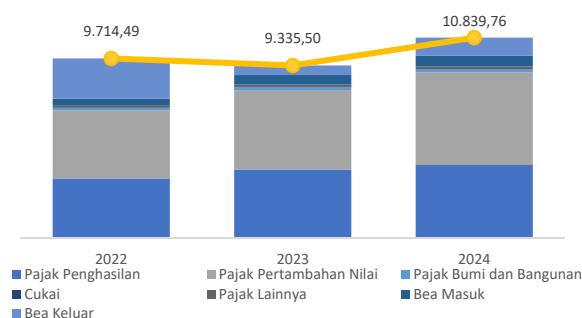
Uraian	Pagu		Realisasi s.d. Desember 2024	% Ketercapaian Target	
	APBN 2023	PERPRES 206/2024		APBN 2023	PERPRES 206/2024
A. Pajak Dalam Negeri	9.035,84	9.273,35	9.286,44	102,77	100,14
Pajak Penghasilan	4.472,71	3.892,64	3.948,16	88,27	101,43
Pajak Pertambahan Nilai	4.185,67	5.084,81	5.009,21	119,68	98,51
Pajak Bumi dan Bangunan	153,56	135,55	153,18	99,75	113,00
Cukai	2,25	7,03	13,92	619,53	197,97
Pajak Lainnya	221,65	153,32	161,98	73,08	105,65
B. Pajak Perdagangan Internasional	1.321,89	1.488,86	1.553,32	117,51	104,33
Bea Masuk	548,86	559,83	571,35	104,10	102,06
Bea Keluar/Pungutan Ekspor	773,03	929,03	981,97	127,03	105,70
Total	10.357,74	10.762,21	10.839,76	104,65	100,72

Sumber: Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Kanwil DJBC Sumbagbar, 2025 (diolah)

Berdasarkan target awal, capaian Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri hingga akhir 2024 mencapai 102,77 persen dari target APBN, sedangkan Penerimaan Perpajakan Perdagangan

Internasional mencapai 117,15 persen dari target. Sedangkan, mengacu pada target akhir sesuai Perpres 206 Tahun 2024, Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri mencapai 100,14 persen, sementara Penerimaan Perpajakan Perdagangan Internasional sebesar 104,33 persen dari target. Peningkatan ini didorong oleh meningkatnya importasi gula dan beras. Secara keseluruhan, total Pendapatan Perpajakan terhadap target Perpres mencapai 100,72 persen.

Grafik 3.1 Tren Kontribusi Komponen Penerimaan Perpajakan Tahun 2022-2024 (miliar rupiah)



Sumber: Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Kanwil DJBC Sumbagbar, OM-SPAN, 2025 (data diolah)

Tren menunjukkan bahwa realisasi Penerimaan Perpajakan dalam tiga tahun terakhir (2022–2024) didominasi oleh PPN dan PPh, dengan pertumbuhan yang konsisten hingga akhir 2024. Bea Masuk, sebagai kontributor terbesar ketiga, mengalami fluktuasi akibat dinamika penerimaan Bea Keluar, yang sangat dipengaruhi oleh harga komoditas global, khususnya CPO, sebagai komoditas ekspor utama Lampung.

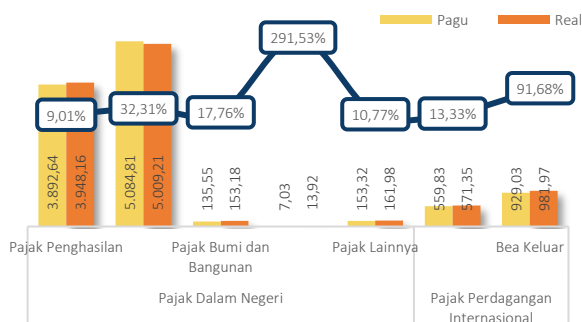
Pada tahun 2022, kenaikan harga CPO meningkatkan harga referensi Bea Keluar, sehingga penerimaannya mencapai Rp2.175,13 miliar. Namun, pada 2023, moderasi harga CPO menyebabkan penerimaan Bea Keluar turun signifikan menjadi Rp512,29 miliar. Memasuki 2024, penerimaan Bea Keluar mengalami pemulihan hingga mencapai Rp981,97 miliar, didorong oleh peningkatan volume ekspor meskipun harga masih berfluktuasi.

Fluktuasi penerimaan Bea Keluar ini dipengaruhi oleh perubahan kebijakan ekspor, dinamika pasar global, serta kapasitas produksi perkebunan yang meningkat tanpa diimbangi stabilitas harga.

Sementara itu, kenaikan penerimaan PPN dari Rp3.686,55 miliar (2022) menjadi Rp5.009,21 miliar (2024) mencerminkan peningkatan konsumsi domestik dan aktivitas perdagangan yang lebih tinggi.

Selanjutnya, berfokus pada tahun 2024, realisasi penerimaan perpajakan pemerintah pusat di regional Lampung secara agregat tumbuh sebesar 16,11 persen (yoy) atau secara nominal mencapai sebesar Rp10.839,76 miliar. Penerimaan Perpajakan di Lampung didominasi oleh penerimaan Pajak Dalam Negeri yang tumbuh hingga 11,63 persen (yoy). Seluruh komponen penerimaan Perpajakan Dalam Negeri menunjukkan pertumbuhan *double-digit*. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ekonomi domestik di Lampung masih terjaga solid dan terus berlanjut tumbuh. Dari sisi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional juga mengalami peningkatan sebesar 52,82 persen (yoy).

Grafik 3.2 Target, Realisasi, Pertumbuhan Penerimaan Perpajakan di Lampung Tahun 2022-2024 (miliar rupiah, persen)



Sumber: Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Kanwil DJBC Sumbagbar, 2025 (data diolah)

Kontributor utama Penerimaan Pajak Dalam Negeri di Lampung tahun 2024 berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mencapai Rp5.009,21 miliar, dengan realisasi 119,68 persen dari target APBN awal atau 98,51 persen dari target Perpres 206/2024. PPN menyumbang 40,51 persen dari total penerimaan, tumbuh 16,67 persen (yoy) yang didorong oleh peningkatan PPN Dalam Negeri, penerapan tarif PPN 11 persen, serta kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang mencerminkan daya beli masyarakat tetap terjaga.

Selain itu, Pajak Penghasilan (PPh) menjadi kontributor terbesar kedua dengan realisasi

Rp3.948,16 miliar atau 31,93 persen dari total penerimaan Pajak Dalam Negeri. Penerimaan PPh mencapai 88,27 persen dari target awal APBN dan 101,43 persen dari target Perpres 206/2024, dengan pertumbuhan 6,61 persen (yoy). Peningkatan ini terutama didorong oleh PPh Pasal 21, yang tumbuh 17,26 persen (yoy) dengan kontribusi Rp1.606,98 miliar. Namun, PPh Pasal 25/29 Badan mengalami kontraksi 10,51 persen (yoy), dengan realisasi Rp971,37 miliar, akibat penurunan setoran pajak dari sektor pengolahan, terutama industri gula, pati ubi kayu, dan minyak kelapa sawit (CPO), yang terdampak oleh fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi global. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga mengalami penurunan 11,11 persen (yoy), sementara pajak lainnya di Lampung mencatatkan pertumbuhan 10,76 persen (yoy).

Di sisi lain, Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional tercatat tumbuh sebesar 52,82 persen (yoy). Secara persentase ketercapaian target, apabila mengacu pada target awal APBN Tahun 2024 yakni Rp1.321,89 miliar, capaian Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional telah mencapai target hingga 117,51 persen. Namun, apabila dilihat dari persentase ketercapaian target berdasarkan Perpres 206 Tahun 2024, Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional tercapai sebesar 104,33 persen dari target.

Penerimaan Bea Masuk terealisasi sebesar Rp571,35 miliar, atau 104,10 persen dari target awal APBN 2024 dan 102,06 persen dari target Perpres 206 Tahun 2024, berhasil tumbuh 13,33 persen (yoy). Pertumbuhan ini didukung oleh kenaikan importasi beras untuk menjaga cadangan pangan pokok dan stabilitas harga pangan di Lampung sebagai dampak perubahan iklim yang berpengaruh pada produktivitas beras dalam negeri.

Sementara itu, penerimaan yang bersumber dari Bea Keluar tumbuh sebesar 91,68 persen (yoy) atau terealisasi sebesar Rp981,97 miliar, tercapai 127,03 persen dari target awal APBN 2024 atau 105,70 persen dari target Perpres 206/2024. Penurunan ini utamanya terjadi akibat moderasi harga referensi

CPO beserta turunannya di pasar global, khususnya minyak kelapa sawit yang menduduki peringkat pertama komoditas terbesar ekspor dari Lampung.

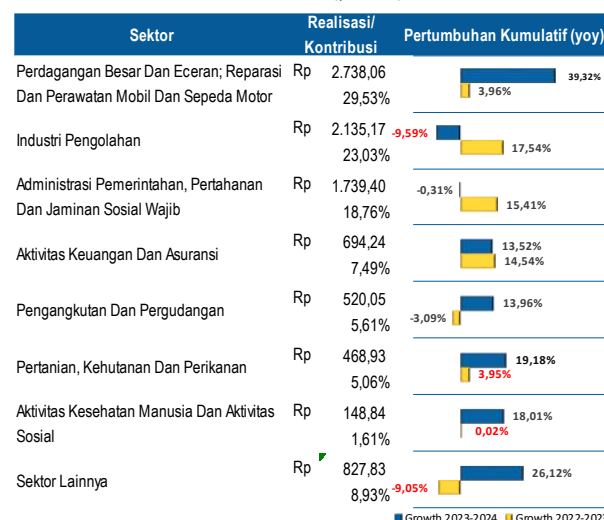
Dari sisi penerimaan negara berupa Cukai, pada tahun 2024 mencatatkan pertumbuhan yang signifikan sebesar 291,53 persen (yoy) atau nominal sebesar Rp13,92 miliar yang disebabkan karena adanya realisasi atas pemesanan Pita Cukai (CK-1) atas komoditas rokok elektrik dan penerimaan atas denda administrasi cukai dengan berlakunya peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 237/PMK.04/2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai. Secara persentase, realisasi Cukai mencapai 619,53 persen dari target awal APBN 2024 atau 197,97 persen dari target Perpres 26/2024. Pada Kuartal IV, realisasi penerimaan Cukai meningkat cenderung lebih tinggi dipengaruhi oleh Pemesanan Pita Cukai atas rokok elektrik yang memiliki tren peningkatan di akhir tahun.

Berdasarkan sektor pajak sebagaimana pada Grafik 3.3, Sektor Perdagangan Besar Dan Eceran menjadi sektor utama dalam menyumbang penerimaan Pajak Dalam Negeri di Lampung dengan kontribusi 29,53 persen. Kinerja kumulatif secara yoy pada Tahun 2024 tumbuh positif sebesar 39,32 persen (yoy) dipicu oleh peningkatan kegiatan ekonomi pada perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) kontrak, perdagangan besar kopi, teh dan kakao serta perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya.

Industri Pengolahan yang merupakan sektor terbesar kedua dengan kontribusi 23,03 persen dari total Pajak Dalam Negeri, terkontraksi 9,59 persen dari tahun lalu sejalan dengan penurunan pada setoran pajak pada industri gula pasir, industri pati ubi kayu dan industri minyak mentah kelapa sawit (CPO). Sementara itu, Sektor Administrasi Pemerintahan terkontraksi sebesar 0,31 persen (yoy), dipicu oleh perubahan fokus atau prioritas dalam belanja pemerintah pada akhir tahun 2024 dalam rangka efisiensi dalam administrasi pemerintahan, sehingga mengurangi aktivitas ekonomi yang sebelumnya menjadi sumber

penerimaan PPN dan PPh Pasal 22 dari aktivitas pemerintah.

Grafik 3.3 Penerimaan Pajak Neto Kumulatif per Sektor di Lampung Tahun 2024 (persen)



Sumber: Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, 2025 (data diolah)

Sementara itu, kinerja kumulatif penerimaan pajak dari Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, tercatat tumbuh 13,52 persen (yoy) akibat peningkatan pada Industri Perbankan seperti meningkatnya jasa kredit yang ditopang oleh kredit investasi dan kredit modal kerja. Kinerja sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebagai sektor basis di Lampung berhasil kembali tumbuh 19,18 persen (yoy) dengan kontribusi 5,06 persen dari Penerimaan Pajak Dalam Negeri. Peningkatan penerimaan Pajak dari Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Tahun 2024 ini dipicu oleh kenaikan harga komoditas pertanian.

Secara keseluruhan kinerja Penerimaan Pajak di Lampung sampai dengan akhir 2024 melanjutkan tren positif, hal ini tercermin dari kelima sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan Pajak Dalam Negeri di Lampung menunjukkan tren pertumbuhan dari tahun sebelumnya. Capaian tersebut didukung oleh upaya pemerintah melalui penyempurnaan layanan dan regulasi di bidang perpajakan dan kerja sama masyarakat dalam membangun negara melalui kepatuhan pembayaran dan pelaporan perpajakan.

3.1.1.2 Analisis Tax Ratio

Tax ratio digunakan untuk melihat seberapa besar porsi pajak dalam perekonomian suatu daerah

dengan mengukur perbandingan antara penerimaan perpajakan dengan PDRB suatu daerah pada periode tertentu. Penerimaan Perpajakan dihitung dengan menjumlahkan Penerimaan Pajak Dalam Negeri dan Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional. Tabel 3.3 menyajikan perhitungan tax ratio Tahun 2024 di Lampung

Tabel 3.3 Tax Ratio Penerimaan Pajak 2022-2024 di Lampung (miliar rupiah)

Uraian	2022	2023	2024
Pajak Dalam Negeri	7.189,20	8.319,05	9.286,44
Pajak Perdagangan Internasional	2.525,29	1.016,45	1.553,32
Total Pendapatan Perpajakan	9.714,49	9.335,50	10.839,76
PDRB ADHB s.d. Desember	414.131,42	448.880,25	483.906,99
Tax Ratio	2,35%	2,08%	2,24%

Sumber: Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Kanwil DJBC Sumbagbar, BPS, 2025 (data diolah)

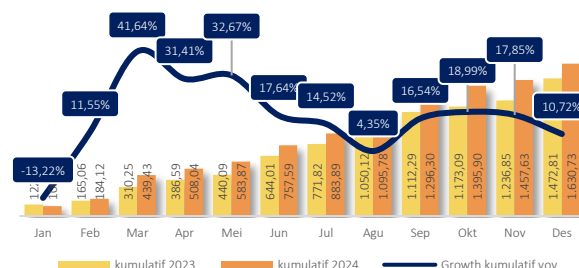
Berdasarkan Tabel 3.3 tersebut diperoleh informasi bahwa tax ratio pemerintah pusat sampai dengan Desember 2024 di Lampung sebesar 2,24 persen, meningkat dari tax ratio s.d. Desember 2023 sebesar 2,08 persen. Meningkatnya angka tax ratio ini terjadi seiring dengan realisasi Pajak Perdagangan Internasional yang juga meningkat akibat impor komoditas seperti gula dan beras yang berkontribusi signifikan terhadap peningkatan penerimaan Bea Masuk. Demikian halnya dengan Penerimaan Pajak Dalam Negeri menunjukkan tren pertumbuhan selaras dengan pertumbuhan PDRB secara kumulatif. Pertumbuhan ini didukung oleh pemulihan ekonomi yang semakin solid, ekspansi sektor-sektor produktif, serta kebijakan perpajakan yang semakin adaptif dan terarah. Peningkatan kepatuhan wajib pajak, optimalisasi layanan digital, serta dorongan investasi dan konsumsi domestik turut memperkuat basis penerimaan pajak, menjadikannya salah satu pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Lampung secara berkelanjutan.

3.1.1.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), kinerja kumulatif sampai dengan akhir 2024 menunjukkan peningkatan secara yoy sebesar 10,72 persen. Sepanjang tahun 2024, kenaikan tertinggi realisasi PNBP terjadi pada Bulan Maret dan Agustus yang dipengaruhi oleh peningkatan pengesahan pendapatan yang diterima Satker BLU

berupa pendapatan atas jasa pelayanan pendidikan yang diterima oleh Perguruan Tinggi dan jasa layanan Kesehatan.

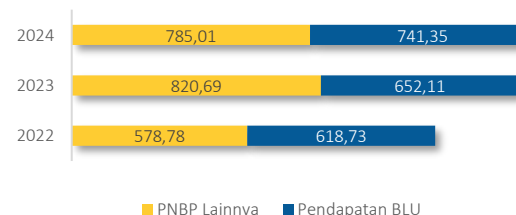
Grafik 3.4 Pertumbuhan Kumulatif PNBP Tahun 2024 (miliar rupiah)



Sumber: OM-SPAN, 2025 (data diolah)

Capaian penerimaan negara yang bersumber dari PNBP mencatatkan hasil yang memuaskan dan melebihi target hingga 145,20 persen pada akhir tahun. Secara nominal, realisasi PNBP di Lampung pada Tahun 2024 mencapai angka Rp1.526,35 miliar. Capaian ini didominasi oleh penerimaan Pendapatan Badan Layanan Umum yang meningkat sebesar 13,68 persen (yoy).

Grafik 3.5 Tren PNBP Provinsi Lampung Tahun 2022-2024 (miliar rupiah)



Sumber: OM-SPAN, 2025 (data diolah)

Di tahun 2024, komponen PNBP Lainnya berkontribusi sebesar 51,43 persen dari total PNBP, atau secara nominal sebesar Rp785,01 miliar, dimana berkontraksi 4,35% (yoy), dan mencapai 185,40 persen dari target. Realisasi PNBP Lainnya utamanya bersumber dari penerimaan Pendapatan Biaya Pendidikan pada Perguruan Tinggi yang sebagian besar merupakan penerimaan Satker Institut Teknologi Sumatera (ITERA). Selain itu, penerimaan PNBP Lainnya disumbang oleh Pendapatan Jasa Kepelabuhanan khususnya Pelabuhan Panjang yang merupakan Pelabuhan Internasional sebagai pintu utama keluar masuknya barang/jasa ke Kota Bandar Lampung, serta

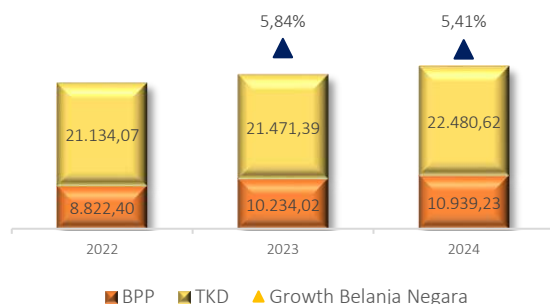
Pendapatan atas Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).

Selanjutnya, PNPB yang disumbang dari pendapatan Satker BLU terealisasi sebesar Rp741,35 miliar atau 118,09 persen dari target APBN yang tumbuh 13,68 persen (yoy). Capaian ini sebagian besar didukung oleh Pendapatan jasa layanan Pendidikan yang diberikan oleh Satker BLU, dengan pendapatan tertinggi berasal dari Universitas Lampung. Selain itu, Pendapatan Jasa Layanan Rumah Sakit Bhayangkara juga turut menyumbang PNPB di Lampung melalui penerimaan atas layanan kesehatan. Dengan terus bertumbuhnya penerimaan dari Satker BLU mencerminkan kualitas layanan yang lebih baik dan kepercayaan masyarakat yang meningkat atas peran serta pemerintah.

3.1.2 Belanja Negara

Alokasi Belanja Negara di wilayah Lampung pada APBN Tahun 2024 sebesar Rp33.946,54 miliar. Per 31 Desember 2024 Belanja Negara telah terealisasi sebesar Rp33.419,85 miliar atau tumbuh 5,41 persen (yoy) dibandingkan dengan tahun 2023 dengan persentase penyerapan mencapai 98,45 persen.

Grafik 3.6 Tren Belanja Negara Tahun 2022 s.d. 2024 Provinsi Lampung (miliar rupiah)



Sumber: OM-SPAN, 2025 (data diolah)

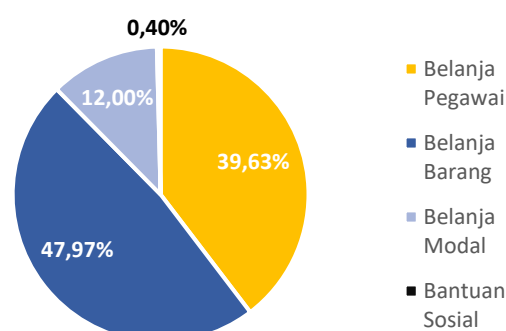
Tren belanja negara provinsi Lampung selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Realisasi Belanja Negara didominasi oleh kinerja Transfer ke Daerah (TKD) yang berkontribusi 67,27 persen dari total Belanja APBN di Lampung. Komposisi terbesar realisasi Belanja Negara berasal dari penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dengan realisasi Rp13.829,07 miliar yang tumbuh 8,88 persen (yoy)

dari periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, kontribusi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terhadap total Belanja Negara yakni 32,73 persen yang komposisi terbesarnya merupakan realisasi Belanja Barang dan Belanja Pegawai yang secara berurutan tumbuh 7,05 persen (yoy) dan 14,61 persen (yoy).

3.1.2.1 Belanja Pemerintah Pusat (BPP)

Realisasi BPP sampai dengan akhir Desember 2024, mencapai Rp10.939,23 miliar lebih tinggi 6,89 persen (yoy) dari tahun lalu, dengan tingkat penyerapan sebesar 97,75 persen dari alokasi pagu.

Grafik 3.7. Proporsi Belanja Pemerintah Pusat 2024 (miliar rupiah)



Sumber: OM-SPAN, 2025 (data diolah)

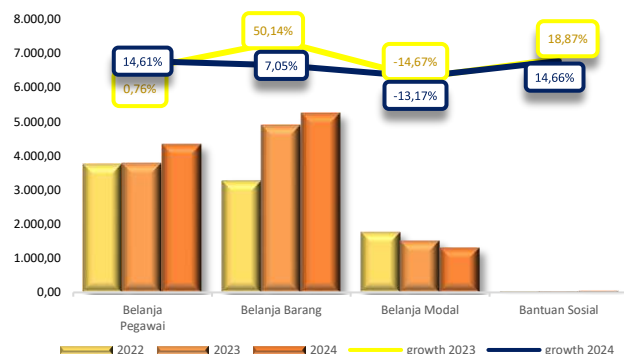
Kontributor realisasi terbesar disumbang dari Belanja Barang dengan besaran 47,97 persen, kemudian Belanja Pegawai 39,63 persen, Belanja Modal 12,00 persen, dan Belanja Bantuan Sosial 0,40 persen.

3.1.2.2 Berdasarkan Jenis Belanja

Dari keseluruhan jenis belanja, Belanja Pegawai memiliki pertumbuhan yang paling tinggi mencapai 14,61 persen (yoy) atau secara nominal sebesar Rp4.335,70 miliar dengan kontribusi 39,63 persen dari total BPP di Lampung. Pertumbuhan tersebut seiring dengan peningkatan Belanja Bahan dan Belanja Barang Non Operasional Lainnya khususnya dalam rangka mendukung persiapan agenda strategis nasional yakni pelaksanaan pemilu 2024, serta peningkatan Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan diantaranya melalui Satuan Kerja (Satker) Kementerian PUPR. Belanja Barang juga dimanfaatkan diantaranya untuk membiayai

keperluan operasional layanan pemerintah oleh Satker, serta pemeliharaan dan perawatan baik infrastruktur maupun Barang Milik Negara (BMN).

Grafik 3.8 Growth Belanja Pemerintah Pusat per Jenis Belanja 2024 (miliar rupiah)



Sumber: OM-SPAN, 2025 (data diolah)

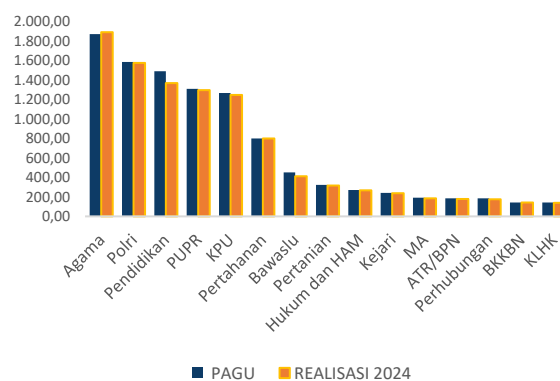
Sementara itu, realisasi Belanja Modal sebesar Rp1.312,19 miliar atau terkonsentrasi 13,17 persen (yoy) seiring dengan penurunan pagu di tahun 2024. Dalam pagu Belanja Modal yang belum terserap, diantaranya terdapat sisa anggaran kontraktual yang merupakan selisih atas nilai riil pelaksanaan kontrak yang telah selesai. Meskipun demikian, sisa Belanja Modal tersebut dapat mencerminkan adanya efisiensi pelaksanaan kontrak. Selain itu, penyerapan Belanja Modal yang belum optimal diantaranya karena terdapat belanja infrastruktur yang belum terpenuhi prasyaratnya, khususnya yang didanai oleh Pinjaman Luar Negeri. Belanja Modal antara lain dimanfaatkan untuk memperpanjang umur ekonomis aset melalui penambahan nilai jalan dan jembatan, pembangunan jaringan, gedung sarana pendidikan, serta pengadaan BMN diantaranya peralatan, mesin, dan aset fisik lainnya.

Kinerja Belanja Bantuan Sosial tumbuh 14,66 persen (yoy) atau secara nominal sebesar Rp43,77 miliar dengan tingkat penyerapan 100 persen dari alokasi pagu. Realisasi Belanja Bantuan Sosial di Lampung dimanfaatkan untuk pemberian bantuan kepada peserta didik yang disalurkan melalui UIN Raden Intan Lampung, IAIN Metro, dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung, sehingga alokasi dan kinerja penyaluran Belanja Bantuan sosial dipengaruhi oleh jumlah peserta didik yang

merupakan calon penerima bantuan dan jadwal penyaluran yang mengacu pada kalender akademik.

3.1.2.3 Berdasarkan Kementerian Negara/Lembaga

Grafik 3.9 Perbandingan Pagu dan Realisasi pada Lima Belas K/L Pagu Terbesar 2024 (miliar rupiah)

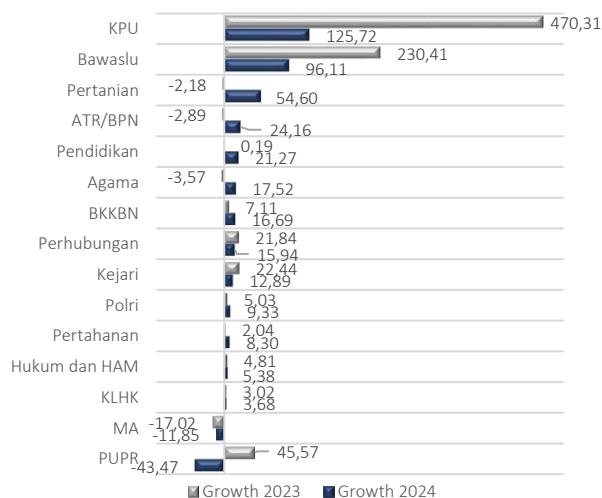


Sumber: OM SPAN, 2025 (data diolah)

Apabila melihat kinerja BPP sampai dengan akhir tahun 2024, tentunya tidak terlepas dari kinerja lima belas Kementerian/Lembaga (K/L) yang memiliki alokasi pagu APBN terbesar di Provinsi Lampung yang berkontribusi sebesar 93,49 persen dari total pagu BPP TA 2024. Sampai dengan akhir tahun 2024, Satker Kementerian Agama memiliki alokasi anggaran terbesar di Lampung yang didominasi oleh Belanja Pegawai, dengan persentase pertumbuhan realisasi tahun 2024 sebesar 17,52 persen dari tahun sebelumnya.

Apabila dilihat dari tingkat pertumbuhan, tingkat pertumbuhan terbesar terjadi pada Satker Komisi Pemilihan Umum dengan persentase peningkatan realisasi tahun 2024 sebesar 125,72 persen (yoy). Kemudian diikuti oleh Satker Bawaslu dengan peningkatan 96,11 persen (yoy). Pertumbuhan realisasi belanja yang tinggi ini utamanya dipengaruhi oleh penyerapan Belanja Barang untuk mendukung persiapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pilkada di Tahun 2024 yang dilaksanakan serentak secara nasional. Hal ini mencerminkan peran APBN dalam menunjang proses konsolidasi demokrasi melalui fungsi alokasi Belanja Negara.

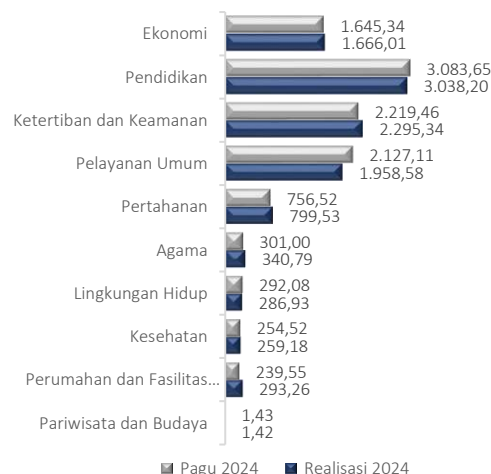
Grafik 3.10 Pertumbuhan Realisasi Belanja pada Lima Belas K/L Pagu Terbesar 2024 (persen)



Sumber: OM SPAN, 2025 (data diolah)

3.1.2.4 Berdasarkan Fungsi

Grafik 3.11. Realisasi BPP Berdasarkan Fungsi 2024 (miliar rupiah)



Sumber: SINTESA, 2025 (data diolah)

Jenis BPP juga diklasifikasikan berdasarkan fungsi pemerintahan yang menyangkut beberapa aspek dalam pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Alokasi belanja terbesar terdapat pada fungsi Pendidikan dengan persentase penyerapan 98,52 persen dari total pagu. Alokasi belanja negara pada fungsi pendidikan dilaksanakan oleh K/L teknis yang memiliki tugas dan fungsi strategis yang mendukung aspek-aspek Pendidikan antara lain Kementerian Pendidikan Riset, Kebudayaan dan Teknologi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Agama Kementerian Perhubungan,

dan beberapa K/L lainnya. Alokasi belanja tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM serta dukungan sarana prasarana yang optimal untuk menunjang pelaksanaan pendidikan mulai dari jenjang sekolah menengah hingga perguruan tinggi.

Selanjutnya, fungsi ekonomi memiliki alokasi BPP terbesar kedua yang khususnya dituangkan pada beberapa program yang mencakup antara lain: infrastruktur konektivitas; ketahanan sumber daya air; ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas; pengelolaan perikanan dan kelautan; nilai tambah dan daya saing industri; serta 12 program lainnya yang secara spesifik diarahkan untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi di Lampung untuk. Apabila dilihat dari tingkat serapan, BPP pada fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum memiliki persentase penyerapan tertinggi yakni sebesar 99,55 persen dari total pagu.

Grafik 3.12. Tren Pertumbuhan BPP Berdasarkan Fungsi 2024 (miliar rupiah)



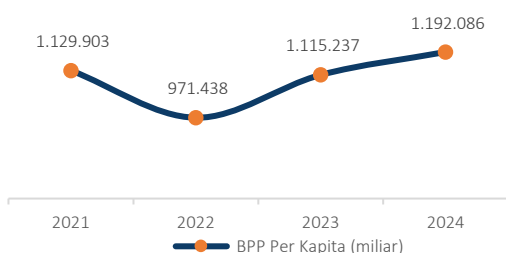
Sumber: SINTESA, 2025 (data diolah)

Tren realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) per kapita di Lampung selama periode 2022 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang dipengaruhi oleh pertumbuhan realisasi belanja negara. Pada tahun 2022, realisasi BPP mengalami penurunan signifikan menjadi Rp971.438,00 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.129.933,00. Namun, pada tahun 2023 dan 2024, terjadi peningkatan berturut-turut, dengan angka mencapai Rp1.115.237,00 dan Rp1.192.086,00 pada akhir Desember 2024, atau meningkat 6,89 persen (yoy).

Di sisi lain, tren jumlah penduduk di Lampung terus mengalami kenaikan dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Lampung pada tahun 2024 mencapai 9,18 juta jiwa.

Peningkatan BPP Per Kapita pada tahun 2024 mencerminkan realisasi belanja negara yang lebih tinggi, yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Perhitungan BPP Per Kapita ini dilakukan dengan membagi realisasi belanja dengan jumlah penduduk tahun sebelumnya (T-1).

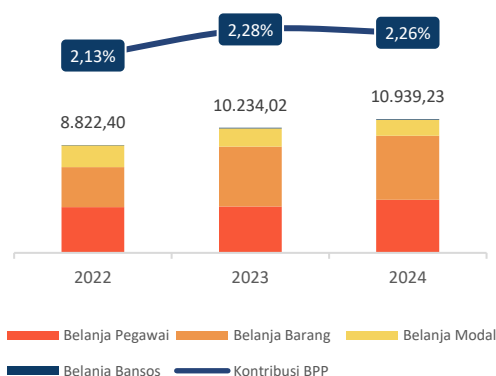
Grafik 3.13. Perkembangan BPP Per Kapita s.d. Desember 2024 (rupiah, orang)



Sumber: OM-SPAN, BPS Provinsi Lampung, 2025 (diolah)

3.1.2.5 Kontribusi BPP Terhadap PDRB

Grafik 3.14. Perkembangan Kontribusi BPP Terhadap PDRB 2022-2024 (miliar rupiah)



Sumber: OM-SPAN, BPS Provinsi Lampung, 2025 (diolah)

Realisasi BPP di Lampung sampai dengan Desember 2024 memberikan kontribusi terhadap PDRB 2024 sebesar 2,26 persen atau turun 0,02 persen dari periode yang sama tahun lalu. Tren kontribusi BPP tentunya sangat dipengaruhi oleh perkembangan realisasi belanja setiap tahunnya. Kontribusi ini mencerminkan belanja yang berasal dari Kementerian/Lembaga menyumbang PDRB Lampung dari sisi pengeluaran yang dihasilkan oleh perekonomian khususnya melalui konsumsi barang

dan jasa pemerintah yang meningkat pada Triwulan IV, belanja pegawai, pembangunan fisik dari belanja modal, dan bantuan sosial kepada masyarakat.

3.1.3 Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Grafik 3.15. Pagu Realisasi dan Pertumbuhan Realisasi Penyaluran TKD s.d. Desember 2024 per Jenis (miliar rupiah, persen)

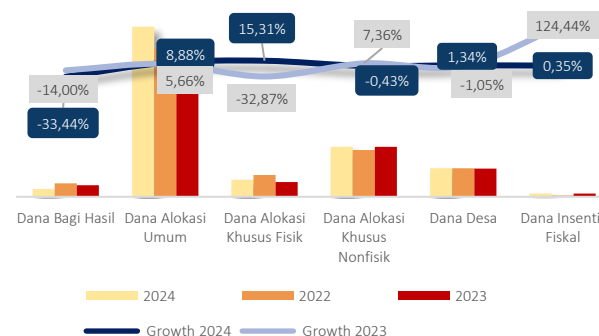


Sumber: OMSPAN, 2025 (diolah)

Kinerja Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan Desember 2024 tumbuh secara positif 4,70 persen (yoy) dibandingkan tahun lalu dan telah tersalurkan 98,79 persen dari anggaran atau secara nominal sebesar Rp22.480,62 miliar. Capaian ini meningkat dibandingkan periode yang sama TA 2023 sebesar Rp21.471,39 miliar.

Secara keseluruhan, pertumbuhan penyaluran Transfer ke Daerah mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan di regional Lampung. Tumbuhnya penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) terutama didorong oleh pertumbuhan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Namun demikian, realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik mengalami kontraksi secara yoy.

Grafik 3.16. Tren Realisasi TKD berdasarkan DTU, DTK, Dana IF, dan Dana Desa Tahun 2022-2024 (miliar rupiah)

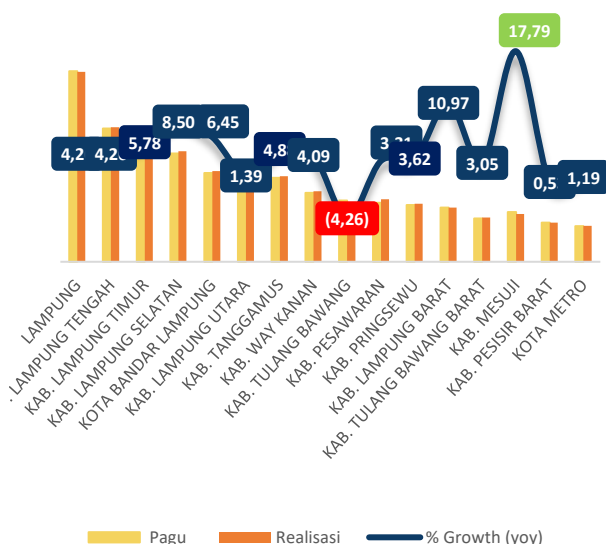


Sumber: OMSPAN, 2025 (diolah)

Pertumbuhan tertinggi berasal dari DAK Fisik, dimana dana tersebut merupakan transfer dari pemerintah pusat kepada daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan spesifik yang menjadi prioritas nasional di daerah, seperti pembangunan infrastruktur, dan pemerataan pembangunan.

Sedangkan, komponen yang mendominasi Realisasi TKD Provinsi Lampung adalah DAU, yang pada tahun 2023 secara global difokuskan untuk mendorong dan memperbaiki produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kebijakan dukungan atas penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), meningkatkan kualitas SDM, infrastruktur, dan layanan publik dasar.

Grafik 3.17. Pagu Realisasi dan Pertumbuhan Realisasi Penyaluran TKD s.d. Desember 2024 per Pemerintah Daerah (persen)

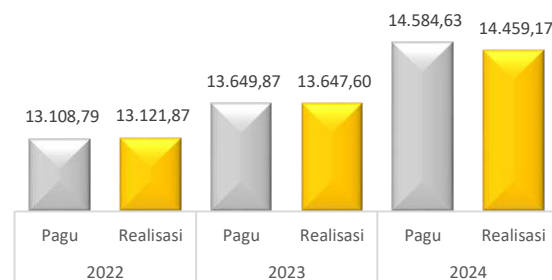


Sumber: OM-SPAN dan Simtrada, 2025 (diolah)

Untuk mencermati kinerja penyaluran TKD secara lebih dalam, perlu ditelusuri kinerja penyaluran pada masing-masing pemerintah daerah. Pertumbuhan tertinggi penyaluran TKD berada pada Kabupaten Mesuji sebesar 17,79 persen (yoy) diikuti oleh Kabupaten Lampung Barat sebesar 10,97 persen (yoy). Sedangkan pertumbuhan negatif pada Kabupaten Tulang Bawang sebesar 4,26 persen (yoy).

3.1.3.1 Dana Transfer Umum (DTU)

Grafik 3.18 Pagu Realisasi DTU 2022- 2024 (miliar rupiah)

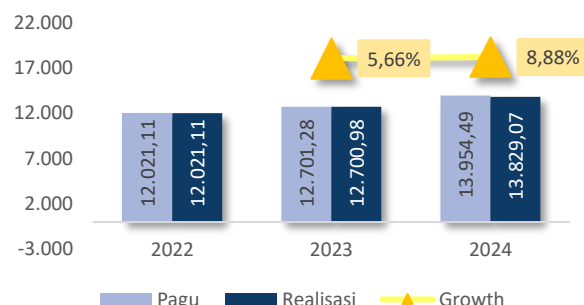


Sumber: OMSPAN, 2025 (diolah)

Realisasi Dana Transfer Umum (DTU) pada akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp14.459,17 miliar, mencapai 99,14 persen atau tumbuh 5,95 persen (yoy) dibanding tahun sebelumnya. Kontribusi DTU terbesar berasal dari penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 95,64 persen dari keseluruhan DTU di Provinsi Lampung. Sedangkan Dana Bagi Hasil berkontribusi sebesar 4,35 persen terhadap keseluruhan realisasi DAU tahun 2024.

3.1.3.1.1 Dana Alokasi Umum

Grafik 3.19 Tren Penyaluran DAU Lampung 2022-2024 (miliar rupiah)



Sumber: OMSPAN, 2025 (diolah)

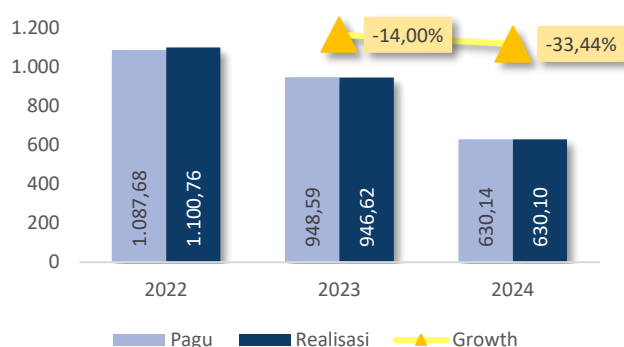
Penyaluran DAU se-Provinsi Lampung telah terealisasi Rp13.829,07 miliar atau 99,10 persen dari total pagu, angka ini tumbuh 8,88 persen (yoy) dari tahun lalu. Seluruh DAU Block Grant per bulan hingga Desember 2024 telah tersalurkan seluruhnya. Sedangkan, DAU Specific Grant diarahkan untuk meningkatkan harmonisasi belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung prioritas nasional, peningkatan layanan dasar dan infrastruktur, serta merupakan implementasi atas amanat UU No 1 Tahun 2022

tentang Harmonisasi Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD).

Performa kinerja realisasi pada triwulan IV-2024, secara spesifik, merupakan kontribusi dari akselerasi realisasi DAU Block Grant, serta realisasi atas tambahan alokasi DAU TA 2024 pada November 2024 yang digunakan untuk dukungan pendanaan pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi ASN guru berdasarkan KMK Nomor 416 Tahun 2024.

3.1.3.1.2 Dana Bagi Hasil

Grafik 3.20 Tren Penyaluran DBH Lampung 2022-2024 (miliar rupiah)



Sumber: OMSPAN, 2025 (diolah)

Penurunan realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) di Provinsi Lampung sebesar 33,44 persen (yoy) hingga 31 Desember 2024 disebabkan oleh beberapa faktor utama. Selain faktor penurunan pagu DBH dibanding tahun sebelumnya, realisasi DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) juga belum optimal, hanya mencapai 70,59 persen dari pagu akibat keterlambatan pemerintah daerah dalam menyampaikan rencana kerja dan persyaratan pencairan. Kenaikan tarif cukai rokok rata-rata 10 persen pada tahun 2024 menyebabkan peralihan konsumsi ke rokok golongan III yang lebih murah, sehingga mengurangi penerimaan cukai dan berdampak pada penurunan DBH CHT. Selain itu, peredaran rokok ilegal meningkat sebagai dampak dari kenaikan harga rokok, yang semakin menekan penerimaan negara dari sektor cukai. Keterlambatan penyaluran DBH dari pemerintah pusat juga turut berkontribusi terhadap rendahnya realisasi, menghambat pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban belanja rutin dan modal.

3.1.3.2 Dana Transfer Khusus (DTK)

Grafik 3.21 Pagu Realisasi DTK s.d. Desember 2022-2024 (miliar rupiah)



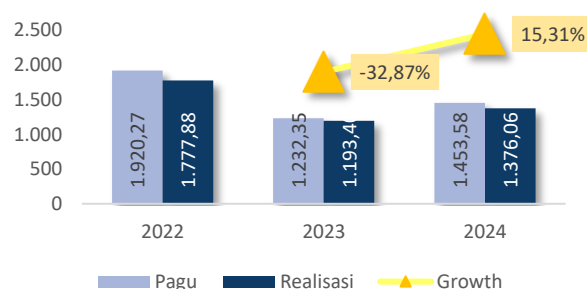
Sumber: OMSPAN (diolah)

Dana Transfer Khusus (DTK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, yang terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non fisik. Dalam APBN Provinsi Lampung, realisasi DTK 2024 mencapai Rp5.435,59 miliar dengan penyaluran sebesar 98,35 persen dari pagu anggaran, terkontraksi 5,47 persen (yoy) dibanding tahun lalu.

3.1.3.2.1 Dana Alokasi Khusus Fisik

Penyaluran Dana Transfer Khusus melalui DAK Fisik pada Provinsi Lampung tahun 2024 sebesar Rp1.376,06 miliar atau 94,67 persen terhadap pagu, dimana nilai tersebut tumbuh sebesar 15,31 persen (yoy) atau secara nominal Rp584,48 miliar. Hal ini disebabkan adanya penambahan pagu untuk penguatan ketahanan pangan melalui pembangunan irigasi dan fasilitas pertanian, serta percepatan program sanitasi dan air bersih di wilayah dengan akses terbatas.

Grafik 3.22 Tren Penyaluran DAK Fisik Lampung 2022-2024 (miliar rupiah)

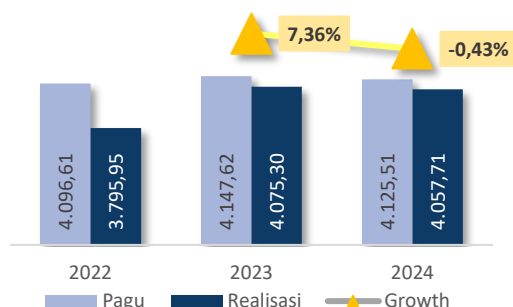


Sumber: OMSPAN, 2025 (diolah)

3.1.3.2 Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Kontraksi sebesar 0,43 persen (yoy) pada komponen Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik di Provinsi Lampung pada tahun 2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor. Meskipun terdapat peningkatan alokasi pada beberapa sub-komponen, seperti Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Tunjangan Profesi Guru (TPG), penurunan terjadi pada sub-komponen lainnya. Penurunan ini disebabkan oleh penyesuaian alokasi anggaran berdasarkan evaluasi kebutuhan dan kinerja program pada tahun sebelumnya. Selain itu, perubahan kebijakan nasional terkait prioritas pendanaan dan efisiensi anggaran turut memengaruhi besaran alokasi DAK Non Fisik yang diterima oleh daerah. Faktor-faktor tersebut secara keseluruhan berkontribusi pada kontraksi komponen DAK Non Fisik di Provinsi Lampung pada tahun 2024.

Grafik 3.23 Tren Penyaluran DAK Non Fisik Lampung 2022-2024 (miliar rupiah)



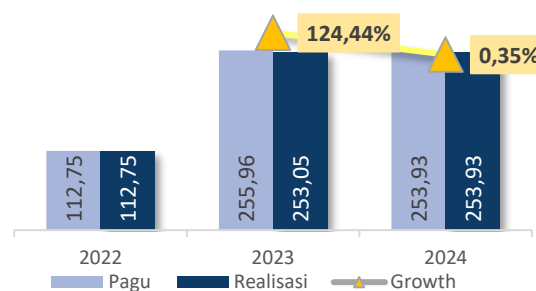
Sumber: OMSPAN, 2025 (diolah)

3.1.3.3 Dana Insentif Daerah/ Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan

Dana Insentif Fiskal Provinsi Lampung pada tahun 2024 mencatat pertumbuhan sebesar 0,35 persen (yoy) dengan persentase penyaluran mencapai 100 persen atau senilai Rp253 miliar. Peningkatan ini utamanya disebabkan oleh Pada tahun 2024, Provinsi Lampung dan Kabupaten Tanggamus menerima dana insentif fiskal dari pemerintah pusat sebagai apresiasi atas kinerja daerah dalam menekan inflasi, menurunkan stunting, dan percepatan belanja daerah sebagaimana tercantum dalam KMK 295 Tahun 2024. Mekanisme

penyaluran yang diatur dalam PMK Nomor 43 Tahun 2024 masih menjadi kendala bagi Pemda dalam penyesuaian terhadap prosedur baru dan potensi keterlambatan pencairan akibat proses verifikasi yang lebih kompleks.

Grafik 3.24 Tren Penyaluran Dana Insentif Fiskal Lampung 2022-2024 (miliar rupiah)

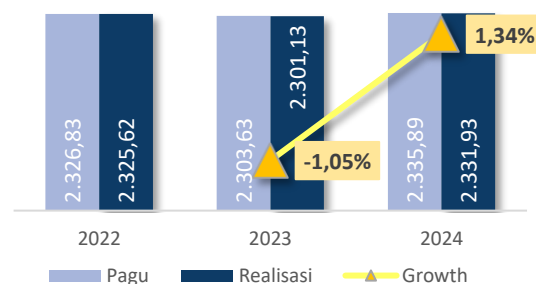


Sumber: OMSPAN, 2025 (diolah)

3.1.3.4 Dana Desa (DD)

Dari sisi perkembangan penyaluran Dana Desa, realisasi hingga 31 Desember 2024 mencapai Rp2.331,93 miliar atau 99,89 persen dari pagu anggaran. Tren pagu dan realisasi Dana Desa di Lampung selama tiga tahun terakhir menunjukkan fluktuasi, dengan kontraksi sebesar 1,05 persen (yoy) pada 2023, sebelum kembali tumbuh sebesar 1,34 persen (yoy) pada 2024. Peningkatan ini didorong oleh perbaikan dalam manajemen penyaluran serta peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam memenuhi persyaratan administrasi pencairan dana. Selain itu, kebijakan pemerintah dalam mempercepat penyaluran turut berkontribusi terhadap optimalisasi realisasi Dana Desa di Lampung.

Grafik 3.25 Tren Penyaluran Dana Insentif Fiskal Lampung 2022-2024 (miliar rupiah)



Sumber: OMSPAN, 2025 (diolah)

Dari total Dana Desa sebesar Rp2.331,93 miliar yang telah disalurkan, hingga 31 Desember 2024

mencapai rata-rata ketercapaian output sebesar 87,12 persen. Penyerapan terbesar terjadi pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dengan total penyerapan mencapai Rp825,4 miliar. Dana ini sebagian besar dialokasikan untuk Program Penguatan Ketahanan Pangan dan Hewani, dengan realisasi mencapai Rp410,25 miliar dan ketercapaian output sebesar 96,45 persen, serta untuk Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan Masyarakat, dengan realisasi sebesar Rp278,63 miliar dan ketercapaian mencapai 94,78 persen. Sementara itu, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa mencatatkan ketercapaian output tertinggi hingga akhir tahun 2024, yaitu sebesar 97,31 persen, yang disumbangkan oleh Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Air Bersih, dengan total realisasi Rp9,14 miliar.

Dalam pengelolaan Dana Desa tahun 2024, masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi efektivitas pencairan dan pemanfaatannya. Salah satu tantangan utama adalah proses pencatatan penggunaan Dana Desa yang masih ditemukan praktik di tingkat pemerintah daerah yang memperlambat proses pencairan, seperti di Kabupaten Pringsewu, terdapat kecamatan yang meminta persyaratan tambahan di luar ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Hal ini menghambat desa-desa dalam mengajukan permintaan penyaluran Dana Desa, sehingga proses pencairan menjadi lebih lambat dari yang seharusnya. Di sisi lain, belum adanya aturan yang mengikat terkait batas maksimal pengeluaran untuk kebutuhan yang kurang produktif, seperti pembuatan poster atau baliho, turut menjadi kendala.

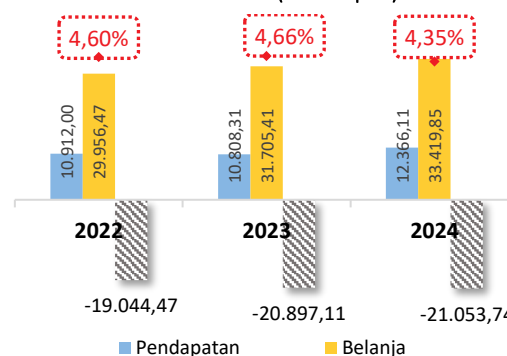
Kurangnya koordinasi antar-pemangku kepentingan juga menjadi tantangan dalam pengelolaan Dana Desa. Berbagai instansi seperti Kementerian Desa, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Koperasi dan UMKM masih belum terkoordinasi secara efektif dalam mendukung pembangunan desa. Ketidakselarasan ini berpotensi menimbulkan kebingungan di tingkat

desa dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang harus diikuti.

3.1.4 Surplus/ Defisit APBN

Pada tahun 2024, Pemerintah tetap menjalankan kebijakan fiskal ekspansif yang terarah dan berkelanjutan guna mendorong pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan di daerah. Kebijakan ini dilaksanakan dengan tetap menjaga keseimbangan fiskal dan memastikan pengelolaan APBN yang sehat.

Grafik 3.26 Perkembangan Surplus/Defisit APBN Regional Lampung Tahun 2022-2024 (miliar rupiah)



Sumber: OM-SPAN, 2025 (diolah)

Selama tiga tahun terakhir, posisi APBN di Provinsi Lampung terus mengalami defisit dengan rasio defisit terhadap PDRB yang berfluktuasi. Pada tahun 2022, defisit APBN Lampung mencapai 4,60 persen terhadap PDRB seiring dengan penurunan alokasi Belanja Negara. Pada tahun 2023, rasio defisit meningkat menjadi 4,80 persen (yoy), didorong oleh kenaikan Belanja Pemerintah Pusat, yang mencakup penguatan infrastruktur daerah serta peningkatan anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan, serta Dana TKD, khususnya DAU dan DAK Fisik yang berkontribusi besar dalam pembangunan daerah.

Pada tahun 2024, defisit APBN di Provinsi Lampung mengalami penurunan dengan rasio terhadap PDRB sebesar 4,35 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini seiring dengan peningkatan Pendapatan Negara sebesar Rp12.366,11 miliar, dengan realisasi Belanja Negara sebesar Rp33.419,85 miliar. Pengelolaan fiskal yang lebih efisien serta optimalisasi pendapatan daerah turut berkontribusi

dalam perbaikan rasio defisit terhadap PDRB di tahun ini.

3.1.5 Pengelolaan BLU Pusat

Kanwil DJPb Lampung memiliki peran dalam melakukan pembinaan kepada Satker BLU, diantaranya melalui monitoring dan evaluasi kinerja dan pengelolaan keuangan BLU, serta mendorong Satker PNBPN menjadi lebih mandiri dengan menerapkan tata Kelola BLU. Bagian berikut merupakan profil dan jenis layanan, perkembangan BLU di Wilayah Provinsi Lampung, serta Satker PNBPN yang potensial untuk menjadi BLU.

3.1.5.1 Profil dan Jenis Layanan BLU Pusat

Badan Layanan Umum (BLU) memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan masyarakat di berbagai bidang. Di wilayah Provinsi Lampung, terdapat lima BLU.

Tabel 3.4 Profil BLU di Wilayah Provinsi Lampung

No	Nama BLU	Bidang Usaha
1	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Lampung	Jasa Lainnya (Industri)
2	Politeknik Kesehatan Tanjungkarang	Kesehatan
3	Rumkit Bhayangkara Bandar Lampung	Kesehatan
4	UIN Raden Intan Bandar Lampung	Pendidikan
5	Universitas Lampung	Pendidikan

Sumber: OM-SPAN, 2025 (diolah)

Adapun profil singkat masing-masing BLU adalah sebagai berikut:

- 1) Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Lampung merupakan lembaga pengawasan mutu dengan status sebagai Proyek Penelitian dan Pengawasan Mutu Industri yang merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- 2) Politeknik Kesehatan Tanjung Karang merupakan Unit Pelaksana Teknis Kemenkes RI dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan bertugas untuk melaksanakan pendidikan vokasi dalam bidang kesehatan;
- 3) Layanan utama RSB Lampung berupa layanan kesehatan kepolisian, termasuk bagi anggota

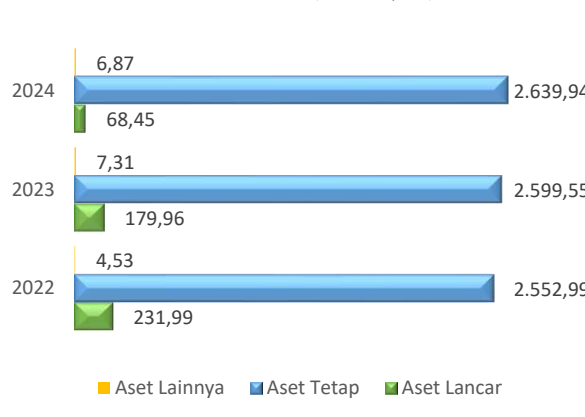
POLRI, pegawai negeri pada POLRI, keluarganya, dan masyarakat umum;

- 4) UIN Raden Intan Lampung merupakan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri dengan kegiatan utama menyelenggarakan pelayanan di bidang pendidikan tinggi yang bernuansa keislaman. Layanan yang diberikan terdiri dari tarif layanan akademik dan tarif layanan penunjang akademik;
- 5) Universitas Lampung menyelenggarakan layanan di bidang Pendidikan dan pengajaran, layanan di bidang penelitian, layanan di bidang pengabdian masyarakat, layanan di bidang kerja sama, dan layanan manajemen universitas.

3.1.5.2 Perkembangan Pengelolaan Aset, PNBPN, dan Belanja BLU

Nilai aset yang dimiliki oleh Badan Layanan Umum (BLU) di Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan dari tahun 2022 hingga 2024. Tren ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat secara berkelanjutan, terutama melalui penguatan sarana dan prasarana operasional BLU.

Grafik 3.27 Tren Perkembangan Aset Tetap BLU per 31 Desember Tahun 2022-2024 (miliar rupiah)



Sumber: MON-SAKTI, 2025 (diolah)

Aset tetap menjadi komponen utama dalam struktur aset BLU, dengan nilai yang terus bertambah dari Rp2.552,99 miliar pada 2022, menjadi Rp2.599,55 miliar pada 2023, dan meningkat lagi menjadi Rp2.639,94 miliar pada 2024. Sementara itu, aset lancar mengalami tren penurunan dari Rp231,99 miliar di 2022, menjadi

Rp179,96 miliar di 2023, dan turun signifikan menjadi Rp68,45 miliar pada 2024. Hal serupa terjadi pada aset lainnya, yang tercatat sebesar Rp4,53 miliar pada 2022, meningkat menjadi Rp7,31 miliar pada 2023, dan kemudian turun sedikit menjadi Rp6,87 miliar di 2024.

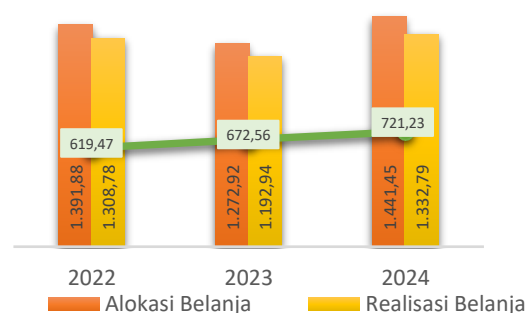
Peningkatan nilai aset BLU, terutama pada aset tetap, sebagian besar bersumber dari alokasi APBN dalam bentuk Belanja Negara pada Satker BLU, yang mendukung pengembangan infrastruktur serta fasilitas layanan publik di Provinsi Lampung.

Total alokasi Belanja Negara dalam APBN yang dikelola oleh lima Badan Layanan Umum (BLU) di Provinsi Lampung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2024, alokasi belanja BLU mencapai Rp1.441,45 miliar, meningkat dari Rp1.227,92 miliar pada 2023 dan Rp1.391,88 miliar pada 2022. Dari total anggaran tersebut, hingga Desember 2024, realisasi belanja mencapai Rp1.332,79 miliar, yang digunakan untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal guna mendukung penyelenggaraan layanan operasional serta pengembangan fasilitas di sektor pendidikan. Universitas Lampung menjadi penerima alokasi terbesar, dengan mayoritas belanja dialokasikan untuk Belanja Barang.

Di sisi lain, Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BLU juga menunjukkan tren peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Pada 2024, realisasi PNBP mencapai Rp721,23 miliar, lebih tinggi dibandingkan Rp672,56 miliar pada 2023 dan Rp619,47 miliar pada 2022. Peningkatan ini mencerminkan peningkatan kinerja BLU dalam mengelola sumber pendapatan non-pajak, yang digunakan untuk mendukung operasional dan layanan kepada masyarakat.

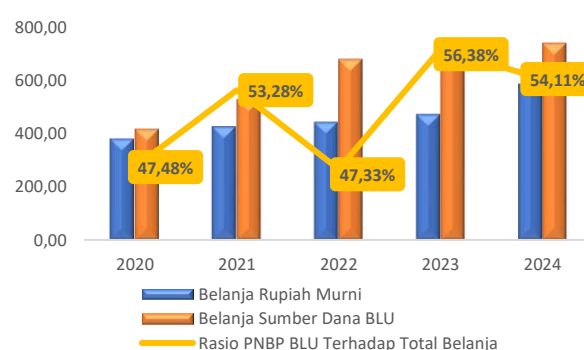
Pertumbuhan alokasi dan realisasi belanja BLU di Provinsi Lampung terus meningkat, seiring dengan peningkatan penerimaan PNBP yang mendukung keberlanjutan layanan publik, terutama di sektor pendidikan.

Grafik 3.28 Perkembangan Realisasi Belanja RM dan PNBP BLU di Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2022-2024 (miliar Rp)



Sumber : OM-SPAN, SINTESA, 2025 (diolah)

Grafik 3.29. Perkembangan Kontribusi PNBP BLU terhadap Total Belanja pada Satker BLU Provinsi Lampung Tahun 2020-2024

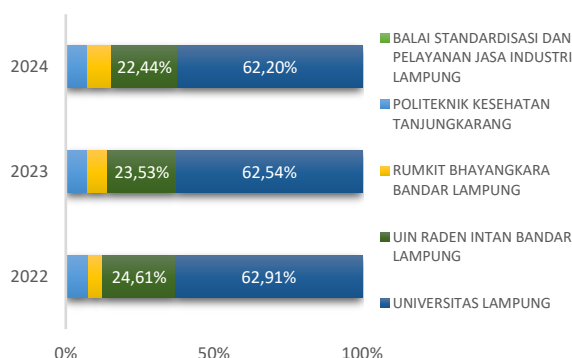


Sumber : OM-SPAN, SINTESA, 2025 (diolah)

Pada tahun 2024, kontribusi PNBP BLU terhadap total belanja Satker BLU di Provinsi Lampung sebesar 54,11 persen, sedikit menurun dibandingkan tahun 2023 sebesar 56,38 persen. Pertumbuhan belanja dengan sumber dana Rupiah Murni lebih tinggi dibandingkan peningkatan PNBP, menunjukkan BLU masih dalam tahap penguatan kemandirian finansial, dengan dukungan APBN yang tetap diperlukan untuk menjamin keberlanjutan layanan kepada masyarakat.

Meskipun terjadi penurunan, tren lima tahun terakhir tetap menunjukkan peningkatan kontribusi PNBP dalam mendukung belanja BLU, untuk mengurangi ketergantungan pada dana pemerintah. Hal ini mencerminkan upaya BLU dalam meningkatkan kemandirian keuangan melalui optimalisasi layanan dan sumber pendapatan sendiri.

Grafik 3.30. Proporsi PNBP BLU per Satuan Kerja di Provinsi Lampung Tahun 2022-2024



Sumber : OM-SPAN, SINTESA, 2025 (diolah)

Pada tahun 2024, Universitas Lampung masih menjadi kontributor utama dalam penerimaan PNBP BLU di Provinsi Lampung dengan proporsi 62,20% dari total PNBP yang diperoleh oleh seluruh satuan kerja (Satker) BLU di wilayah ini. Meskipun mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, dominasi Universitas Lampung tetap mencerminkan kapasitasnya sebagai institusi pendidikan dengan skala terbesar dalam pengelolaan PNBP. Sementara itu, UIN Raden Intan Bandar Lampung menyumbang 22,44 persen, menunjukkan peran yang cukup besar dalam perolehan pendapatan BLU. Proporsi ini sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang tercatat 23,53 persen. PNBP BLU dari satker Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung, Politeknik Kesehatan Tanjung Karang, serta Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Lampung, secara kumulatif mencakup 15,36 persen dari total PNBP.

Tren proporsi PNBP terhadap total belanja BLU di Provinsi Lampung yang cenderung stagnan dan sedikit menurun pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan PNBP belum mampu mengimbangi pertumbuhan belanja yang terjadi pada beberapa satker BLU. Sektor pendidikan masih menjadi penyumbang utama PNBP BLU di Lampung, dengan Universitas Lampung dan UIN Raden Intan sebagai kontributor terbesar. Namun, dominasi sektor pendidikan ini juga mengindikasikan bahwa BLU di sektor lain, seperti layanan kesehatan dan industri, masih memiliki keterbatasan dalam

mengoptimalkan potensi pendapatan mandiri mereka.

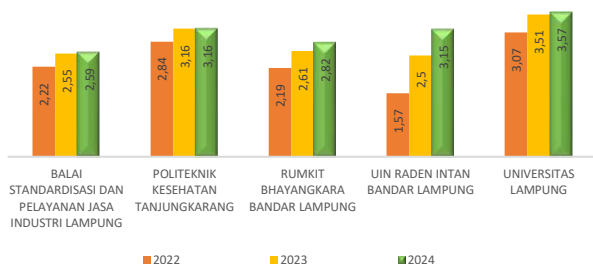
Salah satu kendala utama dalam peningkatan PNBP adalah pemanfaatan aset yang belum maksimal oleh beberapa BLU. Aset-aset yang dimiliki belum sepenuhnya dimanfaatkan secara produktif untuk mendukung peningkatan pendapatan mandiri. Hal ini menyebabkan ketergantungan yang tinggi terhadap APBN, sehingga membatasi fleksibilitas keuangan BLU dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat.

3.1.5.3 Tingkat Kemandirian BLU

Tingkat kemandirian Badan Layanan Umum (BLU) diukur melalui Maturity Rating, yang menjadi alat evaluasi dalam menilai sejauh mana BLU mampu mengelola keuangan, layanan, dan asetnya secara optimal. Penilaian ini meliputi aspek keuangan, aspek pelayanan dan Total Quality Management (TQM) dengan berbagai indikator, termasuk tata kelola, efisiensi belanja, serta optimalisasi pendapatan dan aset.

Maturity Rating BLU di Lampung mengalami peningkatan sejak dilakukan pertama kali pada tahun 2022 sampai dengan penilaian terakhir di tahun 2024. Universitas Lampung dan UIN Raden Intan menunjukkan kinerja terbaik dengan skor 3,57 dan 3,15 pada tahun 2023, menandakan tingkat kematangan yang lebih tinggi dalam pengelolaan BLU. Sementara itu, BLU di sektor kesehatan dan industri juga menunjukkan tren positif, meskipun dengan peningkatan yang lebih moderat. Namun, masih terdapat tantangan dalam mencapai tingkat kemandirian yang lebih optimal. Salah satu aspek yang perlu ditingkatkan adalah penyelarasan pemahaman dan implementasi tata kelola BLU di seluruh satuan kerja, agar kinerja masing-masing BLU semakin optimal dan merata. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat pendukung pengelolaan layanan dan keuangan masih memiliki ruang untuk berkembang, sehingga dapat lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi BLU dalam mencapai tujuan strategisnya.

Grafik 3.31 Maturity Rating BLU Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2022-2024



Sumber : Aplikasi BIOS, 2025 (diolah)

3.1.5.4 Profil Satker PNBPN Potensial Menjadi BLU

Dalam rangka menjangkau dan mengembangkan potensi satker di lingkup Kanwil DJPb Provinsi Lampung untuk menjadi BLU rumpun Pendidikan, Kanwil DJPb Provinsi berperan sebagai katalisator bagi satker-satker yang ingin dan berpotensi menjadi BLU. Fungsi katalisator tersebut telah dilakukan dengan mengadakan asistensi kepada satker-satker pengguna PNBPN di bidang pendidikan yang berpotensi menjadi BLU.

Kanwil DJPb Provinsi Lampung telah melakukan asistensi kepada Satker Politeknik Negeri Lampung sejak pengusulannya dimulai tahun 2022. Pada November 2023, unit Eselon I Kemendikbudristek dan Kanwil DJPb Lampung melakukan asistensi offline kepada satker dalam rangka persiapan ujian menjadi BLU, serta memberikan langkah strategis yang dalam rangka mempersiapkan pimpinan Satker dan tim dalam menghadapi assessment menjadi satker Pengelolaan Keuangan BLU. Assessment calon satker BLU oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat PK-BLU dilaksanakan Februari 2024.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 315 Tahun 2024 tanggal 13 Agustus 2024, Polinela ditetapkan sebagai satker dengan penerapan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Dengan status BLU yang memiliki fleksibilitas lebih dalam pengelolaan keuangan, memungkinkan Polinela meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan penelitian, responsif terhadap kebutuhan dan perkembangan di bidang pendidikan vokasi, serta membuka peluang untuk

mengembangkan inovasi dan memperluas kerja sama dengan berbagai pihak, baik domestik maupun internasional.

Tabel 3.5 Institut Teknologi Sumatera sebagai Satker PNBPN Potensial menjadi BLU



Sumber: ITERA

Progres pengusulan Satker PNBPN Potensial untuk menjadi BLU sebagai berikut:

- 1) Pengusulan ITERA menjadi BLU telah dilakukan sejak tahun 2021, namun pada tahun 2022 terkendala oleh pergantian SDM. Pengusulan kembali mulai dilakukan pada bulan Juli 2023, di mana Kanwil DJPb Provinsi Lampung telah melakukan asistensi kepada satker baik secara daring maupun luring sebanyak 6 (enam) kali. Pada November 2023, unit Eselon I Kemendikbudristek dan Kanwil DJPb Lampung melakukan asistensi *offline* kepada satker atas perbaikan dokumen usulan dan Langkah strategis yang dapat dilakukan satker dalam persiapan sebagai satker BLU. Perbaikan dokumen dimaksud akan diajukan kembali ke unit Eselon I pada awal tahun 2024 untuk kemudian diteruskan ke Direktorat PK-BLU.

3.1.6 Pengelolaan Manajemen Investasi Pusat Kinerja Penyaluran Kredit Program Pemerintah

Kanwil DJPb Provinsi Lampung juga memiliki peran dalam menatausahakan investasi pemerintah antara lain berupa penerusan pinjaman (*Subsidiary Loan Agreement*), kredit program, ultra mikro, dan investasi lainnya. Investasi pemerintah dalam berbagai instrumen tersebut ditujukan untuk mengakselerasi pembangunan dan perekonomian khususnya di daerah. Kedepannya, diharapkan dengan adanya peran fiskal dalam memberikan

modal baik dalam bentuk penerusan pinjaman maupun kredit program kepada para pelaku UMKM, mampu memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan manfaat lainnya yang lebih besar, serta menghasilkan *multiplier effect* bagi ekonomi regional.

3.1.6.1 Penerusan Pinjaman

Jumlah penerusan pinjaman (Subsidiary Loan Agreement)/ SLA yang ditatausahakan oleh Kanwil DJPb Provinsi Lampung per 31 Desember sebesar Rp40,88 miliar dengan total lima debitur yang terdiri dari: 3 debitur pemerintah daerah, 2 debitur BUMD, dan 1 debitur koperasi.

Tabel 3.6 Rincian Jumlah Penerusan Pinjaman Per 31 Desember 2024 (miliar rupiah)

No	Debitur	Posisi Piutang Negara (miliar)			Hak Tagih Pemerintah
		Tunggakan Pokok	Tunggakan Non Pokok	Belum Jatuh Tempo	
1	Pemkab Lampung Utara	-	15,45	-	15,45
2	Pemkab Lampung Utara	-	-	2,24	2,24
3	PDAM Lampung Utara	-	-	-	-
4	Pemkab Lampung Tengah	-	14,00	-	14,00
5	PDAM Lampung Tengah	-	-	-	-
6	KLP Sinar Siwo Mego	1,67	7,52	-	9,19
Total		1,67	36,97	2,24	40,88

Sumber: Aplikasi SLIM, 2025 (diolah)

Pinjaman Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara sebesar Rp2,24 miliar berstatus lancar, masih dalam proses pelunasan, dan telah dianggarkan dalam APBD. Pinjaman ini merupakan hasil restrukturisasi utang pokok PDAM Lampung Utara.

Sementara itu, pinjaman Pemkab Lampung Utara sebesar Rp15,45 miliar dan Pemkab Lampung Tengah sebesar Rp14 miliar berasal dari restrukturisasi tunggakan non-pokok PDAM masing-masing daerah. Kedua pinjaman ini telah mendapatkan persetujuan penghapusan piutang negara secara bersyarat dari Presiden dan sedang dalam proses penghapusan hak tagih pemerintah.

Adapun pinjaman Koperasi Kredit Sinar Siwo Mego sebesar Rp9,19 miliar telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) karena koperasi tersebut tidak aktif selama lebih dari 20 tahun. Hasil observasi Kanwil DJPb Provinsi Lampung menunjukkan bahwa bangunan koperasi telah lama ditinggalkan dan tidak ditemukan pengurus yang dapat ditemui.

3.1.6.2 Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Realisasi penyaluran KUR di Provinsi Lampung sampai dengan 31 Desember 2024 telah mencapai Rp10,350,45 miliar kepada 208.614 debitur. Nilai penyaluran KUR sebesar 21,57 persen (yoy) meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan Peningkatan penyaluran KUR di Provinsi Lampung sebesar 21,57 persen pada 2024 dipengaruhi oleh dominasi sektor pertanian dan perdagangan yang merupakan sektor utama di Provinsi Lampung sebagai penerima utama KUR, komitmen perbankan dalam mendukung UMKM, serta pertumbuhan ekonomi regional yang positif.

Grafik 3.32 Tren Penyaluran KUR di Provinsi Lampung Tahun 2022-2024 (miliar rupiah, debitur)



Sumber : SIKP, 2025 (diolah)

Penyaluran KUR berdasarkan skema juga menunjukkan bahwa skema Mikro menjadi yang paling diminati oleh debitur, dengan porsi yang terus meningkat dalam tiga tahun terakhir. Sebaliknya, skema TKI memiliki penyaluran paling kecil, didukung oleh kuota nasional yang masih terbatas. Isu utama dalam skema TKI meliputi tingginya tingkat kredit macet akibat sulitnya pemantauan pembayaran oleh debitur di luar negeri, minimnya sosialisasi, serta keterbatasan bank penyalur yang memiliki kuota untuk skema ini.

Pada tahun 2024, sebaran penyaluran KUR berdasarkan skema menunjukkan dominasi skema Mikro dengan Rp197,62 miliar kepada 197.617 debitur, diikuti oleh skema Kecil sebesar Rp9,35 miliar kepada 9.350 debitur, skema Supermikro Rp1,63 miliar kepada 1.629 debitur, dan skema TKI yang paling kecil dengan Rp18 juta kepada 18 debitur.

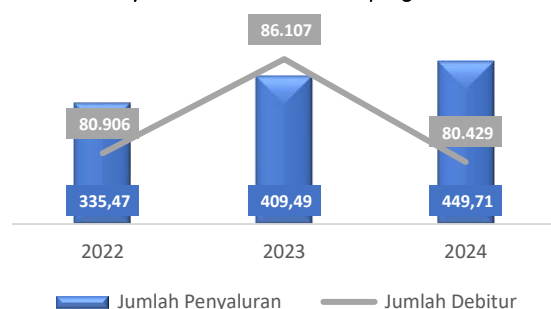
Dari perspektif sektor, penyaluran KUR terbesar di Lampung terdapat pada Sektor Pertanian dan

Perdagangan. Kedua sektor tersebut memiliki porsi hingga 92,60 persen dari total penyaluran KUR dengan jumlah 254.857 debitur dari kedua sektor tersebut. Hal ini seiring dengan kontribusi dominan Sektor Pertanian dan Perdagangan dalam perekonomian Lampung dan merupakan sektor unggulan. Penyaluran KUR terkonsentrasi di Kabupaten Lampung Tengah yang mencapai Rp2.472,68 miliar kepada sebanyak 57.500 debitur dan penyaluran paling rendah pada Kabupaten Pesisir Barat sebesar Rp94,19 miliar kepada sebanyak 2.663 debitur. Penyaluran KUR di Provinsi Lampung Sebagian besar disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar 72,68 persen dari total penyaluran, diikuti oleh Bank Mandiri dan BPD Lampung secara berturut-turut 8,9 dan 7,8 persen dari total penyaluran.

3.1.6.3 Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)

Pembiayaan UMi ditargetkan untuk para pelaku UMKM yang masih berskala sangat kecil termasuk di antaranya pedagang kaki lima. Realisasi penyaluran pembiayaan UMi di Lampung tahun 2024 mencapai Rp409,49 miliar kepada 86.107 debitur yang sebagian besar disalurkan melalui PT Penanaman Nasional Madani secara linkage.

Grafik 3.33 Penyaluran UMi di Provinsi Lampung Tahun 2022-2024



Sumber : SIKP, 2025 (diolah)

Penyaluran UMi di Lampung pada 2024 terbesar di Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp66,39 miliar kepada 11.991 debitur, sementara yang terendah di Kabupaten Lampung Utara dengan Rp48,98 miliar kepada 8.164 debitur. Peningkatan penyaluran UMi

didorong oleh meningkatnya kesadaran pelaku usaha mikro terhadap akses pembiayaan serta sinergi pemerintah dengan lembaga penyalur dan OJK dalam sosialisasi program. Di Lampung, UMi berperan penting dalam mendorong pertumbuhan UMKM, memperluas inklusi keuangan, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Untuk mendukung hal tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Lampung aktif melakukan sosialisasi dan edukasi, memfasilitasi akses pembiayaan, serta berkoordinasi dengan perbankan dan lembaga keuangan. Selain itu, monitoring dan evaluasi rutin dilakukan guna memastikan efektivitas program, didukung dengan digitalisasi layanan agar proses pengajuan dan pencairan lebih efisien. Langkah-langkah ini diharapkan dapat semakin mengoptimalkan manfaat pembiayaan bagi pelaku usaha di Lampung.

3.1.7 Isu Strategis Pelaksanaan APBN di Daerah

3.1.7.1 Capaian Output Strategis APBN

Hingga Desember 2024, alokasi Belanja Negara pada APBN di Provinsi Lampung untuk mendukung pelaksanaan Program PN mencapai Rp2.130,80 miliar, dengan realisasi sebesar Rp1.555,27 miliar atau sekitar 72,99 persen dari total anggaran yang disediakan. Dana yang telah terserap ini telah menghasilkan berbagai capaian output strategis di masing-masing Program PN, mencakup berbagai sektor pembangunan di daerah.

Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional yang bertujuan membangun fondasi kuat menuju Indonesia Emas 2045, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 mengusung tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” yang diwujudkan dalam tujuh Program Prioritas Nasional (PN). Selaras dengan tema tersebut, APBN 2024 dirancang untuk mendorong transformasi ekonomi yang lebih inklusif, menjaga stabilitas ekonomi, serta mendukung berbagai program prioritas nasional.

Tabel 3.7 Capaian Program Prioritas Nasional di Lampung 2024

Uraian	Pagu	Realisasi s.d Des 2024	% Realisasi	Progress Capaian Output s.d Des 2024	
				Volume	Satuan
PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan					
Prasarana Pengembangan Kawasan	164.638	164.394	99,85%	282	km2
Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	74.346	73.440	98,78%	439	unit
Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	62.505	62.494	99,98%	2	unit
PN 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan					
Pelayanan Publik kepada lembaga	39.597	36.683	92,64%	194.815	Hektar
Pelayanan Publik kepada masyarakat	12.958	12.203	94,17%	52.928	Bidang
Layanan Dukungan Manajemen Internal	244	244	99,76%	3	Layanan
PN 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing					
Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah	242.549	238.481	98,32%	64.026	Orang
Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	127.501	97.129	76,18%	2	unit
Pelatihan Bidang Pendidikan	89.609	83.125	92,76%	13.919	Orang
PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan					
Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	25.156	16.268	64,67%	10.788	Orang
Pelayanan Publik kepada masyarakat	24.236	23.818	98,28%	21.968	Orang
Pelayanan Publik Lainnya	18.345	17.797	97,01%	18.724	Orang
PN 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar					
OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	285.228	285.167	99,98%	904	Layanan
Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	232	227	98,18%	15	KK
Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	98.776	97.957	99,17%	3.893	unit
PN 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim					
Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	33.381	31.980	95,80%	5.909	Hektar
Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	7.889	7.865	99,70%	941.000	Unit
OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2.065	1.551	75,08%	70	Unit
PN 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik					
Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	627.347	617.802	98,48%	258	Lembaga
Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	50.858	48.606	95,57%	4.898	Laporan
Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	114.477	101.524	88,69%	3.219	Lembaga

Sumber: OM-SPAN, SINTESA, 2025 (diolah)

3.1.7.2 Reviu Pelaksanaan Anggaran

Reviu pelaksanaan anggaran merupakan upaya dalam rangka mengevaluasi kinerja pelaksanaan

APBN di regional Lampung dan mengidentifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi untuk memberikan solusi kepada Satker atas kendala

tersebut. Berikut ini merupakan kendala yang ditemui terkait pelaksanaan anggaran yang diklasifikasikan berdasarkan klaster permasalahan, diantaranya:

3.1.7.2.1 Permasalahan Terkait Data Capaian Output

Capaian output adalah indikator kinerja yang terdapat pada Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran untuk mengukur ketepatan waktu penyampaian data dan ketercapaian output pada Satker. Hingga akhir Semester II 2024, nilai capaian output Satker lingkup Kanwil DJPb Provinsi Lampung adalah 98,92. Namun, nilai capaian output di Tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai angka 99,26. Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi oleh Satker lingkup Kanwil DJPb Provinsi Lampung terkait capaian output antara lain:

- 1) Adanya rincian output pada Program Prioritas Nasional (PN) yang tidak mencapai target karena pencapaian targetnya bergantung pada pihak lain atau pihak pengguna jasa seperti pada Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Agama;
- 2) Target RO tidak sesuai dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan, yang menjadi kendala dalam menentukan progres capaian sesuai periode berkenaan;
- 3) Masih terdapat satker yang belum disiplin dalam melakukan input target dan capaian output sesuai dengan batas waktu;
- 4) Masih terdapat satker yang mengisi target dan capaian output hanya sekedar untuk "formalitas" dan belum memahami proses dan urgensi pengisian capaian output, sehingga proses pengisian target dan capaian, serta polarisasi output dilakukan hanya dengan justifikasi personal satker, menyebabkan akurasi data tidak valid.

3.1.7.2.2 Permasalahan Terkait Belanja Kontraktual

Sampai dengan akhir tahun 2024, Belanja Modal merupakan jenis belanja dengan Tingkat penyerapan yang paling rendah di antara jenis belanja lainnya. Hal ini disebabkan karena karakteristik Belanja Modal yang berbeda, diantaranya pelaksanaan Kontraktual. Beberapa permasalahan yang ditemukan terkait Belanja Kontraktual antara lain:

- 1) Keterlambatan administrasi dalam pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu faktor utama yang menghambat penyerapan anggaran, antara lain disebabkan hal-hal berikut:
- 2) Proses pendaftaran kontrak terlambat akibat adanya mekanisme PBJ yang dilakukan terpusat dan membutuhkan waktu lama, terutama ketika kontrol satker terhadap proses tersebut rendah dan kelengkapan administratif belum terpenuhi;
- 3) Ketidakpastian tambahan pagu dan pemblokiran anggaran juga menghambat optimalisasi kontrak pra-DIPA, sehingga pelaksanaan kontrak mengalami kemunduran sekaligus tertundanya pengadaan.
- 4) Mekanisme TKDN dalam pengadaan barang yang membutuhkan izin impor terpusat, turut memperlambat eksekusi pengadaan
- 5) Kondisi internal pada satker seperti kelalaian SDM dalam penyampaian ADK kontrak tepat waktu, kendala teknis pada aplikasi, serta pejabat pengadaan yang berhalangan/belum ada.
- 6) Terdapat Proyek yang tidak dapat dilaksanakan karena kondisi eksternal satker sebagai pelaksana kegiatan, antara lain:
- 7) Proyek yang berada di wilayah dengan kondisi geografis sulit, seperti Lampung Barat dan Pesisir Barat, menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya;

- 8) Beberapa proyek berbasis kontrak, khususnya yang didanai oleh SBSN, mengalami keterlambatan akibat progres konstruksi yang tidak sesuai target;
- 9) Adanya putus kontrak pada proyek strategis, seperti program penanganan kemiskinan ekstrem di Pesawaran akibat masalah cashflow penyedia jasa;
- 10) Dalam beberapa kasus, pengadaan peralatan dan mesin baru dapat direalisasikan setelah pembangunan gedung selesai, sehingga eksekusi belanja sering kali baru dilakukan di akhir tahun;
- 11) Keterlambatan pelaksanaan proyek berbasis lingkungan akibat Faktor eksternal seperti kondisi musim yang tidak sesuai dengan timeline anggaran, keterbatasan SDM satker, serta lambatnya pengajuan proposal dan persetujuan dari masyarakat.

3.1.7.2.3 Permasalahan Terkait Transfer ke Daerah

Penyaluran TKD melalui KPPN yang dimulai secara penuh pada Tahun 2024 menunjukkan kinerja penyaluran TKD yang efektif dan optimal. Hal ini ditunjukkan oleh persentase penyaluran TKD yang lebih tinggi di tahun sebelumnya. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemda terkait penyaluran TKD, di antaranya:

- 1) Kebijakan baru terkait DAU yang baru terkait pembagian *Block Grant* dan *Specific Grant* membuat kesulitan beberapa Pemda dalam melakukan manajemen kas;
- 2) Terbatasnya SDM di Puskesmas yang kompeten dalam pengelolaan dana (BOK Puskesmas). Untuk itu, diperlukan adanya penyederhanaan administrasi proses penyaluran TKD tetapi tetap memenuhi aspek akuntabilitas pengelolaan dana.
- 3) Keterlambatan penyampaian prasyarat administratif oleh Pemerintah Daerah yang

mengakibatkan hambatan dalam penyaluran TKD.

- 4) Kendala dalam penyaluran Dana Desa erat kaitannya dengan kurangnya komunikasi antara Pendamping Desa dengan pihak Pemda.

3.1.7.2.4 Permasalahan dan tantangan dalam Upaya Akselerasi Belanja APBN di Daerah

- 1) Masih terdapat satker yang mengajukan Dispensasi SPM atas keterlambatan penyampaian SPM yang melewati batas waktu penyampaian SPM, sebagai akibat satker tidak tertib dan disiplin atas batas-batas waktu pada akhir tahun.
- 2) Pagu minus belanja hingga akhir tahun terjadi karena beberapa faktor, seperti satuan kerja (satker) yang tidak memperbarui dokumen anggaran (POK) melalui revisi DIPA, alokasi anggaran yang kurang mencukupi untuk kebutuhan belanja pegawai, serta kurangnya evaluasi rutin terhadap ketersediaan dana. Hal ini dapat menghambat kelancaran pelaksanaan anggaran dan menyebabkan ketidakseimbangan dalam pengelolaan keuangan satker
- 3) Tingginya volume pengajuan pencairan anggaran pada akhir tahun juga menyebabkan peningkatan risiko kesalahan verifikasi dokumen pencairan di KPPN .
- 4) Pemecahan Bagian Anggaran (BA) Kementerian/Lembaga (K/L) yang diikuti dengan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) mengakibatkan perubahan kode dan nomenklatur satuan kerja (satker). Perubahan ini memerlukan pembaruan dokumen administrasi, pemutakhiran data, serta pembuatan akun pengguna baru dalam berbagai sistem keuangan dan pelaksanaan anggaran, guna memastikan kelancaran proses pengelolaan anggaran dan pencairan dana.

SUPLEMEN 5

Pemanfaatan Dana Desa

Success Story Desa Hanura

Desa Hanura, yang terletak di Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, berhasil menjadi teladan dalam optimalisasi Dana Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2024, Desa Hanura menerima alokasi Dana Desa sebesar Rp1.270.024.000, yang telah tersalurkan dalam dua tahap dan memenuhi syarat penggunaan dengan transparan.

Dana Desa dimanfaatkan untuk berbagai sektor strategis, termasuk:

✓ Infrastruktur:

Pembangunan jalan rabat beton 100m, jalan usaha tani 150m, dan Tembok Penahan Tanah (TPT) 65m.

✓ Sarana Prasarana:

Drainase dan talud lapangan desa

✓ Lingkungan Hidup:

Pengadaan bibit tanaman pangan dan pengelolaan sampah melalui BUMDes, menghasilkan keuntungan Rp94 juta/tahun.

✓ BLT Desa:

Disalurkan kepada 34 KPM setiap bulan.

Keberhasilan Desa Hanura menjadi inspirasi bagi desa lain, baik di dalam maupun di luar Provinsi Lampung. Desa ini telah menjadi tujuan studitiru oleh desa-desa dari Sumatera Selatan seperti Desa Tanjung Payang (Lahat Selatan), Desa Remayu (Musi Rawas), hingga Jambi, termasuk Desa Sungai Putih dan Desa Biuku Tanjong (Merangin). Pada 19 Desember 2024, sebanyak 300 kepala desa dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, melakukan studi lapangan terkait praktik produk hukum di Desa Hanura.

Prestasi gemilang di tingkat nasional:

🏆 Juara II Desa Teladan dalam ajang Lembaga Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (LPKAD)

🏆 Predikat Desa Anti-Korupsi berkat layanan administrasi cepat, gratis, dan berbasis digital.

🏆 Pembangunan Rumah *Restorative Justice* untuk penyelesaian sengketa warga secara damai.

Atas kinerjanya, Desa Hanura mendapatkan tambahan alokasi kinerja Dana Desa Tahun 2025 sebesar Rp258.510.000. Desa Hanura telah membuktikan bahwa pengelolaan Dana Desa yang efektif dapat membawa dampak positif yang signifikan bagi masyarakat dan menjadi contoh inspiratif bagi desa-desa lain di Indonesia.

Penyaluran BLT Dana Desa untuk 34 KPM Desa Hanura



Juara II Desa Teladan LPKAD Tingkat Nasional dari Kemendagri



300 Kepala Desa dari Sumsel melakukan studi lapang ke Desa Hanura



3.2 PELAKSANAAN APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2024 menargetkan peningkatan pendapatan agregat regional Lampung sebesar 5,94 persen menjadi Rp33.585,23 miliar dibandingkan APBD-P tahun 2023. Kenaikan ini sejalan dengan peningkatan alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat yang menjadi sumber utama pendapatan daerah di Provinsi Lampung. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat diproyeksikan meningkat sebesar 6,36 persen (yoy), sementara Pendapatan Transfer Antar Daerah ditargetkan tumbuh signifikan sebesar 25,00 persen (yoy).

Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga ditargetkan meningkat sebesar 1,95 persen (yoy) menjadi Rp8.597,61 miliar, yang didorong oleh kenaikan Pajak Daerah sebesar 8,02 persen (yoy) serta eskalasi Retribusi Daerah hingga 537,91 persen (yoy). Peningkatan target pada Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencerminkan optimisme Pemerintah Daerah dalam memperluas basis

penerimaan asli daerah melalui optimalisasi kebijakan fiskal serta upaya intensif dalam memperkuat kemandirian fiskal. Kenaikan signifikan pada target Retribusi Daerah terutama disebabkan oleh perubahan klasifikasi pembukuan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang sebelumnya dicatat sebagai Lain-Lain PAD yang Sah, menjadi bagian dari Retribusi Daerah. Penyesuaian tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Di sisi lain, APBD-P tahun 2024 mengalokasikan belanja daerah sebesar Rp34.076,21 miliar, meningkat 5,31 persen dibandingkan dengan alokasi pada APBD-P tahun 2023. Kenaikan ini terjadi pada hampir seluruh komponen belanja, kecuali pada Belanja Bunga dan Belanja Bantuan Sosial yang mengalami penurunan alokasi.

Tabel 3.8. I-Account Realisasi APBD Regional Lampung Tahun 2022-2024 (miliar rupiah)

I-Account (dalam Miliar Rp)	TA 2022*			TA 2023*			TA 2024**			%Growth (2023-2024)	
	PAGU-P	REALISASI	%REAL	PAGU-P	REALISASI	%REAL	PAGU-P	REALISASI	%REAL	PAGU	REALISASI
PENDAPATAN DAERAH	30.226,14	28.406,35	93,98%	31.702,97	28.822,64	90,91%	33.585,23	30.720,16	91,47%	5,94%	6,58%
PAD	6.915,77	6.070,32	87,78%	8.433,08	6.363,22	75,46%	8.597,61	6.710,77	78,05%	1,95%	5,46%
Pendapatan Transfer (Pusat)	21.325,51	20.835,20	97,70%	21.431,18	21.206,06	98,95%	22.795,13	22.414,34	98,33%	6,36%	5,70%
Transfer Antar daerah	1.658,72	1.371,37	82,68%	1.630,79	1.227,03	75,24%	2.038,47	1.534,66	75,28%	25,00%	25,07%
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	326,14	129,46	39,70%	207,91	26,33	12,66%	154,01	60,40	39,21%	-25,92%	129,39%
BELANJA DAERAH	32.070,38	28.954,69	90,28%	32.358,72	28.708,40	88,72%	34.076,21	30.314,84	88,96%	5,31%	5,60%
Belanja Operasi	21.815,87	19.776,07	90,65%	22.600,15	20.328,69	89,95%	23.910,91	21.517,99	89,99%	5,80%	5,85%
Belanja Pegawai	11.293,36	10.613,49	93,98%	11.791,05	10.882,96	92,30%	12.503,89	11.679,08	93,40%	6,05%	7,32%
Belanja Barang dan Jasa	8.982,02	7.823,42	87,10%	8.858,81	7.787,95	87,91%	9.235,84	7.855,50	85,05%	4,26%	0,87%
Belanja Bunga	54,12	49,40	91,28%	53,52	48,97	91,49%	40,42	33,55	83,00%	-24,49%	-31,49%
Belanja Subsidi	4,41	5,35	121,23%	6,95	5,40	77,71%	9,65	7,93	82,16%	38,96%	46,93%
Belanja Hibah	1.409,13	1.242,73	88,19%	1.837,55	1.555,72	84,66%	2.096,03	1.919,52	91,58%	14,07%	23,38%
Belanja Bantuan Sosial	72,84	41,69	57,23%	52,26	47,68	91,24%	25,08	22,43	89,42%	-52,01%	-52,97%
Belanja Modal	5.187,69	4.311,62	83,11%	4.497,65	3.748,13	83,34%	4.622,17	3.711,52	80,30%	2,77%	-0,98%
Belanja Modal	5.187,69	4.311,62	83,11%	4.497,65	3.748,13	83,34%	4.622,17	3.711,52	80,30%	2,77%	-0,98%
Belanja Tidak Terduga	159,13	63,40	39,84%	79,11	33,34	42,15%	110,84	44,98	40,59%	40,10%	34,91%
Belanja Tidak Terduga	159,13	63,40	39,84%	79,11	33,34	42,15%	110,84	44,98	40,59%	40,10%	34,91%
Belanja Transfer	4.907,69	4.803,61	97,88%	5.181,81	4.598,24	88,74%	5.432,29	5.040,34	92,78%	4,83%	9,61%
Belanja Bagi Hasil	1.449,98	1.406,88	97,03%	1.747,66	1.246,29	71,31%	1.968,18	1.616,66	82,14%	12,62%	29,72%
Belanja Bantuan Keuangan	3.457,71	3.396,73	98,24%	3.434,15	3.351,95	97,61%	3.464,11	3.423,68	98,83%	0,87%	2,14%
SURPLUS/ (DEFISIT)	-1.844,24	-548,34	29,73%	-655,75	114,24	-17,42%	-490,98	405,33	-82,55%	-25,13%	254,81%
PEMBIAYAAN	1.844,24	1.436,35	77,88%	655,75	620,65	94,65%	490,98	465,86	94,88%	-25,13%	-24,94%
Penerimaan Pembiayaan	2.225,00	1.742,01	78,29%	1.008,92	928,94	92,07%	748,90	714,37	95,39%	-25,77%	-23,10%
Pengeluaran Pembiayaan	380,76	305,66	80,28%	353,17	308,28	87,29%	257,92	248,50	96,35%	-26,97%	-19,39%
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	0,00	888,01		0,00	734,89		0,00	871,19		-	18,55%
SILPA/SikPA											

Sumber: *) LRA Pemda se-Provinsi Lampung, GFS-LKPD Audited (diolah)

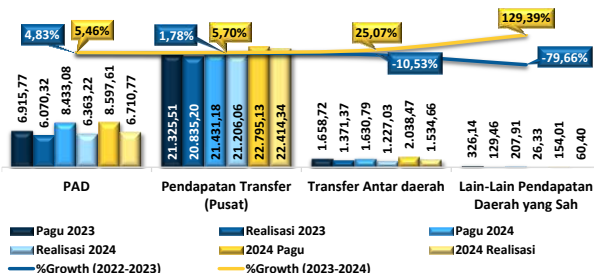
**) LRA Pemda se-Provinsi Lampung, GFS-LKPD Preliminary 2025 (diolah)

3.2.1 Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan Daerah Regional Lampung tahun 2024 mencapai Rp30.720,16 miliar atau 91,47 persen dari target APBD-P. Capaian ini mencatat pertumbuhan sebesar 6,58 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023, yang hanya tumbuh sebesar 1,47 persen dibandingkan realisasi tahun 2022. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh peningkatan signifikan pada komponen Pendapatan Transfer Antar Daerah, yang tumbuh sebesar 25,07 persen (yoy) setelah mengalami kontraksi 10,53 persen pada tahun sebelumnya. Selain itu, Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat juga mengalami akselerasi pertumbuhan sebesar 5,70 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yang hanya 1,78 persen.

Kinerja positif juga tercermin pada PAD, yang tumbuh 5,46 persen (yoy) mencapai Rp6.710,77 miliar, setelah mencatat pertumbuhan sebesar 4,83 persen pada periode sebelumnya. Sementara itu, komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah mengalami pemulihan signifikan dengan pertumbuhan 129,39 persen (yoy), setelah mengalami penurunan tajam sebesar 79,66 persen pada tahun sebelumnya.

Grafik 3.34. Perbandingan Pagu dan Realisasi Pendapatan daerah (miliar rupiah) dan Pertumbuhannya (persen) 2022-2024



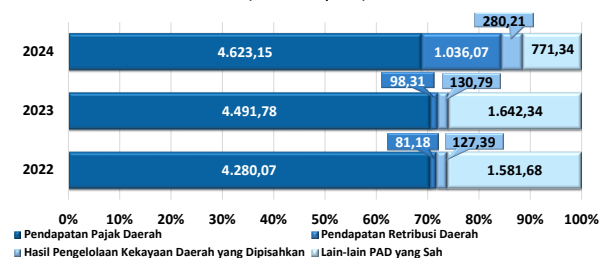
Sumber: LRA Pemda se-Provinsi Lampung, GFS, 2025 (diolah)

Selain itu, peningkatan persentase pencapaian target pendapatan daerah dari 90,91 persen pada tahun 2023 menjadi 91,47 persen pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan kapasitas fiskal daerah dalam mengelola sumber pendapatannya secara lebih efisien. Perbandingan pagu dan realisasi Pendapatan Daerah tahun 2022-2024 dan pertumbuhannya dapat dilihat pada grafik 3.34.

3.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hingga akhir tahun 2024, PAD Lampung tercatat sebesar Rp6.710,77 miliar atau 78,05 persen dari target, mengalami pertumbuhan 5,46 persen dibanding periode yang sama tahun 2023. Peningkatan ini sejalan dengan pertumbuhan positif pada realisasi Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, yang mencerminkan efektivitas kebijakan fiskal daerah dalam mengoptimalkan sumber penerimaan asli. Sebaliknya, Lain-Lain PAD yang Sah mengalami kontraksi tajam hingga -50,03 persen, mengindikasikan adanya penurunan signifikan dalam pos pendapatan tersebut. Perbandingan komposisi PAD secara total pada regional Lampung tahun 2022 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada grafik 3.35.

Grafik 3.35. Perbandingan Komposisi PAD Lampung Tahun 2022-2024 (miliar rupiah)



Sumber: LRA Pemda se-Provinsi Lampung, GFS, 2025 (diolah)

Sebagaimana ditunjukkan dalam grafik, dalam tiga tahun terakhir, kontribusi Pajak Daerah tetap menjadi penyumbang utama terhadap PAD maupun total pendapatan daerah. Di sisi lain, kontribusi Retribusi Daerah serta Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan menunjukkan tren peningkatan sepanjang periode 2022-2024, yang mencerminkan semakin optimalnya pemanfaatan aset daerah sebagai sumber pendapatan. Sebaliknya, kontribusi Lain-Lain PAD yang Sah mengalami penurunan yang berkelanjutan hingga tahun 2024, mengindikasikan perlunya strategi adaptif dalam diversifikasi sumber pendapatan asli daerah guna menjaga kesinambungan fiskal daerah.

3.2.1.1.1 Pajak Daerah

Realisasi pendapatan Pajak Daerah di Regional Lampung dalam tiga tahun terakhir menunjukkan

tren peningkatan yang berkelanjutan. Hingga akhir tahun 2024, realisasi Pajak Daerah tumbuh sebesar 2,92 persen (yoy) dengan capaian Rp4.623,15 miliar atau 90,26 persen dari target APBD-P. Kontribusi Pajak Daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap dominan sebesar 68,89 persen, meskipun mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 70,59 persen dan tahun 2022 sebesar 70,51 persen.

Sebagian besar komponen Pajak Daerah mencatatkan pertumbuhan positif, terutama Pajak Hotel yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 27,30 persen (yoy), diikuti oleh Pajak Restoran yang meningkat 7,87 persen (yoy), dan Pajak Reklame yang tumbuh 4,80 persen (yoy). Kenaikan ini sejalan dengan peningkatan aktivitas sektor jasa dan pariwisata di Lampung, yang didorong oleh penyelenggaraan berbagai event dan festival pariwisata, serta momen liburan sekolah dan Natal-Tahun Baru (Nataru), yang mendorong pertumbuhan industri penyediaan akomodasi, makanan-minuman, serta jasa lainnya baik secara kuartalan (q-to-q) maupun tahunan (y-on-y) (sumber: BPS Lampung). Tren ini mengindikasikan bahwa sektor pariwisata semakin berperan dalam perekonomian daerah, sehingga program promosi wisata serta penguatan ekosistem industri pariwisata dapat menjadi strategi utama dalam menjaga momentum pertumbuhan sektor ini.

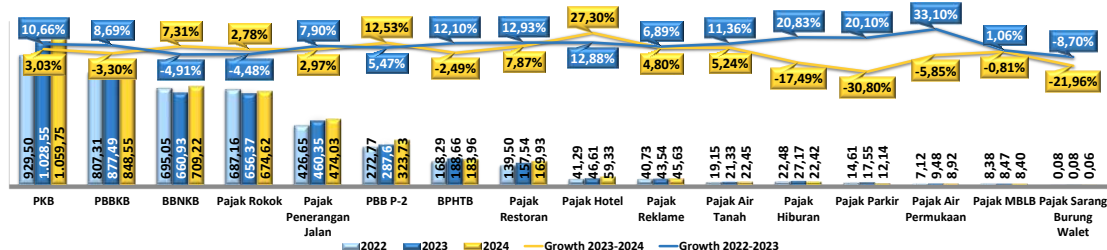
Namun demikian, beberapa jenis pajak mengalami kontraksi, di antaranya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang turun 3,30 persen (yoy), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang mengalami penurunan 2,49 persen (yoy), serta Pajak Hiburan yang terkoreksi signifikan sebesar 17,49 persen (yoy).

Selain itu, Pajak Parkir mengalami kontraksi terbesar sebesar 30,80 persen (yoy), diikuti oleh Pajak Sarang Burung Walet yang turun 21,96 persen (yoy), Pajak Air Permukaan yang menurun 5,85 persen (yoy), serta Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang juga berkontraksi 0,81 persen (yoy). Penurunan ini mengindikasikan adanya perlambatan aktivitas pada sektor-sektor tertentu yang menjadi objek pajak, sehingga dibutuhkan evaluasi terhadap regulasi, insentif fiskal, serta kebijakan peningkatan kepatuhan pajak untuk mengatasi tren negatif pada jenis pajak yang mengalami penurunan.

Meskipun demikian, PBBKB bersama dengan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tetap menjadi tiga jenis pajak dengan kontribusi terbesar dalam struktur Pajak Daerah Regional Lampung. Sebagai sumber PAD yang strategis dan dominan di regional Lampung, pemerintah daerah terus mengupayakan peningkatan realisasi Pendapatan Pajak Daerah, termasuk melalui persiapan penerapan opsen PKB dan BBNKB pada tahun 2025. Pemerintah Provinsi Lampung juga telah menerbitkan Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 yang memberikan keringanan PKB dan BBNKB. Kebijakan ini berlaku mulai 2 September hingga 16 Desember 2024, dan terbukti berhasil meningkatkan realisasi penerimaan pajak kendaraan, di mana PKB tumbuh sebesar 3,03 persen (yoy) dengan realisasi Rp1.059,75 miliar, sementara BBNKB meningkat 7,31 persen (yoy) dengan capaian Rp709,22 miliar.

Perbandingan realisasi per jenis Pajak Daerah dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 3.36.

Grafik 3.36. Perkembangan Realisasi Pajak Daerah per Jenis di Lampung 2022-2024 (miliar rupiah)

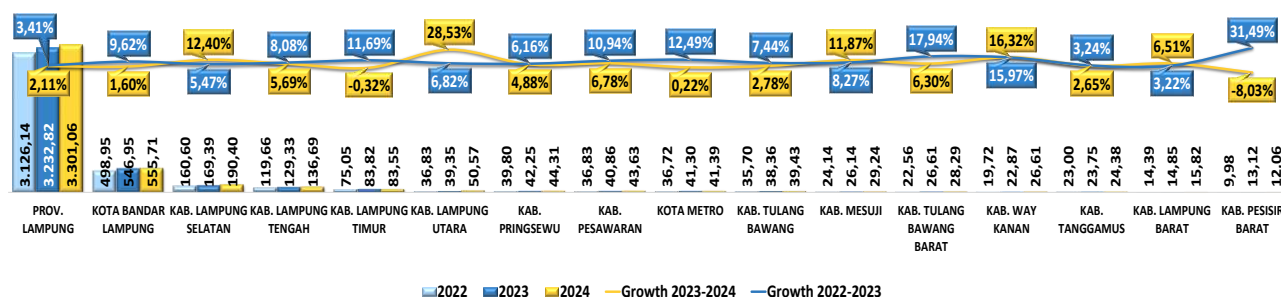


Sumber: LRA Pemda se-Provinsi Lampung, GFS, 2025 (diolah)

Secara spasial, Pemerintah Daerah dengan nominal realisasi pendapatan Pajak Daerah terbesar adalah Pemerintah Provinsi Lampung yang mencapai Rp3.301,06 miliar atau 89,51 persen dari target. Sementara itu, Kota Bandar Lampung tercatat menjadi penyumbang Pajak Daerah tertinggi pada tingkat Kabupaten/Kota dengan realisasi sebesar Rp555,71 miliar. Sedangkan tingkat ketercapaian

target tertinggi dicatatkan oleh Kabupaten Way Kanan dengan capaian yang melebihi target sebesar 113,37 persen. Lebih lanjut, pertumbuhan realisasi Pajak Daerah tertinggi dicapai oleh Kab. Lampung Utara dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 28,53 persen. Realisasi Pajak Daerah pada masing-masing Pemda di regional Lampung dan pertumbuhannya dapat dilihat pada grafik 3.37.

Grafik 3.37. Perkembangan Realisasi Pajak Daerah per Pemda di Lampung 2022-2024 (miliar rupiah)



Sumber: LRA Pemda se-Provinsi Lampung, GFS, 2025 (diolah)

Secara spasial, Pemerintah Daerah dengan nominal realisasi pendapatan Pajak Daerah terbesar adalah Pemerintah Provinsi Lampung yang mencapai Rp3.301,06 miliar atau 89,51 persen dari target. Sementara itu, Kota Bandar Lampung tercatat menjadi penyumbang Pajak Daerah tertinggi pada tingkat Kabupaten/Kota dengan realisasi sebesar Rp555,71 miliar. Sedangkan tingkat ketercapaian target tertinggi dicatatkan oleh Kabupaten Way Kanan dengan capaian yang melebihi target sebesar 113,37 persen. Lebih lanjut, pertumbuhan realisasi Pajak Daerah tertinggi dicapai oleh Kab. Lampung Utara dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 28,53 persen. Realisasi Pajak Daerah pada masing-masing Pemda di regional Lampung dan pertumbuhannya dapat dilihat pada grafik 3.37.

3.2.1.1.2 Retribusi Daerah

Perkembangan realisasi Retribusi Daerah dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, terutama setelah penerapan kebijakan pengalihan pencatatan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ke dalam kategori Retribusi Daerah. Kebijakan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang

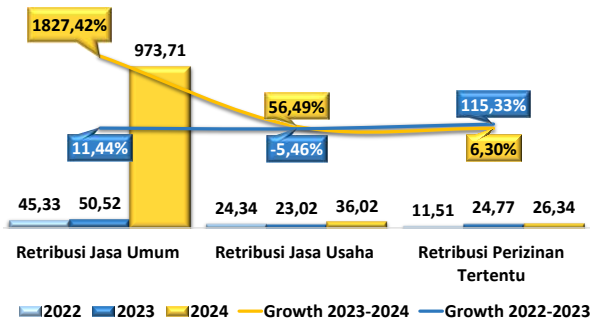
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengubah struktur pencatatan pendapatan daerah. Sebagai dampak dari kebijakan tersebut, penerimaan Retribusi Daerah meningkat tajam hingga 953,89 persen (yoy), mencapai Rp1.036,07 miliar atau 91,15 persen dari target APBD-P 2024.

Dukungan terbesar dalam peningkatan Retribusi Daerah berasal dari Retribusi Jasa Layanan Umum, yang berkontribusi sebesar 93,98 persen terhadap total penerimaan retribusi. Komponen terbesar dalam kelompok ini adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan, yang mencatatkan realisasi Rp937,17 miliar, meningkat signifikan dari hanya Rp0,76 miliar pada tahun 2023. Kenaikan substansial ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya aktivitas jasa kesehatan di Lampung (sumber: BPS Provinsi Lampung) serta fakta bahwa mayoritas BLUD di Provinsi Lampung bergerak di sektor kesehatan, yang mencakup rumah sakit, puskesmas, serta laboratorium kesehatan daerah.

Sementara itu, Retribusi Jasa Usaha juga menunjukkan pertumbuhan positif, terutama didukung oleh peningkatan Retribusi Pemakaian

Kekayaan Daerah, yang mencatat kenaikan 140,81 persen (yoy) dengan realisasi Rp21,29 miliar. Peningkatan ini mencerminkan optimalisasi pengelolaan aset daerah melalui skema penyewaan yang lebih terstruktur dan efisien.

Grifik 3.38. Perkembangan Realisasi Retribusi Daerah per Jenis di Lampung 2022-2024 (miliar rupiah)



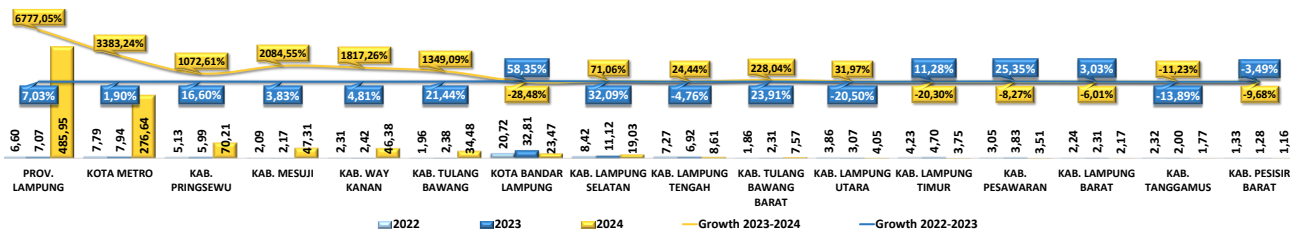
Sumber: LRA Pemda se-Provinsi Lampung, GFS, 2025 (diolah)

Selain itu, Retribusi Perizinan Tertentu turut mengalami pertumbuhan, dengan kontribusi utama berasal dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang mencatatkan realisasi Rp25,80 miliar

atau meningkat 10,77 persen (yoy). Kenaikan ini mengindikasikan semakin meningkatnya aktivitas pembangunan di Lampung. Perbandingan realisasi per jenis Retribusi Daerah dalam kurun 3 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 3.38.

Pemerintah daerah dengan realisasi penerimaan Retribusi Daerah tertinggi di Regional Lampung pada tahun 2024 adalah Provinsi Lampung, dengan capaian sebesar Rp485,95 miliar atau 110,16 persen dari target APBD-P 2024. Realisasi ini menjadikan Provinsi Lampung sebagai kontributor utama dalam penerimaan retribusi di tingkat regional, dengan pangsa sebesar 46,90 persen dari total realisasi Retribusi Daerah di Lampung. Di posisi kedua, Kota Metro mencatatkan realisasi sebesar Rp274,64 miliar, yang setara dengan 26,70 persen dari total penerimaan retribusi regional. Realisasi Retribusi Daerah pada masing-masing Pemda di regional Lampung dapat dilihat pada grafik 3.39.

Grifik 3.39. Perkembangan Realisasi Retribusi Daerah per Pemda di Lampung 2022-2024 (miliar rupiah)



Sumber: LRA Pemda se-Provinsi Lampung dan GFS, 2025 (diolah)

3.2.1.1.3 Rasio Pajak Daerah (Local Tax Ratio)

Tabel 3.9. Perbandingan Local Tax Ratio Lampung Tahun 2022-2024

Komponen (miliar Rupiah)	2022	2023	2024
Pendapatan Pajak Daerah	4.280,07	4.491,78	4.623,15
Pendapatan Retribusi Daerah	81,18	98,31	1.036,07
Total Pajak dan Retribusi Daerah	4.361,25	4.590,09	5.659,21
PDRB (ADHB)	414.119,68	448.850,64	483.882,92
Local Tax Ratio (Persen)	1,05%	1,02%	1,17%

Sumber: LRA Pemda se-Provinsi Lampung, GFS, BPS, 2025 (diolah)

Rasio Pajak Daerah merupakan indikator yang mengukur kontribusi total penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Rasio ini menjadi ukuran penting dalam menilai kapasitas fiskal daerah serta tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah. Berikut adalah perbandingan

Local Tax Ratio Regional Lampung tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 yang disajikan dalam Tabel 3.9.

Dalam tiga tahun terakhir, Local Tax Ratio di Regional Lampung masih berada jauh di bawah batas ideal 3 persen, mencerminkan rendahnya kontribusi PDRD terhadap perekonomian daerah. Pada tahun 2024, Local Tax Ratio tercatat sebesar 1,17 persen, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 1,02 persen dan tahun 2022 yang mencapai 1,05 persen. Peningkatan rasio ini sejalan dengan pertumbuhan PDRD sebesar 23,29 persen (yoy) dan pertumbuhan PDRB yang mencapai 7,80 persen (yoy). Meskipun terjadi peningkatan, rasio ini tetap mengindikasikan ketergantungan daerah

yang tinggi terhadap sumber pendanaan di luar komponen PDRD, seperti dana transfer dari pemerintah pusat.

Rendahnya *Local Tax Ratio* juga mencerminkan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti terbatasnya basis pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih perlu ditingkatkan, serta adanya kebocoran penerimaan akibat inefisiensi dalam sistem pemungutan pajak daerah. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kontribusi PDRD terhadap PDRB, di antaranya melalui perluasan basis pajak, penguatan sistem administrasi perpajakan, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah sebagai sumber pendapatan retribusi yang lebih berkelanjutan.

Dari sisi distribusi PDRB menurut lapangan usaha, terdapat ketimpangan antara sektor ekonomi dominan dan kontribusinya terhadap Pajak Daerah. Sektor pertanian, yang berkontribusi 26,21 persen terhadap PDRB, namun memiliki sumbangsih yang terbatas terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah. Bahkan, sektor ini menunjukkan tren penurunan distribusi terhadap PDRB, mengindikasikan perlunya diversifikasi sumber penerimaan daerah dari sektor-sektor yang lebih produktif dan memiliki potensi pajak yang lebih tinggi.

Sebaliknya, sektor industri pengolahan, yang berkontribusi 18,93 persen terhadap PDRB, memiliki potensi signifikan untuk dioptimalkan sebagai basis penerimaan daerah. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), kinerja industri pengolahan di Provinsi Lampung terus mencatatkan pertumbuhan tahunan (yoy), terutama didorong oleh industri makanan.

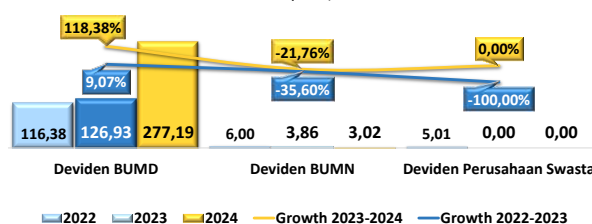
Oleh karena itu, pengembangan industrialisasi berbasis hilirisasi hasil pertanian menjadi langkah strategis dalam meningkatkan nilai tambah sektor ini. Dorongan terhadap investasi dan inovasi di sektor industri pengolahan sangat penting untuk mendukung peningkatan penerimaan daerah,

sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

3.2.1.1.4 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di Regional Lampung dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten. Setelah mengalami pertumbuhan sebesar 2,67 persen pada tahun 2023, realisasi pendapatan hingga akhir tahun 2024 mencapai Rp280,21 miliar, mencatatkan lonjakan signifikan sebesar 114,24 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Meski mencatatkan pertumbuhan yang tinggi, capaian ini masih jauh dari target yang ditetapkan dalam APBD-P 2024, dengan tingkat pencapaian hanya sebesar 50,99 persen.

Grafik 3.40. Perkembangan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lampung Tahun 2022-2024 (miliar rupiah)



Sumber: LRA Pemda se-Provinsi Lampung, GFS, 2025 (diolah)

Pertumbuhan pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terutama didorong oleh peningkatan Bagian Laba (dividen) yang dibagikan kepada pemerintah daerah atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dividen tersebut mengalami kenaikan signifikan sebesar 118,38 persen (yoy) dan secara proporsional mendominasi komponen pendapatan dengan kontribusi mencapai 98,92 persen. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dalam tiga tahun terakhir di regional Lampung dapat dilihat pada grafik 3.40.

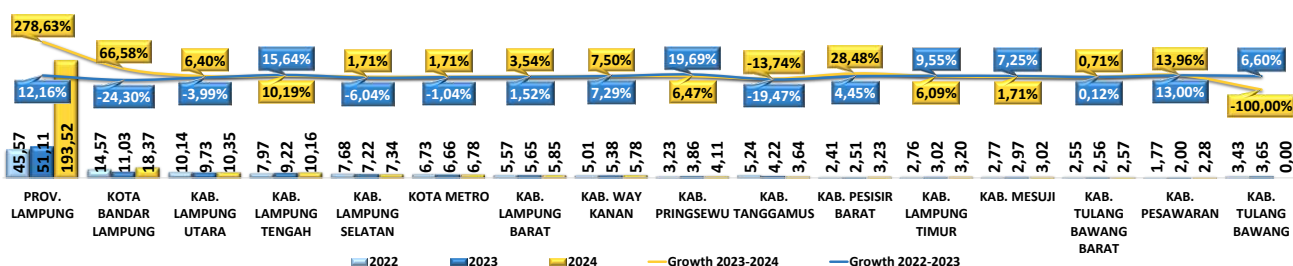
Lebih lanjut, secara nominal, realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tertinggi dicapai oleh Pemerintah Provinsi Lampung dengan nilai Rp193,52 miliar. Peningkatan signifikan sebesar 278,63 persen ini terutama bersumber dari dividen atas penyertaan modal pada BUMD, di

mana PT Lampung Jasa Utama (LJU) pada tahun 2023 telah mencatatkan laba dan mulai memberikan dividen kepada Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2024 ini.

Di tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Lampung Tengah mencatatkan capaian target tertinggi dengan realisasi sebesar 120,17 persen, diikuti oleh Kota Metro yang mencapai 100,66 persen. Kedua daerah ini memperoleh pendapatan dari dividen

atas penyertaan modal pada BUMD sektor keuangan. Sementara itu, delapan kabupaten lainnya, yakni Mesuji, Pringsewu, Lampung Barat, Way Kanan, Pesisir Barat, Lampung Selatan, dan Tulang Bawang Barat, berhasil merealisasikan pendapatan sesuai target, yakni sebesar 100 persen. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada masing-masing Pemda di regional Lampung dapat dilihat pada grafik 3.41.

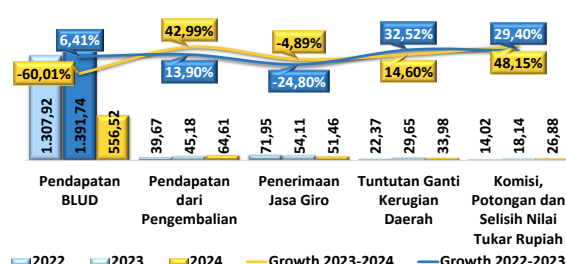
Grafik 3.41. Perkembangan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per Pemda di Lampung Tahun 2022-2024 (miliar rupiah)



Sumber: LRA Pemda se-Provinsi Lampung, GFS, 2025 (diolah)

3.2.1.1.5 Lain-Lain PAD yang Sah

Grafik 3.42. Perkembangan Realisasi 5 Teratas Jenis LLPADyS Lampung Tahun 2022-2024 (miliar rupiah)



Sumber: LRA Pemda se-Provinsi Lampung, GFS, 2025 (diolah)

Dalam tiga tahun terakhir, total realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (LLPADyS) di Regional Lampung menunjukkan tren penurunan, meskipun beberapa komponen masih mencatatkan pertumbuhan. Pada tahun 2024, realisasi penerimaan dari LLPADyS tercatat sebesar Rp771,34 miliar, mengalami kontraksi sebesar 53,03 persen (yoy), yang berdampak pada penurunan kontribusinya terhadap total PAD menjadi 11,49 persen.

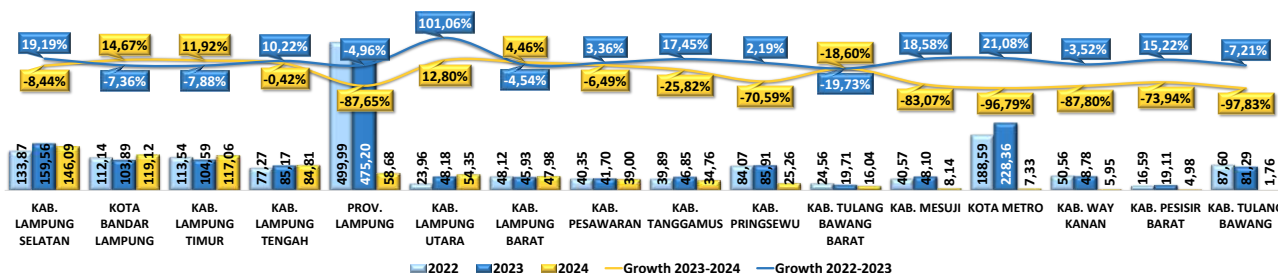
Komponen terbesar dalam LLPADyS didominasi oleh Pendapatan BLUD dengan porsi mencapai 72,15 persen atau senilai Rp556,52 miliar. Meski demikian, angka ini lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 dan 2022. Penurunan

tersebut terutama disebabkan oleh perubahan kebijakan pencatatan keuangan di beberapa pemerintah daerah yang mengalihkan Pendapatan BLUD dari kategori LLPADyS menjadi bagian dari Pendapatan Retribusi Daerah.

Di sisi lain, beberapa komponen LLPADyS mencatatkan pertumbuhan positif, antara lain Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan dari Pengembalian, Pendapatan Denda Pajak, serta Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah. Grafik 3.42 menggambarkan perkembangan realisasi LLPADyS dalam periode 2022–2024 untuk lima jenis pendapatan dengan kontribusi tertinggi di Regional Lampung.

Secara spasial, Kabupaten Lampung Selatan mencatatkan realisasi LLPADyS tertinggi secara nominal dengan nilai Rp146,09 miliar. Sementara itu, Kota Bandar Lampung mencatatkan pertumbuhan realisasi tertinggi sebesar 14,67 persen (yoy), menunjukkan peningkatan efektivitas dalam optimalisasi pendapatan dari komponen ini. Realisasi lain-lain PAD yang sah masing-masing Pemda di regional Lampung tahun 2022-2024 sebagaimana grafik 3.43.

Grafik 3.43. Perkembangan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah per Pemda di Lampung 2022-2024 (miliar rupiah)



Sumber: LRA Pemda se-Provinsi Lampung, GFS, 2025 (diolah)

3.2.1.2 Pendapatan Transfer

Dalam tiga tahun terakhir, realisasi Pendapatan Transfer secara nominal menunjukkan tren peningkatan, terutama pada komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Sementara itu, Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami fluktuasi namun tetap mencatatkan pertumbuhan positif pada tahun 2024 apabila dibandingkan dengan tahun 2023. Pada tahun 2024, realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah mencapai Rp1.534,66 miliar atau 75,28 persen dari pagu, dengan pertumbuhan sebesar 25,07 persen (yoy). Peningkatan ini didorong oleh kenaikan signifikan pada realisasi pendapatan bagi hasil pajak di tingkat kabupaten/kota, yang tumbuh sebesar 26,04 persen dengan total realisasi mencapai Rp1.505,99 miliar.

Grafik 3.44. Perbandingan Komposisi Realisasi Pendapatan Transfer Lampung Tahun 2022-2024 (miliar rupiah)



Sumber: LRA Pemda se-Provinsi Lampung, GFS, 2025 (diolah)

Di sisi lain, realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat di Regional Lampung pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp22.414,34 miliar atau 98,33 persen dari pagu, tumbuh 5,70 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tetap menjadi kontributor utama terhadap total Pendapatan Daerah, dengan kontribusi

sebesar 72,96 persen. Meski demikian, angka ketergantungan terhadap pendapatan ini mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 73,57 persen.

Rincian pertumbuhan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat menunjukkan peningkatan positif pada hampir seluruh komponennya, yakni Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik, DAK Fisik, Hibah, Insentif Fiskal, dan Dana Desa. Namun, pendapatan dari Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami kontraksi seiring dengan menurunnya alokasi dana tersebut dibandingkan tahun sebelumnya.

Terdapat perbedaan realisasi antara Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam APBD, yang disebabkan oleh perbedaan sistem aplikasi dalam penatausahaan keuangan daerah. Secara prinsip, seluruh TKD yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat menjadi bagian dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam struktur Pendapatan Daerah. Grafik 3.44 menggambarkan perbandingan komposisi realisasi Pendapatan Transfer di Provinsi Lampung selama periode 2022–2024.

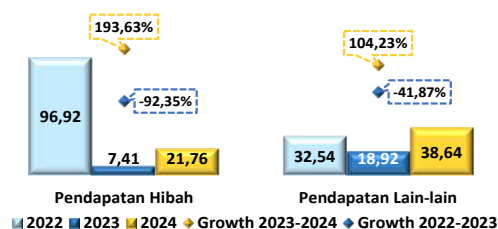
3.2.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (LLPDyS) mencakup pendapatan hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Dalam tiga tahun terakhir, realisasi LLPDyS di Provinsi Lampung mengalami fluktuasi, dengan dominasi pada pendapatan hibah dan pendapatan lainnya. Pada

tahun 2024, realisasi LLPdYs tercatat sebesar Rp60,40 miliar, meningkat signifikan hingga 129,39 persen dibandingkan tahun 2023. Komponen utama realisasi ini terdiri atas Pendapatan Hibah sebesar Rp21,76 miliar dan Pendapatan Lainnya sebesar Rp38,64 miliar.

Pendapatan Hibah pada tahun 2024 bersumber dari berbagai entitas, di antaranya Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp1,82 miliar yang merupakan Hibah Sanitasi Air Limbah Setempat (masuk dalam alokasi TKD untuk Kabupaten Lampung Tengah). Selain itu, Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri mencapai Rp12,73 miliar, sedangkan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan tercatat sebesar Rp7,20 miliar. Sementara itu, Pendapatan Lainnya seluruhnya berasal dari penerimaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Rumah Sakit Non-BLUD pada Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Mesuji, dan Kabupaten Pesisir Barat. Perkembangan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2022-2024 tergambar dalam grafik 3.45.

Grafik 3.45. Perkembangan Realisasi LLPdYs Lampung Tahun 2022-2024 (miliar rupiah)



Sumber: LRA Pemda se-Provinsi Lampung, GFS, 2025 (diolah)

3.2.1.4 Analisis Tingkat Kemandirian Daerah

Tingkat kemandirian daerah diukur melalui rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan serta rasio Transfer Pemerintah Pusat (TPP) terhadap total pendapatan. Daerah yang memiliki tingkat kemandirian yang baik adalah daerah yang memiliki rasio PAD yang tinggi sekaligus rasio transfer yang rendah.

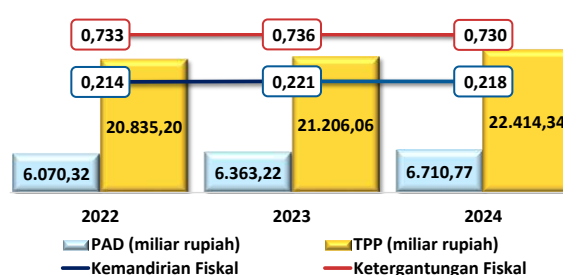
Secara agregat, Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) regional Lampung pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,218, mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 0,221, namun

masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 yang berada pada level 0,214. Berdasarkan klasifikasi Sampurna (2018), rasio ini masih termasuk dalam kategori belum mandiri, yang mengindikasikan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhannya secara independen masih terbatas.

Penurunan IKF pada tahun 2024 mencerminkan bahwa pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum cukup signifikan untuk mengimbangi peningkatan total pendapatan daerah, yang masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Hal ini sejalan dengan rasio Ketergantungan Fiskal yang pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,730, sedikit menurun dari 0,736 pada tahun 2023 dan 0,733 pada tahun 2022. Meskipun angka ini menunjukkan adanya perbaikan dalam upaya mengurangi ketergantungan fiskal, proporsi yang masih relatif tinggi menegaskan bahwa sumber pendanaan utama daerah tetap berasal dari transfer pusat.

Kondisi ini juga mencerminkan adanya peningkatan pendapatan dari sumber di luar PAD dan TPP, yang berkontribusi terhadap sedikitnya penurunan rasio ketergantungan fiskal. Namun, mengingat angka ketergantungan fiskal yang masih berada di kisaran 0,73, optimalisasi penerimaan PAD menjadi krusial untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah secara lebih substansial. Oleh karena itu, strategi penguatan PAD melalui diversifikasi sumber pendapatan, optimalisasi pajak dan retribusi daerah, serta peningkatan efisiensi pengelolaan aset dan BUMD perlu terus diperkuat guna mengurangi ketergantungan pada pendanaan dari pemerintah pusat dalam jangka panjang.

Grafik 3.46. Perkembangan Rasio Kemandirian Fiskal dan Rasio Ketergantungan Fiskal Lampung Tahun 2022-2024



Sumber: LRA Pemda se-Provinsi Lampung, GFS, 2025 (diolah)

Perkembangan Realisasi PAD dan TPP (miliar rupiah) dibandingkan dengan Rasio Kemandirian Fiskal dan Rasio Ketergantungan Fiskal Lampung Tahun 2022-2024 dilihat pada grafik 3.46.

Tabel 3.10 Klasifikasi Kondisi Fiskal Daerah

Rasio Kemandirian	Kondisi Kemandirian Fiskal
$0,00 \leq IKF < 0,25$	Belum Mandiri
$0,25 \leq IKF < 0,50$	Menuju Kemandirian
$0,50 \leq IKF < 0,75$	Mandiri
$0,75 \leq IKF \leq 1,00$	Sangat Mandiri

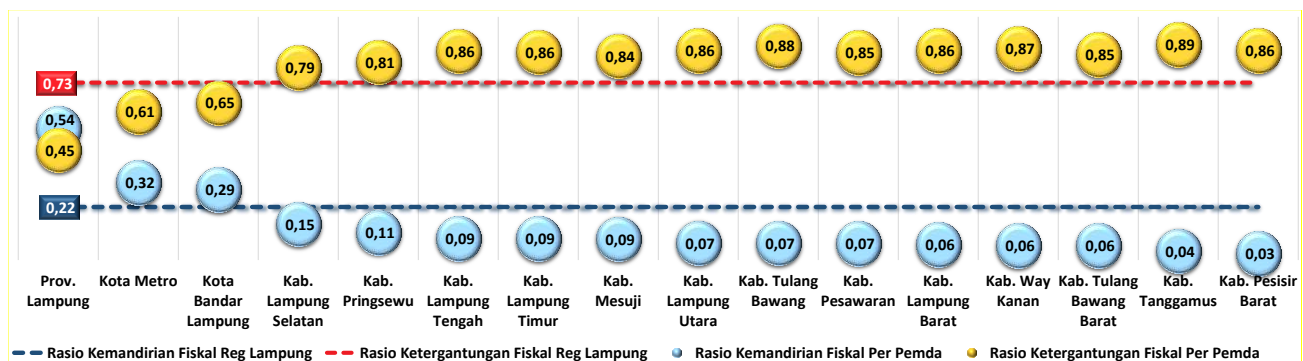
Sumber: Sampurna, 2018

Secara spasial, berdasarkan perbandingan realisasi PAD terhadap total realisasi pendapatan daerah tahun 2024, Provinsi Lampung memiliki rasio kemandirian tertinggi, yaitu 0,54 (kategori mandiri).

Sebaliknya, Kabupaten Pesisir Barat mencatat rasio kemandirian terendah, yaitu 0,03. Sedangkan Kota Bandar Lampung dan Kota Metro masuk pada kategori menuju kemandirian dengan rasio kemandirian pada rentang 0,25-0,50.

Ketergantungan terhadap TPP juga bervariasi, di mana Kabupaten Tanggamus memiliki angka ketergantungan tertinggi, yaitu 0,89 persen. Di sisi lain, Provinsi Lampung mencatat angka ketergantungan terendah terhadap TPP, yaitu 0,45 persen. Rasio kemandirian daerah tahun 2024 dan komposisi realisasi pendapatan masing-masing Pemda di Regional Lampung dapat dilihat pada grafik 3.47 dan grafik 3.48.

Grafik 3.47. Rasio Kemandirian Fiskal Daerah per Pemda Tahun 2024



Sumber: LRA Pemda se-Provinsi Lampung, GFS, 2025 (diolah)

Grafik 3.48. Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah per Pemda Tahun 2024 (miliar rupiah)



Sumber: LRA Pemda se-Provinsi Lampung, GFS, 2025 (diolah)

3.2.1.5 Upaya Daerah dalam Peningkatan PAD

Dalam tiga tahun terakhir, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) regional Lampung secara agregat menunjukkan tren peningkatan. Sebagai salah satu kontributor utama dalam pembiayaan pembangunan daerah, peningkatan realisasi

komponen penyumbang PAD menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah. Upaya ini dilakukan melalui berbagai strategi optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi, pemanfaatan teknologi, serta penguatan tata kelola aset daerah.

Beberapa langkah strategis yang telah diterapkan dalam meningkatkan PAD di Provinsi Lampung antara lain sebagai berikut:

a. Optimalisasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Pemerintah daerah memperluas aksesibilitas dan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan memanfaatkan teknologi informasi. Berbagai inovasi yang telah diterapkan meliputi:

- 1) e-Salam 1: Sistem pembayaran elektronik Samsat Lampung melalui ATM.
- 2) e-Salam 2: Sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor berbasis aplikasi Android.
- 3) e-Samdes: Sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor hingga tingkat pedesaan melalui 277 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- 4) SIGNAL (Samsat Digital Nasional): Layanan digital untuk pembayaran dan pengesahan pajak kendaraan bermotor secara nasional

b. Peningkatan Kualitas Layanan Pajak Air Permukaan (PAP)

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan terhadap Wajib Pajak Air Permukaan, Pemerintah Provinsi Lampung telah mengembangkan e-PAP, yaitu sistem informasi pengelolaan Pajak Air Permukaan yang bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak.

Selain itu, untuk mendorong kepatuhan wajib pajak, pemerintah memberikan Penghargaan Wajib Pajak Air Permukaan Tahun 2024 dalam beberapa kategori: Kategori Terbaik dan Terdisiplin dalam Administrasi Pajak Air Permukaan, Kategori Teraktif dan Terkooperatif dalam kepatuhan pembayaran, Kategori Wajib Pajak dengan Kontribusi Terbesar terhadap penerimaan PAP.

Hingga akhir tahun 2024, realisasi PAP telah melampaui target dengan capaian sebesar 115,13 persen atau mencapai Rp8.922,70 miliar, menunjukkan efektivitas kebijakan yang diterapkan.

c. Kebijakan Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan, Pemerintah Provinsi Lampung menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2024 yang memberikan keringanan pembayaran PKB dan BBNKB. Kebijakan ini berlaku mulai 2 September hingga 16 Desember 2024 dan terbukti efektif dalam meningkatkan realisasi penerimaan pajak kendaraan dimana PKB tumbuh 3,03 persen (*yoy*), dan BBNKB meningkat 7,31 persen (*yoy*)

d. Digitalisasi Pelaporan dan Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Sebagai langkah optimalisasi pemungutan pajak, pemerintah daerah melaksanakan pelatihan penggunaan Aplikasi e-PBBKB bagi seluruh Wajib Pungut di Provinsi Lampung. Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akurasi dalam pelaporan serta pemungutan PBBKB, yang merupakan salah satu sumber utama PAD daerah.

e. Peningkatan Sinergi dengan Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Opsen Pajak

Pemerintah Provinsi Lampung meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait pengelolaan Opsen Pajak PKB dan BBNKB di tahun 2025. Kerja sama ini mencakup:

- 1) *Cost sharing*, yaitu pembagian biaya operasional dalam pengelolaan pajak daerah.
- 2) *Role sharing*, yaitu pembagian peran dan tanggung jawab antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pemungutan serta pengawasan pajak kendaraan bermotor.

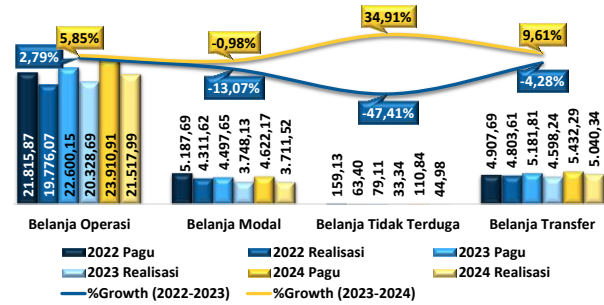
f. Optimalisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Selain pajak dan retribusi, Pemerintah Provinsi Lampung juga meningkatkan penerimaan dari sektor pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, khususnya melalui perbaikan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Upaya optimalisasi dalam perencanaan dan pengawasan BUMD menghasilkan peningkatan realisasi dividen hingga 118,38 persen (yoy).

3.2.2 Belanja Daerah

Dalam tiga tahun terakhir, realisasi Belanja Daerah di Provinsi Lampung mengalami fluktuasi. Setelah mengalami kontraksi pada tahun 2023, realisasi Belanja Daerah tahun 2024 kembali mencatatkan pertumbuhan positif. Realisasi belanja pada tahun 2024 mencapai Rp30.314,84 miliar atau 88,96 persen dari pagu, meningkat 5,60 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tren ini mencerminkan adanya perbaikan dalam efektivitas penyerapan anggaran serta peningkatan aktivitas belanja pemerintah daerah dalam mendukung program pembangunan dan pelayanan publik. Perbandingan pagu, realisasi, dan pertumbuhan realisasi belanja per jenis belanja 2022-2024 dapat dilihat pada grafik 3.49.

Gratik 3.49. Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Daerah (miliar rupiah) dan Pertumbuhannya (yoy) s.d. Triwulan 2022-2024

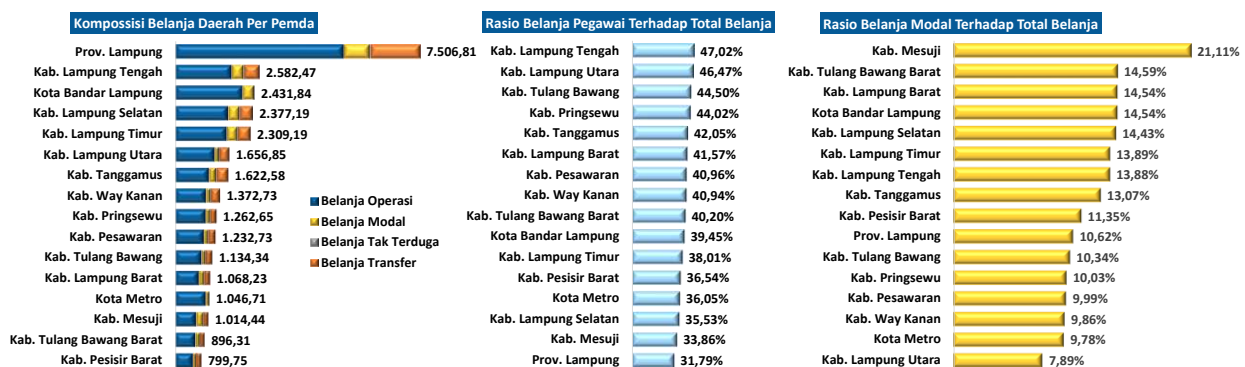


Sumber: LRA Pemda se-Provinsi Lampung, GFS, 2025 (diolah)

3.2.2.1 Berdasarkan Jenis Belanja

Belanja Daerah berdasarkan jenisnya diklasifikasikan menjadi empat kategori utama, yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Berdasarkan data realisasi tahun 2023-2024, belanja operasi masih tetap menjadi komponen terbesar dalam struktur Belanja Daerah di Provinsi Lampung. Pada tahun 2024, kontribusi belanja operasi terhadap total realisasi belanja mencapai 70,98 persen, terus meningkat dibandingkan kontribusi belanja operasi tahun 2023 yang sebesar 70,81 persen dan 2022 yang sebesar 68,30 persen. Perbandingan kontribusi jenis belanja bervariasi di setiap kabupaten/kota. Komposisi Belanja Daerah per Pemda menurut jenis belanja dapat dilihat pada grafik 3.50.

Gratik 3.50. Komposisi Belanja Daerah per Pemda, Rasio Belanja Pegawai, dan Rasio Belanja Modal Tahun 2024 (miliar rupiah)



Sumber: LRA Pemda se-Provinsi Lampung, GFS, 2025 (diolah)

3.2.2.1.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp21.517,99 miliar, atau 89,99 persen dari pagu, tumbuh 5,85 persen dibandingkan tahun 2023. Peningkatan ini didorong oleh kenaikan pada

Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, serta Belanja Hibah. Sementara itu, Belanja Bunga dan Belanja Bantuan Sosial mengalami kontraksi.

Belanja Pegawai tetap menjadi komponen dominan dalam struktur Belanja Operasi, dengan realisasi

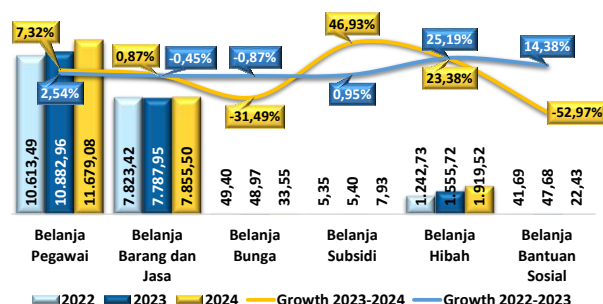
mencapai Rp11.679,08 miliar, tumbuh 7,32 persen (yoy), dan memberikan kontribusi sebesar 54,28 persen terhadap total Belanja Operasi. Angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 53,53 persen dan tahun 2022 yang mencapai 53,67 persen. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU-HKPD), dalam lima tahun ke depan, Pemerintah Daerah wajib menyesuaikan alokasi Belanja Pegawai maksimal 30 persen dari APBD, tidak termasuk tunjangan guru yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD).

Sementara itu, Belanja Barang dan Jasa mencatatkan realisasi sebesar Rp7.855,50 miliar atau 85,05 persen dari pagu, dengan pertumbuhan 0,87 persen (yoy). Namun, kontribusinya terhadap total Belanja Operasi mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 38,31 persen dan tahun 2022 sebesar 39,56 persen, dengan porsi tahun 2024 turun menjadi 36,51 persen.

Pada sisi lain, Belanja Hibah mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 25,19 persen, dengan realisasi mencapai Rp1.919,52 miliar atau 28,69 persen dari pagu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh lonjakan 172,45 persen dalam realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagai bagian dari mekanisme *cost-sharing* untuk pendanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2024.

Perkembangan realisasi komponen Belanja Operasi tahun 2022-2024 sebagaimana grafik 3.51.

Grafik 3.51. Realisasi Belanja Operasi tahun 2022-2024 (miliar rupiah)



Sumber: LRA Pemda se-Provinsi Lampung, GFS, 2025 (diolah)

Lebih lanjut, pemda dengan rasio realisasi Belanja Pegawai terhadap total belanja tertinggi dicatatkan

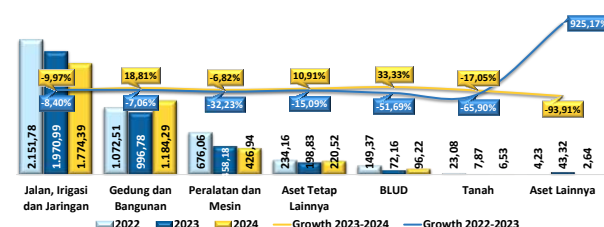
Kabupaten Lampung Tengah dengan rasio sebesar 47,02 persen. Sedangkan rasio terendah pada Provinsi Lampung yaitu sebesar 31,79 persen. Perbandingan Rasio realisasi Belanja Pegawai terhadap total belanja di regional Lampung dapat dilihat pada grafik 3.50.

3.2.2.1.2 Belanja Modal

Dalam tiga tahun terakhir, realisasi Belanja Modal di Regional Lampung secara agregat mengalami kontraksi, mencerminkan kecenderungan penurunan investasi daerah dalam aset jangka panjang. Meskipun alokasi Belanja Modal dalam APBD-P 2024 mengalami peningkatan, realisasinya hingga akhir tahun hanya mencapai Rp3.711,52 miliar, mengalami penurunan sebesar 0,98 persen dibandingkan dengan tahun 2023. Kondisi ini berdampak pada penurunan tingkat ketercapaian pagu, yang hanya mencapai 80,30 persen, lebih rendah dibandingkan dengan 83,34 persen pada tahun 2023.

Kontraksi ini terutama disebabkan oleh penurunan realisasi pada Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar 9,97 persen (yoy), yang merupakan komponen utama dalam struktur Belanja Modal dengan kontribusi mencapai 47,81 persen dengan realisasi sebesar Rp1.774,39 miliar. Selain itu, Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Tanah juga mengalami kontraksi, sehingga semakin memperlemah pertumbuhan kinerja belanja modal daerah.

Grafik 3.52. Perkembangan Realisasi Belanja Modal Lampung Tahun 2022-2024 (miliar rupiah)



Sumber: LRA Pemda se-Provinsi Lampung, GFS, 2025 (diolah)

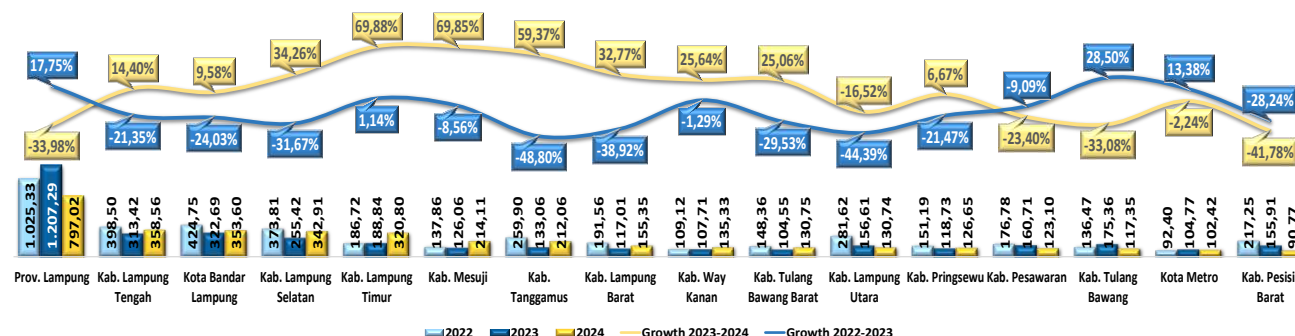
Di sisi lain, beberapa komponen belanja modal seperti Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, serta Belanja Modal BLUD menunjukkan pertumbuhan positif. Namun, peningkatan pada komponen ini belum

cukup signifikan untuk mendorong pertumbuhan Belanja Modal secara keseluruhan, yang masih berada dalam tren penurunan. Perkembangan Realisasi Belanja Modal Lampung Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada grafik 3.52.

Meskipun secara agregat Belanja Modal mengalami kontraksi, secara spasial mayoritas pemerintah

daerah (pemda) mencatatkan pertumbuhan positif, kecuali Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tulang Bawang, Kota Metro, dan Kabupaten Pesisir Barat, yang mengalami penurunan realisasi belanja modal dibandingkan tahun sebelumnya. Perkembangan Realisasi Belanja Modal Lampung per Pemda Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada grafik 3.53.

Grafik 3.53. Perkembangan Realisasi Belanja Modal Lampung per Pemda Tahun 2022-2024 (miliar rupiah)



Sumber: LRA Pemda se-Provinsi Lampung, GFS, 2025 (diolah)

Lebih lanjut, rasio realisasi Belanja Modal terhadap total Belanja Daerah tertinggi tercatat di Kabupaten Mesuji, di mana belanja modal menyumbang 21,11 persen dari total belanja. Sebaliknya, rasio terendah terjadi di Kabupaten Lampung Utara, di mana Belanja Modal hanya berkontribusi sebesar 7,89 persen dari total belanja daerah. Perbandingan Rasio realisasi Belanja Modal terhadap total belanja di regional Lampung dapat dilihat pada grafik 3.50.

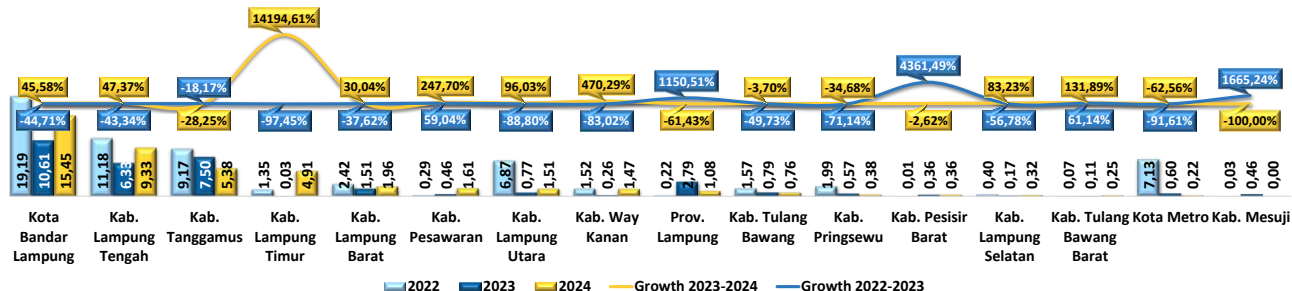
3.2.2.1.3 Belanja Tidak Terduga

Dalam tiga tahun terakhir, realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) di Regional Lampung mengalami fluktuasi. Setelah mengalami kontraksi pada tahun 2023, realisasi BTT kembali tumbuh signifikan pada tahun 2024 sebesar 34,91 persen (yoy), mencapai Rp44,98 miliar atau 40,59 persen dari pagu anggaran. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Tidak Terduga tidak hanya ditujukan untuk keadaan darurat yang mendesak dan tidak terprediksi atau

bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, tetapi juga mencakup pengembalian atas kelebihan pembayaran penerimaan daerah dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menganggarkan pengembalian pembayaran yang sifatnya tidak berulang dan terjadi pada tahun sebelumnya.

Secara spasial, realisasi Belanja Tidak Terduga tertinggi dicatatkan oleh Kota Bandar Lampung sebesar Rp15,45 miliar, mencerminkan kebutuhan penanganan kejadian tak terduga yang lebih besar di wilayah perkotaan. Sebaliknya, Kabupaten Mesuji belum mencatatkan realisasi BTT pada tahun 2024, yang dapat mengindikasikan rendahnya penggunaan anggaran untuk keperluan darurat atau masih adanya kendala dalam mekanisme pencairan dana tidak terduga di daerah tersebut. Realisasi Belanja Tidak Terduga masing-masing Pemda lingkup regional Lampung 2022-2024 dan pertumbuhannya sebagaimana grafik 3.54.

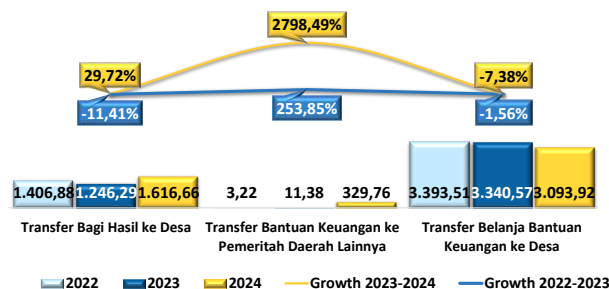
Grafik 3.54. Realisasi Belanja Tidak Terduga per Pemda 2022-2024 (miliar)



Sumber: LRA Pemda se-Provinsi Lampung, GFS, 2025 (diolah)

3.2.2.1.4 Belanja Transfer

Grafik 3.55. Realisasi Belanja Transfer tahun 2022-2024 per komponen dan pertumbuhannya



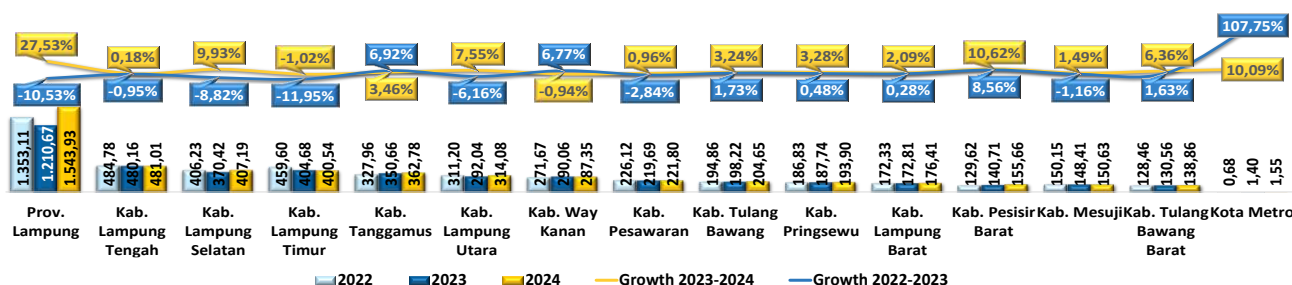
Sumber: LRA Pemda se-Provinsi Lampung, GFS, 2025 (diolah)

Secara total, kinerja realisasi Belanja transfer menunjukkan fluktuasi pada periode tiga tahun terakhir. Pada tahun 2024, realisasi Belanja transfer mencatatkan realisasi sebesar Rp5.040,34 miliar atau 92,78 persen dari pagu, tumbuh 9,61 persen dibandingkan tahun 2023 setelah sempat terkontraksi 4,28 persen dari tahun 2022. Pertumbuhan ini disebabkan oleh peningkatan dari semua komponen Belanja Transfer, yaitu Transfer

Bagi Hasil (29,72 persen, yoy), dan Transfer bantuan Keuangan (2,14 persen, yoy). Realisasi Belanja Transfer didominasi oleh Transfer Bantuan Keuangan ke Desa yang mencapai 61,38 persen dari total realisasi Belanja Transfer atau sebesar Rp3.093,92 miliar. Perkembangan Realisasi Belanja Transfer tahun 2022-2024 per komponen dan pertumbuhannya sebagaimana grafik 2.50

Secara spasial, Realisasi Belanja Transfer tertinggi dicatatkan Provinsi Lampung sebesar Rp1.543,93 miliar atau 83,71 persen dari pagu, tumbuh 27,53 persen (yoy). Sedangkan realisasi Belanja Transfer terendah dicatatkan Kota Metro dengan realisasi sebesar Rp1,55 miliar atau 79,29 persen dari pagu, tumbuh 10,09 persen (yoy). Kota Bandar Lampung tidak mengalokasikan belanja Transfer pada APBD tahun 2022, 2023, dan 2024. Realisasi Belanja Transfer masing-masing Pemda lingkup regional Lampung tahun 2022-2024 sebagaimana grafik 3.56.

Grafik 3.56. Perkembangan Realisasi Belanja Transfer per Pemda Tahun 2022-2024 (miliar rupiah)



Sumber: LRA Pemda se-Provinsi Lampung, GFS, 2025 (diolah)

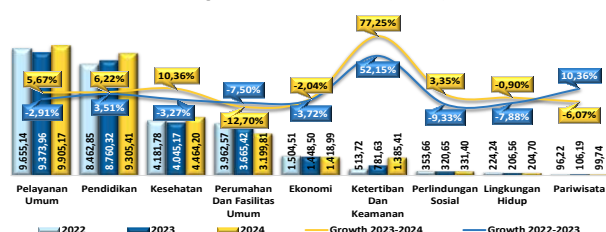
3.2.2.2 Berdasarkan Fungsi

Berdasarkan fungsinya, Belanja Daerah terdiri atas 9 fungsi utama yaitu Pelayanan Umum, Ketertiban dan Keamanan, Ekonomi, Lingkungan Hidup, Perumahan dan Fasilitas Umum, Kesehatan,

Pariwisata, Pendidikan, serta Perlindungan Sosial. Hingga akhir tahun 2024, distribusi realisasi belanja berdasarkan fungsi menunjukkan bahwa fungsi Pelayanan Umum mencatat realisasi belanja tertinggi, yaitu sebesar Rp9,905,17 miliar, dengan kontribusi terhadap Belanja Daerah sebesar 32,67

persen. Realisasi ini mengalami peningkatan sebesar 5,67 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang tercatat Rp9.373,96 miliar. Sementara itu, fungsi Pendidikan mencatatkan realisasi sebesar Rp9.305,41 miliar, dengan kontribusi 30,70 persen terhadap total belanja, memenuhi *mandatory spending* minimal 20 persen untuk sektor pendidikan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 serta Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Grafik 3.57. Perkembangan Realisasi dan Pertumbuhan Belanja per Fungsi Tahun 2022-2024 (miliar)



Sumber: LRA Pemda se-Provinsi Lampung, GFS, 2025 (diolah)

Di sisi lain, fungsi Ketertiban dan Keamanan menunjukkan pertumbuhan tertinggi dalam tiga tahun terakhir, dengan peningkatan realisasi sebesar 77,25 persen (yoy) pada tahun 2024, mencapai Rp1.385,41 miliar terkait penyelenggaraan pengamanan Pilkada 2024.

Sebaliknya, fungsi Pariwisata mencatatkan kontribusi terendah, yakni 0,33 persen dari total Belanja Daerah, dengan realisasi sebesar Rp99,74 miliar. Capaian ini mengalami kontraksi 6,07 persen (yoy). Realisasi belanja regional Lampung

berdasarkan fungsi tahun 2022-2024 terdistribusi sebagaimana grafik 3.57.

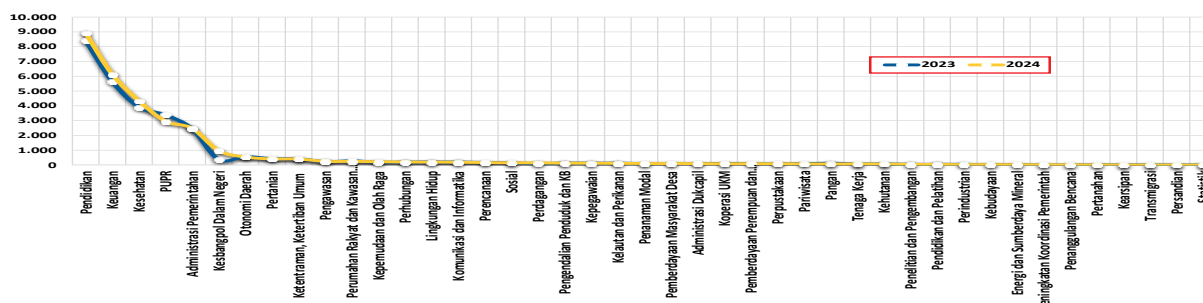
3.2.2.3 Berdasarkan Urusan

Berdasarkan urusan, realisasi belanja regional Lampung tahun 2024 tertinggi dialokasikan untuk Urusan Pendidikan, yaitu sebesar Rp8.918,47 miliar atau 29,42 persen dari total belanja. Urusan Keuangan menempati peringkat kedua dengan porsi 20,24 persen, diikuti oleh Urusan Kesehatan sebesar 14,32 persen.

Sementara itu, realisasi belanja Urusan Pertanian, yang merupakan salah satu sektor unggulan di Lampung, hanya mencapai 1,36 persen dengan realisasi sebesar Rp412,66 miliar, menempati urutan ke-8 dalam struktur belanja regional. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar 2,72 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023.

Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun sektor pertanian memiliki peran strategis dalam perekonomian Lampung, alokasi belanja untuk sektor ini masih relatif rendah. Kondisi tersebut berpotensi berdampak pada daya saing, produktivitas, serta ketahanan sektor pertanian dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih terarah dalam optimalisasi belanja untuk meningkatkan nilai tambah dan keberlanjutan sektor pertanian di Lampung. Realisasi belanja berdasarkan urusan regional Lampung 2023-2024 dapat dilihat pada grafik 3.58.

Grafik 3.58. Perbandingan Realisasi Belanja Transfer Berdasarkan Urusan 2023-2024 (miliar rupiah)



Sumber: LRA Pemda se-Provinsi Lampung, GFS, 2025 (diolah)

3.2.2.4 Kontribusi Belanja Terhadap PDRB

Belanja daerah merupakan salah satu instrumen fiskal yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui mekanisme pengeluaran pemerintah. Dalam PDRB Pengeluaran, belanja pemerintah tercermin dalam komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) yang meliputi pengeluaran dari Pemerintah Kabupaten/Kota dalam provinsi tersebut, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat (APBN) yang terkait dengan provinsi, serta Pemerintah Desa/Kelurahan di wilayah provinsi bersangkutan. Tabel 3.11 menunjukkan kontribusi daerah terhadap PDRB regional Lampung dalam periode tahun 2022-2024.

Tabel 3.11. Kontribusi Belanja Daerah terhadap PDRB 2022-2024

Komponen	2022	2023	2024
Belanja Daerah (miliar rupiah)	28.954,69	28.708,40	30.314,84
PK-P ADHB (miliar rupiah)	28.345,95	29.615,33	31.778,97
PDRB (miliar rupiah)	414.119,68	448.850,64	483.882,92
Ratio Belanja Daerah terhadap PDRB	6,99%	6,40%	6,26%
Kontribusi PK-P pada PDRB ADHB	6,84%	6,60%	6,57%

Sumber: LRA Pemda se-Provinsi Lampung, GFS, BPS, 2025 (diolah)

Kontribusi PK-P terhadap PDRB Lampung (Pengeluaran ADHB) menunjukkan tren penurunan, yakni dari 6,84 persen pada tahun 2022 menjadi 6,60 persen pada tahun 2023, dan kembali turun menjadi 6,57 persen pada tahun 2024. Pola serupa juga terjadi pada rasio Belanja Daerah terhadap PDRB, yang mengalami penurunan dari 6,99 persen (2022) menjadi 6,40 persen (2023), dan kembali turun menjadi 6,26 persen pada tahun 2024.

Meskipun secara nominal belanja daerah meningkat dari Rp28.708,40 miliar (2023) menjadi Rp30.314,84 miliar (2024) atau tumbuh 5,60 persen, rasionya terhadap PDRB justru mengalami penurunan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi Lampung lebih banyak ditopang oleh sektor non-pemerintah, dalam hal ini pengeluaran konsumsi rumah tangga. Penurunan kontribusi PK-P terhadap PDRB dapat mencerminkan efektivitas belanja pemerintah yang masih perlu ditingkatkan. Selama tahun 2024, pertumbuhan PK-P sebagian besar didorong oleh peningkatan belanja pegawai, terutama akibat

kebijakan kenaikan gaji ASN dalam APBN dan APBD (sumber: BPS Lampung). Meskipun langkah ini dapat meningkatkan daya beli ASN dan konsumsi masyarakat, proporsi belanja pegawai yang tinggi dapat mengurangi ruang fiskal untuk belanja modal dan program pembangunan strategis.

3.2.2.5 Analisis Belanja per Kapita

Rasio belanja daerah per kapita merupakan indikator yang menunjukkan tingkat pengeluaran daerah untuk kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi nilainya, semakin besar anggaran yang dialokasikan per orang, sehingga meningkatkan potensi tercapainya kesejahteraan di wilayah tersebut.

Grafik 3.59. Realisasi Belanja Daerah per Kapita Kabupaten/Kota 2024 (juta rupiah)



Sumber: LRA Pemda se-Provinsi Lampung, GFS, BPS, 2025 (diolah)

Berdasarkan data realisasi Belanja Daerah Tahun 2024 dan jumlah penduduk Lampung tahun 2024 (data BPS), Kota Metro memiliki rasio belanja per kapita tertinggi di regional Lampung, yaitu Rp5,96 juta dengan jumlah penduduk 175.710 jiwa. Sebaliknya, Kabupaten Lampung Tengah memiliki rasio belanja per kapita terendah, yaitu Rp1,69 juta dengan jumlah penduduk 1.525.090 jiwa. Sementara itu, belanja per kapita agregat se-Provinsi Lampung mencapai Rp3,22 juta dengan populasi total 9.419.580 jiwa yang tersebar di 15 kabupaten/kota, meningkat 4,41 persen (yoy).

Grafik 3.60. Realisasi Belanja Modal per Kapita Kabupaten/Kota Tahun 2024 (juta rupiah)



Sumber: LRA Pemda se-Provinsi Lampung, GFS, BPS, 2025 (diolah)

Selanjutnya, rasio belanja modal per kapita akan mengukur alokasi anggaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur per penduduk. Rasio ini penting karena belanja modal merupakan salah satu komponen pengeluaran pemerintah yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, rasio ini mencerminkan perhatian pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur.

Pada tahun 2024, rasio belanja modal per kapita agregat di Lampung hanya sebesar Rp0,39 juta, atau turun 2,09 persen (yoy). Kabupaten Mesuji mencatat rasio belanja modal per kapita tertinggi di regional Lampung, yaitu Rp0,89 juta dengan jumlah penduduk 241.600 jiwa. Di sisi lain, Kabupaten Lampung Utara memiliki rasio belanja modal per kapita terendah, sebesar Rp0,20 dengan jumlah penduduk 659.890 jiwa.

Realisasi Belanja Daerah per Kapita dan Realisasi Belanja Modal per Kapita Kabupaten/Kota di regional Lampung sampai dengan akhir Tahun 2024 dapat dilihat pada grafik 3.69 dan grafik 3.60.

3.2.3 Perkembangan Surplus/Defisit APBD

Pada tahun 2024, realisasi APBD regional Lampung secara agregat mencatatkan surplus. Perkembangan surplus/defisit APBD dapat dianalisis melalui empat rasio berikut:

a. **Rasio Surplus APBD terhadap Total Pendapatan Daerah.** Rasio surplus APBD terhadap total pendapatan daerah meningkat menjadi 0,013 pada 2024, naik sebesar 0,009 basis poin dibandingkan 2023 dan 0,032 basis poin dibandingkan 2022. Kenaikan ini mencerminkan penguatan kapasitas fiskal daerah yang didorong oleh pertumbuhan pendapatan sebesar 6,58 persen (yoy) serta peningkatan surplus yang signifikan sebesar 254,81 persen (yoy). Meskipun belanja daerah juga tumbuh 5,60 persen (yoy), surplus tetap tercapai, menunjukkan efektivitas pengelolaan fiskal yang semakin baik. Tren ini mengindikasikan optimalisasi pendapatan serta efisiensi dalam pengendalian belanja daerah.

- b. **Rasio Surplus APBD terhadap Dana Transfer** pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,018, meningkat 0,013 basis poin dibandingkan 2023 dan 0,044 basis poin dibandingkan 2022 yang masih mencatatkan defisit. Peningkatan ini mengindikasikan menurunnya ketergantungan fiskal terhadap dana transfer, seiring dengan pertumbuhan surplus APBD yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan dana transfer.
- c. **Rasio Surplus APBD terhadap PDRB** pada tahun 2024 mencapai 0,001, meningkat 0,0007 basis poin dibandingkan 2023 dan 0,002 basis poin dibandingkan 2022 yang mencatatkan defisit. Peningkatan ini menunjukkan kontribusi surplus APBD terhadap perekonomian daerah yang semakin membaik, meskipun masih dalam proporsi yang relatif kecil dibandingkan dengan total nilai ekonomi yang dihasilkan di Lampung.
- d. **Rasio SiLPA terhadap Realisasi Belanja** pada 2024 meningkat menjadi 0,029, naik 0,003 basis poin dibandingkan 2023 namun turun 0,002 basis poin dibandingkan 2022. Meskipun kenaikan SiLPA menunjukkan adanya kelebihan anggaran yang dapat digunakan untuk tahun berikutnya, peningkatan ini juga mengindikasikan potensi realisasi belanja yang belum optimal.

Tabel 3.12. Perkembangan Surplus/Defisit APBD Regional Lampung 2022-2024

Periode	Surplus terhadap Pendapatan	Surplus terhadap Realisasi Dana Transfer	Surplus terhadap PDRB	SiLPA terhadap Realisasi Belanja
2022	-0,019	-0,026	-0,001	0,031
2023	0,004	0,005	0,0003	0,026
2024	0,013	0,018	0,001	0,029

Sumber: LRA Pemda se-Provinsi Lampung, GFS, BPS, 2025 (diolah)

Selanjutnya, keseimbangan umum pada postur APBD di regional Lampung tahun 2024 sebagaimana tabel 3.12 menunjukkan nilai positif sebesar Rp405,33 miliar. Sementara itu, keseimbangan primer APBD di regional Lampung juga menunjukkan angka positif sebesar Rp438,87 miliar setelah mengeluarkan komponen bunga. Hal ini mencerminkan kebijakan fiskal kontraktif, di mana belanja daerah lebih rendah dari pendapatan. Meskipun kebijakan ini dapat meningkatkan

stabilitas fiskal jangka panjang dengan menjaga belanja di bawah pendapatan, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial perlu dikelola secara cermat agar tidak menghambat pembangunan daerah.

Tabel 3.13. Perkembangan Keseimbangan Umum dan Primer Regional Lampung Tahun 2022-2024 (miliar rupiah)

Periode	Pendapatan APBD	Belanja APBD	Belanja Bunga	Keseimbangan Umum	Keseimbangan Primer
2022	28.406,35	28.954,69	49,40	-548,34	-498,94
2023	28.822,64	28.708,40	48,97	114,24	163,21
2024	30.720,16	30.314,84	33,55	405,33	438,87

Sumber: LRA Pemda se-Provinsi Lampung, GFS, 2025 (diolah)

3.2.4 Pembiayaan Daerah

Dalam tiga tahun terakhir, pembiayaan APBD regional Lampung menunjukkan tren yang menurun secara signifikan. Pada tahun 2024, pembiayaan netto mengalami kontraksi sebesar -24,94 persen (yoy), melanjutkan tren penurunan dari tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kontraksi penerimaan pembiayaan yang lebih besar dibandingkan dengan penurunan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan mengalami penurunan bertahap dari Rp1,74 triliun pada 2022 menjadi Rp928,94 miliar pada 2023, dan selanjutnya hanya mencapai Rp714,37 miliar pada 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya penggunaan SiLPA sebagai sumber utama pembiayaan daerah, yang berkontribusi lebih dari 99 persen terhadap total penerimaan pembiayaan. Penggunaan SiLPA menurun dari Rp1,16 triliun pada 2022 menjadi Rp885,41 miliar pada 2023, dan lebih lanjut ke Rp714,35 miliar pada 2024. Selain itu, tidak adanya penerimaan dari pinjaman dalam negeri sejak tahun 2023, serta minimnya penerimaan kembali piutang dan investasi non-permanen lainnya juga turut menjadi penyebab termoderasinya penerimaan pembiayaan.

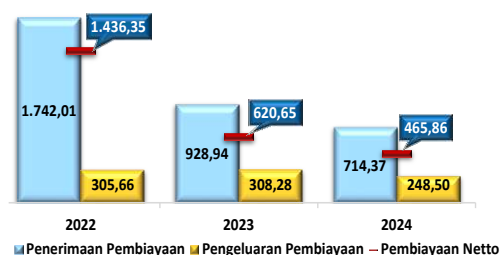
Sejalan dengan kontraksi penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan juga mengalami penurunan dari Rp305,66 miliar pada 2022 menjadi Rp308,28 miliar pada 2023, dan selanjutnya turun menjadi Rp248,50 miliar pada 2024. Komponen utama dalam pengeluaran pembiayaan adalah

Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri, yang menyerap 89,34 persen dari total pengeluaran pembiayaan pada 2024. Meski masih menjadi beban terbesar, angkanya menurun dari Rp276,81 miliar pada 2022 menjadi Rp274,71 miliar pada 2023, dan lebih lanjut ke Rp222,01 miliar pada 2024. Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri terbesar pada Lembaga keuangan bukan bank yang menurun secara signifikan hingga 52,59 persen (yoy) dengan realisasi hanya Rp116,16 miliar pada 2024, dibandingkan Rp245,08 miliar pada 2022 dan Rp244,87 miliar pada 2023. Sedangkan pembayaran pokok kepada pemerintah pusat melonjak hingga 4.921,09 persen, dari hanya Rp1,13 miliar pada 2023 menjadi Rp56,34 miliar pada 2024. Pada tahun 2024, selain Kabupaten Lampung Utara, pembayaran pokok pinjaman kepada pemerintah pusat juga dilakukan oleh Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Tanggamus.

Sementara itu Penyertaan modal pemerintah daerah, yang dialokasikan untuk BUMD, juga mengalami tren penurunan dari Rp27,67 miliar pada 2022 menjadi Rp33,58 miliar pada 2023, dan selanjutnya Rp26,50 miliar pada 2024. Penyertaan modal ini terealisasi di delapan kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Pesisir Barat, Kota Bandar Lampung, dan Kota Metro.

Perkembangan Pembiayaan Daerah Regional Lampung tahun 2022-2024 sebagaimana grafik 3.61.

Grafik 3.61. Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah Lampung Tahun 2022-2024 (miliar rupiah)



Sumber: LRA Pemda se-Provinsi Lampung, GFS, 2025 (diolah)

3.2.5 Perkembangan BLU Daerah

3.2.5.1 Profil BLU Daerah

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan unit kerja di bawah pemerintah daerah yang bertugas memberikan layanan kepada masyarakat dengan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan. Pada tahun 2024, jumlah BLUD di Provinsi Lampung tercatat sebanyak 353 unit, yang tersebar di Pemerintah Provinsi serta 15 Kabupaten/Kota. Namun, belum seluruh BLUD di wilayah ini telah sepenuhnya menerapkan fleksibilitas keuangan sesuai dengan prinsip tata kelola BLUD

Jika diklasifikasikan berdasarkan rumpun layanan, BLUD di Provinsi Lampung terdiri atas 335 unit di sektor kesehatan, 16 unit di sektor pendidikan, 1 unit di sektor barang dan jasa lainnya, serta 1 unit di sektor pengelolaan dana. BLUD kesehatan mendominasi, dengan 315 unit Puskesmas, 18 unit Rumah Sakit, dan 2 unit Laboratorium Kesehatan Daerah. Pada tahun 2024, terdapat penambahan 15 unit BLUD Puskesmas, terdiri dari 2 unit di Kabupaten Pesawaran dan 11 unit di Kabupaten Pesisir Barat. Namun, 11 Puskesmas di Pesisir Barat belum sepenuhnya mengimplementasikan tata kelola BLUD, menunggu diterbitkannya Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang mengatur fleksibilitas pengelolaan keuangannya.

Di sektor pendidikan, seluruh 16 BLUD merupakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang baru dikukuhkan sebagai BLUD pada tahun 2023. Implementasi BLUD di SMK bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sekolah dalam mengelola anggaran secara lebih fleksibel, khususnya dalam pelaksanaan praktik kejuruan, pengelolaan unit usaha berbasis sekolah, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan industri.

Sementara itu, BLUD rumpun barang dan jasa lainnya hanya terdiri dari 1 unit, yaitu Laboratorium Lingkungan, yang berfungsi sebagai pusat layanan pengujian dan pemantauan lingkungan. Adapun BLUD rumpun pengelola dana hanya terdapat 1 unit, yaitu Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan

Umum Daerah (UPT-BLUD) Perkuatan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). BLUD ini berperan strategis dalam mendukung akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Lampung melalui skema pemberian pinjaman modal yang lebih fleksibel.

Dari sisi sebaran wilayah, BLUD terbanyak terdapat di Kabupaten Lampung Tengah (41 unit), Kabupaten Lampung Timur (35 unit), dan Kabupaten Lampung Selatan (28 unit). Jumlah dan profil BLUD di regional Lampung tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.14.

Tabel 3.14. Profil BLUD Lampung Tahun 2022-2024

NAMA PEMDA	RUMPUN						Jumlah
	Rumah Sakit	Puskesmas	Kesehatan Lainnya	Pendidikan SMK	Pengelola Dana	Barang dan Jasa Lainnya	
Provinsi Lampung	2	-	1	16	-	1	20
Kab. Lampung Selatan	1	27	-	-	-	-	28
Kab. Lampung Tengah	1	39	1	-	-	-	41
Kab. Lampung Utara	1	27	-	-	-	-	28
Kab. Lampung Barat	1	15	-	-	1	-	17
Kab. Tulang Bawang	1	20	-	-	-	-	21
Kab. Tanggamus	1	24	-	-	-	-	25
Kab. Lampung Timur	1	34	-	-	-	-	35
Kab. Way Kanan	1	20	-	-	-	-	21
Kab. Pesawaran	1	15	-	-	-	-	16
Kab. Pringsewu	1	13	-	-	-	-	14
Kab. Mesuji	1	12	-	-	-	-	13
Kab. Tulang Bawang Barat	1	16	-	-	-	-	17
Kab. Pesisir Barat	1	11	-	-	-	-	12
Kota Bandar Lampung	1	31	-	-	-	-	32
Kota Metro	2	11	-	-	-	-	13
JUMLAH	18	315	2	16	1	1	353

Sumber: BPKAD se-Provinsi Lampung, 2025 (diolah)

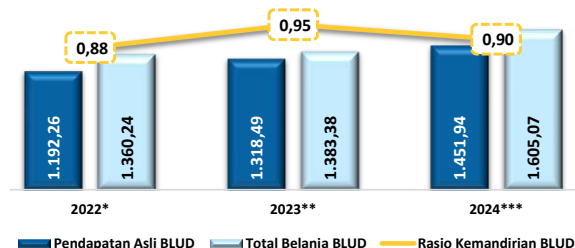
3.2.5.2 Analisis Tingkat Kemandirian BLUD

Kemandirian BLUD menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur efektivitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam konteks optimalisasi penerimaan dan efisiensi belanja. Sebagai entitas yang diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip bisnis yang sehat, BLUD diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pendapatannya secara mandiri untuk mengurangi ketergantungan terhadap alokasi APBD.

Pendekatan analisis kemandirian daerah yang umumnya digunakan dalam mengukur kapasitas fiskal pemerintah daerah melalui rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total belanja daerah, dapat diadaptasi dalam mengkaji tingkat kemandirian BLUD. Dalam konteks ini, tingkat kemandirian BLUD diukur dengan rasio antara Pendapatan Asli BLUD terhadap total belanja BLUD. Pendapatan Asli BLUD mencakup penerimaan dari

retribusi, dana kapitasi, dan non-kapitasi, sedangkan total belanja BLUD meliputi seluruh pengeluaran, baik untuk belanja operasional maupun belanja modal. Rasio kemandirian ini mencerminkan sejauh mana BLUD mampu membiayai operasionalnya secara mandiri tanpa bergantung pada pendanaan dari APBD.

Grafik 3.62. Perkembangan Realisasi Pendapatan BLUD, Belanja BLUD, (miliar rupiah) dan Rasio Kemandirian BLUD Regional Lampung Tahun 2022-2024



Sumber: BPKAD se-Provinsi Lampung (diolah), *) Data dari 279 sampel BLUD, **) Data dari 306 sampel BLUD, ***) Data dari 309 sampel BLUD

Berdasarkan 309 sampel dari total 353 BLUD di Regional Lampung yang berhasil dihimpun, rasio kemandirian BLUD dalam tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi, namun tetap berada dalam rentang 0,75 – 1,00, yaitu 0,88 pada tahun 2022, 0,95 pada tahun 2023, dan 0,90 pada tahun 2024. Secara agregat, kondisi ini mencerminkan tingkat kemandirian BLUD di Provinsi Lampung yang relatif baik, dengan kecenderungan berada dalam kategori sangat mandiri.

Secara lebih rinci, hasil analisis terhadap sampel BLUD menunjukkan bahwa pada tahun 2022, sebanyak 149 dari 279 BLUD (53,41%) memiliki rasio kemandirian di atas 100%, menandakan bahwa lebih dari separuh BLUD mampu menutup seluruh belanjanya secara mandiri. Tren positif berlanjut pada tahun 2023, di mana 225 dari 306 BLUD (73,53%) mencatat rasio kemandirian di atas 100%, menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah BLUD yang dapat membiayai operasionalnya tanpa dukungan APBD. Namun, pada tahun 2024, persentase BLUD yang memiliki kemandirian tinggi mengalami penurunan menjadi 172 dari 309 BLUD (55,66%), yang mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan tingkat kemandirian tersebut. Meskipun secara agregat BLUD di Lampung masih menunjukkan kecenderungan

kemandirian yang kuat, fluktuasi yang terjadi mengindikasikan adanya faktor-faktor eksternal maupun internal yang memengaruhi keberlanjutan pendapatan BLUD.

Tabel 3.15. Kemandirian Keuangan 10 BLUD di Lampung Tahun 2022-2024

Nama BLUD	2022			2023			2024		
	Pendapatan BLUD (Non APBD) (miliar Rp)	Belanja (miliar Rp)	Rasio Kemandirian	Pendapatan BLUD (Non APBD) (miliar Rp)	Belanja (miliar Rp)	Rasio Kemandirian	Pendapatan BLUD (Non APBD) (miliar Rp)	Belanja (miliar Rp)	Rasio Kemandirian
RSUAM Provinsi Lampung	421,49	411,89	1,02	389,44	380,80	1,02	446,95	491,10	0,91
RSUD A. Yani	173,63	200,41	0,87	211,02	219,00	0,96	254,72	265,49	0,96
RSUD Dr H. Bob Bazar, SKM	81,60	148,86	0,55	92,71	121,74	0,76	84,98	140,78	0,60
RSUD Pringsewu	60,72	60,26	1,01	59,00	59,87	0,99	66,52	69,47	0,96
RSUD Menggala	69,56	53,04	1,31	54,59	74,91	0,73	51,33	53,73	0,96
RSUD Ragab Begawe Caram	24,48	22,63	1,08	25,52	27,44	0,93	32,75	34,53	0,95
RSUD Alimuddin Umar	30,97	56,60	0,55	24,32	43,73	0,56	24,46	36,22	0,68
RSUD Demang Sepulau Raya	14,32	33,96	0,42	20,21	26,57	0,76	21,78	34,02	0,64
RSUD ZA. Pagaram Way Kanan	18,73	18,67	1,00	21,32	22,68	0,94	20,08	21,11	0,95
RSUD Batin Mangunang	10,13	24,96	0,41	10,69	19,09	0,56	17,91	17,46	1,03

Sumber: BPKAD se-Provinsi Lampung (diolah), *) Data dari 279 sampel BLUD, **) Data dari 306 sampel BLUD, ***) Data dari 309 sampel BLUD

3.2.5.3 Perkembangan Aset BLUD

Aset BLUD merupakan indikator utama dalam menilai kapasitas dan keberlanjutan operasional BLUD dalam menjalankan fungsinya sebagai penyedia layanan publik yang lebih fleksibel. Perkembangan aset BLUD dalam beberapa tahun terakhir mencerminkan efektivitas pengelolaan keuangan, efisiensi investasi, serta kemampuan BLUD dalam mengoptimalkan sumber daya guna meningkatkan kualitas layanan.

Berdasarkan data aset dari 254 sampel BLUD yang mewakili 353 populasi BLUD di Regional Lampung, terdapat dinamika pertumbuhan aset dalam tiga tahun terakhir. Beberapa BLUD mengalami pertumbuhan aset, sementara yang lain menunjukkan penurunan nilai aset akibat berbagai faktor, seperti efisiensi pengelolaan keuangan, alokasi belanja modal, serta perubahan kebijakan pendanaan.

Secara umum, pada tahun 2023, sebanyak 173 BLUD (68,11%) mengalami peningkatan aset. Misalnya, RSUD A. Yani mencatatkan kenaikan sebesar 5,72% dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan RSUD Pringsewu mengalami peningkatan 3,42%. Namun, terdapat juga BLUD yang mengalami penurunan aset, seperti RSUAM Provinsi Lampung yang turun sebesar 3,05%, serta RSUD Zainal Abidin Pagaram Way Kanan dengan penurunan sebesar 7,28%.

Tren pada tahun 2024 menunjukkan bahwa beberapa BLUD kembali mengalami fluktuasi. RSUD Pringsewu mencatatkan peningkatan 1,92%, sementara RSUD A. Yani hanya tumbuh 0,78%. Di sisi lain, RSUAM Provinsi Lampung mengalami penurunan lebih lanjut sebesar 5,42%. Namun demikian, sebagian besar BLUD mencatatkan pertumbuhan aset, yaitu sebanyak 155 BLUD (61,02%). Tren ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan dalam pengelolaan aset, mayoritas BLUD tetap mampu mempertahankan atau meningkatkan nilai asetnya.

Tabel 3.16. Perkembangan Aset 10 BLUD di Lampung Tahun 2022-2024

Nama BLUD	Total Aset			Growth 2022-2023	Growth 2023-2024
	2022	2023	2024		
RSUAM Provinsi Lampung	899,48	872,07	824,77	-3,05%	-5,42%
RSUD Pringsewu	182,80	189,06	192,68	3,42%	1,92%
RSUD A. Yani	180,76	191,10	192,60	5,72%	0,78%
RSUD ZA. Pagaram Way Kanan	113,51	105,25	109,44	-7,28%	3,98%
RSUD Batin Mangunang	64,77	63,43	65,28	-2,07%	2,91%
RSUD Alimuddin Umar	48,36	45,07	41,06	-6,81%	-8,88%
Laboratorium Kesehatan Daerah (Provinsi Lampung)	36,89	34,28	35,16	-7,08%	2,58%
RSUD Ragab Begawe Caram	6,55	17,87	17,87	172,98%	0,00%
RSUD Sumbersari Bantul	19,39	22,53	17,22	16,18%	-23,59%
Puskesmas Liwa	17,87	17,53	17,15	-1,95%	-2,13%

Sumber: BPKAD se-Provinsi Lampung, 2025 (diolah)

Secara agregat, dinamika aset BLUD ini mengindikasikan perlunya strategi yang lebih optimal dalam pengelolaan aset guna memastikan keberlanjutan layanan kesehatan dan publik. BLUD dengan tren penurunan aset memerlukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan investasi dan efisiensi penggunaan sumber daya agar tidak berdampak negatif terhadap pelayanan yang diberikan. Berikut adalah tabel perkembangan Aset 10 BLUD dengan data aset tertinggi di Lampung Tahun 2022-2024.

3.2.6 Isu Strategis Pelaksanaan APBD

Beberapa isu strategis yang menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan APBD Lampung antara lain:

1) Penguatan Kemandirian Fiskal.

Pemerintah daerah diharapkan terus berupaya meningkatkan kemandirian fiskal dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), seiring dengan masih besarnya ketergantungan terhadap transfer pusat. Indeks Kemandirian

Fiskal (IKF) Lampung pada 2024 tercatat 0,218, sementara rasio Ketergantungan Fiskal sebesar 0,730, menunjukkan bahwa sumber pendanaan utama daerah masih berasal dari transfer pusat. Untuk mengatasi hal ini, berbagai strategi telah diterapkan, termasuk diversifikasi sumber pendapatan, optimalisasi pajak dan retribusi daerah, serta pengelolaan aset dan BUMD yang lebih efisien, guna memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunan secara lebih mandiri.

2) Optimalisasi Struktur Belanja Daerah.

Pemerintah daerah perlu untuk menyeimbangkan alokasi belanja agar lebih proporsional antara belanja operasi dan belanja modal, dengan tetap memenuhi kewajiban alokasi anggaran untuk pendidikan, infrastruktur, dan batas maksimal belanja pegawai sesuai UU HKPD. Saat ini, belanja operasi, khususnya belanja pegawai dan barang, masih mendominasi struktur APBD, sementara belanja modal yang berkontribusi terhadap investasi jangka panjang masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, strategi efisiensi belanja, peningkatan efektivitas program, serta penguatan kapasitas fiskal daerah terus didorong untuk mengoptimalkan penggunaan APBD.

3) Percepatan penyerapan anggaran.

Pemerintah daerah perlu mendorong peningkatan efektivitas dan ketepatan waktu dalam realisasi belanja guna memaksimalkan dampak pembangunan. Pola penyerapan anggaran yang masih terkonsentrasi pada akhir tahun perlu diatasi dengan perencanaan pengadaan yang lebih terstruktur sejak awal tahun, peningkatan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta penguatan kapasitas pengelola keuangan daerah. Dengan strategi ini, diharapkan belanja daerah dapat terealisasi lebih merata sepanjang tahun dan mendukung akselerasi pembangunan di Lampung.

3.3 ANALISIS KONSOLIDASI APBN DAN APBD

3.3.1 Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian

Realisasi anggaran konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tahun 2024 tingkat wilayah Provinsi Lampung mencatatkan realisasi Pendapatan sebesar Rp21.497,87 miliar dan realisasi Belanja sebesar Rp43.765,94 miliar sehingga menghasilkan defisit anggaran

konsolidasian sebesar Rp22.265,07 miliar. Dari sisi Pembiayaan mencatatkan realisasi sebesar Rp465,86 miliar yang seluruhnya merupakan penerimaan yang bersumber dari dalam negeri, yang kemudian mengurangi angka defisit sehingga diperoleh Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) sebesar Rp21.799,21 miliar. Ringkasan *I-Account* Konsolidasi APBN dan APBD Regional Lampung dapat dilihat pada Tabel 3.17.

Tabel 3.17. *I-Account* Konsolidasian APBN dan APBD Regional Lampung 2022-2024 (miliar rupiah)

Uraian	2022	2023	2024		% Kontribusi	% Growth
	Konsolidasi	Konsolidasi	Pemerintah Daerah	Pemerintah Pusat		
A. Pendapatan Negara dan Hibah	19.455,76	19.531,18	29.214,17	12.366,11	21.497,87	100,00
I. Penerimaan Perpajakan	14.075,74	13.925,59	5.659,21	10.839,76	16.498,97	76,75
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	2.939,12	3.264,85	1.090,19	1.526,35	2.616,54	12,17
III. Penerimaan Hibah	96,92	7,41	21,76	-	21,76	0,10
IV. Pendapatan Transfer	2.343,97	2.333,33	22.443,01	-	2.360,60	10,98
B. Belanja Negara	39.048,57	40.314,05	30.425,50	33.419,85	43.762,94	100,00
I. Belanja Pemerintah Pusat/Daerah	36.424,08	37.747,59	30.425,50	10.939,23	41.364,74	94,52
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	2.624,49	2.566,46	0,00	22.480,62	2.398,21	5,48
C. Surplus (Defisit) Anggaran	(19.592,81)	(20.782,87)	(1.211,33)	(21.053,74)	(22.265,07)	100,00
D. Pembiayaan	1.436,35	620,65	465,86	-	465,86	100,00
I. Pembiayaan Dalam Negeri Pemerintah	1.436,35	620,65	465,86	-	465,86	100,00
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	-	-	-	-	-	-
E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran SiLPA/SiKPA	(18.156,46)	(20.162,21)	(745,47)	(21.053,74)	(21.799,21)	100,00

Sumber: LKPKD-TW Triwulan IV Provinsi Lampung, Kanwil DJP Bengkulu Lampung, Kanwil DJBC Sumbagbar, 2025 (diolah)

3.3.2 Pendapatan Konsolidasian

3.3.2.1 Proporsi dan Perbandingan

Realisasi pendapatan negara konsolidasian tahun 2024, membukukan realisasi sebesar Rp21.495,87 miliar atau tumbuh 10,07 persen (yoy) dari pendapatan di tahun 2023 yang dipengaruhi oleh peningkatan penerimaan perpajakan sebesar 18,48 persen. Komponen utama penyumbang pendapatan konsolidasian bersumber dari penerimaan perpajakan baik di tingkat pusat maupun daerah dengan kontribusi sebesar 76,75 persen dari total pendapatan konsolidasian di Lampung atau secara nominal mencapai Rp16.498,97 miliar, sedangkan penerimaan negara bukan pajak menyumbang kontribusi sebesar 12,17 persen atau secara nominal sebesar Rp2.616,54 miliar yang didominasi oleh PNBPN dari BLU, PNBPN Lainnya, dan Pendapatan Bagian Laba BUMN/Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan. Selanjutnya, untuk pendapatan yang bersumber dari hibah memiliki kontribusi yang tidak signifikan

yakni sebesar Rp21,76 miliar yang seluruhnya merupakan hibah dalam negeri kepada pemerintah daerah.

3.3.3 Belanja Konsolidasian

3.3.3.1 Proporsi dan Perbandingan

Belanja konsolidasian Lampung terealisasi sebesar Rp43.762,94 miliar yang terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat/Daerah dan Transfer ke Daerah. Proporsi realisasi belanja konsolidasian terbesar tahun 2024 yaitu belanja pemerintah yang mencapai 94,52 persen atau sebesar Rp41.364,74 miliar, sedangkan proporsi belanja transfer tercatat 5,48 persen atau Rp2.398,21 miliar. Lebih lanjut, dilihat per jenis belanja, realisasi terbesar belanja konsolidasian adalah belanja pegawai yang mencapai 38,72 persen dari keseluruhan belanja diikuti belanja barang sebesar 31,68 persen. Sementara itu realisasi belanja modal hanya berkontribusi 12,14 persen terhadap total belanja. Realisasi Belanja Negara Konsolidasian tahun 2024 tumbuh 8,56 persen dibandingkan periode yang

sama tahun 2023. Peningkatan realisasi tersebut disebabkan oleh realisasi Belanja Pemerintah Pusat yang tumbuh 5,41 persen (yoy) dan Belanja pemerintah Daerah yang juga tumbuh 5,60 persen (yoy) sehingga menghasilkan defisit yang lebih lebar sebesar 3,97 persen (yoy).

3.3.3.2 Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja

Tabel 3.18. Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja Konsolidasian Tahun 2022-2024

Uraian	2023		2023		2024	
	Konsolidasi (miliar Rp)	% Rasio	Konsolidasi (miliar Rp)	% Rasio	Konsolidasi (miliar Rp)	% Rasio
Belanja Operasi (pegawai+barang)	25.456,18	65,19	27.355,54	67,86	29.117,84	66,54
Total Belanja Konsolidasian	39.048,57		40.314,05		43.762,94	

Sumber: LKPK Triwulan IV Provinsi Lampung, 2025 (diolah)

Belanja operasi terdiri atas belanja pegawai konsolidasian dengan belanja barang konsolidasian. Rasio belanja operasi terhadap total belanja konsolidasian menunjukkan porsi belanja pemerintah untuk mendukung operasional pemerintahan. Pada tahun 2024, rasio belanja operasi terhadap total belanja konsolidasian di Provinsi Lampung mencapai 66,54 persen, sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 67,86 persen. Namun, angka ini masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 periode sebelumnya yang sebesar 65,19 persen. Penurunan rasio ini terjadi meskipun secara nominal belanja operasi mengalami peningkatan, baik pada belanja pegawai maupun belanja barang, yang mencerminkan adanya kenaikan kebutuhan operasional pemerintahan. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan total belanja konsolidasian pada tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan belanja operasi, yang kemungkinan disebabkan oleh peningkatan alokasi belanja pada sektor-sektor strategis lainnya, seperti belanja subsidi, dan hibah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

3.3.3.3 Belanja Perkapita Konsolidasi

Indikator ini berfungsi untuk mendapatkan proporsi antara kebijakan fiskal yang tercermin dari anggaran dengan indikator demografis (populasi) sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih riil besaran

anggaran pada suatu wilayah. Berdasarkan perhitungan tercatat bahwa belanja per kapita konsolidasian di Provinsi Lampung tahun 2024 tercatat sebesar Rp4,65 juta. Artinya, rata-rata belanja pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan layanan kepada satu orang penduduk meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yakni Rp4,33 juta pada tahun 2023 dan Rp4,26 juta pada tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran per individu semakin besar, yang dapat mencerminkan peningkatan kapasitas fiskal pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan layanan publik, baik dalam bentuk belanja operasional maupun investasi pembangunan.

Tabel 3.19. Belanja Perkapita Konsolidasian Tahun 2022-2024

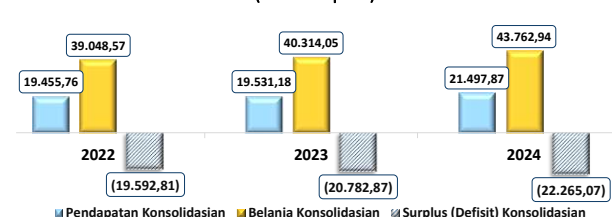
Keterangan	2022	2023	2024
Belanja Konsolidasi (miliar rupiah)	39.048,57	40.314,05	43.762,94
Jumlah Penduduk (jiwa)	9.176.550	9.313.990	9.419.580
Belanja Konsolidasi Per Kapita (juta rupiah)	4,26	4,33	4,65

Sumber: LKPK Triwulan IV Provinsi Lampung, BPS, 2025 (diolah)

3.3.4 Surplus Defisit Anggaran Konsolidasian

Pada tahun 2024, keseimbangan umum konsolidasian regional Lampung berada pada posisi defisit sebesar Rp22.265,07 miliar. Angka ini lebih besar 7,13 persen dibandingkan realisasi pada tahun 2023 yang mengalami defisit sebesar Rp20.782,87 miliar.

Grafik 3.63. Surplus Defisit Anggaran Konsolidasian tahun 2022-2024 (miliar rupiah)



Sumber: LKPK Triwulan IV Provinsi Lampung, 2025 (diolah)

Melebarnya defisit anggaran tahun 2024 terutama disebabkan oleh pertumbuhan belanja negara yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pendapatan. Realisasi belanja konsolidasian pada tahun 2024 meningkat sebesar Rp3.448,90 miliar (8,6 persen) dari Rp40.314,05 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp43.762,94 miliar. Sementara itu, pendapatan konsolidasian hanya mengalami peningkatan sebesar Rp1.996,69 miliar (10,07

persen) dari Rp19.531,18 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp21.497,87 miliar pada tahun 2024.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat peningkatan penerimaan, laju pertumbuhan belanja tetap lebih tinggi, sehingga memperlebar defisit fiskal. Faktor utama yang berkontribusi terhadap peningkatan belanja meliputi kenaikan belanja pegawai, belanja barang, serta peningkatan alokasi untuk subsidi dan hibah. Sementara itu, meskipun pendapatan meningkat, kenaikannya belum cukup untuk menutupi kebutuhan belanja yang semakin besar.

3.3.5 Pembiayaan Konsolidasian

Pada tahun 2024, pembiayaan konsolidasian netto di Lampung tercatat sebesar Rp465,86 miliar, mengalami kontraksi sebesar 24,94 persen dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar

Rp620,65 miliar. Seluruh pembiayaan konsolidasian Lampung bersumber dari dalam negeri, yang mencerminkan strategi pembiayaan daerah yang tetap bergantung pada sumber-sumber domestik. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kontraksi penerimaan pembiayaan yang lebih besar dibandingkan dengan penurunan pengeluaran pembiayaan.

Ke depan, dinamika pembiayaan konsolidasian netto di Lampung akan bergantung pada beberapa faktor utama, termasuk prospek pertumbuhan ekonomi daerah, kebijakan fiskal nasional dan regional terkait defisit dan pembiayaan daerah, serta efektivitas pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah dan pelaksanaan belanja daerah secara lebih efisien.

SUPLEMEN 6

Analisis Dampak Belanja Pemerintah

Analisis Belanja Konektivitas, Belanja Modal, Dan Kemandirian Fiskal Terhadap PDRB Di Provinsi Lampung Tahun 2018-2022

Penulis:

Prof. Dr. Marselina Djayasinga, S.E., M.P.M.
Gwen Adhitya Amalkhan, S.S.T., MPA(Enh).

Model Penelitian:

$$LJPDRB_{it} = 1,045 + 0,02KF_{it} - 0,02BM_{it} + 0,26BK_{it} + \epsilon_i$$

Keterangan:

$LJPDRB_{it}$	= Laju pertumbuhan ekonomi (%)
β_0	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien regresi variabel independen
KF	= Kemandirian Fiskal Daerah (%)
BM	= Belanja Modal (%)
BK	= Belanja Konektivitas (%)
ϵ	= Error term (Galat)
i	= 15 Kab/Kota se-Provinsi Lampung
t	= 5 Tahun (2018 s.d. 2022)

Penelitian ini mengambil isu kualitas belanja daerah, dengan cara menganalisis pengaruh Kemandirian Fiskal, Belanja Modal, dan Belanja Konektivitas terhadap laju pertumbuhan PDRB pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung pada periode 2018 s.d. 2022. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Belanja Konektivitas memiliki pengaruh signifikan terhadap PDRB, dengan setiap peningkatan 1% dalam belanja konektivitas dapat meningkatkan laju pertumbuhan PDRB sebesar 0,26%.

Sementara itu, Belanja Modal berdampak negatif, yang menjadi sinyal alokasi anggaran perolehan aset yang kurang efektif mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan antarwilayah. Kemandirian Fiskal tidak berpengaruh signifikan, mencerminkan ketergantungan transfer pusat yang besar.

Melalui model VAR, ditemukan juga bahwa seluruh variabel mempengaruhi PDRB dengan lag 1 tahun selanjutnya. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya Belanja Modal dan Belanja Konektivitas yang efisien dan berdampak kepada masyarakat (*spending better*), serta pentingnya peningkatan kapasitas fiskal daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Peningkatan Belanja Konektivitas sebesar 1% dapat mendorong pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung sebesar 0,26%.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

- **Reorientasi Alokasi Belanja Modal.** Pemerintah daerah di Provinsi Lampung perlu mengarahkan belanja modal ke proyek yang lebih produktif, seperti infrastruktur strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi secara langsung. Belanja modal untuk aktivitas rutin dan aset non-produktif harus dikurangi agar anggaran lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
- **Peningkatan Efisiensi Belanja Konektivitas.** Perlu dilakukan optimalisasi belanja konektivitas dengan memastikan proyek infrastruktur yang dipilih memiliki multiplier effect yang tinggi, seperti peningkatan akses transportasi antarwilayah dan pengembangan fasilitas energi serta air bersih.
- **Peningkatan Kemandirian Fiskal.** Daerah harus berfokus pada diversifikasi sumber pendapatan dan mengoptimalkan potensi PAD agar lebih mandiri secara fiskal. Ini dapat dilakukan dengan penguatan sektor-sektor unggulan daerah serta perbaikan tata kelola untuk meningkatkan efektivitas pungutan dan pemanfaatan PAD.
- **Perbaikan Manajemen Proyek dan Evaluasi.** Setiap proyek infrastruktur yang didanai oleh belanja modal perlu dievaluasi efektivitasnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Evaluasi kinerja belanja yang lebih ketat dan berbasis hasil dapat membantu mengidentifikasi sektor yang perlu prioritas investasi.
- **Mendorong Kolaborasi Antar Daerah.** Kerja sama antar kabupaten/kota dalam proyek infrastruktur konektivitas dapat memperkuat integrasi ekonomi regional. Dengan kolaborasi ini, distribusi barang dan jasa antar wilayah akan lebih lancar, meningkatkan efisiensi ekonomi secara keseluruhan.



INDONESIA TREASURY



BAB IV PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH



Anda harus memberi lebih banyak kepada masyarakat dan bangsa Indonesia. Berikan baik dalam bentuk pemikiran, kerja keras, prestasi, dan yang paling penting berikan hati anda hanya untuk Indonesia



-Sri Mulyani Indrawati -

BAB IV PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH: HARMONISASI BELANJA K/L DAN DAK FISIK DI LAMPUNG

4.1 PENDAHULUAN

Pembangunan daerah yang efektif dan berkelanjutan memerlukan sinergi antara berbagai instrumen fiskal, terutama Belanja Kementerian/Lembaga (Belanja K/L) yang dikelola oleh pemerintah pusat dan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) yang merupakan bagian dari transfer ke daerah dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kedua mekanisme ini memiliki peran strategis dalam mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas layanan dasar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat tantangan berupa potensi tumpang tindih program, ketidakseimbangan alokasi anggaran, serta ketidakefisienan dalam pelaksanaan belanja. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi yang lebih kuat antara Belanja K/L dan DAK Fisik agar pembangunan daerah lebih terarah, tepat sasaran, dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah telah menegaskan pentingnya sinergi belanja pusat dan daerah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Regulasi ini menekankan perlunya penyesuaian kebijakan fiskal, pengendalian defisit dan pembiayaan utang APBD, serta sinkronisasi perencanaan dan penganggaran untuk mencegah duplikasi anggaran dan meningkatkan efisiensi. Sejalan dengan itu, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2023 mengatur bahwa proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional harus dilakukan secara terpadu, dengan monitoring dan evaluasi (monev) yang sistematis oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas.

Untuk memperkuat pengawasan dan evaluasi, SOP Link 70 Tahun 2023 menetapkan bahwa Ditjen Anggaran (DJA), Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Ditjen Perbendaharaan (DJPb) memiliki peran sebagai *Unit in Charge* (UIC) dalam proses monev terhadap Belanja K/L dan Transfer ke Daerah (TKD). DJA dan DJPK bertanggung jawab dalam monev perencanaan dan penganggaran, sedangkan DJPb berfokus pada monev pelaksanaan anggaran. Kolaborasi ketiga unit ini menjadi krusial dalam memastikan bahwa Belanja K/L dan DAK Fisik berjalan selaras, efisien, dan efektif dalam mendukung pembangunan daerah.

Bab ini akan menguraikan lebih lanjut kondisi harmonisasi pelaksanaan Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik melalui tiga aspek utama:

- 1) Reviu kinerja realisasi anggaran dan capaian rincian output harmonis (RO Harmonis) di Lampung, yaitu rincian output pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA K/L) yang saling melengkapi atau mendukung rincian kegiatan pada DAK Fisik.
- 2) Analisis permasalahan dalam implementasi harmonisasi Belanja K/L oleh pemerintah pusat dan DAK Fisik oleh pemerintah daerah Lampung.
- 3) Identifikasi upaya harmonisasi Belanja K/L dan DAK Fisik oleh satuan kerja kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh rekomendasi yang lebih konkret dalam meningkatkan efektivitas koordinasi belanja pusat dan daerah, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

4.2 GAMBARAN UMUM HARMONISASI BELANJA K/L DAK FISIK DI TINGKAT WILAYAH

Harmonisasi Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah tercermin melalui sinergi antara Belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan Transfer ke Daerah (TKD), khususnya dalam program DAK Fisik. Dalam konteks ini, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan berperan dalam melakukan analisis harmonisasi antara Belanja K/L dan DAK Fisik di wilayah Lampung. Analisis ini akan menggunakan identifikator yang disebut **“Rincian Output (RO) Harmonis”**, yaitu rincian output pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA K/L) yang saling melengkapi atau mendukung rincian kegiatan pada DAK Fisik.

Tabel 4.1. Perbedaan DAK Fisik dan Belanja K/L RO Harmonis

No.	Indikator	DAK Fisik	Belanja K/L (RO Harmonis)
1.	Jenis Belanja	Dana Transfer	Belanja Pemerintah Pusat
2.	Pelaksana Kegiatan	OPD Pemerintah Daerah	Satker Kementerian/Lembaga
3.	Jumlah Bidang	13	6
4.	Tujuan	- Mempercepat pembangunan infrastruktur pelayanan dasar - Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat & pemerataan ekonomi - Mendukung pencapaian prioritas nasional	- Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat - Mendukung pelaksanaan DAK Fisik

Sumber: Kanwil DJPb Provinsi Lampung, 2024 (diolah)

Monev sinkronisasi Belanja Pemerintah Pusat dan DAK Fisik tahun 2024 dilakukan terhadap 6 (enam) bidang yang telah dilakukan sinkronisasi pada tahapan perencanaan/penganggaran, yaitu:

- 1) Bidang Pendidikan (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi);
- 2) Bidang Kesehatan (Kementerian Kesehatan);
- 3) Bidang Jalan (Kementerian PUPR)
- 4) Bidang Air Minum (Kementerian PUPR);
- 5) Bidang Sanitasi (Kementerian PUPR);
- 6) Bidang Pertanian (Kementerian Pertanian).

4.2.1 Alokasi Belanja K/L yang Mendukung DAK Fisik

4.2.1.1 Perbandingan Belanja KL yang Mendukung DAK Fisik dan DAK Fisik

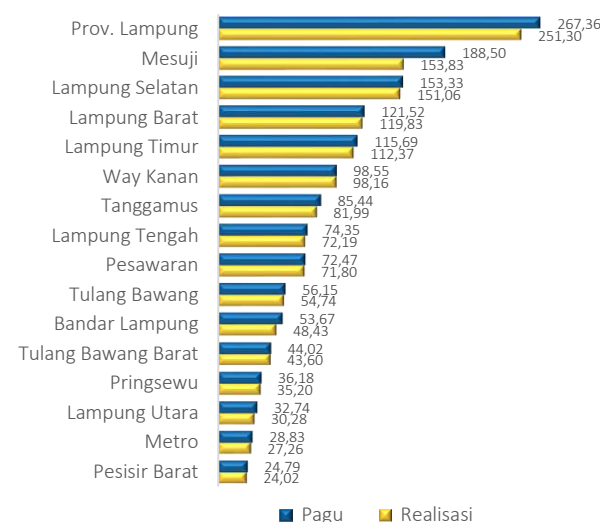
Tabel 4.2 Perbandingan Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik dengan DAK Fisik pada 6 Bidang (miliar Rp)

Bidang	Belanja KL (RO Harmonis)			TKD DAK Fisik		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1 Pendidikan	115,50	107,45	93,03%	561,48	552,18	98,34%
2 Kesehatan	2,27	2,08	91,26%	277,85	250,49	90,15%
3 Jalan	365,26	365,19	99,98%	379,96	374,92	98,67%
4 Air Minum	12,56	12,40	98,71%	16,36	14,75	90,18%
5 Sanitasi	1,85	1,79	96,93%	1,63	0,00	0,00%
6 Pertanian	26,01	24,77	95,25%	48,03	45,81	95,38%
TOTAL	523,45	513,68	98,13%	1.285,31	1.238,16	96,33%

Sumber: Sintesa dan TKD OMSPAN, 2025 (diolah)

Pada tahun 2024, Belanja Kementerian/Lembaga yang sinergis mendukung area yang menjadi fokus penyaluran DAK Fisik di regional Lampung (RO Harmonis) memiliki total pagu anggaran sebesar Rp523,45 miliar dengan capaian realisasi Rp513,68 miliar atau 98,13 persen dari pagu anggaran. Sedangkan, pagu anggaran DAK Fisik untuk seluruh pemerintah provinsi/kabupaten/kota di regional Lampung adalah sebesar Rp1.285,31 miliar dengan realisasi mencapai Rp1.238,16 miliar atau 96,33 persen dari pagu.

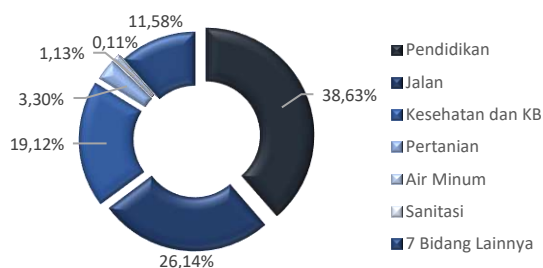
Grafik 4.1. Pagu dan Realisasi DAK Fisik Pemda Lampung Tahun 2024 (dalam miliar rupiah)



Sumber: OM SPAN, 2025 (diolah)

Menurut alokasi DAK Fisik secara keseluruhan, Pemerintah Daerah dengan alokasi DAK Fisik terbesar pada tahun 2024 adalah Provinsi Lampung dengan total pagu Rp267,36 miliar. Sedangkan, Kabupaten Pesisir Barat memperoleh pagu DAK Fisik terkecil dengan alokasi Rp24,79 miliar. Dari sisi realisasi, sampai dengan 31 Desember 2024, Kabupaten Way Kanan memiliki tingkat penyaluran DAK Fisik tertinggi dibandingkan Pemda lainnya yaitu sebesar 99,61%.

Grafik 4.1. Porsi Pagu DAK Fisik Pemda Per Bidang Tahun 2024 (dalam miliar rupiah)



Sumber: OM SPAN, 2025 (diolah)

Berdasarkan porsi per bidang, Belanja DAK Fisik untuk Bidang Pendidikan menerima alokasi tertinggi, yaitu Rp561,48 miliar atau 38,63 persen dari total pagu. Selanjutnya, Bidang Jalan mendapatkan alokasi sebesar Rp379,96 miliar (26,14 persen), Bidang Kesehatan (dan Keluarga Berencana) Rp277,85 miliar (19,12 persen), Bidang Pertanian Rp48,03 miliar (3,30 persen), Bidang Air Minum Rp16,36 miliar (1,13 persen), dan Bidang Sanitasi Rp1,63 miliar (0,11 persen). Alokasi untuk tujuh bidang lainnya berjumlah 168,28 miliar atau 11,58 persen.

Dari sisi penyaluran, Bidang Jalan menempati peringkat pertama dengan realisasi anggaran mencapai 98,67 persen dari alokasinya. Penyaluran tertinggi kedua yaitu pada Bidang Pendidikan sebesar 98,34 persen. Bidang Pertanian, Air Minum, dan Kesehatan menunjukkan tingkat penyaluran yang baik dengan persentase di atas 90 persen. Sementara itu, penyaluran terendah terdapat pada Bidang Sanitasi yang tidak memiliki realisasi.

Meskipun realisasi belanja K/L yang mendukung DAK Fisik mencapai persentase yang lebih baik yaitu

98,13 persen, realisasi DAK Fisik di daerah hanya mencapai 96,33 persen. Lebih rinci menurut bidang, terdapat capaian nihil pada DAK Fisik Bidang Sanitasi sementara Belanja K/L yang mendukung bidang tersebut sudah terealisasi. Ketidaksielarasan capaian ini mencerminkan perlunya peningkatan eksekusi harmonisasi belanja antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam konteks DAK Fisik di regional Lampung. Secara nominal, terlihat bahwa harmonisasi belanja K/L yang secara langsung mendukung DAK Fisik perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut oleh masing-masing satuan kerja K/L dan Pemerintah Daerah sebagai eksekutor.

4.2.1.2 Alokasi Anggaran K/L Secara Umum

Tabel 4.3 Alokasi Anggaran K/L Secara Umum (miliar Rp)

Kode BA	Nama K/L	Pagu yang Mendukung DAK Fisik	Total Pagu	Porsi (%)	Jumlah Satker	Jumlah RO
A	B	C	D	E=C/D	F	G
33	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	379,67	1.310,10	28,98%	6	15
23	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	115,50	1.491,46	7,74%	3	7
18	Kementerian Pertanian	26,01	322,14	8,07%	5	19
24	Kementerian Kesehatan	2,27	142,24	1,60%	1	22
TOTAL		523,45	3.265,93	16,03%	15	63

Sumber: Sintesa, 2025 (diolah)

Jumlah pagu yang termasuk dalam kategori RO Harmonis Belanja K/L pendukung DAK Fisik pada Satuan Kerja K/L mencapai Rp523,45 miliar dengan Alokasi Belanja K/L yang mendukung pelaksanaan DAK Fisik memiliki porsi sebesar 16,03 persen dari total pagu anggaran seluruh belanja K/L di Provinsi Lampung, dengan total 63 Rincian Output Harmonis. Alokasi tersebut tersebar pada 4 Kementerian Lembaga dan 15 Satuan Kerja.

Kementerian PUPR memperoleh alokasi tertinggi sebesar Rp379,67 miliar atau 72,53 persen dari total pagu RO Harmonis Belanja K/L pendukung DAK Fisik di Provinsi Lampung. Sedangkan, Kementerian Kesehatan mendapatkan alokasi paling kecil yaitu Rp2,27 miliar atau 0,43 persen.

Dari sisi Satuan Kerja sebagai instansi pelaksana, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Lampung mengelola alokasi terbesar yaitu Rp195,44 miliar, diikuti Satker Pelaksanaan Jalan

Nasional Wilayah II Provinsi Lampung dengan pagu Rp159,49 miliar, dan BGP Provinsi Lampung Rp101,45 miliar. Sementara itu, pagu terkecil dikelola oleh Kantor Bahasa Lampung sebesar Rp563,15 juta, Balai Pelatihan Pertanian Lampung Rp1,03 miliar, dan Dinas Tanaman dan Holtikultura Prov. Lampung Rp1,5 miliar.

Apabila dibandingkan dengan keseluruhan total pagu Belanja Pemerintah Pusat yang bersifat non administratif (belanja barang, modal, dan sosial) di regional Lampung pada tahun 2024 yang berjumlah Rp3.265,93 miliar, belanja K/L yang sinergis mendukung DAK Fisik secara langsung memiliki porsi sebesar 16,03 persen.

4.2.1.3 Alokasi Anggaran K/L Berdasarkan Bidang DAK Fisik

Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik dapat dijabarkan ke dalam beberapa sub-bidang per kementerian/lembaga, sebagaimana tertera dalam tabel 3.3. Di antara sub-bidang tersebut, RO Harmonis untuk DAK Fisik Bidang Jalan menerima alokasi tertinggi, yaitu sebesar Rp365,26 miliar. Hal ini sejalan dengan pentingnya infrastruktur jalan sebagai kebutuhan dasar yang mendukung akses masyarakat terhadap ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Pembangunan jalan juga mendukung program nasional yang bertujuan meningkatkan konektivitas antar daerah.

Tabel 4.2. Alokasi Anggaran K/L Berdasarkan Bidang DAK Fisik (Miliar Rp)

Bidang DAK Fisik	Subbidang	Nama K/L	Pagu	Realisasi	% Realisasi	Jumlah Satker	Jumlah RO
1 Pendidikan	PAUD	Kementerian Pendidikan	0,23	0,19	82,46%	1	1
	SD/SMP/SMA/SMK	Kementerian Pendidikan	115,27	107,26	93,05%	3	6
2 Kesehatan	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	Kementerian Kesehatan	0,92	0,85	92,20%	1	6
	Penguatan Sistem Kesehatan	Kementerian Kesehatan	1,36	1,23	90,62%	1	16
3 Jalan	Jalan	Kementerian PUPR	365,26	365,19	99,98%	3	11
4 Air Minum	Air Minum	Kementerian PUPR	12,56	12,40	98,71%	3	3
5 Sanitasi	Sanitasi	Kementerian PUPR	1,85	1,79	96,93%	1	1
6 Pertanian	Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	Kementerian Pertanian	26,01	24,77	95,25%	5	19
Total			523,45	513,68	98,13%	18	63

Sumber: Sintesa, 2025 (diolah)

Sampai dengan 31 Desember 2024, Bidang Jalan mencapai realisasi tertinggi, yaitu sebesar 99,98 persen dari pagu anggaran, sedangkan Bidang Kesehatan memiliki realisasi terendah, yaitu 91,26 persen. Sementara, Sub-bidang dengan realisasi terendah adalah PAUD sebesar 82,46 persen.

Lebih rinci, alokasi anggaran untuk Bidang Pendidikan berada di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mencakup 2 sub-bidang, dan dilaksanakan oleh 3 Satker dengan tujuh RO. Bidang Kesehatan di bawah Kementerian Kesehatan mencakup 2 sub-bidang,

dilaksanakan oleh satu Satker dengan 22 RO. Bidang Jalan, di bawah Kementerian PUPR, terdiri dari 1 sub-bidang dan dilaksanakan oleh 3 Satker dengan 11 RO. Bidang Air Minum, juga di bawah Kementerian PUPR, memiliki 1 sub-bidang dan dilaksanakan oleh 3 Satker dengan tiga RO. Bidang Sanitasi, masih di bawah Kementerian PUPR, terdiri dari 1 sub-bidang dan dilaksanakan oleh 1 Satker dengan satu RO. Sementara itu, Bidang Pertanian berada di bawah Kementerian Pertanian, terdiri dari 1 sub-bidang, dan dilaksanakan 5 Satker dengan 19 RO.

4.2.1.4 Capaian RO utama pada Belanja K/L berdasarkan Bidang DAK Fisik

4.2.1.4.1 Bidang Jalan

Bidang Jalan memiliki alokasi sebesar Rp365,26 miliar dengan realisasi mencapai Rp365,19 miliar atau 99,98 persen dari alokasi dengan capaian output mencapai 100 persen. Terdapat 11 RO yang masuk dalam Bidang Jalan dengan kriteria RO biasa, Pro PN, dan Padat Karya. RO Pro PN artinya adalah kegiatan tersebut merupakan Program Prioritas Nasional dimana menjadi fokus kerja pemerintah yang harus dilaksanakan dengan segera. Sedangkan RO Padat Karya artinya adalah pekerjaan dengan pelaksanaan kegiatan membutuhkan banyak orang sehingga dapat menyerap banyak tenaga kerja.

Dukungan APBN yang bersinergi dengan DAK Fisik Bidang Jalan telah dianggarkan pada Kementerian PUPR. Pelaksanaan belanja tersebut di Provinsi Lampung direalisasikan oleh 3 satuan kerja yaitu Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I (PJN I) Provinsi Lampung, Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II (PJN II) Provinsi Lampung, dan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Lampung.

Tabel 4.5. Capaian Output Utama Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik Bidang Jalan

No.	Nama RO	Satuan	Pagu (Miliar)	Realisasi (Miliar)	% Realisasi	Volume RO	Realisasi RO	% Capaian RO
A	B	C	D	E	F=E/D	G	H	I
1	Jalan Strategis (ProPN)	km	73,72	73,72	100,00%	5,97	5,97	100%
		m	39,12	39,12	100,00%	2.326,91	2.326,91	100%
2	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	km	107,86	107,86	100,00%	810,46	810,46	100%
3	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya)	km	36,50	36,44	99,83%	479,53	479,53	100%
Total			257,20	257,14	99,98%	-	-	100%

Sumber: Sintesa, 2025 (diolah)

Berdasarkan alokasi pagu tertinggi, 3 RO utama Bidang Jalan ditampilkan sebagaimana tabel 4.5. RO Jalan Strategis (Pro PN) memiliki total realisasi sebesar Rp112,84 miliar dan atau 100 persen dari pagu. Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan telah terealisasi sebesar Rp107,86 miliar atau 100 persen dari pagu. Sementara, Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya) memiliki realisasi sebesar Rp36,44 miliar atau 99,83 persen dari pagu. Sampai

dengan 31 Desember 2024, ketiga RO utama ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian output 100 persen dari target output yang telah direncanakan.

Secara spasial, Belanja K/L melalui RO Harmonis yang bersinergi dengan DAK Fisik pada bidang Jalan dapat dilihat dari lokus pelaksanaan kegiatan yaitu:

- 1) Pengembangan infrastruktur jalan melalui belanja RO Harmonis Jalan Strategis (ProPN) mencakup penanganan ruas jalan Gedong Aji Baru – Rawajitu di Tulang Bawang yang berstatus sebagai jalan nasional sekaligus jalan kolektor primer satu, serta penggantian Jembatan Way Sabuk di Lampung Utara. Kedua proyek ini mendukung konektivitas wilayah sekaligus memperlancar distribusi hasil pertanian dan perikanan guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
- 2) RO Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan dengan realisasi sebesar Rp107,86 miliar di antaranya untuk pemeliharaan rutin jalan dan jembatan di Kota Bandar Lampung, Metro, Kab. Pesisir Barat, Tanggamus, Pesawaran, Tulang Bawang, Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Utara, Lampung Timur
- 3) Pengembangan jalan akses menuju simpul transportasi prioritas, seperti Terminal Rajabasa, Pelabuhan Bakauheni, dan Bandara Radin Inten II, dilakukan melalui belanja RO Harmonis Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN) dengan realisasi sebesar Rp35,39 miliar. Anggaran ini dibelanjakan untuk rehabilitasi mayor, rekonstruksi jalan, dan penanganan drainase pada ruas-ruas jalan di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, dan Mesuji, yang berperan dalam mendukung konektivitas menuju simpul transportasi utama di Provinsi Lampung.

Belanja Pemerintah Pusat yang dilaksanakan pada lokasi tersebut melengkapi kebermanfaatan atas upaya pemerintah daerah yang dilaksanakan melalui DAK Fisik antara lain:

- 1) Akses Jalan Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas total pagu sebesar Rp25,51 miliar, dengan nilai sebesar Rp7,4 miliar dilaksanakan oleh Pemprov Lampung, dan Rp18,11 miliar di Kab. Lampung Barat, Kab. Lampung Timur. Realisasi sub bidang DAK Fisik ini sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp25,01 miliar atau 98,01 persen dari pagu.
- 2) Akses Jalan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) total alokasi sebesar Rp 85,47 miliar, dengan alokasi anggaran masing-masing sebesar Rp12,83 miliar di Lampung Timur, Rp12,22 miliar di Provinsi Lampung, Rp11,51 miliar di Lampung Tengah, dan Rp38,16 miliar di 4 kabupaten lainnya. Belanja tersebut telah disalurkan kepada seluruh pemerintah daerah di atas dengan total realisasi Rp84,52 miliar atau 98,89 persen dari pagu.
- 3) Perbaikan dan Pembangunan Jalan Kabupaten/Kota dengan total alokasi Rp 268,97 miliar dan telah terealisasi Rp265,39 miliar atau 98,67 persen dari alokasi. Realisasi belanja ini tersebar pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung dengan rincian Rp71,46 miliar di Way Kanan, Rp53,12 miliar di Lampung Timur, Rp29,64 miliar di Lampung Selatan, Rp20,08 miliar di Pringsewu, Rp12,92 miliar di Tulang Bawang Barat, Rp11,25 miliar di Lampung Utara, Rp10,68 miliar di Mesuji, Rp10,56 miliar di Tulang Bawang, Rp10,19 miliar di Tanggamus, Rp9,77 miliar di Lampung Tengah, Rp9,06 miliar di Pesawaran, Rp8,99 miliar di Pesisir Barat, dan Rp7,68 miliar di Lampung Barat.

4.2.1.4.2 Bidang Kesehatan

Bidang Kesehatan memiliki alokasi sebesar Rp2,27 Miliar dengan realisasi sebesar Rp2,08 Miliar atau 91,26 persen dari alokasi. Terdapat 22 RO yang masuk dalam Bidang Kesehatan dengan capaian output mencapai 100 persen pada seluruh RO. Pelaksanaan kegiatan ini di Provinsi Lampung hanya

dilakukan oleh Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

Tabel 4.3. Capaian Output Utama Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik Bidang Kesehatan

No.	Nama RO	Satuan	Pagu (Miliar)	Realisasi (Miliar)	% Realisasi F=E/D	Volume RO	Realisasi RO	% Capaian RO
A	B	C	D	E	F=E/D	G	H	I
1	Tenaga Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya terkait Upaya Perbaikan Status Gizi (LP - 4)	Orang	0,50	0,48	95,86%	84	84	100%
2	Pemerintah Daerah yang Dilakukan Pembinaan Revitalisasi Posyandu (LP-1)	Daerah (Prov/Kab /Kota)	0,22	0,20	92,89%	15	15	100%
3	Tenaga Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya terkait Pelayanan Kesehatan Lansia dan Geriatri (LP-10)	Orang	0,18	0,17	98,24%	30	30	100%
Total			0,89	0,85	95,61%	-	-	100%

Sumber: Sintesa, 2025 (diolah)

RO Tenaga Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya terkait Upaya Perbaikan Status Gizi mendapatkan alokasi anggaran terbesar pada Bidang Kesehatan yaitu Rp498,13 juta dan telah terealisasi Rp477,52 juta atau sebesar 95,86 persen dari alokasi pada akhir tahun anggaran 2024. Peningkatan kualitas SDM pendukung Cakupan program ini antara lain pelatihan konseling menyusui, *Training of Trainers* (ToT) SDIDTK dan Pemberian Makan pada Balita dan Anak Prasekolah, ToT MTBS dan Tata Laksana Gizi Buruk yang menargetkan 84 tenaga kesehatan.

RO Pemerintah Daerah yang Dilakukan Pembinaan Revitalisasi Posyandu menargetkan 15 daerah atau seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Telah tercapai realisasi anggaran yang cukup baik yaitu sebesar 92,89 persen atau Rp201,73 Juta dari alokasi pagu sebesar Rp217,17 Juta. Meski demikian, capaian output RO ini sudah 100 persen dan telah memenuhi target revitalisasi pada 15 daerah (Prov/Kab/Kota).

Belanja untuk Tenaga Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya terkait Pelayanan Kesehatan Lansia dan Geriatri memiliki pagu sebesar Rp176,54 Juta dan telah terealisasi sebesar Rp173,44 juta atau 98,24 persen dari alokasi. Pelaksanaan kegiatan yaitu melalui *workshop* pelayanan kesehatan lansia dan geriatri bagi petugas kesehatan dengan target *output* 30 peserta dari seluruh kabupaten/kota Provinsi Lampung. Target tersebut telah tercapai

sepenuhnya, dengan capaian output 100 persen. Namun, realisasi anggaran baru terjadi pada November 2024, menjelang akhir tahun anggaran, sehingga manfaat peningkatan kapasitas tidak dapat dirasakan sejak awal tahun.

Secara spasial, Belanja K/L melalui RO Harmonis yang bersinergi dengan DAK Fisik pada bidang Kesehatan dapat dilihat dari lokus pelaksanaan kegiatan yaitu:

- 1) Belanja Kab./Kota yang Mendapatkan Fasilitas/Pembinaan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir dengan realisasi sebesar Rp26 juta dan pelaksanaan kegiatan dialokasikan untuk kabupaten/kota Lampung Barat, Pesawaran, Tanggamus, Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Way Kanan.
- 2) Belanja Tenaga Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dengan peserta dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
- 3) Belanja Fasilitas Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam Pemenuhan Data Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) Puskesmas dan Klinik Pratama Sesuai Standar dengan realisasi output kepada seluruh atau sebanyak 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
- 4) Belanja Tenaga Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya terkait Aplikasi Sistem Informasi Gizi Berbasis Keluarga/ GIKIA (termasuk ePPGBM) dengan realisasi sebesar Rp100,89 juta atau 99,53 persen dari pagu dan dilaksanakan dengan peserta berasal dari seluruh regional Lampung.

Belanja Pemerintah Pusat yang dilaksanakan pada lokasi tersebut melengkapi kebermanfaatan atas upaya pemerintah daerah yang dilaksanakan melalui DAK Fisik antara lain:

- 1) Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting dengan alokasi anggaran sebesar Rp30,15 miliar. Kegiatan ini dilaksanakan

di seluruh kabupaten/kota Provinsi Lampung. Hingga 31 Desember 2024, 15 kabupaten/kota telah merealisasikan anggaran tersebut dengan total penyaluran senilai Rp28,50 miliar atau 94,53 persen.

- 2) Penguatan Sistem Kesehatan di Provinsi Lampung dengan total realisasi Rp221,78 miliar atau terealisasi 89,77 dari pagu, yang secara khusus dialokasikan ke seluruh kabupaten/kota regional Lampung.

4.2.1.4.3 Bidang Pendidikan

Bidang Pendidikan memiliki alokasi sebesar Rp115,50 Miliar dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 mencapai Rp107,45 Miliar atau 93,03 persen dari alokasi. Terdapat 7 RO yang masuk dalam Bidang Pendidikan dengan capaian output rerata 162,76 persen. Capaian output utama bidang Pendidikan berdasarkan 3 RO pagu tertinggi ditunjukkan melalui Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Capaian Output Utama Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik Bidang Pendidikan

No.	Nama RO	Satuan	Pagu (Miliar)	Realisasi (Miliar)	% Realisasi	Volume RO	Realisasi RO	% Capaian RO
A	B	C	D	E	F=E/D	G	H	I
Guru yang mengikuti Program								
1	Pendidikan Kepemimpinan Sekolah Model Baru	Orang	84,53	79,03	93,50%	5.101	6.348	124,45%
Satuan Dikdas dan Dikmen								
2	yang difasilitasi penjaminan mutunya	Lembaga	13,26	12,52	94,39%	6.744	6.744	100,00%
Guru dan tenaga kependidikan								
3	yang mendapat pendampingan pembelajaran	Orang	12,48	11,74	94,08%	1.833	2.184	119,15%
Total			110,27	103,29	93,67%	-	-	114,53%

Sumber: Sintesa, 2025 (diolah)

Kegiatan dengan alokasi terbesar pada Bidang Pendidikan adalah RO Guru yang Mengikuti Program Pendidikan Kepemimpinan Sekolah Model Baru yaitu sebesar Rp84,53 Miliar dengan realisasi sebesar Rp79,03 Miliar atau 93,50 persen dari alokasi, yang dilaksanakan oleh satuan kerja Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Lampung. RO ini merupakan turunan dari program Merdeka Belajar dari Kemendikbudristek. Program Pendidikan Kepemimpinan Sekolah Model Baru ditujukan bagi guru dan tenaga kependidikan dalam rangka

mendukung peningkatan kompetensi. Program ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih adaptif, inovatif, dan berkualitas demi meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Pelaksanaannya mencakup berbagai bentuk pelatihan, seperti Program Guru Penggerak, bimbingan teknis Platform Merdeka Mengajar, pelatihan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pembelajaran, serta penguatan karakter kepemimpinan. Hingga 31 Desember 2024, kegiatan ini telah diikuti oleh 6.348 orang dari target 5.101 orang dengan capaian output sebesar 124,45 persen.

Kegiatan yang memiliki pagu terbesar kedua yaitu Satuan Dikdas dan Dikmen yang Difasilitasi Penjaminan Mutunya dengan pagu sebesar Rp13,26 Miliar dan telah terealisasi Rp12,52 Miliar atau sebesar 94,39 persen. Kegiatan ini telah dilaksanakan oleh seluruh target atau sebanyak 6.744 lembaga dengan capaian RO sebesar 100 persen.

Kegiatan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Mendapat Pendampingan Pembelajaran memiliki pagu senilai Rp12,48 Miliar dan telah terealisasi sebesar Rp11,47 Miliar atau 94,08 persen dari pagu. Sebanyak 2.184 guru dan tenaga kependidikan telah menerima pendampingan dari target sejumlah 1.833 peserta sehingga terealisasi capaian RO sebesar 119,15 persen.

Secara spasial, Belanja K/L melalui RO Harmonis yang bersinergi dengan DAK Fisik pada bidang Pendidikan dapat dilihat dari lokus pelaksanaan kegiatan yaitu:

- 1) Belanja untuk Satuan Dikdas dan Dikmen yang Difasilitasi Penjaminan Mutunya bagi seluruh lembaga dikdas dan dikmen dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
- 2) Belanja untuk Guru dan tenaga kependidikan yang mendapat pendampingan pembelajaran di antaranya dengan kegiatan Pendampingan IKM, Kepemimpinan, Komunitas Belajar, P5, Pengimbasan PSP di seluruh Kabupaten/Kota

Provinsi Lampung, kegiatan Diklat transisi PAUD ke SD serta kegiatan penguatan IKM bagi guru jenjang PAUD di Sekolah Penggerak dengan peserta adalah guru dan tenaga kependidikan dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

- 3) Belanja untuk Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti Inovasi Pembelajaran dalam peningkatan kompetensi dengan realisasi Rp3,4 miliar atau 77,78 persen dari pagu yang dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota Provinsi Lampung.

Belanja-belanja yang dilaksanakan pada lokasi tersebut melengkapi kebermanfaatan atas upaya pemerintah daerah yang dilaksanakan melalui DAK Fisik untuk:

- 1) SD yang mendapatkan alokasi pagu tertinggi sebesar Rp187,70 miliar dengan realisasi Rp185,57 miliar atau 98,87 persen dari alokasi dan SMP dengan alokasi sebesar Rp135,97 miliar dengan realisasi Rp132,86 miliar atau 97,71 persen dari alokasi. DAK Fisik atas kedua subbidang ini tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
- 2) Pengembangan perpustakaan di berbagai daerah. Bandar Lampung dengan pagu sebesar Rp10,5 miliar, Lampung Barat dengan total Rp10,18 miliar. Lampung Utara sebesar Rp800 juta, dan Metro sebesar Rp499,95 juta. Total realisasi atas sub bidang perpustakaan adalah Rp21,47 miliar atau 97,66 persen dari alokasi.

4.2.1.4.4 Bidang Air Minum

Bidang Air Minum memiliki pagu sebesar Rp12,56 Miliar dengan realisasi Rp12,40 Miliar atau 98,71 persen dari pagu anggaran. Terdapat 3 RO pada Bidang Air Minum dengan rerata capaian RO sebesar 97,91 persen sebagaimana ditampilkan pada tabel 4.5.

RO Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat mendapatkan alokasi anggaran tertinggi pada Bidang Air Minum yaitu Rp8,36 Miliar dan telah

terrealisasi 8,26 Miliar atau 98,71 persen dari pagu. Meski demikian, tingkat realisasi capaian RO hanya sebesar 93,72 persen. Kegiatan ini bertujuan untuk pembangunan sistem penyediaan air bersih langsung ke rumah masyarakat tanpa harus jauh ke sumber air dengan target tahun 2024 sebanyak 3.040 Sambungan Rumah (SR).

Tabel 4.5. Capaian Output Utama Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik Bidang Air Minum

No.	Nama RO	Satuan	Pagu (Miliar)	Realisasi (Miliar)	% Realisasi	Volume RO	Realisasi RO	% Capaian RO
A	B	C	D	E	F=E/D	G	H	I
1	Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat	SR	8,36	8,26	98,71%	3.040	2.849	93,72%
2	Jaringan air baku yang dioperasikan dan dipelihara	Unit	2,88	2,86	99,59%	16	16	100%
3	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1,32	1,28	96,78%	15	15	100%
Total			12,56	12,40	98,71%	-	-	97,91%

Sumber: Sintesa, 2025 (diolah)

RO Jaringan Air Baku Yang Dioperasikan Dan Dipelihara mencapai realisasi tertinggi pada DAK Fisik Bidang Air Minum yaitu 99,59 persen atau sebesar Rp2,86 Miliar dari pagu senilai Rp2,88 Miliar. Capaian output kegiatan ini telah mencapai 100 persen dengan pelaksanaan sebanyak 16 unit dari target 16 unit.

RO Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM atau Sistem Penyediaan Air Minum memiliki alokasi anggaran Rp1,32 Miliar dan telah terealisasi Rp1,28 Miliar atau 96,78 persen dari pagu. Capaian output juga telah mencapai 100 persen atas target pelaksanaan 15 daerah (Prov/Kab/Kota).

Secara spasial, Belanja K/L melalui RO Harmonis yang bersinergi dengan DAK Fisik pada bidang Air Minum dapat dilihat dari lokus pelaksanaan kegiatan yaitu:

- 1) Belanja Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat dengan rencana kegiatan Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat dalam program Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (BPM Pamsimas) dilaksanakan di Lampung Selatan dan Pringsewu sebanyak masing-masing 6 desa dan Lampung Utara sebanyak 7 desa.

- 2) Belanja Jaringan Air Baku yang dioperasikan dan dipelihara yang dilaksanakan di Lampung Timur, Lampung Selatan, Pringsewu, Pesawaran, Pesisir Barat, Tanggamus, dan Way Kanan.
- 3) Belanja Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM dilaksanakan dengan peserta dari seluruh regional Lampung.

Belanja Pemerintah Pusat yang dilaksanakan pada lokasi tersebut melengkapi kebermanfaatan atas upaya pemerintah daerah yang dilaksanakan melalui DAK Fisik antara lain:

- 1) Belanja sub bidang Air Minum oleh Pemkot Bandar Lampung dengan total realisasi sebesar Rp14,75 miliar atau 98,35 persen dari pagu sebesar Rp14,99 miliar.
- 2) Belanja sub bidang Air Minum - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu untuk Kabupaten Mesuji dengan alokasi anggaran Rp1,36 miliar. Meski demikian, hingga 31 Desember 2024 tidak terdapat penyaluran atas sub bidang DAK Fisik ini.

4.2.1.4.5 Bidang Sanitasi

Tabel 4.6. Capaian Output Utama Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik Bidang Sanitasi

No.	Nama RO	Satuan	Pagu (Miliar)	Realisasi (Miliar)	% Realisasi	Volume RO	Realisasi RO	% Capaian RO
A	B	C	D	E	F=E/D	G	H	I
1	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Sanitasi	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1,85	1,79	96,93%	15	15	100%
Total			1,85	1,79	96,93%	15	15	100%

Sumber: Sintesa, 2025 (diolah)

Bidang Sanitasi memiliki alokasi sebesar Rp1,85 Miliar dengan realisasi sebesar Rp1,79 Miliar atau tercapai 96,93 persen dari alokasi anggaran. Hanya terdapat 1 RO pada Bidang Sanitasi dan telah memiliki capaian output sebesar 100 persen.

RO Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Sanitasi dilaksanakan oleh Kementerian PUPR melalui satker Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung. Pelaksanaan RO ini dilakukan dalam bentuk Pendampingan kepada Pemerintah Daerah terkait Implementasi Strategi Sanitasi Kab. /Kota,

Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Sanitasi terkait Percepatan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik, serta *Workshop* Daerah. Adapun target dari RO ini adalah sebanyak 15 Kabupaten/Kota atau seluruh OPD di Provinsi Lampung.

Belanja Pemerintah Pusat yang dilaksanakan pada melengkapi kebermanfaatan atas upaya pemerintah daerah yang dilaksanakan melalui DAK Fisik sub bidang Sanitasi- Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu dengan total pagu sebesar Rp1,62 miliar. DAK Fisik tersebut dialokasikan pada Kabupaten Mesuji. Namun, sampai 31 Desember 2024 tidak terdapat penyaluran atas DAK Fisik Bidang Sanitasi pada Kabupaten Mesuji atas kegiatan tersebut. Penjelasan dari kendala tersebut telah disampaikan Pemerintah Kabupaten Mesuji melalui Surat Bupati Mesuji Nomor Pu.16.00/5286/IV.17/MSJ/2024 tentang tanggapan atas tidak salur DAK Fisik TA 2024.

4.2.1.4.6 Bidang Pertanian

Bidang Pertanian memiliki alokasi sebesar Rp26,01 Miliar dengan realisasi mencapai Rp24,77 Miliar atau 95,25 persen. Terdapat 19 RO yang masuk dalam Bidang Pertanian yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian melalui 5 satuan kerja vertikal di Provinsi Lampung. Realisasi anggaran tertinggi terdapat pada RO Layanan Kesehatan Hewan, Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan dan Sertifikat Benih jagung dengan capaian masing-masing 100 persen dari alokasi.

Tabel 4.7. Capaian Output Utama Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik Bidang Pertanian

No.	Nama RO	Satuan	Pagu (Miliar)	Realisasi (Miliar)	% Realisasi	Volume RO	Realisasi RO	% Capaian RO
A	B	C	D	E	F=E/D	G	H	I
1	Area penyaluran benih jagung	Hektar	6,75	6,69	99%	7.500	7.500	100%
2	Layanan Kesehatan Hewan	Layanan	6,51	6,51	100%	260.250	260.250	100%
3	Area penyaluran benih padi	Hektar	4,42	4,32	97,74%	13.000	13.000	100%
Total			17,68	17,52	99,12%	-	-	100,00%

Sumber: Sintesa, 2025 (diolah)

Tabel 4.7 menunjukkan capaian output utama yaitu 3 RO dengan alokasi tertinggi. Kegiatan dengan alokasi terbesar pada Bidang Pertanian adalah RO

Area Penyaluran Benih Jagung. Program ini dilaksanakan dalam bentuk belanja barang bantuan lainnya berupa penyaluran benih jagung untuk diserahkan kepada masyarakat. Sampai dengan 31 Desember 2024 kegiatan ini telah terealisasi sebesar 99 persen dari alokasi. Capaian output telah mencapai 7.500 hektar atau 100% dari target output. Kegiatan penyaluran benih jagung kepada kelompok tani telah dilaksanakan pada triwulan II (akhir bulan Mei), tetapi realisasi baru tercatat pada triwulan III setelah proses pertanggungjawabannya oleh satker Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung selesai.

RO Layanan Kesehatan Hewan memiliki pagu terbesar kedua yaitu sebesar Rp6,51 Miliar dengan realisasi anggaran Rp6,51 Miliar atau 100 persen dari alokasi dengan capaian output 100 persen. Bentuk dari kegiatan tersebut adalah layanan pengendalian dan penanggulangan PMK (penyakit mulut dan kuku) melalui vaksinasi PMK dengan target sebanyak 260.250 dosis. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya mitigasi pengendalian dan penanggulangan risiko penyebaran penyakit PMK pada hewan ternak di provinsi Lampung. Realisasi anggaran dan capaian output yang akurat ini menunjukkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang baik dari Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.

RO Area Penyaluran Benih Padi dilaksanakan dalam bentuk penyaluran bantuan benih padi untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda. Kegiatan ini memiliki alokasi anggaran Rp4,42 miliar dan telah terealisasi Rp4,32 miliar atau 97,74 persen dari alokasi. Dari target output sejumlah 13.000 hektar, telah terealisasi seluruhnya atau 100 persen.

Secara spasial, Belanja K/L melalui RO Harmonis yang bersinergi dengan DAK Fisik pada bidang Pertanian dapat dilihat dari lokus pelaksanaan kegiatan yaitu:

- 1) Belanja untuk area penyaluran benih jagung dengan dilaksanakan di Lampung Utara, Pringsewu, Lampung Selatan, Way Kanan, Pesawaran, Pesisir Barat.

- 2) Belanja untuk peningkatan area penyaluran benih padi dilaksanakan di Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tulang Bawang, Pringsewu dan Mesuji.
- 3) Belanja untuk Pelatihan Pertanian bagi Non Aparatur seperti teknik pompanisasi guna optimalisasi irigasi di Way Kanan dan Lampung Utara dan program Brigade Pangan di Lampung Tengah, Lampung Timur, Tulang Bawang dan Mesuji, dengan realisasi RO sebesar Rp1,13 miliar atau 99,61 persen dari pagu.
- 4) Belanja untuk pembelian Prasarana Pascapanen Hortikultura dengan realisasi Rp958,8 juta atau 99,88 persen dari pagu dilaksanakan di Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Barat, Pringsewu.

Belanja Pemerintah Pusat yang dilaksanakan pada lokasi tersebut melengkapi kebermanfaatan atas upaya pemerintah daerah yang dilaksanakan melalui DAK Fisik pada sub bidang Dukungan Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani), alokasi anggaran terfokus pada pengadaan sarana dan prasarana pendukung pertanian, perikanan, dan peternakan. Lampung Selatan sebesar Rp15,07 miliar, Provinsi Lampung sebesar Rp7,89 miliar, dan Lampung Tengah sebesar Rp7,41 miliar. Sementara itu, Pesawaran memiliki pagu sebesar Rp9,2 miliar, Tanggamus sebesar Rp4,15 miliar, Tulang Bawang sebesar Rp2,9 miliar, dan Mesuji yaitu Rp1,39 miliar. Dari total alokasi DAK Fisik sebesar Rp48,03 miliar tersebut, telah disalurkan sebesar Rp45,81 miliar atau 95,38 persen.

4.3 KENDALA DAN TANTANGAN PELAKSANAAN HARMONISASI BELANJA K/L

Walaupun secara keseluruhan tingkat realisasi dan pencapaian output dapat terpenuhi, bahkan beberapa melampaui target, belanja K/L yang bersinergi dengan DAK Fisik tetap menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kendala dan tantangan tersebut, meliputi:

a. Penganggaran

- Revisi Anggaran
 - Terdapat penambahan pagu anggaran di akhir bulan September untuk RO Bidang Sanitasi berdasarkan Inpres. Meski pada akhirnya belanja terserap dengan baik, tetapi waktu persiapan dan eksekusi yang dimiliki satker untuk belanja strategis ini menjadi terbatas.
 - Terdapat pengurangan pagu anggaran pada Balai Pelatihan Pertanian Lampung untuk Pelatihan Pertanian bagi Non Aparatur karena penyesuaian alokasi dari Kantor Pusat sebesar 53 persen, tetapi target kegiatan pelatihan tetap. Hal ini berpotensi mempengaruhi kualitas atau efektivitas pelatihan.
 - Terdapat instruksi dari pusat untuk mengubah atau menambah kegiatan yang memerlukan penyesuaian kembali pada alokasi anggaran, contohnya pada Satker Kemendikbudristek.
 - Revisi anggaran membutuhkan waktu karena harus mengikuti *timeline* yang ditetapkan oleh Kantor Pusat Satker terkait, serta memerlukan validasi dan verifikasi di tingkat Kementerian dan DJA.
- Halaman III DIPA
 - Revisi anggaran yang tidak segera selesai membuat pelaksanaan kegiatan menjadi tertunda. Hal ini menyebabkan rencana penarikan dana (Halaman III DIPA) yang telah disusun oleh Satuan Kerja sebelumnya tidak optimal.
 - Tingginya deviasi pada Halaman III DIPA disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan dan *timeline* baru dari pusat sehingga pelaksanaan kegiatan harus menunggu arahan dan menyebabkan penyesuaian Rencana Penarikan Dana pada Halaman III DIPA belum dapat

dilakukan. Permasalahan ini terjadi pada Satker lingkup Kemendikbudristek, Kementan, Kemenkes, dan Kementerian PUPR.

- **Blokir Anggaran**

- Satuan Kerja Balai Pelatihan Pertanian Lampung mengalami adanya blokir anggaran di bulan Januari untuk program banper berupa peralatan dan mesin. Meski belanja terealisasi pada triwulan I, proses buka blokir yang membutuhkan kesiapan semua dokumen dan data dukung membutuhkan waktu dan menyesuaikan kesiapan satker, yang menyebabkan Satuan Kerja harus menunggu hingga semua data dukung terkumpul dan revisi anggaran selesai baru dapat melaksanakan program.

- **Automatic Adjustment (AA).**

Ketidakpastian waktu pembukaan blokir anggaran AA yang tidak dapat diprediksi dan biasanya baru dibuka pada akhir triwulan III dan IV berpotensi menyebabkan tidak optimalnya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, khususnya kontrak yang membutuhkan proses panjang namun waktu yang tersedia tidak banyak. Kendala terkait AA merupakan kendala yang paling banyak terjadi pada Kementan dan Kemendikbudristek pada tahun 2024 ini.

- **Sumber Dana SBSN**

Meskipun sampai akhir tahun 2024 anggaran belanja dapat terserap secara optimal, terdapat belanja dengan sumber dana SBSN pada Satker Kementerian PUPR yang hingga akhir semester I baru terealisasi 20 persen, sehingga terjadi konsentrasi realisasi di akhir tahun anggaran. Kendala yang dihadapi adalah faktor cuaca yang kadang menghambat kegiatan pembangunan jalan, menyebabkan pelaksanaan kegiatan dijadwalkan pada di semester akhir.

b. Sumber Daya Manusia

- Kurangnya SDM

- Keterbatasan jumlah pegawai yang bersertifikasi pejabat perbendaharaan sehingga satker akan mengalami kesulitan dalam proses penyelesaian belanja apabila pejabat perbendaharaan berhalangan maupun mutasi.
- Arus mutasi pegawai yang dinamis pada satker mengakibatkan sering terjadinya perubahan pejabat dan staf pengelola keuangan yang belum mempunyai kompetensi maupun pengalaman di bidang perbendaharaan dan teknis pengoperasian aplikasi perbendaharaan seperti SAKTI.

- **Pergantian Pejabat Perbendaharaan**

BGP Provinsi Lampung mengalami pergantian KPA sebanyak tiga kali selama tahun 2024 dan turut memengaruhi proses pencairan anggaran. Selain itu, terdapat satker lingkup Kementan yang tidak segera menyusun SK Pejabat Perbendaharaan di awal tahun sehingga proses pelaksanaan anggaran tidak dapat segera dilaksanakan

- **Pemahaman terhadap Aplikasi**

Kurangnya kompetensi dan pemahaman SDM pengelola keuangan pada beberapa satker terhadap regulasi pengelolaan keuangan maupun pengoperasian aplikasi SAKTI seperti menu perekaman capaian output. Selain itu, koordinasi internal satker yang belum optimal antara pengelola keuangan dengan tim teknis pada satuan kerja sehingga rencana dan realisasi menjadi tidak sejalan dan berimplikasi pada deviasi halaman III DIPA.

c. Eksekusi Kegiatan

- **Faktor Luar**

- RO Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat yang dikelola oleh satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Lampung tidak dapat mencapai

target output yang ditentukan akibat jarak antar rumah penerima manfaat yang terlalu jauh.

- Dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, kondisi cuaca yang terlalu ekstrem dan progres fisik yang membutuhkan waktu merupakan tantangan bagi Satker di Kementerian PUPR.
- Kesiapan Pedoman Umum, Petunjuk Teknis, Dokumen Pelaksanaan Lain

Terlambatnya penerbitan Juknis oleh Kantor Pusat Kementan yang baru diterbitkan di Bulan April tahun berjalan, menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan. Hal tersebut juga terjadi pada satker Kemendikbudristek yang sesuai arahan kantor pusat harus menambah kegiatan. Namun, kegiatan tersebut harus menunggu juknis dan menyesuaikan *timeline* yang disusun oleh kantor pusat.

- Kekurangan Prasyarat
Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat telah memanfaatkan BAST *Online* sehingga verifikasi pelayanan lebih akuntabel. Namun, terdapat kendala jaringan di lokasi kegiatan yang terpencil sehingga beberapa BAST *Online* tidak masuk langsung ke dalam sistem. Hal ini mengakibatkan proses penyerapan anggaran menjadi terlambat dari target yang telah ditetapkan.
- Proses pembagian bantuan
 - Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung mengalami kendala dalam melaksanakan program Pelayanan Kesehatan Hewan. Persiapan kegiatan menyita waktu yang cukup banyak sehingga pelaksanaan kegiatan baru terealisasi pada akhir triwulan IV 2024. Selain itu, para penyuluh kesehatan terkendala lokasi pembagian bantuan ke

masyarakat berupa vaksin dan pengobatan karena posisi hewan di luar desa/ rumah warga pemilik hewan. Beberapa penerima manfaat juga menunjukkan resistensi akibat kekhawatiran efek samping vaksinasi pada hewan ternaknya.

- Kendala yang sama dialami dalam Kegiatan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan untuk penyaluran bantuan ke Kabupaten Pesisir Barat dan Way Kanan karena jauhnya lokasi target penerima bantuan.

d. Pengadaan Barang dan Jasa

- Proses Lelang
 - Beberapa K/L memiliki sistem lelang secara terpusat salah satunya pada Kemendikbudristek. Kontrol satker atas pelaksanaan lelang secara terpusat sangat rendah sehingga satker hanya mengikuti petunjuk dari kantor pusat maupun kanwil.
 - Pada salah satu satker Kemendikbudristek juga mengalami hambatan proses lelang akibat permasalahan pada aplikasi LKPP yang disebabkan serangan siber pada Pusat Data Nasional di awal tahun 2024, mengakibatkan waktu yang diperlukan untuk proses lelang menjadi lebih lama, dan mundurnya pelaksanaan pekerjaan.

e. Regulasi Pelaksanaan Anggaran

- Regulasi Pemerintah Pusat
 - Munculnya PMK 25 tahun 2024 tentang Pengelolaan DAK yang secara tidak langsung memunculkan pergeseran kegiatan DAK Fisik yang dikelola pemda sehingga turut berdampak juga pada kegiatan penunjang DAK Fisik pada K/L. Diharapkan pemda pengelola DAK Fisik dapat terus berkoordinasi secara aktif dengan K/L terkait agar pelaksanaan

kegiatan DAK Fisik dan kegiatan penunjang dapat berjalan maksimal.

- Kebijakan S-1023/MK.02/2024 yang terbit pada bulan November 2024 mengharuskan K/L memblokir anggaran perjadih sebesar minimal 50 persen. Belanja yang termasuk ke dalam RO Harmonis yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung mengalami kendala dalam merealisasikan kegiatan pembinaan bagi tenaga kesehatan di daerah yang telah direncanakan, sementara BGP Provinsi Lampung juga terkendala dalam pelaksanaan pelatihan bagi guru dan tenaga pendidik yang memerlukan belanja pendukung perjadih.

4.4 KENDALA DAN TANTANGAN PELAKSANAAN DAK FISIK PADA 6 BIDANG

Hingga akhir tahun 2024, dari 6 bidang yang dilakukan harmonisasi, terdapat 1 bidang DAK Fisik yang tidak memiliki realisasi penyaluran yaitu Bidang Sanitasi. Sedangkan, berdasarkan sub bidangnya, terdapat 2 sub bidang yang tidak tersalur yaitu sub bidang Air Minum dan Sanitasi (Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu) yang dilaksanakan oleh Pemda Kabupaten Mesuji.

Rendahnya penyaluran dan penyerapan ini turut dipengaruhi oleh kendala dan tantangan yang dihadapi Pemda dalam melaksanakan DAK Fisik di wilayahnya. Adapun permasalahan selama tahun 2024 di wilayah Provinsi Lampung yang dihipun berdasarkan pendalaman bersama KPPN dan Pemda adalah sebagai berikut:

- a. Terbitnya PMK Nomor 25/PMK.07/2024 pada tanggal 16 April 2024 tentang Pengelolaan DAK Fisik yang mengharuskan pemerintah daerah untuk segera melakukan penyesuaian terhadap rencana pelaksanaan DAK Fisik di

wilayah masing-masing guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

- b. Peluncuran aplikasi OMSPAN TKD dengan menu DAK Fisik untuk periode tahun 2024 yang baru mulai diimplementasikan pada awal triwulan II tahun 2024 berkontribusi pada *delay* dalam proses entri data kontrak oleh pemerintah daerah.
- c. Pergantian pejabat di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki alokasi DAK Fisik, ditambah dengan kurangnya koordinasi di unit-unit terkait, turut berkontribusi terhadap tertundanya proses penyelesaian administrasi yang diperlukan untuk penyaluran DAK Fisik secara tepat waktu.
- d. Penyaluran DAK Fisik untuk Bidang Air Minum dan Sanitasi yang dialokasikan di Kabupaten Mesuji tidak berkontrak sehingga tidak terdapat terealisasi hingga akhir tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh lokasi relokasi baru yang dinilai cukup jauh dari lokasi yang ditetapkan dalam tahap perencanaan, serta terbatasnya waktu dan sumber daya untuk mempersiapkan lahan relokasi secara memadai pada tahun berkenaan.
- e. Pada Kabupaten Pringsewu dan Kota Metro, rehabilitasi Puskesmas menggunakan DAK Fisik Bidang Kesehatan tidak dapat terserap maksimal karena bangunan yang direncanakan untuk diperbaiki masih dalam kondisi layak. Hal tersebut menunjukkan tidak selarasnya antara perencanaan dan kondisi riil.
- f. Kurang optimalnya penyaluran pagu DAK Fisik Bidang Pertanian pada Kabupaten Tanggamus yang direkam hanya senilai 68,30 % dari pagu RK. Hal tersebut akibat kegiatan pendukung (irigasi dan jalan) yang bersinergi dengan sebagian rencana kegiatan pada RK mengalami perubahan sehingga tidak dapat dikontrakan.

4.5 UPAYA SINKRONISASI DI DAERAH OLEH SATKER DAN PEMDA

Untuk memastikan keberlangsungan kegiatan RO Harmonis DAK Fisik yang efektif dan efisien, Pemerintah Daerah dan Satker Kementerian Lembaga telah melakukan berbagai upaya.

Pertama, sinkronisasi perencanaan anggaran menjadi langkah kunci. Ini melibatkan analisis pada tahap penyusunan anggaran untuk menghindari tumpang tindih antara APBD dan APBN, terutama yang terkait dengan DAK Fisik. Sebagai contoh, Satker Kementerian Kesehatan di Lampung memimpin koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung serta Kabupaten/Kota. Setelah tahap diskusi regional, hasil analisis bersama diverifikasi secara terpusat untuk meningkatkan efisiensi penganggaran.

Kedua, evaluasi rutin menjadi penting dalam memantau pelaksanaan anggaran. Misalnya, Satker Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung mengadakan rapat koordinasi bulanan dengan pemerintah daerah, sering kali melalui platform daring. Mekanisme ini memungkinkan pemantauan progres pelaksanaan program secara berkala, memastikan ketercapaian target yang ditetapkan.

Ketiga, koordinasi Satker dan Pemda kepada KPPN dan Kanwil DJPb menjadi strategis dalam mengatasi hambatan pelaksanaan anggaran. Tujuannya adalah

mencari solusi atas permasalahan yang mungkin timbul sehingga pelaksanaan anggaran tidak terhambat oleh kendala administratif atau teknis.

Ke depan, harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Daerah perlu lebih menjadi prioritas. Hal ini sejalan dengan kerangka Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (HKFN) yang diatur dalam PP 1 tahun 2024. Proses ini melibatkan penyalarsan antara Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Pemerintah Pusat dengan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Pemerintah Daerah. Selain itu, harmonisasi Belanja DAK Fisik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Belanja K/L RO Harmonis Pendukung DAK Fisik melalui Kementerian Lembaga juga perlu dimasukkan dalam kerangka ini. Langkah ini diperlukan guna meningkatkan akurasi implementasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan stabilitas ekonomi, pertumbuhan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.



SUPLEMEN 7

Analisis Ekonomi dan Kesejahteraan

Analisis Ketimpangan Produktivitas Tenaga Kerja Sektoral Lampung

PERBANDINGAN JUMLAH TENAGA KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA SEKTORAL DI LAMPUNG

Sektor	Tenaga Kerja (Ribu Jiwa)								Produktivitas Tenaga Kerja (Nilai Tambah/Jumlah TK Dibayar)							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.013	2.031	1.969	1.991	2.023	2.201	2.234	33.251	33.406	34.687	34.133	34.249	31.656	15.294		
Pertambangan dan Penggalian	9	26	20	29	6	40	16	1.544.530	545.310	667.437	447.572	1.954.506	318.428	423.217		
Industri Pengolahan	306	358	393	390	448	396	422	141.286	130.525	112.796	118.939	104.076	119.400	58.043		
Listrik dan Gas	13	6	15	8	5	13	3	29.665	66.978	29.205	50.490	87.633	34.414	69.800		
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Lainnya	10	7	7	13	14	10	12	22.852	33.418	34.778	20.237	19.737	27.165	11.920		
Konstruksi	163	189	191	217	207	231	229	139.689	127.696	124.094	116.713	126.835	121.684	62.256		
Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan	763	712	782	812	914	886	867	37.006	42.501	36.176	37.668	38.647	43.750	23.437		
Transportasi dan Pergudangan	156	121	122	147	178	144	171	76.684	106.590	99.754	85.078	84.109	121.637	56.155		
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	189	160	164	196	252	179	214	17.723	22.844	21.236	17.301	15.336	24.432	10.492		
Informasi dan Komunikasi	26	14	21	19	37	38	66	428.247	830.803	627.735	717.872	379.755	394.229	119.459		
Jasa Keuangan dan Asuransi	14	24	17	16	26	39	23	337.192	205.126	294.949	326.198	190.123	132.107	120.902		
Real Estat	1	2	2	1	4	2	4	5.253.851	3.887.236	4.169.621	5.393.256	2.079.658	3.200.416	1.136.677		
Jasa Perusahaan	20	34	40	30	35	42	40	15.809	9.735	8.176	11.138	11.116	9.851	6.466		
Administrasi Pemerintahan dan Lainnya	147	138	145	133	151	123	145	48.574	54.039	54.136	61.085	53.082	65.228	30.240		
Jasa Pendidikan	178	207	182	188	227	179	231	36.939	34.312	40.730	39.764	33.795	43.919	17.143		
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	43	71	52	59	63	81	52	52.077	33.685	51.618	47.175	44.073	35.266	28.685		
Jasa Lainnya	154	130	124	159	166	189	111	13.829	17.889	17.694	13.593	16.252	16.473	14.721		

Sumber: BPS, 2024 dan PIER, 2024

Di Provinsi Lampung, mayoritas tenaga kerja berkontribusi di sektor pertanian, perdagangan, dan industri manufaktur. Namun, produktivitas tenaga kerja di sektor-sektor ini relatif lebih rendah dibandingkan sektor-sektor lain seperti real estat, pertambangan, serta jasa keuangan dan asuransi.

Hal ini menunjukkan ketimpangan antara sektor dengan jumlah tenaga kerja terbesar dan sektor dengan produktivitas tertinggi. Sektor pertanian, yang menyerap tenaga kerja terbanyak, masih menghadapi kendala dalam hal akses teknologi, inovasi, dan nilai tambah dari hasil pertanian. Kondisi ini mengakibatkan produktivitas per tenaga kerja tetap rendah meskipun kontribusi sektor ini signifikan terhadap lapangan pekerjaan. Sebaliknya, sektor real estat, jasa keuangan, dan pertambangan meskipun menyerap lebih sedikit tenaga kerja, menunjukkan produktivitas yang jauh lebih tinggi berkat pengembangan infrastruktur, investasi besar, dan teknologi.



TANTANGAN

- **Keterbatasan Teknologi di Sektor Pertanian.** Banyak tenaga kerja di sektor pertanian masih menggunakan metode tradisional yang berdampak pada rendahnya produktivitas. Minimnya penerapan mekanisasi pertanian, infrastruktur irigasi yang belum optimal, dan akses terbatas pada inovasi agrikultur menjadi tantangan utama.
- **Kesenjangan Keterampilan Tenaga Kerja.** Sektor-sektor dengan produktivitas tinggi seperti real estat, pertambangan, dan jasa keuangan membutuhkan keterampilan khusus, namun kebanyakan tenaga kerja Lampung belum memiliki keterampilan ini. Peningkatan produktivitas di sektor-sektor ini tidak sejalan dengan ketersediaan tenaga kerja lokal yang terampil.
- **Distribusi Investasi yang Tidak Merata.** Investasi infrastruktur dan sumber daya cenderung terkonsentrasi di sektor-sektor yang lebih maju seperti pertambangan dan keuangan, sehingga menciptakan kesenjangan produktivitas. Sektor-sektor utama seperti pertanian dan perdagangan kurang mendapat perhatian dalam hal investasi teknologi dan pengembangan kapasitas tenaga kerja.



REKOMENDASI



Diversifikasi dan Modernisasi Sektor Pertanian, guna meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan nilai tambah produk pertanian.



Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja (Upskilling & Reskilling) melalui akses terhadap pendidikan vokasional dan pelatihan kerja relevan dan masif.



Stimulus Investasi untuk Sektor yang Berpotensi Menyerap Tenaga Kerja. Mendorong Kemitraan Publik-Swasta di sektor-sektor strategis

BAB V

ANALISIS TEMATIK: KETAHAAN PANGAN



“Kemandirian pangan adalah kunci keberhasilan suatu negara dalam mencapai kesejahteraan rakyatnya”

-Ir. Soekarno-



BAB V ANALISIS TEMATIK: REVIU ATAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN DI LAMPUNG

5.1 PENDAHULUAN

Ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi di Indonesia, termasuk di Provinsi Lampung yang berperan strategis sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Sesuai dengan Undang-Undang Ketahanan Pangan No. 18 Tahun 2012, ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara hingga perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik dari segi jumlah maupun mutu, aman, beragam, bergizi, merata, terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mendukung kehidupan yang sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Lebih dari itu, UU ini juga menegaskan pentingnya kedaulatan pangan (*food sovereignty*), kemandirian pangan (*food resilience*), dan keamanan pangan (*food safety*) sebagai fondasi utama dalam mencapai ketahanan pangan nasional.

Ketahanan pangan memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan politik. Gangguan pada ketahanan pangan, seperti kenaikan harga beras pada masa krisis moneter, dapat memicu kerawanan sosial yang mengancam stabilitas nasional. Oleh karena itu, pemerintah senantiasa berupaya meningkatkan ketahanan pangan melalui berbagai kebijakan dan program, baik melalui produksi dalam negeri maupun impor. Pemenuhan kebutuhan pangan menjadi semakin penting mengingat Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar dengan cakupan geografis yang luas dan tersebar. Hal ini menuntut ketersediaan pangan yang mencukupi, mudah diakses, dan berkelanjutan untuk memastikan

bahwa setiap individu dapat memenuhi kebutuhan pangannya. Dalam konteks regional, Lampung sebagai salah satu provinsi penghasil beras, jagung, dan komoditas pangan lainnya memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Komitmen pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan juga sejalan dengan upaya pencapaian target *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya target nomor 1 (*no poverty* atau tanpa kemiskinan) dan target nomor 2 (*zero hunger* atau mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan). Selain itu, ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas utama Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, menegaskan komitmen Indonesia untuk mencapai swasembada pangan dan energi sebagai langkah strategis dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

Bab ini menyajikan analisis tematik terkait implementasi kebijakan ketahanan pangan di regional Lampung. Analisis ini dibagi menjadi tiga bagian utama:

- 1) Perkembangan kondisi ketahanan pangan Provinsi Lampung;
- 2) Implementasi kebijakan ketahanan pangan di Provinsi Lampung; dan
- 3) Keterkaitan antara kebijakan ketahanan pangan dengan pencapaian indikator-indikator ketahanan pangan di Provinsi Lampung.

Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai capaian, tantangan, dan rekomendasi kebijakan dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan di regional Lampung.

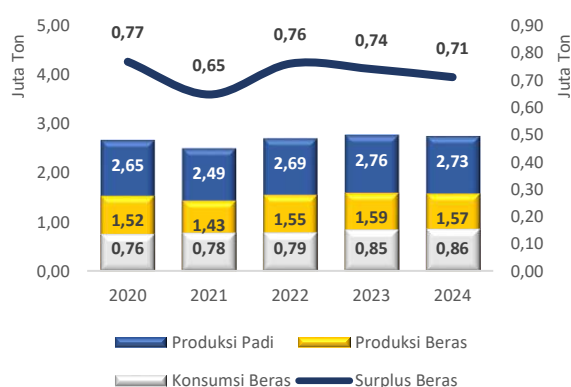
5.2 ANALISIS PERKEMBANGAN KONDISI KETAHANAN PANGAN REGIONAL LAMPUNG

5.2.1 Perkembangan Ketersediaan Pangan di Regional Lampung

5.2.1.1 Supply Dan Demand Padi/Beras Di Regional Lampung

Ketahanan beras di Lampung masih terjaga dengan adanya surplus beras rata-rata 724.884 ton per tahun selama periode 2020–2024. Namun, tren menunjukkan bahwa surplus ini semakin menurun dalam lima tahun terakhir, dari 767.043 ton pada 2020 menjadi 710.401 ton pada 2024, atau menyusut sebesar 7,38 persen. Penyusutan surplus ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan konsumsi beras lebih cepat dibandingkan pertumbuhan produksi, yang dapat menjadi perhatian utama dalam perencanaan ketahanan pangan jangka panjang. Rata-rata sekitar 52,65 persen dari total produksi beras di Lampung dikonsumsi secara domestik, sementara sisanya didistribusikan ke berbagai provinsi lain, sehingga ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada produksi tetapi juga efisiensi distribusi dan stabilitas pasokan dalam provinsi.

Grafik 5.1. Produksi Padi, Produksi Beras, Konsumsi Beras, dan Surplus Beras Lampung 2020-2024



Sumber: BPS, 2024 (diolah)

Secara keseluruhan, produksi padi dan beras di Lampung mengalami pertumbuhan dalam lima tahun terakhir, meskipun dengan laju yang relatif rendah. Produksi padi meningkat sebesar 3,00 persen, dari 2.650.291 ton pada 2020 menjadi

2.729.903 ton pada 2024, sementara produksi beras juga naik 3,00 persen dari 1.523.525 ton menjadi 1.569.291 ton dalam periode yang sama. Pertumbuhan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam produktivitas pertanian, meskipun masih terdapat tantangan dalam mempertahankan laju pertumbuhan yang lebih tinggi. Peningkatan produksi ini perlu ditunjang dengan kebijakan yang mendorong efisiensi pertanian, seperti modernisasi alat produksi, penggunaan varietas unggul, serta optimalisasi penggunaan lahan pertanian yang semakin terbatas.

Di sisi lain, konsumsi beras di Lampung mengalami peningkatan yang lebih pesat dibandingkan produksi, naik sebesar 13,54 persen dalam lima tahun terakhir, dari 756.482 ton pada 2020 menjadi 858.890 ton pada 2024. Peningkatan konsumsi ini sejalan dengan pertumbuhan populasi serta perubahan pola konsumsi masyarakat. Apabila tren ini terus berlanjut, tekanan terhadap surplus beras akan semakin besar, yang dapat berimplikasi pada ketahanan pangan dan stabilitas harga di pasar lokal. Oleh karena itu, selain meningkatkan produksi, perlu ada kebijakan untuk diversifikasi pangan guna mengurangi ketergantungan pada beras serta memperkuat cadangan pangan daerah sebagai langkah antisipatif terhadap potensi defisit di masa depan.

Dengan kondisi surplus yang terus menyempit dan konsumsi yang meningkat, strategi ketahanan pangan Lampung perlu mencakup aspek produksi, distribusi, dan konsumsi secara seimbang. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa rantai distribusi beras tetap efisien agar harga tetap stabil dan pasokan dalam provinsi terjamin. Selain itu, penguatan kapasitas penggilingan padi di Lampung menjadi krusial untuk mengurangi ketergantungan pada daerah lain dalam proses pascapanen. Dengan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data, Lampung diharapkan dapat terus mempertahankan statusnya sebagai salah satu lumbung pangan nasional sambil memastikan ketahanan pangan masyarakatnya tetap kuat.

Tabel 5.1. Neraca Beras (Produksi – Konsumsi) Lampung 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024	Tren
KAB. LAMPUNG TENGAH	229.868	163.163	207.217	210.678	201.725	↘
KAB. TULANG BAWANG	83.674	91.707	112.027	144.151	166.523	↗
KAB. LAMPUNG TIMUR	170.651	132.037	161.612	169.739	160.332	↘
KAB. MESUJI	169.270	175.221	152.326	148.981	127.850	↘
KAB. LAMPUNG SELATAN	88.615	96.307	101.467	69.931	90.635	↘
KAB. PRINGSEWU	39.456	33.319	41.794	36.589	38.625	↘
KAB. PESAWARAN	25.274	24.030	33.707	25.051	19.582	↘
KAB. TANGGAMUS	31.585	15.530	18.302	24.436	16.380	↘
KAB. PESISIR BARAT	20.812	21.536	20.627	19.434	14.185	↘
KAB. WAY KANAN	5.011	5.622	16.237	4.429	9.011	↗
KAB. LAMPUNG BARAT	5.753	6.948	8.112	13.068	7.728	↘
KOTA METRO	8.891	- 1.720	1.079	1.514	965	↗
KAB. TULANG BAWANG BARAT	- 6.950	- 5.740	3.924	- 151	- 9.800	↗
KAB. LAMPUNG UTARA	- 11.374	- 13.755	- 19.887	- 16.344	- 24.036	↘
KOTA BANDAR LAMPUNG	- 93.492	- 97.466	- 98.566	- 111.247	- 109.303	↘
PROVINSI LAMPUNG	767.043	646.740	759.976	740.258	710.401	↘

Sumber: BPS, 2024 (diolah)

Beberapa kabupaten tetap menjadi penopang utama produksi, sementara daerah perkotaan seperti Bandar Lampung dan Metro terus mengalami defisit beras yang signifikan.

Kabupaten Lampung Tengah, Tulang Bawang, dan Lampung Timur merupakan daerah dengan surplus beras tertinggi di Lampung. Lampung Tengah secara konsisten mencatat surplus di atas 160.000 ton per tahun, menjadikannya sebagai daerah penghasil utama yang berkontribusi besar terhadap ketahanan pangan Lampung. Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan tren surplus yang meningkat dari 83.674 ton pada 2020 menjadi 166.523 ton pada 2024, mencerminkan perbaikan dalam produktivitas pertanian. Sementara itu, Kabupaten Lampung Timur tetap menjadi penyumbang surplus yang stabil dalam lima tahun terakhir dengan rata-rata di atas 130.000 ton per tahun. Keunggulan daerah-daerah ini dalam produksi beras menunjukkan bahwa ketahanan pangan Lampung masih sangat bergantung pada wilayah-wilayah sentra produksi pertanian di sekitar pusat ibu kota.

Sebaliknya, beberapa kabupaten dan kota terus mengalami defisit beras, terutama Bandar Lampung dan Lampung Utara. Bandar Lampung mencatat defisit terbesar dengan angka yang terus meningkat dari -93.492 ton pada 2020 menjadi -109.303 ton pada 2024. Kota Metro dan Kabupaten Tulang Bawang Barat juga menghadapi tantangan serupa meskipun skalanya lebih kecil. Defisit di daerah perkotaan ini mencerminkan tingginya konsumsi

beras dibandingkan dengan kapasitas produksi lokal yang terbatas. Untuk mengatasi ketidakseimbangan ini, diperlukan sistem distribusi yang lebih efisien serta kebijakan yang mendorong diversifikasi sumber pangan guna mengurangi ketergantungan pada beras sebagai bahan pangan utama.

Selain itu, strategi ketahanan pangan di Lampung juga perlu berfokus pada peningkatan produksi beras di daerah dengan potensi pertanian yang belum maksimal, seperti Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Mesuji. Kedua daerah ini memiliki lahan pertanian yang cukup luas serta akses terhadap sumber daya air yang mendukung produksi padi, tetapi tren surplus beras dalam lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun.

Gambar 5.1. Luas Lahan Baku Sawah 2019 dan 2024 Lampung



Sumber: BPS, 2024

Penurunan luas lahan baku sawah di Provinsi Lampung dari 361.699 hektare pada 2019 menjadi 337.284 hektare pada 2024 mencerminkan tantangan serius bagi sektor pertanian dalam menopang ketahanan pangan dan perekonomian daerah. Berkurangnya luas lahan sawah ini dapat berdampak pada produksi pangan, mengingat Lampung merupakan salah satu daerah penopang stok beras nasional. Selain itu, penyusutan ini berpotensi menurunkan kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang sudah menunjukkan tren pelemahan dalam beberapa tahun terakhir. Perubahan ini juga sejalan dengan dinamika alih fungsi lahan akibat urbanisasi, ekspansi industri, serta perubahan tata ruang secara organik yang semakin mendorong transformasi ekonomi ke sektor non primer.

Penetapan luas lahan baku sawah oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Keputusan Menteri Nomor 686/SK-PG.03.03/XII/2019 dan Nomor 446.1/SK-

PG.03.03/V/2024 menjadi indikator bahwa kebijakan perlindungan lahan pertanian perlu diperkuat, utamanya bagi daerah dengan sektor basis pertanian seperti di Lampung. Penurunan luas sawah ini menunjukkan perlunya optimalisasi pemanfaatan lahan yang tersisa agar tetap produktif melalui peningkatan efisiensi pertanian, seperti penggunaan teknologi pertanian modern, sistem irigasi yang lebih baik, dan penerapan varietas unggul. Selain itu, strategi diversifikasi pangan juga perlu dikembangkan guna mengurangi ketergantungan pada beras serta meningkatkan produktivitas sektor pertanian secara keseluruhan.

Dalam jangka panjang, kebijakan perlindungan lahan pertanian perlu menjadi prioritas bagi pemerintah daerah guna memastikan keberlanjutan produksi pangan di Lampung. Implementasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) menjadi langkah strategis untuk membatasi konversi lahan sawah yang semakin meningkat. Di sisi lain, insentif bagi petani dalam bentuk subsidi pupuk, akses permodalan, dan dukungan infrastruktur pertanian perlu diperkuat.

5.2.1.2 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Regional Lampung

Tabel 5.2. Margin Perdagangan dan Pengangkutan Total (MPPT) Beras di Interregional Sumatera

No	Provinsi	MPPT (persen)	Jumlah Rata-Rata Rantai Distribusi
1	Bangka Belitung	18,49	3
2	Sumatera Selatan	16,17	3
3	Lampung	14,48	3
4	Sumatera Barat	13,85	2
5	Aceh	11,23	3
6	Bengkulu	11,04	2
7	Kepulauan Riau	11,03	3
8	Jambi	10,69	2
9	Sumatera Utara	10,35	3
10	Riau	10,32	3

Sumber: BPS, 2022 (diolah)

Analisis terhadap pola distribusi perdagangan beras di regional Lampung menunjukkan beberapa *insights* sebagai berikut:

1) Anomali Surplus Beras dan Inflasi Beras di Lampung

Meskipun Lampung rata-rata surplus beras per tahunnya, harga beras di provinsi ini seringkali tetap menjadi salah satu penyumbang inflasi utama. Salah satu faktor utama adalah cukup tingginya margin distribusi akibat rantai perdagangan yang lebih panjang. Lampung memasarkan kelebihan produksi berasnya ke sembilan provinsi, termasuk Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, dan Banten. Lampung juga masih melakukan pembelian dari Sumatera Selatan (BPS, 2022). Pola distribusi panjang membuat harga beras di pasar lokal berfluktuasi, terutama saat permintaan meningkat, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap inflasi. Hal ini menjadi perhatian Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

2) Variasi Pola Distribusi dan Tingginya Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPPT)

Secara spesifik, pola distribusi perdagangan beras di Lampung menunjukkan variasi dalam jumlah perantara yang terlibat, yang secara langsung mempengaruhi Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPPT). Distribusi terpendek, yang hanya melibatkan satu perantara (eceran), memiliki MPPT terendah sebesar 5,98 persen, yang menunjukkan bahwa semakin sedikit perantara, semakin kecil kenaikan harga di tingkat konsumen. Sebaliknya, pola distribusi utama yang melibatkan tiga rantai pedagang mencatat MPPT sebesar 14,48 persen, sementara distribusi terpanjang yang melibatkan lima perantara meningkatkan MPPT hingga 26,31 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin panjang rantai distribusi, semakin tinggi beban biaya yang ditanggung oleh konsumen akhir.

Tabel 5.3. Pola Margin Perdagangan dan Pengangkutan Total (MPPT)
Di Regional Lampung

Arah Pola	Rantai Pola Distribusi	Margin Pola Terpendek	Margin Pola Rata-Rata	Margin Pola Terpanjang
	Produsen	-	-	-
	Distributor	-	-	6,86%
	Subdistributor	-	-	3,25%
	Pedagang Grosir	-	8,02%	8,02%
	Pedagang Eceran	5,98%	5,98%	5,98%
	MPPT yang diterima oleh Konsumen Akhir	5,98%	14,48%	26,31%

Sumber: BPS, 2022 (diolah)

3) Pengangkutan Gabah Basah ke Luar Lampung dan Dampaknya terhadap Pasokan Lokal

Fenomena pengangkutan gabah basah ke luar daerah menjadi salah satu tantangan utama dalam menjaga ketahanan pasokan beras di Lampung. Beberapa pengusaha besar dari Jawa membeli gabah basah dalam jumlah besar dengan harga yang lebih kompetitif dibandingkan harga pasar lokal, sekaligus menawarkan kepastian pembelian bagi petani. Hal ini menyebabkan Gabah Basah dikirim keluar Lampung sebelum diolah menjadi Gabah Kering Giling (GKG) atau beras. Konsekuensinya, pasokan bahan baku untuk penggilingan di Lampung berkurang, menyebabkan ketidakstabilan harga di pasar lokal dan memperlemah daya saing industri penggilingan dalam provinsi.

4) Rendahnya Kapasitas Penggilingan di Lampung dan Implikasinya terhadap Ketahanan Pangan

Namun demikian, salah satu faktor yang memperburuk ketergantungan Lampung terhadap pasar luar adalah rendahnya kapasitas penggilingan beras di dalam provinsi. Pengusaha di Pulau Jawa memiliki kapasitas penggilingan yang lebih besar dan modern, memungkinkan mereka menawarkan harga lebih menarik bagi petani dibandingkan pengusaha lokal. Hal ini menciptakan ketimpangan dalam rantai pasokan dan menyebabkan pengalihan hasil panen dari

Lampung ke provinsi lain untuk diolah sebelum dijual kembali ke Lampung dengan harga lebih tinggi.

5.2.2 Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Lampung

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dikembangkan sebagai sistem penilaian untuk mengukur tingkat ketahanan pangan suatu wilayah serta faktor-faktor yang memengaruhinya. IKP didasarkan pada tiga aspek utama, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Penyusunannya mengadopsi metode *Global Food Security Index* (GFSI) dengan berbagai penyesuaian sesuai dengan ketersediaan data di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Sebagai indikator strategis, IKP berperan dalam mengevaluasi capaian pembangunan ketahanan pangan, menilai kinerja daerah dalam memenuhi urusan wajib pemerintah, serta membantu merumuskan prioritas pembangunan dan intervensi kebijakan. Selain itu, IKP juga memberikan gambaran perbandingan antarwilayah dalam pencapaian ketahanan pangan.

Tabel 5.4. Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Lampung
2019-2023 Berdasarkan Kab/Kota

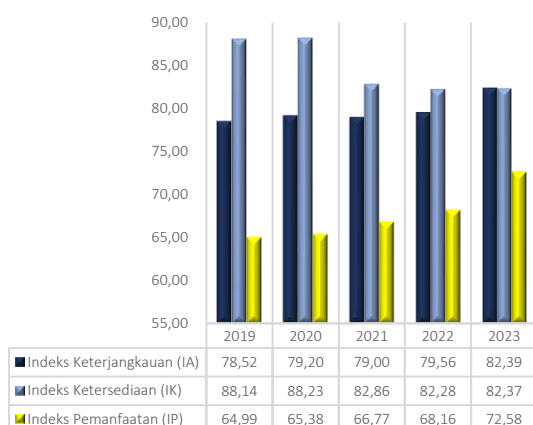
Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023	Tren	Predikat 2023
Tulang Bawang	82,29	82,83	84,58	86,25	87,51		Sangat Tahan
Pringsewu	83,13	83,79	84,05	84,14	87,38		Sangat Tahan
Mesuji	81,78	83,66	85,60	85,62	86,21		Sangat Tahan
Lampung Selatan	78,99	79,23	79,66	81,81	85,46		Sangat Tahan
Lampung Tengah	78,88	79,83	80,16	81,07	84,55		Sangat Tahan
Kota Metro	75,85	76,76	76,74	73,35	83,66		Sangat Tahan
Tulang Bawang Barat	79,28	77,58	78,58	79,84	83,59		Sangat Tahan
Lampung Timur	77,38	79,50	81,20	82,78	83,55		Sangat Tahan
Kota Bandar Lampung	73,49	71,62	74,17	73,41	83,37		Sangat Tahan
Way Kanan	72,37	73,34	74,96	78,34	79,31		Sangat Tahan
Pesawaran	76,74	80,15	78,96	77,86	77,89		Sangat Tahan
Pesisir Barat	71,98	72,93	71,60	71,71	76,32		Sangat Tahan
Lampung Barat	74,62	74,02	70,80	74,34	75,39		Tahan
Lampung Utara	71,35	71,51	73,00	75,00	74,94		Tahan
Tanggamus	76,55	74,67	75,34	73,60	74,19		Tahan
Provinsi Lampung	76,98	77,43	77,96	78,61	81,55		Sangat Tahan

Sumber: Indeks Ketahanan Pangan Bapanas 2019-2023 (diolah)

Dalam lima tahun terakhir, IKP Provinsi Lampung mengalami peningkatan signifikan, dari 76,98 pada tahun 2019 menjadi 81,55 pada tahun 2023, yang menempatkan provinsi ini dalam kategori 'sangat tahan'. Namun, terdapat disparitas antarwilayah, di

mana tiga kabupaten—Lampung Barat, Lampung Utara, dan Tanggamus—memiliki skor di bawah 75,68 pada tahun 2023, yang hanya masuk dalam kategori ‘tahan’. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun ketahanan pangan di tingkat provinsi mengalami perbaikan, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi di tingkat kabupaten/kota.

Grafik 5.2. Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di Provinsi Lampung 2019-2023 Berdasarkan Komponen



Sumber: Indeks Ketahanan Pangan Bapanas 2019-2023 (diolah)

Peningkatan IKP Lampung terutama didorong oleh perbaikan pada Indeks Keterjangkauan (IA) dan Indeks Pemanfaatan (IP), sementara Indeks Ketersediaan (IK) mengalami tren penurunan yang perlu mendapat perhatian dalam kebijakan ketahanan pangan Lampung ke depan.

Indeks Ketersediaan (IK), yang mencerminkan ketersediaan pangan di pasar serta tingkat produksi domestik, turun 5,77 basis poin dalam lima tahun terakhir, dari 88,14 pada 2019 menjadi 82,37 pada 2023. Penurunan ini mencerminkan tantangan dalam menjaga stabilitas produksi dan distribusi pangan, termasuk dampak alih fungsi lahan serta faktor eksternal seperti perubahan iklim.

Sebaliknya, Indeks Keterjangkauan (IA) meningkat 3,87 basis poin dalam periode yang sama, dari 78,52 pada 2019 menjadi 82,39 pada 2023. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan akses ekonomi masyarakat terhadap pangan, yang didukung oleh stabilisasi harga dan efektivitas program bantuan pangan. Hal ini menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam menjaga daya beli

serta mengurangi kesenjangan akses terhadap bahan pangan.

Indeks Pemanfaatan (IP) mengalami kenaikan tertinggi, sebesar 7,59 basis poin, dari 64,99 pada 2019 menjadi 72,58 pada 2023. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan kualitas konsumsi pangan serta akses terhadap layanan kesehatan dan gizi. Namun, meskipun menunjukkan tren positif, IP masih menjadi aspek dengan kontribusi terendah dalam IKP, menandakan masih adanya kendala dalam optimalisasi pemanfaatan pangan di tingkat rumah tangga, seperti keterbatasan akses air bersih, tingginya angka balita stunting, serta keterbatasan infrastruktur kesehatan dan pendidikan yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia.

Meskipun Lampung telah mencapai status ‘sangat tahan’ dalam IKP, beberapa tantangan masih perlu diatasi untuk memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Rendahnya kontribusi Indeks Pemanfaatan (IP) mengindikasikan perlunya intervensi lebih lanjut dalam peningkatan gizi masyarakat serta penyediaan infrastruktur dasar yang mendukung kesehatan dan pendidikan. Optimalisasi pemanfaatan pangan menjadi krusial dalam meningkatkan produktivitas masyarakat serta menurunkan angka stunting di wilayah rentan gizi.

Di sisi lain, penurunan pertumbuhan Indeks Ketersediaan (IK) menunjukkan perlunya kebijakan strategis dalam menjaga produksi pangan di tengah ancaman alih fungsi lahan dan perubahan iklim. Pemerintah daerah perlu memperkuat perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), meningkatkan investasi dalam teknologi pertanian, serta mengoptimalkan sistem logistik pangan guna memastikan stabilitas pasokan.

Dari sisi fiskal, peningkatan alokasi APBN/D untuk ketahanan pangan dapat difokuskan pada penguatan infrastruktur irigasi, pemberian insentif bagi petani untuk meningkatkan produktivitas, serta program diversifikasi pangan guna mengurangi ketergantungan pada beras sebagai sumber utama karbohidrat. Selain itu, sinergi dengan sektor swasta

dalam rantai pasok pangan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi distribusi dan menekan fluktuasi harga pangan.

5.3 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN

Pemerintah telah mengalokasikan belanja yang mendukung ketahanan pangan melalui APBN (mencakup Belanja Kementerian/Lembaga dan Transfer Ke Daerah) dan APBD.

5.3.1 Belanja APBN terkait Ketahanan Pangan di Regional Lampung

Pada 2024, alokasi belanja K/L Terkait Ketahanan Pangan meningkat 0,85 persen (yoy) menjadi Rp675,52 M, dengan porsi terbesar untuk Program Ketahanan Sumber Daya Air (43,55 persen) dan Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas (40,56 persen). Sementara alokasi DAK terkait ketahanan pangan menurun 3,62 persen menjadi Rp213,82 M, yang didominasi oleh bidang jalan, bidang irigasi, dan bidang pertanian (86,02 persen).

5.3.1.1 Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Terkait Ketahanan Pangan di Regional Lampung

Tabel 5.5. Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Terkait Ketahanan Pangan 2023-2024

No	Belanja K/L Terkait Ketahanan Pangan Per Program	2023				2024			
		Pagu (Rp M)	Real (Rp M)	% Capaian	% dari Total BPP	Pagu (Rp M)	Real (Rp M)	% Capaian	% dari Total BPP
1	Program Ketahanan Sumber Daya Air	390,34	322,82	82,70%	3,69%	294,17	284,05	96,56%	2,63%
2	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	139,33	138,28	99,25%	1,32%	273,97	261,75	95,54%	2,45%
3	Program Dukungan Manajemen	88,31	86,95	98,45%	0,83%	68,60	64,54	94,07%	0,61%
4	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	25,71	25,51	99,19%	0,24%	15,03	14,56	96,93%	0,13%
5	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	12,44	12,00	96,42%	0,12%	12,19	10,18	83,49%	0,11%
6	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	13,66	13,49	98,82%	0,13%	11,42	11,01	96,34%	0,10%
7	Program Kualitas Lingkungan Hidup	-	-	0,00%	0,00%	0,13	0,13	97,26%	0,00%
Total Belanja K/L Terkait Ketahanan Pangan		669,80	599,04	89,44%	6,33%	675,52	646,22	95,66%	6,04%

Sumber: Sintesa, 2025 (diolah)

Pemerintah terus meningkatkan alokasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) untuk mendukung ketahanan pangan, meskipun proporsinya terhadap

total Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mengalami penurunan. Pada tahun 2024, anggaran belanja K/L terkait ketahanan pangan mencapai Rp675,52 miliar, mengalami kenaikan sebesar 0,85 persen (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, porsi anggaran ini terhadap BPP menurun dari 6,32 persen pada 2023 menjadi 6,06 persen pada 2024, menunjukkan adanya pergeseran prioritas fiskal.

Sebagian besar belanja ketahanan pangan dialokasikan untuk program strategis yang berfokus pada infrastruktur dan stabilisasi pangan. Program Ketahanan Sumber Daya Air menjadi sektor dengan porsi terbesar, yakni 43,55 persen, disusul oleh Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar 40,56 persen. Secara keseluruhan, kedua program ini menyerap 84,11 persen dari total anggaran, yang mencerminkan fokus pemerintah pada penguatan sistem irigasi, peningkatan produksi pangan, serta pengelolaan distribusi dan harga. Sementara itu, 15,99 persen anggaran lainnya digunakan untuk berbagai program pendukung, termasuk penguatan kelembagaan pangan, peningkatan kapasitas petani dan nelayan, serta penelitian di sektor pertanian dan pangan.

Realisasi belanja K/L terkait ketahanan pangan menunjukkan tren positif, meskipun masih menghadapi tantangan dalam implementasinya. Pada tahun 2024, realisasi anggaran mencapai Rp646,22 miliar atau 95,66 persen dari pagu, meningkat 7,87 persen (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam penyerapan anggaran, namun selisih antara pagu dan realisasi menunjukkan masih adanya kendala administratif dan teknis di lapangan. Selain itu, tantangan ketimpangan dalam distribusi anggaran antardaerah masih perlu mendapat perhatian, terutama bagi daerah dengan keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia dalam mengelola program ketahanan pangan.

Peningkatan efektivitas belanja ketahanan pangan di tingkat regional memerlukan strategi yang lebih

terarah dan berbasis kebutuhan daerah. Optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi langkah strategis dalam mendukung pembangunan infrastruktur pertanian, penguatan rantai pasok, serta peningkatan akses terhadap pangan berkualitas. Selain itu, efisiensi program perlu diperkuat dengan memastikan alokasi anggaran diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap produktivitas pertanian dan ketahanan pangan masyarakat.

5.3.1.2 Belanja Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Non Fisik Terkait Ketahanan Pangan di Regional Lampung

Tabel 5.6. Dana Alokasi Khusus (DAK) Terkait Ketahanan Pangan di Regional Lampung 2023-2024

No	DAK Fisik dan DAK Non Fisik Terkait Ketahanan Pangan	2023				2024			
		Pagu (Rp M)	Real (Rp M)	% Capaian	% dari Total TKD	Pagu (Rp M)	Real (Rp M)	% Capaian	% dari Total TKD
1	DAK Fisik Bidang Jalan	110,35	108,30	98,14%	0,51%	85,47	84,52	98,89%	0,38%
2	DAK Fisik Bidang Irigasi	40,24	35,17	87,40%	0,19%	50,44	49,27	97,68%	0,22%
3	DAK Disik Bidang Pertanian	42,05	36,97	87,92%	0,19%	48,03	45,81	95,38%	0,21%
4	DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan	19,45	18,79	96,62%	0,09%	22,45	10,85	48,33%	0,10%
Total DAK Fisik Ketahanan Pangan		212,09	199,23	93,94%	0,98%	206,39	190,45	92,27%	0,91%
5	DAK Non Fisik - Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	9,77	9,77	100%	0,05%	7,43	7,43	100%	0,03%
Total DAK Non Fisik Ketahanan Pangan		9,77	9,77	100%	0,05%	7,43	7,43	100%	0,03%
Total Penyaluran DAK Ketahanan Pangan		221,86	209,00	94,21%	1,03%	213,82	197,88	92,54%	0,94%

Sumber: Sintesa, 2025 (diolah)

Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) terkait ketahanan pangan pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp213,82 miliar, mengalami sedikit penurunan 3,62 persen (yoy) dibandingkan dengan alokasi tahun sebelumnya. Penyesuaian ini mencerminkan adanya dinamika dalam kebijakan fiskal serta kemungkinan perubahan prioritas belanja daerah dalam mendukung ketahanan pangan. Sementara itu, realisasi DAK Fisik terkait ketahanan pangan pada tahun 2024 mencapai Rp196,16 miliar atau 92,54 persen dari pagu, sedikit lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2023 yang turun 4,69 persen (yoy). Meskipun persentase realisasi tergolong tinggi, tren penurunan nominal ini menunjukkan perlunya penguatan strategi implementasi agar optimalisasi penggunaan anggaran dapat terus ditingkatkan.

Dalam struktur Transfer ke Daerah (TKD) di Lampung, DAK Fisik Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan, yang mencakup sektor pertanian, perikanan, dan peternakan, memiliki porsi 1,03 persen dari total TKD. Sementara itu, DAK Non-Fisik lainnya, khususnya Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian, berkontribusi 0,03 persen dari total TKD. Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pendanaan untuk ketahanan pangan masih difokuskan pada belanja fisik dibandingkan dengan belanja non-fisik seperti penguatan kapasitas petani, penyuluhan, dan pendampingan teknis. Untuk memperkuat efektivitas kebijakan ketahanan pangan dalam jangka panjang, keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi aspek yang penting untuk terus diperhatikan.

Jika dilihat dari struktur DAK Fisik tahun 2024, alokasi terbesar masih diberikan kepada Bidang Jalan, Irigasi, dan Pertanian, yang mencapai 86,02 persen dari total DAK terkait ketahanan pangan. Sementara itu, DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan memperoleh porsi yang lebih kecil, yaitu 10,50 persen, dan DAK Fisik lainnya untuk Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar 3,47 persen. Proporsi ini mencerminkan fokus utama pemerintah dalam memperkuat infrastruktur pertanian dan konektivitas, yang berperan penting dalam meningkatkan produktivitas serta efisiensi distribusi pangan. Namun, dengan potensi sektor kelautan dan perikanan yang cukup besar di wilayah Lampung, optimalisasi alokasi anggaran di sektor ini dapat menjadi pertimbangan dalam kebijakan ketahanan pangan ke depan.

Penyaluran DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan pada tahun 2024 mengalami tantangan tersendiri, salah satunya terkait dengan kesiapan kontrak di tingkat pemerintah daerah (Pemda). Beberapa kendala administratif dan teknis dalam proses perencanaan dan pengadaan proyek dapat berdampak pada keterlambatan realisasi anggaran. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan sinergi

yang lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan serta eksekusi program agar dana yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan peningkatan kesiapan teknis dan perencanaan yang lebih matang, diharapkan implementasi program ketahanan pangan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

5.3.2 Proyek Strategis Nasional (PSN) Terkait Ketahanan Pangan di Regional Lampung

Terdapat tiga Proyek Strategis Nasional (PSN) di Regional Lampung yang memiliki potensi peran krusial dalam mendukung ketahanan pangan Lampung. Ketiga proyek ini bertujuan meningkatkan kapasitas produksi pangan, memperluas akses air bersih, menguatkan infrastruktur pertanian, serta mendukung keberlanjutan sektor agribisnis.

5.3.2.1 Bendungan Way Sekampung

Gambar 5.2. Bendungan Way Sekampung



Sumber: DJPb (Foto: Antara News Lampung)

Bendungan Way Sekampung, yang dibangun dengan anggaran sebesar Rp2,13 triliun dan selesai pada 2021, merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berperan krusial dalam mendukung ketahanan pangan di Lampung.

Terletak di Kabupaten Pringsewu, bendungan ini memanfaatkan alur Sungai Sekampung untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui penyediaan air irigasi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Dengan cakupan Daerah Irigasi (D.I) Sekampung Sistem mencapai 55.373 hektare, keberadaan bendungan ini memungkinkan

peningkatan intensitas tanam dari 200% (pola tanam padi-padi) menjadi 270% (pola tanam padi-padi-palawija). Peningkatan ini tidak hanya berdampak pada kenaikan produksi pangan, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan dengan memastikan pasokan komoditas pertanian tetap stabil sepanjang tahun.

Selain bertujuan meningkatkan produktivitas pertanian, Bendungan Way Sekampung juga mendukung ekspansi lahan pertanian melalui pengembangan Daerah Irigasi Rumbia Extension, yang berpotensi memperluas cakupan irigasi hingga 17.334 hektare. Ekstensifikasi ini memberikan peluang bagi petani untuk memanfaatkan lahan lebih optimal dengan diversifikasi komoditas, sehingga tidak hanya bergantung pada padi, tetapi juga palawija dan hortikultura. Dengan distribusi air irigasi yang lebih merata, risiko gagal panen akibat kekeringan dapat diminimalkan, sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya pertanian. Stabilitas produksi yang lebih baik ini menjadi faktor kunci dalam menjaga harga pangan tetap terkendali serta memperkuat daya saing sektor pertanian di Lampung.

Di samping potensi manfaat di sektor pertanian, Bendungan Way Sekampung juga memiliki potensi dalam mendukung penyediaan energi terbarukan melalui Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) berkapasitas 5,4 MW. Keberadaan pembangkit ini memberikan manfaat ganda: mendukung kebutuhan energi di wilayah sekitar serta memperkuat keberlanjutan infrastruktur pertanian. Dengan pasokan listrik yang lebih stabil, adopsi teknologi pertanian berbasis digital, seperti sistem irigasi otomatis dan mekanisasi pertanian, dapat lebih mudah diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Selain itu, bendungan ini juga berfungsi sebagai pengendali banjir dengan total debit reduksi sebesar 3.546 m³/detik, sehingga mampu mengurangi risiko banjir di wilayah hilir yang selama ini berdampak pada lahan pertanian dan infrastruktur pertanian lainnya.

Sebagai bagian dari infrastruktur strategis, Bendungan Way Sekampung juga berkontribusi pada penyediaan air baku sebesar 2,73 liter/detik untuk kebutuhan domestik, industri, dan sektor lainnya. Ketersediaan air baku yang memadai menjadi elemen penting dalam mendukung pertumbuhan industri pengolahan hasil pertanian serta sektor lain yang bergantung pada stabilitas pasokan air. Dengan demikian, keberadaan bendungan ini bertujuan menjadi katalisator bagi ketahanan pangan regional yang berkelanjutan.

5.3.2.2 Bendungan Margatiga

Gambar 5.3. Bendungan Margatiga



Sumber: DJPb (Foto: CNBC Indonesia)

Bendungan Margatiga dibangun dengan total anggaran sebesar Rp886,15 miliar, yang dialokasikan melalui APBN dengan skema multi-years contract selama periode 2017–2022. Terletak di Desa Negeri Jemanten dan Desa Trisinar, Kecamatan Margatiga, Kabupaten Lampung Timur, bendungan ini berfungsi sebagai infrastruktur vital dalam mendukung ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya air di wilayah Lampung.

Salah satu tujuan utama pembangunan Bendungan Margatiga adalah penyediaan air irigasi bagi Daerah Irigasi Jabung yang mencakup 16.588 hektare lahan pertanian. Daerah ini terbagi menjadi dua wilayah utama, yaitu Jabung Kiri seluas 5.638 hektare di Kabupaten Lampung Timur (meliputi Rawa Sragi II dan Rawa Sragi III) dan Jabung Kanan seluas 10.950 hektare di Kabupaten Lampung Selatan (meliputi Rawa Sragi I dan Rawa Piasang). Dengan sistem irigasi yang lebih stabil, petani di kedua kabupaten

dapat meningkatkan produktivitas pertanian, mengurangi ketergantungan terhadap curah hujan, serta menerapkan pola tanam yang lebih intensif dan beragam.

Selain mendukung sektor pertanian, bendungan ini juga berfungsi sebagai penyedia air baku dengan kapasitas 0,83 m³/detik. Ketersediaan air baku ini krusial bagi kebutuhan domestik, industri, serta berbagai aktivitas produktif lainnya. Stabilitas pasokan air dapat mendukung pertumbuhan sektor-sektor strategis, seperti industri pengolahan hasil pertanian dan peternakan, serta memperkuat ketahanan pangan di Lampung Timur dan Lampung Selatan. Dengan demikian, bendungan ini tidak hanya berdampak pada sektor pertanian, tetapi juga berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi daerah secara lebih luas.

Fungsi lain yang tidak kalah penting adalah perannya dalam pengendalian banjir. Bendungan Margatiga memiliki kapasitas mereduksi aliran banjir hingga 83,1 m³/detik. Dengan adanya infrastruktur ini, risiko banjir yang sering melanda wilayah hilir dapat diminimalkan, sehingga lahan pertanian lebih terlindungi dari potensi kerusakan akibat genangan air. Pengendalian banjir yang efektif juga berkontribusi terhadap stabilitas produksi pertanian dan mengurangi risiko kerugian ekonomi akibat gagal panen. Selain itu, perlindungan terhadap pemukiman warga dari bencana banjir turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Di luar manfaat utama dalam sektor pertanian dan pengelolaan air, Bendungan Margatiga juga memiliki potensi sebagai kawasan konservasi sumber daya air dan destinasi pariwisata berbasis alam. Ekosistem perairan yang terjaga dapat mendukung keseimbangan lingkungan dan keanekaragaman hayati di sekitarnya. Selain itu, pengembangan sektor pariwisata, seperti wisata air, ekowisata, dan rekreasi perairan, dapat menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat lokal. Jika dikelola dengan baik, potensi ini dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah,

serta memberikan nilai tambah ekonomi secara berkelanjutan.

Meskipun memiliki potensi besar, implementasi dan optimalisasi Bendungan Margatiga menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek teknis, administratif, dan sosial. Awalnya direncanakan untuk diresmikan pada 2023, bendungan ini baru dapat beroperasi secara resmi pada 26 Agustus 2024. Keterlambatan ini menunjukkan adanya hambatan dalam pembangunan infrastruktur strategis, yang memerlukan evaluasi terhadap perencanaan, koordinasi, serta mekanisme implementasi proyek.

Beberapa faktor utama yang menyebabkan keterlambatan ini antara lain:

- 1) Terdapat tantangan pembebasan lahan. Hingga saat peresmian, sebanyak 1.774 bidang tanah milik warga masih dalam proses ganti rugi. Proses pembebasan lahan yang tidak tuntas menghambat penyelesaian konstruksi dan operasional bendungan. Selain itu, keterbatasan anggaran ganti rugi lahan, serta kasus korupsi dalam proses pembebasan lahan (yang telah ditindak secara hukum) semakin menyebabkan penundaan optimalisasi.
- 2) Terdapat kendala teknis dan administratif. Faktor teknis, seperti kondisi geografis yang kompleks, kendala dalam pengadaan material, serta tantangan desain konstruksi, turut menyebabkan keterlambatan proyek.
- 3) Keterlambatan peresmian berdampak pada penundaan optimalisasi fungsi bendungan, terutama dalam irigasi, pasokan air baku, dan pengendalian banjir. Hal ini menghambat pencapaian target ketahanan pangan yang diharapkan serta menunda manfaat ekonomi bagi masyarakat yang bergantung pada suplai air dari bendungan.

5.3.2.3 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bandar Lampung

Gambar 5.4. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bandar Lampung



Sumber: PDAM Way Rilau

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bandar Lampung merupakan proyek strategis dengan nilai investasi sebesar Rp1,30 triliun yang bertujuan untuk menyediakan akses air minum yang layak dan berkelanjutan bagi masyarakat. Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung ketahanan pangan melalui ketersediaan air yang memadai bagi sektor domestik dan produktif. SPAM Bandar Lampung dikembangkan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang melibatkan PDAM Way Rilau, PT Adhya Tirta Lampung (ATL), dan Kementerian PUPR sejak 2018. Skema ini memungkinkan pembangunan infrastruktur air minum secara efisien dengan dukungan investasi dari berbagai pihak.

Pembangunan SPAM terdiri dari beberapa komponen utama, yakni unit air baku, unit produksi, serta jaringan distribusi perpompaan. Infrastruktur ini mulai dibangun pada 2018 dan selesai pada 2020, dengan sistem yang beroperasi sejak 14 Agustus 2020. Keberadaan SPAM ini meningkatkan kapasitas layanan air bersih di Kota Bandar Lampung, mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sumber air yang tidak terjamin kualitasnya, serta mendorong pola hidup sehat. Selain itu, aspek keberlanjutan sistem ini juga menjadi faktor penting dalam mendukung ketahanan pangan, karena air bersih merupakan

komponen esensial dalam pengolahan dan konsumsi pangan yang aman.

Dari sisi distribusi, proyek ini telah membangun jaringan pipa utama dan sekunder sepanjang 72.398 meter, dengan capaian output hingga 28 Februari 2023 mencapai 100 persen. Namun, tantangan masih dihadapi dalam hal cakupan layanan, khususnya pemasangan sambungan rumah (SR). Hingga 2022, jumlah SR yang terpasang mencapai 7.484 unit dari target 60.000 unit, mencerminkan masih terdapat kesenjangan signifikan dalam akses air minum bagi masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah mengalokasikan tambahan dana melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) pada 2023 guna mempercepat pemasangan SR.

Dalam implementasinya, proyek KPBU SPAM Bandar Lampung menghadapi berbagai tantangan (Panel Ahli KPBU Indonesia, 2023), antara lain:

- 1) Dari aspek kelembagaan, dinamika perubahan kepemimpinan di tingkat pemerintah daerah dan Perumda Way Rilau menghambat konsistensi kebijakan dan eksekusi proyek. Sejak 2015, terjadi tiga kali pergantian wali kota serta perubahan dalam struktur manajemen Perumda, yang berdampak pada kepastian dan keberlanjutan proyek. Kondisi ini memberikan tantangan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam memenuhi kewajiban mereka sesuai perjanjian KPBU. Selain itu, kasus korupsi pada tahun 2019 oleh oknum PDAM Way Rilau juga menggerus tata kelola dalam pengadaan dan pemasangan jaringan pipa distribusi sistem pompa SPAM.
- 2) Dari aspek tarif dan pelayanan, kemampuan membayar masyarakat belum sejalan dengan penerapan tarif yang ideal, sehingga realisasi konsumsi air bersih masih rendah. Pada 2023, konsumsi domestik hanya mencapai 16,7 m³ per pelanggan per bulan, jauh di bawah standar 25–27 m³. Keterbatasan kapasitas BUMD dalam pemetaan pelanggan, pemasaran, serta

penagihan juga berdampak pada rendahnya realisasi SR, yang hingga 2023 baru mencapai 8.801 unit atau sekitar 14,6 persen dari target. Diperlukan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan cakupan layanan dan optimalisasi tarif berbasis daya beli masyarakat.

- 3) Dari aspek dukungan APBD, Pemerintah Kota Bandar Lampung berkomitmen menyediakan Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp150 miliar, namun realisasinya baru mencapai 38,11 persen akibat *refocusing* anggaran selama pandemi COVID-19. Minimnya alokasi anggaran ini berdampak langsung pada pembangunan jaringan perpipaan.

Tantangan dalam proyek KPBU SPAM Bandar Lampung berimplikasi terhadap ketahanan pangan, terutama dalam konteks urbanisasi dan kebutuhan air minum bersih bagi masyarakat perkotaan. Meskipun Bandar Lampung bukan wilayah pertanian utama, keterbatasan pasokan air dapat memengaruhi sektor agribisnis perkotaan, seperti hidroponik, urban farming, dan industri pengolahan makanan yang bergantung pada suplai air stabil. Selain itu, akses air bersih yang terbatas bagi rumah tangga berpenghasilan rendah dapat menurunkan kualitas hidup, memengaruhi kesehatan, serta daya beli masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada konsumsi pangan bergizi.

5.3.3 Belanja APBD Lampung terkait Ketahanan Pangan

Pada tahun 2024, total belanja APBD yang dialokasikan untuk ketahanan pangan di Lampung tercatat sebesar Rp 152,07 miliar, mengalami penurunan signifikan sebesar 43,46 persen dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya, yang mencapai Rp 268,97 miliar. Penurunan ini mencerminkan tantangan fiskal yang dihadapi oleh pemerintah daerah, dengan sebagian besar alokasi anggaran untuk sektor pertanian dan perikanan mengalami pemotongan yang cukup dalam. Kondisi ini berpotensi menghambat pelaksanaan berbagai program ketahanan pangan

yang krusial, seperti pengembangan infrastruktur irigasi, penyediaan sarana produksi pertanian, serta pemberdayaan petani dan peternak, yang pada gilirannya bisa memperburuk ketahanan pangan di tingkat regional.

Tabel 5.7. Realisasi APBD Lampung 2023-2024 Terkait Ketahanan Pangan Per Pemda

Pemda	Real 2023 (Rp M)	Real 2024 (Rp M)	Growth (%)
Provinsi Lampung	127,10	53,79	-57,67%
Kab. Lampung Selatan	26,79	22,50	-16,00%
Kab. Lampung Tengah	13,40	19,05	42,14%
Kab. Pesawaran	6,07	8,95	47,55%
Kab. Tanggamus	1,76	7,55	326,99%
Kab. Mesuji	9,90	6,47	-34,61%
Kab. Lampung Barat	5,86	6,20	5,71%
Kab. Pringsewu	4,79	5,51	15,05%
Kab. Tulang Bawang	7,48	5,05	-32,42%
Kab. Way Kanan	5,73	4,51	-21,25%
Kab. Lampung Timur	37,39	3,31	-91,12%
Kab. Pesisir Barat	4,79	2,37	-50,54%
Kab. Tulang Bawang Barat	1,85	2,23	20,82%
Kota Metro	8,02	2,23	-72,12%
Kota Bandar Lampung	2,18	1,35	-37,99%
Kab. Lampung Utara	5,78	0,90	-84,29%
Total	268,96	152,07	-43,46%

Sumber: GFS, SIKD, 2025 (diolah)

Namun, meskipun terdapat penurunan belanja secara keseluruhan, beberapa daerah menunjukkan tren yang berbeda. Kabupaten Tanggamus mencatatkan kenaikan anggaran yang sangat signifikan sebesar 326,99 persen, diikuti oleh kabupaten-kabupaten lain seperti Pesawaran (47,55 persen) dan Lampung Tengah (42,14 persen). Peningkatan belanja di daerah-daerah ini menunjukkan adanya perhatian yang lebih besar terhadap penguatan ketahanan pangan, yang kemungkinan terkait dengan investasi pada pengelolaan irigasi, diversifikasi komoditas pertanian, serta peningkatan kapasitas petani.

Di sisi lain, beberapa daerah seperti Lampung Timur (-91,12 persen), Lampung Utara (-84,29 persen), dan Kota Metro (-72,12 persen) mengalami penurunan belanja yang tajam. Penurunan anggaran yang signifikan ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam prioritas alokasi dana yang dapat mengancam efektivitas program ketahanan pangan di wilayah tersebut.

Tagging belanja APBD dilakukan untuk mengidentifikasi alokasi dana pada urusan bidang pemerintahan dan program yang mendukung upaya ketahanan pangan, seperti di sektor pertanian, perikanan, pangan, dan perdagangan. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar program ketahanan pangan di Lampung mengalami penurunan anggaran yang signifikan. Penurunan terbesar terjadi pada program-program yang secara langsung mendukung ketahanan pangan, seperti penyuluhan pertanian yang turun 59,71 persen, pengelolaan perikanan tangkap yang mengalami penurunan 65,35 persen, serta penanganan kerawanan pangan yang berkurang drastis sebesar 67,08 persen.

Tabel 5.8. Realisasi APBD Lampung 2023-2024 Terkait Ketahanan Pangan Per Program

Bidang Urusan dan Program APBD	Real 2023 (Rp M)	Real 2024 (Rp M)	Growth (%)
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	201,29	111,88	-44,42%
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	86,61	65,04	-24,90%
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	62,94	21,44	-65,94%
Program Penyuluhan Pertanian	34,27	13,81	-59,70%
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	9,19	6,42	-30,14%
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	7,19	2,88	-59,94%
Program Perizinan Usaha Pertanian	1,09	2,30	111,01%
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	46,86	24,56	-47,59%
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	17,54	12,29	-29,93%
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	19,43	6,73	-65,36%
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	6,45	4,40	-31,78%
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	2,07	0,71	-65,70%
Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil	1,37	0,43	-68,61%
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	13,98	10,50	-24,89%
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	8,07	7,86	-2,60%
Program Pengawasan Keamanan Pangan	1,68	1,05	-37,50%
Program Penanganan Kerawanan Pangan	3,14	1,03	-67,20%
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	1,08	0,55	-49,07%
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	6,84	5,13	-25,00%
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	6,84	5,13	-25,00%
Total	268,97	152,07	-43,46%

Sumber: GFS, SIKD, 2025 (diolah)

Di sektor pangan, alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat turun 2,65 persen, dan Program Pengawasan Keamanan Pangan mengalami penurunan 37,68 persen. Sementara itu, sektor pertanian mencatatkan penurunan yang cukup besar pada belanja untuk penyediaan sarana dan prasarana pertanian sebesar 24,91 persen. Penurunan anggaran ini dapat berdampak pada kemampuan daerah untuk mengelola dan mengembangkan sektor pertanian serta perikanan yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan.

5.4 ANALISIS KETERKAITAN ANTARA KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN DENGAN PENCAPAIAN INDIKATOR-INDIKATOR KETAHANAN PANGAN

Reviu kebijakan ketahanan pangan di Lampung menjadi aspek krusial dalam menilai efektivitas program yang telah diterapkan, terutama dalam memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan secara berkelanjutan. Evaluasi diperlukan untuk melihat apakah kebijakan tersebut telah memberikan dampak optimal sesuai dengan kebutuhan daerah.

5.4.1 Analisis Dampak Bendungan Way Sekampung terhadap Akses Air Bersih dan Produktivitas Pangan

Bendungan Way Sekampung telah dibangun pada tahun 2021 dengan tujuan untuk mendukung ketahanan pangan di wilayah sekitarnya. Terletak di alur Sungai Sekampung, infrastruktur ini mengoptimalkan irigasi dengan cakupan lahan yang luas, yakni 55.373 hektar di D.I Sekampung dan 17.334 hektar di Daerah Irigasi Rumbia *Extension*. Selain itu, penyediaan air baku sebesar 2,73 liter/detik menjadi komponen vital dalam menjamin ketersediaan air bersih berkualitas. Hal ini sangat penting mengingat pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan perubahan iklim yang meningkatkan permintaan air bersih, sehingga keberadaan bendungan ini selain bertujuan sebagai pengendali banjir, juga bertujuan sebagai sumber utama dalam menunjang produktivitas pertanian dan ketahanan pangan di daerah sekitarnya.

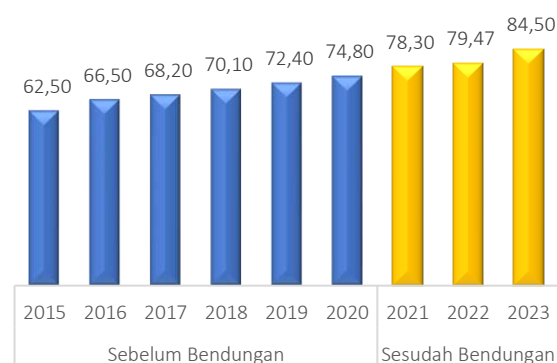
Dengan demikian, subbab ini akan menganalisis dampak dari pembangunan Bendungan Way Sekampung terhadap kondisi ketahanan pangan di regional Lampung yang relevan.

5.4.1.1 Analisis Welch's T-test atas Akses Air Sebelum dan Sesudah Pembangunan Bendungan Way Sekampung

Terjadi tren peningkatan akses air bersih di Lampung dalam kurun waktu 2015 hingga 2023. Sebelum pembangunan Bendungan Way

Sekampung, persentase rumah tangga yang memiliki akses air bersih telah meningkat dari 62,50 persen di tahun 2015 menjadi 78,30 persen di tahun 2021. Setelah bendungan dioperasikan, terlihat peningkatan lebih tajam dari 79,47 persen di tahun 2022 menjadi 84,50 persen di tahun 2023.

Grafik 5.3. Tren Akses Air Bersih Sebelum dan Sesudah Pembangunan Bendungan Way Sekampung (Dalam persen)



Sumber: Susenas BPS 2015 s.d 2023 (diolah)

Selanjutnya, uji statistik digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan signifikan dalam akses air bersih antara periode sebelum dan sesudah pembangunan Bendungan Way Sekampung di Regional Lampung. Dalam pengujian ini, uji statistik *Welch's T-test* dipilih karena kemampuannya mengakomodasi perbedaan varians antar kelompok data, sehingga memberikan analisis yang lebih akurat terhadap dampak pembangunan bendungan tersebut. Metode ini memungkinkan untuk mengevaluasi secara statistik atas perbedaan rata-rata akses air bersih sebelum dan sesudah pelaksanaan proyek infrastruktur.

Tabel 5.9. Hasil Uji Statistik Welch's T-test atas Dampak Sebelum dan Sesudah Pembangunan Bendungan Way Sekampung Terhadap Akses Air Bersih

Aspek	Hasil Uji Statistik
Hipotesis (H0)	H0 ditolak ($p\text{-value} < \alpha$). Rata-rata populasi Sebelum berbeda signifikan dengan Sesudah
P-value	P-value = 0,002162. Peluang kesalahan tipe I kecil (0,22%). Menolak H0, mendukung H1.
Statistik Uji (T)	T = -3,8469, di luar rentang penerimaan 95% (-2,1692 : 2,1692).
Selisih Rata-rata ($x_1 - x_2$)	Selisih rata-rata = -25,59, di luar rentang penerimaan 95% (-14,4296 : 14,4296).
Ukuran Efek (d)	Efek besar ($d = 1,26$), menunjukkan perbedaan signifikan secara praktis.
Outlier	Tidak ada outlier (metode Tukey Fence, $k=1,5$).
	Data Sebelum Bendungan normal ($p\text{-value} = 0,0904$).

Aspek	Hasil Uji Statistik
Asumsi Normalitas	Data Sesudah Bendungan normal (p-value = 0,6).
Uji Power	Power rendah (0,1952), namun H0 tetap ditolak.

Sumber: Stat Welch's T-test (diolah)

Berdasarkan hasil uji statistik Welch's T-test, dapat disimpulkan secara tegas bahwa pembangunan Bendungan Way Sekampung memberikan dampak signifikan terhadap akses air bersih di Regional Lampung. Kesimpulan ini ditunjukkan oleh p-value sebesar 0,002162 yang jauh lebih kecil dari tingkat signifikansi, sehingga hipotesis nol (H0) ditolak.

Selain itu, nilai statistik uji T sebesar -3,8469 yang berada di luar rentang penerimaan 95 persen (-2,1692 hingga 2,1692) serta selisih rata-rata -25,59 yang tidak termasuk dalam rentang penerimaan (-14,4296 hingga 14,4296) semakin menegaskan perbedaan yang nyata dan signifikan antara periode sebelum dan sesudah pembangunan. Ukuran efek yang besar ($d = 1,26$) juga menunjukkan bahwa perbedaan tersebut bermakna secara praktis, sehingga dapat dipastikan bahwa pembangunan bendungan memiliki kontribusi positif yang substansial terhadap peningkatan akses air bersih.

Lebih lanjut, analisis asumsi normalitas dan keandalan data mendukung kesimpulan tersebut. Uji normalitas menghasilkan p-value 0,0904 untuk data sebelum pembangunan dan 0,6 untuk data sesudah pembangunan, yang mengindikasikan bahwa kedua dataset memenuhi kriteria normalitas.

Walaupun uji *power* menunjukkan nilai rendah (0,1952), hal ini tidak mempengaruhi validitas penolakan hipotesis nol. Tidak ditemukannya outlier berdasarkan metode Tukey Fence ($k=1,5$) menambah kepercayaan terhadap hasil analisis ini.

Dengan demikian, Bendungan Way Sekampung berdampak dan berperan dalam meningkatkan ketahanan pangan regional Lampung melalui peningkatan akses terhadap air bersih.

5.4.1.2 Analisis Propensity Score Matching (PSM) Dampak Bendungan Way Sekampung Terhadap Kualitas Air Bersih

Analisis Propensity Score Matching (PSM) bertujuan untuk mengukur secara empiris dampak pembangunan Bendungan Way Sekampung terhadap kualitas air bersih bagi masyarakat sekitar dengan variabel kontrol yang lebih luas. Penelitian menguji dua hipotesis utama, yaitu H0 yang menyatakan tidak terdapat peningkatan kualitas air dan kesejahteraan masyarakat, serta H1 yang menyatakan adanya peningkatan signifikan pasca pembangunan bendungan. Variabel kontrol yang digunakan, antara lain partisipasi KIP, jumlah anggota rumah tangga, pemanfaatan PKH, dan luas lantai rumah, dimaksudkan untuk memastikan bahwa perbandingan antara kelompok terdampak (*treatment group*) dan kelompok tidak terdampak (*control group*) bebas dari bias seleksi.

Gambar 5.5. Uji T Kualitas Air Bersih

```
> t: Pengujian t-test */
```

Two-sample t test with equal variances

Group	Obs	Mean	Std. Err.	Std. Dev.	[95% Conf. Interval]	
0	9,733	24.83808	.0112409	1.108982	24.81604	24.86011
1	700	24.90857	.0350804	.9281395	24.8397	24.97745
combined	10,433	24.84281	.0107486	1.097884	24.82174	24.86388
diff		-.0704948	.0429589		-.1547025	.0137129

diff = mean(0) - mean(1) t = -1.6410
Ho: diff = 0 degrees of freedom = 10431

Ha: diff < 0 Ha: diff != 0 Ha: diff > 0
Pr(T < t) = 0.0504 Pr(|T| > |t|) = 0.1008 Pr(T > t) = 0.9496

Sumber: Susenas BPS 2015 s.d 2023; Azzah & Hasibuan, 2024; STATA

Metode penelitian yang digunakan adalah Propensity Score Matching (PSM), yang mengurangi bias seleksi dengan membandingkan kelompok yang mendapatkan perlakuan langsung dengan kelompok kontrol. Dalam implementasinya, dua teknik matching diterapkan, yakni Kernel Matching dan Nearest Neighbor Matching. Teknik Kernel Matching menghitung rata-rata hasil kelompok kontrol dengan memberikan bobot berdasarkan skor kecenderungan, sementara Nearest Neighbor Matching memilih individu kontrol dengan skor kecenderungan yang paling mendekati kelompok perlakuan. Selanjutnya, uji T (T-Test) digunakan untuk mengukur signifikansi perbedaan rata-rata

kualitas air antara kedua kelompok, dengan validasi keseimbangan variabel menggunakan pstest.

Gambar 5.6. Hasil Kernel Matching

```

psmatch2 $treat $match_covars, out($outcome) kernel bwidth(0.06)

```

Probit regression Number of obs = 10,433
 LR chi2(4) = 17.52
 Prob > chi2 = 0.0015
 Log likelihood = -2058.3663 Pseudo R2 = 0.0034

treatment	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]
memperoleh_KIP	.4083156	.1104686	3.70	0.000	-.1918012 .62483
household_size	.014248	.0140035	1.02	0.309	-.0131984 .0416944
menerima_PKH	-.0416208	.0472068	-0.88	0.378	-.1341444 .0509029
luas_lantai	-.0003402	.0004274	-0.80	0.426	-.0011779 .0004976
_cons	-1.903146	.1209992	-15.73	0.000	-2.1403 -1.665992

Variable	Sample	Treated	Controls	Difference	S.E.	T-stat
outcome	Unmatched	24.9085714	24.8380766	.070494782	.042958927	1.64
	ATT	24.9085714	24.8408195	.06775194	.036852683	1.84

Note: S.E. does not take into account that the propensity score is estimated.

Sumber: Susenas BPS 2015 s.d 2023; Azzah & Hasibuan, 2024; STATA

Hasil dari teknik Kernel Matching menunjukkan Average Treatment on the Treated (ATT) sebesar 6,77 persen poin dengan T-statistic sebesar 1,84, yang signifikan pada tingkat keyakinan 10%. Hasil ini mengindikasikan bahwa kelompok yang terdampak mengalami peningkatan kualitas air rumah tangga yang lebih baik secara statistik dibandingkan dengan kelompok kontrol. Angka T-statistic yang mendekati ambang signifikansi memberikan bukti bahwa perbedaan rata-rata tersebut tidak terjadi secara kebetulan, meskipun peningkatannya terbilang moderat.

Gambar 5.7. Hasil Nearest Neighbor Matching

```

psmatch2 $treat $match_covars, out($outcome) neighbor(1)

```

Probit regression Number of obs = 10,433
 LR chi2(4) = 17.52
 Prob > chi2 = 0.0015
 Log likelihood = -2058.3663 Pseudo R2 = 0.0034

treatment	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]
memperoleh_KIP	.4083156	.1104686	3.70	0.000	-.1918012 .62483
household_size	.014248	.0140035	1.02	0.309	-.0131984 .0416944
menerima_PKH	-.0416208	.0472068	-0.88	0.378	-.1341444 .0509029
luas_lantai	-.0003402	.0004274	-0.80	0.426	-.0011779 .0004976
_cons	-1.903146	.1209992	-15.73	0.000	-2.1403 -1.665992

Variable	Sample	Treated	Controls	Difference	S.E.	T-stat
outcome	Unmatched	24.9085714	24.8380766	.070494782	.042958927	1.64
	ATT	24.9085714	24.7142857	.194285714	.096543173	2.01

Note: S.E. does not take into account that the propensity score is estimated.

Sumber: Susenas BPS 2015 s.d 2023; Azzah & Hasibuan, 2024; STATA

Sementara itu, hasil Nearest Neighbor Matching mengungkapkan peningkatan yang lebih besar dengan ATT mencapai 19,42 persen poin dan T-statistic sebesar 2,01, juga signifikan pada tingkat keyakinan 10 persen. Perbedaan yang lebih

mencolok ini menunjukkan bahwa apabila hanya individu kontrol dengan skor kecenderungan terdekat yang dibandingkan, efek positif pembangunan bendungan terhadap kualitas air menjadi lebih terlihat. Kedua teknik matching ini, meskipun menghasilkan besaran peningkatan yang berbeda, sama-sama menunjukkan adanya dampak positif yang signifikan.

Secara keseluruhan, hasil uji statistik PSM memperkuat argumen bahwa pembangunan Bendungan Way Sekampung telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas air rumah tangga. Temuan signifikan dengan peningkatan antara 6,77 hingga 19,42 persen tidak hanya mengindikasikan manfaat langsung dalam peningkatan akses air bersih namun juga potensi dampak lanjutan terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat terdampak.

5.4.1.3 Analisis Welch's T-test atas Produktivitas Pertanian Sebelum dan Sesudah Irigasi Bendungan Way Sekampung

Grafik 5.4. Tren Produktivitas Pertanian Sebelum dan Sesudah Irigasi Bendungan Way Sekampung (Dalam Ton/Ha)



Sumber: Susenas BPS 2015 s.d 2023 (diolah)

Sebelum bendungan dioperasikan, terlihat adanya fluktuasi pada produktivitas pertanian antara tahun 2015 hingga 2020, dengan angka tertinggi mencapai 5,29 ton/ha dan terendah 4,63 ton/ha. Setelah bendungan beroperasi dan menyediakan irigasi, terlihat peningkatan yang lebih tajam pada tahun 2021 dengan produktivitas mencapai 5,07 ton/ha, dan terus meningkat hingga 5,21 ton/ha di tahun 2023. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa ketersediaan air irigasi yang lebih baik dan terjamin dari Bendungan Way Sekampung memberikan dampak positif peningkatan produktivitas pertanian.

Tabel 5.10. Hasil Uji Statistik Welch's T-test atas Dampak Sebelum dan Sesudah Pembangunan Bendungan Way Sekampung Terhadap Produktivitas Pertanian

Aspek	Hasil Uji Statistik
Hipotesis (H0)	H0 tidak dapat ditolak ($p\text{-value} > \alpha$). Rata-rata Sebelum Bendungan dianggap sama dengan Sesudah Bendungan.
P-value	$P\text{-value} = 0,2322$ (23,22%). Peluang kesalahan tipe I terlalu tinggi, mendukung H0, menolak H1.
Statistik Uji (T)	$T = -1,3209$, berada dalam rentang penerimaan 95% (-2,4151 : 2,4151).
Selisih Rata-rata ($x_1 - x_2$)	Selisih rata-rata = -0,15, berada dalam rentang penerimaan 95% (-0,2743 : 0,2743).
Outlier	Tidak ditemukan outlier (metode Tukey Fence, $k=1,5$).
Asumsi Normalitas	- Data Sebelum Bendungan normal ($p\text{-value} = 0,455$).
	- Data Sesudah Bendungan normal ($p\text{-value} = 0,7$).

Sumber: Stat Welch's T-test (diolah)

Berdasarkan hasil uji statistik Welch's T-test, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan dalam produktivitas pertanian antara periode sebelum dan sesudah pembangunan Bendungan Way Sekampung. Hal ini terlihat dari $p\text{-value}$ sebesar 0,2322 yang jauh lebih besar dari tingkat signifikansi yang diterapkan, sehingga hipotesis nol (H_0) tidak dapat ditolak. Statistik uji T sebesar -1,3209 yang berada dalam rentang penerimaan 95% (-2,4151 hingga 2,4151) serta selisih rata-rata sebesar -0,15 yang juga berada dalam batas rentang penerimaan, semakin menegaskan bahwa peningkatan produktivitas tidak signifikan secara statistik.

Keandalan data yang digunakan dalam analisis ini juga telah terverifikasi melalui uji asumsi normalitas, dengan $p\text{-value}$ masing-masing 0,455 untuk data sebelum bendungan dan 0,7 untuk data sesudah bendungan, yang mengindikasikan distribusi data yang normal.

Selain itu, tidak ditemukan *outlier* berdasarkan metode Tukey Fence ($k=1,5$), sehingga data yang digunakan dapat dianggap representatif dan bebas dari pengaruh ekstrem yang dapat mengganggu hasil analisis.

Terdapat sejumlah faktor struktural yang perlu dipertimbangkan untuk interpretasi lebih mendalam, beberapa hasil pendalaman menunjukkan tantangan optimalisasi dampak infrastruktur tersebut terhadap produktivitas

pertanian di daerah cakupan Bendungan Way Sekampung, yaitu antara lain:

- 1) Masih terdapat penguasaan lahan yang masih dilakukan secara sepihak oleh warga di hulu, yang mengakibatkan sekitar 70 persen lahan di Pringsewu hanya dapat melakukan panen sekali setahun. Kondisi ini secara inheren membatasi frekuensi dan potensi produksi pertanian, sehingga meskipun infrastruktur bendungan telah dibangun, laju produktivitas pertanian tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan.
- 2) Kondisi saluran irigasi di Provinsi Lampung yang mengalami kerusakan mencapai 37 persen pada tahun 2024 juga turut menjadi faktor penghambat. Tingginya sedimentasi yang tidak dikeruk menyebabkan saluran irigasi dalam kondisi tidak optimal, sehingga mengurangi efisiensi distribusi air ke lahan pertanian.

Dengan demikian, permasalahan penguasaan lahan dan kerusakan saluran irigasi menjadi tantangan utama yang harus diatasi untuk mengoptimalkan manfaat infrastruktur tersebut dan meningkatkan produktivitas pertanian secara keseluruhan.

5.4.2 Analisis Dampak Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap Indeks Pemanfaatan Pangan dan Prevalensi Stunting di Regional Lampung

Ketahanan pangan merupakan salah satu prioritas kebijakan nasional yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan yang mencukupi bagi seluruh masyarakat. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin dengan memberikan bantuan dalam bentuk saldo elektronik yang dapat digunakan untuk membeli bahan pangan di e-warong. Program ini memiliki implikasi fiskal yang signifikan serta berperan dalam meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan mengurangi masalah gizi buruk, termasuk stunting. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap Indeks

Pemanfaatan Pangan (IPP) dan Prevalensi Stunting (PST) di Regional Lampung pada periode 2019-2023 dengan pendekatan ekonometrika berbasis regresi log-linear, menggunakan data jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT sebagai variabel independen utama, dengan variabel dependen yaitu IPP dan PST dalam model regresi terpisah.

5.4.2.1 Analisis Dampak Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap Indeks Pemanfaatan Pangan (IPP) di Regional Lampung Periode 2019-2023

Indeks Pemanfaatan Pangan (IPP) mencerminkan sejauh mana masyarakat memanfaatkan pangan yang tersedia secara optimal untuk memenuhi kebutuhan gizi. Analisis regresi log-linear yang digunakan dalam kajian ini menghasilkan model sebagai berikut:

$$\ln(IP) = 3.6878 + 0.03697 \ln(KPM_BPNT)$$

Keterangan:

IP = Indeks Pemanfaatan Pangan

KPM_BPNT = Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai

Tabel 5.11. Hasil ANOVA Regresi Log-Linear Dampak Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap Indeks Pemanfaatan Pangan (IPP)

Source	DF	Sum of Square	Mean Square	F Statistic (df1, df2)	P-value
Regression (between yj and y)	1	0.005338	0.005338	6.1633 (1,3)	0.08906
Residual (between yj and y)	3	0.002598	0.000866		
Total (between yj and y)	4	0.007937	0.001984		

Sumber: Regresi Log-Linear (diolah)

Analisis regresi log-linear menunjukkan bahwa peningkatan 1 persen jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (KPM BPNT) meningkatkan Indeks Pemanfaatan Pangan (IPP) sebesar 0,03697 persen. Hal ini menunjukkan bahwa BPNT berkontribusi dalam meningkatkan akses rumah tangga miskin terhadap pangan yang lebih beragam dan berkualitas.

Dari segi signifikansi statistik, dengan p-value sebesar 0,08906, model ini signifikan pada tingkat kepercayaan 90 persen ($\alpha = 10$ persen). Nilai R-Squared sebesar 0,6726 menunjukkan bahwa sekitar 67,3 persen variasi dalam IPP dapat

dijelaskan oleh jumlah KPM BPNT, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor di luar model. Selain itu, koefisien korelasi sebesar 0,8201 mengindikasikan hubungan yang kuat antara BPNT dan pemanfaatan pangan.

Dampak positif BPNT terhadap IPP menunjukkan bahwa program ini telah berkontribusi dalam meningkatkan konsumsi pangan bagi rumah tangga miskin. Namun, untuk meningkatkan efektivitasnya, perlu adanya diversifikasi jenis pangan yang dapat dibeli melalui BPNT agar penerima manfaat tidak hanya mengonsumsi beras dan telur, tetapi juga pangan yang kaya protein dan mikronutrien lainnya.

5.4.2.2 Analisis Dampak Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap Prevalensi Stunting (PST) di Regional Lampung Periode 2019-2023

Stunting merupakan salah satu indikator utama dalam menilai status gizi masyarakat dan keberhasilan kebijakan pangan. Untuk mengevaluasi dampak BPNT terhadap Prevalensi Stunting (PST), dilakukan analisis regresi log-linear yang menghasilkan model berikut:

$$\ln(PST) = 5.5953 - 0.1894 \ln(KPM_BPNT)$$

Keterangan:

PST = Prevalensi Stunting (%)

KPM_BPNT = Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai

Tabel 5.12. Hasil ANOVA Regresi Log-Linear Dampak Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap Prevalensi Stunting (PST)

Source	DF	Sum of Square	Mean Square	F Statistic (df1, df2)	P-value
Regression (between yj and y)	1	0.1401	0.1401	6.2183 (1,3)	0.0882
Residual (between yj and y)	3	0.0676	0.02253		
Total (between yj and y)	4	0.2077	0.05193		

Sumber: Regresi Log-Linear (diolah)

Analisis regresi log-linear menunjukkan peningkatan 1% jumlah KPM BPNT menurunkan Prevalensi Stunting (PST) sebesar 0,1894%. Hasil ini menegaskan kontribusi BPNT dalam penurunan stunting melalui peningkatan akses pangan.

Koefisien regresi negatif (-0,0923) menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% dalam jumlah KPM

BPNT akan menurunkan prevalensi stunting sebesar 0,0923 persen. Dengan p-value sebesar 0,0882, hasil ini signifikan pada tingkat kepercayaan 90 persen ($\alpha = 10$ persen). Selain itu, dengan R-Squared sebesar 0,6746, model ini menunjukkan bahwa sekitar 67,5 persen variasi dalam PST dapat dijelaskan oleh jumlah KPM BPNT, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Koefisien korelasi negatif (-0,8213) mengindikasikan hubungan terbalik yang kuat antara BPNT dan prevalensi stunting.

Hasil ini menegaskan bahwa BPNT tidak hanya berperan dalam meningkatkan konsumsi pangan tetapi juga memiliki dampak positif dalam menekan angka stunting. Namun, efektivitas BPNT dalam mengurangi stunting masih bergantung pada kualitas pangan yang dikonsumsi oleh penerima manfaat. Untuk mengoptimalkan dampak BPNT terhadap penurunan stunting, diperlukan kebijakan tambahan seperti:

1) Diversifikasi Pangan dalam BPNT

Mendorong konsumsi pangan dengan sumber protein tinggi seperti ikan, daging ayam, dan kacang-kacangan, serta memperluas opsi makanan kaya zat besi dan vitamin A.

2) Pendampingan Gizi bagi KPM BPNT

Memberikan edukasi mengenai pola makan sehat dan seimbang, terutama bagi ibu hamil dan balita.

3) Integrasi BPNT dengan Program Sanitasi dan Kesehatan

Memastikan akses air bersih dan sanitasi layak bagi rumah tangga penerima manfaat BPNT untuk meningkatkan efektivitas penyerapan nutrisi.

4) Peningkatan Monitoring dan Evaluasi Program

Menggunakan data real-time untuk memantau perubahan pola konsumsi dan status gizi penerima manfaat, serta menyesuaikan kebijakan berdasarkan hasil evaluasi.

Analisis menunjukkan bahwa BPNT memiliki dampak positif dalam meningkatkan Indeks Pemanfaatan Pangan (IPP) dan menurunkan Prevalensi Stunting (PST) di Regional Lampung. Dengan setiap peningkatan 1 persen jumlah KPM BPNT, terdapat peningkatan 0,02317 persen dalam IPP dan penurunan 0,0923 persen dalam PST. Meskipun dampaknya tampak kecil dalam jangka pendek, dalam skala regional, program ini tetap menjadi instrumen kebijakan yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan pangan dan gizi masyarakat miskin.

Dari sisi kebijakan fiskal, alokasi anggaran untuk Bantuan Pangan dapat dipertimbangkan sebagai investasi jangka panjang dalam peningkatan kualitas SDM. Pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan bahwa distribusi Bantuan Pangan berjalan optimal, baik dari segi cakupan penerima manfaat maupun efektivitas dalam meningkatkan konsumsi pangan berkualitas. Selain itu, integrasi BPNT dengan program kesehatan dan pendidikan gizi akan memperkuat dampaknya dalam mengurangi stunting dan meningkatkan ketahanan pangan regional.

5.5 KEY TAKEAWAYS DAN POLICY RESPONSES KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN DI REGIONAL LAMPUNG

Berdasarkan analisis kebijakan ketahanan pangan di Lampung, diperoleh beberapa temuan utama:

- 1) Lampung mengalami surplus beras rata-rata 724.884 ton/tahun selama 2020–2024. Namun, surplus tersebut semakin menurun dalam lima tahun terakhir, dari 767.043 ton (2020) menjadi 710.401 ton (2024), menyusut 7,38 persen. Selain itu, penurunan luas lahan baku sawah di 361.699 hektare (2019) menjadi 337.284 hektare (2024) mencerminkan tantangan serius bagi sektor pertanian Lampung jangka panjang.
- 2) Meskipun surplus beras, Lampung memiliki rantai distribusi beras cukup panjang, dengan Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPPT) rata-rata 14,48 persen, dengan *range* 5,98

- persen - 26,31 persen tergantung pedagang perantara yang terlibat. Hal ini menjadikan seringnya beras menjadi faktor penyumbang inflasi di Lampung. Selain itu, inflasi beras juga diakibatkan oleh adanya pengangkutan gabah basah ke Pulau Jawa, serta lemahnya kapasitas penggilingan di Lampung.
- 3) Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Lampung meningkat pada 2019-2023, dengan kategori 'sangat tahan' pada 2023. Meskipun Indeks Keterjangkauan (IA) membaik, namun Indeks Ketersediaan (IK) tumbuh melambat. Indeks pemanfaatan (IP) juga relatif masih rendah, mencerminkan perlunya konsumsi domestik efektif bagi kesehatan di Lampung.
 - 4) Pada 2024, alokasi belanja K/L di Lampung terkait Ketahanan Pangan sebesar Rp675,52 M, meningkat 0,85 persen (yoy), dengan porsi terbesar untuk Program Ketahanan Sumber Daya Air (43,55 persen) dan Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas (40,56 persen). Sementara itu, alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) terkait ketahanan pangan menurun 3,62 persen (yoy) menjadi Rp213,82 M, didominasi oleh bidang jalan, bidang irigasi, dan bidang pertanian (86,02 persen).
 - 5) Terdapat tiga Proyek Strategis Nasional (PSN) di Lampung yang mendukung ketahanan pangan yaitu Bendungan Way Sekampung (Rp2,13 triliun), Bendungan Margatiga (Rp886,15 miliar), dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bandar Lampung (Rp1,30 triliun). Bendungan Way Sekampung berkontribusi pada irigasi dan suplai air baku, dengan perlunya optimalisasi pemanfaatan. Bendungan Margatiga berperan dalam irigasi, namun masih terdapat tantangan dalam pembebasan lahan. Sementara, SPAM Bandar Lampung berpotensi meningkatkan akses air bersih, dengan fokus pada Sambungan Rumah yang masih perlu ditingkatkan.
 - 6) Pada tahun 2024, realisasi belanja APBD untuk ketahanan pangan sebesar Rp152,07 miliar, menurun 43,46 persen (yoy). Penurunan ini mencerminkan kapasitas fiskal daerah, dimana sebagian besar anggaran sektor pertanian dan perikanan mengalami penurunan cukup dalam.
 - 7) Hasil analisis dampak Bendungan Way Sekampung terhadap akses air bersih, yaitu:
 - a) Hasil Welch's T-test menunjukkan peningkatan signifikan akses air bersih pasca pembangunan bendungan, menegaskan kontribusi infrastruktur tersebut terhadap ketahanan pangan.
 - b) Hasil analisis *Propensity Score Matching* (PSM) lebih lanjut menunjukkan peningkatan kualitas air rumah tangga sebesar 6,77–19,42 persen poin. Hasil ini menegaskan peran Bendungan Way Sekampung.
 - 8) Hasil analisis dampak Bendungan Way Sekampung terhadap produktivitas pertanian menunjukkan bahwa, berdasarkan Welch's T-test, peningkatan produktivitas pertanian setelah beroperasinya Bendungan Way Sekampung tidak signifikan secara statistik. Kendala struktural seperti penguasaan lahan di hulu yang membatasi panen, serta kerusakan sekitar 37 persen saluran irigasi di Lampung menghambat optimalisasi manfaat bendungan bagi produktivitas pertanian.
 - 9) Hasil analisis dampak Bantuan Pangan Non Tunai terhadap Pemanfaatan Pangan dan Prevalensi Stunting, yaitu:
 - a) Analisis regresi log-linear menunjukkan bahwa peningkatan 1 persen jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (KPM BPNT) meningkatkan Indeks Pemanfaatan Pangan (IPP) sebesar 0,03697 persen. BPNT terbukti berkontribusi meningkatkan akses pangan rumah tangga miskin.

- b) Analisis regresi log-linear menunjukkan peningkatan 1 persen jumlah KPM BPNT menurunkan Prevalensi Stunting (PST) sebesar 0,1894 persen. Hasil ini menegaskan kontribusi BPNT dalam penurunan stunting melalui peningkatan akses pangan.

Selanjutnya, saran yang dapat disampaikan atas hasil analisis ketahanan pangan Lampung, antara lain:

- 1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar meningkatkan alokasi DAK Fisik dan DAK Non Fisik sektor pertanian untuk mekanisasi, penyediaan benih unggul, dan rehabilitasi lahan sawah guna mengatasi penurunan luas lahan.
- 2) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) agar mendorong program intervensi harga melalui stabilisasi stok beras daerah dan penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan untuk mengurangi distorsi distribusi.
- 3) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) mengembangkan infrastruktur distribusi lokal guna mengurangi ketergantungan pengiriman gabah basah ke Pulau Jawa dan menekan Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPPT).
- 4) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar mengalokasikan anggaran perbaikan irigasi, terutama pada 37 persen saluran irigasi yang rusak, untuk meningkatkan efektivitas suplai air dari Bendungan Way Sekampung dan Margatiga. Serta, memanfaatkan skema pembiayaan inovatif seperti Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pengembangan infrastruktur ketahanan pangan.
- 5) Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi Lampung agar meningkatkan cakupan dan alokasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), mengingat dampaknya yang signifikan dalam meningkatkan Indeks Pemanfaatan Pangan (IPP) dan menurunkan Prevalensi Stunting (PST).
- 6) Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Badan Pangan Nasional agar memfasilitasi pembentukan lebih banyak *Rice Milling Unit* dan klaster penggilingan padi di Lampung yang berbasis kawasan agar lebih efisien dan terintegrasi dengan produksi petani setempat.

SUPLEMEN 8

Analisis Dampak Belanja Pemerintah

Analisis Dampak Bantuan Pangan Non Tunai Terhadap Pemanfaatan Pangan Dan Prevalensi Stunting Lampung 2019-2023



Dampak Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap Indeks Pemanfaatan Pangan (IPP) Lampung 2019-2023

Model Penelitian 1:

$$\ln(IP) = 3.6878 + 0.03697 \ln(KPM_BPNT)$$

Keterangan:

IP = Indeks Pemanfaatan Pangan

KPM_BPNT = Jumlah Keluarga Penerima

Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (KPM)

Peningkatan 1% dalam jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non-Tunai (KPM BPNT) dapat meningkatkan Indeks Pemanfaatan Pangan (IPP) sebesar 0,03697% (*ceteris paribus*)

Analisis regresi log-linear menunjukkan bahwa peningkatan 1% jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (KPM BPNT) meningkatkan Indeks Pemanfaatan Pangan (IPP) sebesar 0,03697%. BPNT terbukti berkontribusi meningkatkan akses pangan rumah tangga miskin.

Dari segi signifikansi statistik, dengan p-value sebesar 0,08906, model ini signifikan pada tingkat kepercayaan 90% ($\alpha = 10\%$). Nilai R-Squared sebesar 0,6726 menunjukkan bahwa sekitar 67,3% variasi dalam IPP dapat dijelaskan oleh jumlah KPM BPNT, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor di luar model. Selain itu, koefisien korelasi sebesar 0,8201 mengindikasikan hubungan yang kuat antara BPNT dan pemanfaatan pangan.

Dampak positif BPNT terhadap IPP menunjukkan bahwa program ini telah berkontribusi dalam meningkatkan konsumsi pangan bagi rumah tangga miskin. Namun, untuk meningkatkan efektivitasnya, perlu adanya diversifikasi jenis pangan yang dapat dibeli melalui BPNT agar penerima manfaat tidak hanya mengonsumsi beras dan telur, tetapi juga pangan yang kaya protein dan mikronutrien lainnya.



Dampak Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap Prevalensi Stunting (PST) Lampung 2019-2023

Model Penelitian 2:

$$\ln(PST) = 5.5953 - 0.1894 \ln(KPM_BPNT)$$

Keterangan:

PST = Prevalensi Stunting (%)

KPM_BPNT = Jumlah Keluarga Penerima

Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (KPM)

Peningkatan 1% jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (KPM BPNT) dapat menurunkan Prevalensi Stunting (PST) sebesar 0,1894% (*ceteris paribus*)

Analisis regresi log-linear menunjukkan peningkatan 1% jumlah KPM BPNT menurunkan Prevalensi Stunting (PST) sebesar 0,1894%. Hasil ini menegaskan kontribusi BPNT dalam penurunan stunting melalui peningkatan akses pangan.

Koefisien regresi negatif (-0,0923) menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% dalam jumlah KPM BPNT akan menurunkan prevalensi stunting sebesar 0,0923%. Dengan p-value sebesar 0,0882, hasil ini signifikan pada tingkat kepercayaan 90% ($\alpha = 10\%$). Selain itu, dengan R-Squared sebesar 0,6746, model ini menunjukkan bahwa sekitar 67,5% variasi dalam PST dapat dijelaskan oleh jumlah KPM BPNT, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Koefisien korelasi negatif (-0,8213) mengindikasikan hubungan terbalik yang kuat antara BPNT dan prevalensi stunting.

Hasil ini menunjukkan bahwa BPNT tidak hanya berperan dalam meningkatkan konsumsi pangan tetapi juga memiliki dampak positif dalam menekan angka stunting. Namun, efektivitas BPNT dalam mengurangi stunting masih bergantung pada kualitas pangan yang dikonsumsi oleh penerima manfaat. Untuk mengoptimalkan dampak BPNT terhadap penurunan stunting

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

“Jangan pernah menyerah dan putus asa
untuk selalu mencintai negeri kita ini”

-Sri Mulyani-



BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 KESIMPULAN

Dari penulisan Kajian Fiskal Regional Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung tahunan 2024, dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut:

6.1.1 Sasaran Pembangunan dan Tantangan Daerah

- 1) Keselarasan antara RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Lampung mencerminkan fokus pada ekonomi dan pengembangan lokal. Meskipun beberapa indikator makro telah melampaui target, masih terdapat tantangan seperti pelambatan pertumbuhan ekonomi dan lemahnya investasi. Ketergantungan pada ekspor komoditas primer dan kualitas tenaga kerja yang rendah juga menjadi tantangan dalam pencapaian pertumbuhan inklusif.
- 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Lampung menunjukkan keselarasan dalam visi, misi, dan prioritas pembangunan. Secara khusus, RPJMN menekankan pembentukan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing, sementara RPJMD Lampung fokus pada pengembangan ekonomi lokal berbasis pertanian dan wilayah pedesaan. Keselarasan ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan di Lampung berkontribusi optimal terhadap tujuan nasional, sambil tetap responsif terhadap kebutuhan dan potensi lokal.
- 3) Keselarasan capaian indikator makro utama Lampung pada 2024 menunjukkan stabilisasi daya beli masyarakat, namun perlu penguatan kapasitas pembangunan daerah. Beberapa indikator, seperti inflasi (1,57 persen), PDRB per kapita (Rp51,37 juta), dan penurunan emisi gas

rumah kaca (15,86 persen), berhasil melampaui target. Namun, pertumbuhan ekonomi (4,57 persen), tingkat pengangguran terbuka (4,19 persen), dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (6,58 persen) masih perlu dikuatkan. Selain itu, prevalensi stunting di daerah terluar dan dominasi tenaga kerja di sektor informal menunjukkan perlunya upaya besar dalam meningkatkan pemerataan pembangunan.

- 4) Tantangan utama Provinsi Lampung mencakup beberapa aspek, di antaranya adalah ketergantungan pada ekspor komoditas primer yang rentan terhadap fluktuasi harga global, serta dampak perubahan iklim yang signifikan terhadap produktivitas sektor pertanian. Selain itu, ketimpangan infrastruktur perkotaan-pedesaan, kualitas tenaga kerja mayoritas berpendidikan rendah, serta stigmatisasi kondisi keamanan di Lampung masih menjadi tantangan dalam menarik investasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

6.1.2 Outlook Makroekonomi Regional Lampung

- 1) Pertumbuhan ekonomi Lampung mencapai 4,57% secara kumulatif hingga akhir tahun 2024. Capaian ini lebih baik dibandingkan empat tahun sebelumnya, namun masih belum sepenuhnya pulih ke tingkat pertumbuhan sebelum pandemi COVID-19, yang mencapai 5%. Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan mobilitas wisatawan serta penguatan sektor transportasi dan industri. Selain itu, konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) tumbuh signifikan sebesar 11,91%, didorong oleh meningkatnya aktivitas politik dalam rangka Pemilu Februari dan Pilkada November 2024..

- 2) Pada Triwulan IV 2024, ekonomi Lampung tumbuh 5,32% (yoy), melampaui rata-rata Sumatera (4,60%) dan nasional (5,02%), didorong oleh ekspansi industri makanan serta lonjakan ekspor barang dan jasa sebesar 12,31% (yoy). Komoditas unggulan seperti minyak nabati, kopi, teh, dan rempah-rempah menjadi motor utama ekspor.
- 3) Meskipun mengalami kontraksi di Triwulan IV 2024, ekonomi Lampung tetap lebih resilient dibandingkan empat tahun terakhir. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terkontraksi 14,80% (qtq) akibat cuaca ekstrem dan penurunan produksi. Ekspor melemah, sedangkan impor tumbuh signifikan, mencerminkan peningkatan permintaan barang dari luar daerah.
- 4) Struktur PDRB Lampung masih didominasi sektor primer dengan kontribusi pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 26,21%. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tetap menjadi pendorong utama dengan porsi 63,21% terhadap PDRB ADHB. Ketergantungan pada konsumsi domestik dan sektor primer mengindikasikan perlunya diversifikasi ekonomi dan penguatan industri hilir.
- 5) Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di kisaran 6,00% – 6,25% untuk menjaga stabilitas ekonomi dan inflasi tetap terkendali pada level $2,5 \pm 1\%$. Dengan tren inflasi yang terus menurun, kebijakan ini menjadi strategi utama dalam mengelola stabilitas harga sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang seimbang.
- 6) Inflasi Lampung sepanjang 2024 terkendali dalam kisaran sasaran $2,5 \pm 1\%$ (yoy), dengan capaian 1,57% (yoy) pada Desember, selaras dengan inflasi nasional. Stabilitas ini mencerminkan efektivitas kebijakan pengendalian harga, meskipun tantangan tetap ada pada komoditas strategis seperti pangan dan hortikultura. Faktor musiman, ketergantungan pasokan luar daerah, dan cuaca ekstrem menegaskan perlunya strategi pengendalian harga yang lebih adaptif dan terintegrasi.
- 7) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung tahun 2024 mencapai 73,13, tumbuh 0,90% (yoy) dan masuk kategori “tinggi.” Peningkatan ini didorong oleh perbaikan di seluruh aspek utama, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga kesejahteraan ekonomi. Namun, IPM Lampung masih di bawah rata-rata nasional dan beberapa provinsi Sumatera, menandakan perlunya strategi yang lebih intensif dan berkelanjutan untuk mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- 8) Tingkat kemiskinan Lampung per September 2024 mencapai 10,62%, masih di atas rata-rata Sumatera dan nasional. Meski demikian, tren penurunan selama empat tahun terakhir menunjukkan efektivitas upaya peningkatan akses kerja dan program pemberdayaan masyarakat, terutama di wilayah perkotaan. Tantangan masih terlihat di perdesaan, yang membutuhkan pendekatan kebijakan lebih terfokus.
- 9) Rasio Gini Lampung menunjukkan tren positif, dengan nilai 0,301 per September 2024, lebih baik dibandingkan rata-rata Sumatera dan nasional. Capaian ini mencerminkan perbaikan distribusi pendapatan dan efektivitas kebijakan pemerataan ekonomi.
- 10) Pada Agustus 2024, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Lampung mencapai 70,41%, lebih tinggi dari Sumatera (69,76%) namun masih di bawah nasional (70,63%). Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, dengan dominasi pekerja informal berpendidikan rendah. Struktur tenaga kerja Lampung masih terkonsentrasi pada lulusan SD ke bawah sehingga perlunya peningkatan keterampilan dan pendidikan yang lebih tinggi.
- 11) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun dari 4,23% pada Agustus 2023 menjadi 4,19% pada Agustus 2024. Namun, bertambahnya jumlah

pengangguran menunjukkan bahwa pertumbuhan angkatan kerja belum sepenuhnya terserap. Di sisi lain, sektor pertanian mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,09% (*ctc*), sejalan dengan penurunan serapan tenaga kerja sebesar 1,75% poin, menandakan tantangan struktural dalam keberlanjutan sektor ini.

- 12) Nilai Tukar Petani (NTP) Lampung tahun 2024 mencapai 124,97, tumbuh 14,32% (*yoy*), mencerminkan peningkatan daya beli petani. Kenaikan ini terutama didorong oleh lonjakan Nilai Tukar Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) sebesar 29,35% (*yoy*). Berbagai program seperti subsidi, akses permodalan, asuransi usaha tani, serta program Kartu Petani Berjaya (KPB) berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan petani.
- 13) Nilai Tukar Nelayan (NTN) atau NTP subsektor perikanan tangkap di Lampung rata-rata mencapai 111,08 pada 2024, lebih tinggi dibandingkan Sumatera (106,12) dan nasional (102,03). Namun, volatilitas harga ikan terus menyebabkan fluktuasi NTN. Pemerintah Provinsi Lampung terus meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui perluasan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), program asuransi nelayan, serta akses permodalan melalui KUR. Hingga 2024, empat SPBN telah aktif, 1.150 kartu asuransi diterbitkan, dan nelayan semakin difasilitasi dalam memperoleh modal usaha, memperkuat ekosistem perikanan berkelanjutan.

6.1.3 Kinerja Fiskal Regional Lampung

6.1.3.1 Kinerja APBN

- 1) Kinerja APBN Regional Lampung tahun 2024 menunjukkan kinerja yang konsisten dan positif, yang mencerminkan dukungan kebijakan fiskal dalam mendukung perekonomian daerah. Pendapatan Negara melampaui target di tengah ketidakpastian global dan tantangan ekspor. Di sisi lain, Belanja Negara terealisasi secara akseleratif, mendorong pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan.
- 2) Realisasi Pendapatan Negara sebesar Rp12.366,11 miliar, tercapai 104,68 persen dari target, dan berhasil tumbuh 21,15 persen (*yoy*). Hal ini utamanya didorong oleh pertumbuhan kinerja Penerimaan Perpajakan (16,11 persen, *yoy*) yang mengalami pertumbuhan pada Pajak Dalam Negeri (11,63 persen, *yoy*) dan Pajak Perdagangan Internasional (52,82 persen, *yoy*). Di sisi lain, PNPB juga mencatatkan pertumbuhan 0,24 persen (*yoy*) sejalan dengan pertumbuhan Pendapatan BLU.
- 3) Realisasi Belanja Negara sebesar Rp33.419,85 miliar, tercapai 98,45 persen dari pagu, tumbuh 5,41 persen (*yoy*) didukung oleh kinerja penyerapan anggaran Belanja K/L dan penyaluran Dana TKD. Belanja Pegawai dan Belanja Barang mendorong pertumbuhan kinerja Belanja K/L sebesar 6,89 persen (*yoy*). Dari sisi penyaluran TKD mencatatkan pertumbuhan positif 4,70 persen (*yoy*) didorong oleh seluruh komponen DBH, DAU, DAK Fisik, DAK Non Fisik, Dana Desa, dan Insentif Fiskal. Sementara, penyaluran Hibah menunjukkan perlambatan.
- 4) Defisit Anggaran regional Lampung s.d. 31 Desember 2024 sebesar Rp21.053,74 miliar, menyempit 0,75 persen dari tahun sebelumnya. Penurunan defisit ini sejalan dengan kinerja positif penerimaan negara dan pengendalian belanja yang berkualitas. Defisit menandakan bahwa APBN berusaha keras menjadi shock absorber dalam menjaga daya beli masyarakat tengah tantangan fluktuasi harga komoditas global dan ketidakpastian geopolitik yang juga mempengaruhi ekonomi regional Lampung.
- 5) Kredit Usaha Rakyat (KUR) di regional Lampung hingga 31 Desember 2024 telah mencapai Rp10.350,45 miliar, tumbuh 21,57 persen (*yoy*), dan telah disalurkan kepada 208.614 debitur. Peningkatan ini didorong oleh dominasi pelaku usaha di sektor pertanian dan perdagangan sebagai pengguna manfaat KUR, komitmen

perbankan dalam mendukung UMKM, serta pertumbuhan ekonomi. Selain itu, terdapat pembiayaan UMi yang ditargetkan untuk para pelaku UMKM yang masih berskala ultra mikro (non-bankable) dengan realisasi penyaluran mencapai Rp409,49 miliar kepada 86.107 debitur.

- 6) Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) di Provinsi Lampung menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam hal peningkatan aset dan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kanwil DJPb Lampung berperan aktif dalam membina dan memonitor kinerja Satker BLU, mendorong mereka untuk lebih mandiri melalui penerapan tata kelola yang baik. Dengan adanya lima BLU yang beroperasi di wilayah ini, masing-masing memiliki profil dan jenis layanan yang beragam, mulai dari pendidikan hingga layanan kesehatan. Peningkatan nilai aset tetap BLU dari tahun 2022 hingga 2024 mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan publik.
- 7) Untuk memastikan efektivitas belanja APBN dalam pembangunan daerah, diperlukan penguatan tata kelola anggaran, peningkatan koordinasi, dan optimalisasi pelaksanaan program. Reformasi kebijakan harus mengatasi hambatan administratif, mempercepat pemenuhan syarat TKD, serta meningkatkan kapasitas SDM daerah. Sinergi pusat-daerah dan pemanfaatan teknologi digital perlu dioptimalkan untuk mengatasi tantangan struktural seperti perubahan organisasi, dispensasi SPM, dan pagu minus. Dengan langkah strategis ini, akselerasi belanja dapat dilakukan secara optimal, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan memastikan pembangunan berkelanjutan.

6.1.3.2 Kinerja APBD

- 1) Pendapatan Daerah Regional Lampung tahun 2024 terkumpul Rp30.720,16 miliar atau 91,47% dari target, mencatat pertumbuhan

6,58% (yoy). Kenaikan ini didorong oleh kinerja positif seluruh komponen Pendapatan Daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (5,46%, yoy), Transfer Pemerintah Pusat (5,70%, yoy), Transfer Antar Daerah (25,07%, yoy) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah (129,39%, yoy)

- 2) Realisasi PAD mencapai Rp6.710,77 miliar atau 78,05% dari target, tumbuh 5,46% (yoy). Peningkatan ini sejalan dengan pertumbuhan positif pada Pendapatan Pajak Daerah (2,92%, yoy), Retribusi Daerah (953,89%, yoy), serta Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (114,24%, yoy). Rasio pajak daerah Lampung pada tahun 2024 meski mengalami peningkatan namun masih tergolong rendah, yaitu 1,17%, menunjukkan potensi PDRD yang belum teroptimalkan.
- 3) Pendapatan Daerah Lampung sangat bergantung pada Transfer Pemerintah Pusat (TKD), yang menyumbang 72,96% dari total pendapatan daerah 2024, dengan Indeks Kemandirian Fiskal regional sebesar 0,22 yang menunjukkan perlunya diversifikasi sumber pendapatan untuk mencapai kemandirian yang lebih baik.
- 4) Provinsi Lampung meningkatkan PAD melalui digitalisasi pajak kendaraan, optimalisasi PAP (e-PAP), kebijakan keringanan PKB dan BBNKB, serta digitalisasi PBBKB. Sinergi opsen pajak dan pengelolaan BUMD juga diperkuat, mendorong kemandirian fiskal dan pertumbuhan pendapatan daerah yang berkelanjutan.
- 5) Belanja Daerah Lampung hingga akhir tahun 2024 mencapai Rp30.314,84 miliar atau 88,96% dari pagu, tumbuh 5,60% (yoy). Belanja Operasi tercatat sebesar Rp21.517,99 miliar atau 89,99% dari pagu, meningkat 5,85% (yoy), dengan kontribusi terbesar pada belanja Pegawai sebesar 54,28%. Belanja Modal tercapai Rp3.711,52 miliar atau 80,30% dari pagu, didorong oleh investasi dalam infrastruktur. Belanja Transfer juga tumbuh 92,78% (yoy), didorong oleh pertumbuhan

transfer bagi hasil ke desa dan Bantuan Keuangan ke Pemda lainnya.

- 6) Belanja tertinggi berdasarkan fungsi adalah pada Pelayanan Umum sebesar Rp9.905,17 miliar, tumbuh 5,67% (yoy), sementara belanja terendah adalah pada Pariwisata sebesar Rp99,74 miliar, turun 6,07% (yoy).
- 7) Kontribusi belanja daerah terhadap PDRB Lampung menunjukkan tren penurunan meskipun secara nominal meningkat, mencerminkan dominasi pertumbuhan ekonomi oleh sektor non-pemerintah. Peningkatan belanja pegawai memperkuat daya beli, namun perlu diimbangi dengan optimalisasi belanja modal untuk meningkatkan efektivitas pengeluaran pemerintah dalam mendorong pembangunan daerah.
- 8) Belanja dan belanja modal per kapita bervariasi di Lampung, dengan Kota Metro memiliki rasio belanja tertinggi, sementara Kabupaten Mesuji memiliki rasio belanja modal tertinggi.
- 9) APBD Lampung mencatat surplus pada keseimbangan umum dan primer, menunjukkan kebijakan fiskal kontraktif, namun masih perlu peningkatan belanja untuk mendukung daya beli masyarakat. Pembiayaan netto turun 24,94% (yoy), terutama disebabkan oleh kontraksi penerimaan pembiayaan yang lebih besar dibandingkan penurunan pengeluaran pembiayaan.
- 10) BLUD di Provinsi Lampung terus berkembang dengan 353 unit pada 2024, didominasi oleh sektor kesehatan dan pendidikan. Kemandirian BLUD tetap terjaga dengan mayoritas rasio lebih tinggi dari 0,75, meskipun mengalami fluktuasi. Sementara itu, aset BLUD mengalami pertumbuhan dinamis, menandakan perlunya sinergi yang lebih optimal dalam pengelolaan keuangan dan investasi.

6.1.3.3 Analisis Konsolidasi APBN dan APBD

- 1) Realisasi anggaran konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lampung sampai dengan akhir tahun 2024 mencatatkan realisasi

Pendapatan sebesar Rp21.497,87 miliar dan realisasi Belanja sebesar Rp43.767,94 miliar, sehingga menghasilkan defisit anggaran konsolidasian sebesar Rp22.265,07 miliar. Dari sisi Pembiayaan terealisasi sebesar Rp465,86 miliar.

- 2) Realisasi pendapatan negara konsolidasian tahun 2024 membukukan realisasi sebesar 21.497,87 miliar, tumbuh 10,07% (yoy) yang dipengaruhi oleh penerimaan pajak konsolidasi yang tumbuh sebesar 18,48% (yoy), dan pendapatan transfer konsolidasi tumbuh sebesar 1,17% (yoy) dan pendapatan hibah konsolidasi tumbuh signifikan sebesar 193,63% (yoy). Realisasi belanja konsolidasian sebesar Rp43.762,94 miliar, tumbuh 8,56% (yoy), didominasi oleh pertumbuhan Transfer ke Daerah. Belanja perkapita Konsolidasi tahun 2024 tercatat sebesar Rp4,65 juta.
- 3) Keseimbangan umum konsolidasian regional Lampung tahun 2024 berada pada posisi defisit Rp22.265,07 miliar. Angka defisit ini melebar 7,13% dibanding periode yang sama tahun 2023. Pembiayaan *netto* konsolidasian sebesar Rp465,86 miliar sehingga menghasilkan SiKPA sebesar Rp21.799,21 miliar.

6.1.4 Harmonisasi Belanja K/L dan DAK Fisik

- 1) Program belanja Kementerian/Lembaga (K/L) melalui Rincian Output (RO) Harmonis dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik di Lampung menunjukkan fokus pada sektor-sektor kritis. Alokasi anggaran tahun 2024 meliputi jalan sebesar Rp365,26 miliar (99,98 persen), kesehatan Rp2,27 miliar (91,26 persen), pendidikan Rp115,50 miliar (93,03 persen), air minum Rp12,56 miliar (98,71 persen), sanitasi Rp1,85 miliar (96,93 persen), dan pertanian Rp26,01 miliar (95,25 persen). Setiap sektor mendapatkan perhatian yang sesuai dengan kebutuhan regional dan prioritas pembangunan.
- 2) Hingga 31 Desember 2024, total realisasi anggaran DAK Fisik yang selaras dengan RO Harmonis mencapai Rp1.238,16 miliar atau

96,33 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp1.285,31 miliar yang didistribusikan untuk seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Lampung. Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik telah mencapai realisasi sebesar Rp513,68 miliar atau 98,13 persen dari pagu sebesar Rp523,45 miliar, menunjukkan komitmen yang tinggi dan kontribusi signifikan dalam mendukung pelaksanaan DAK Fisik Lampung.

- 3) Meski secara keseluruhan realisasi dan pencapaian output menunjukkan pencapaian yang baik, Belanja RO Harmonis DAK Fisik tidak luput dari berbagai kendala dan tantangan dalam pelaksanaannya, seperti revisi dan blokir anggaran, keterlambatan penerbitan petunjuk teknis, arus mutasi, pergantian pejabat perbendaharaan, dan masalah koordinasi antara pemerintah daerah dan K/L. Faktor eksternal seperti akses menuju lokasi kegiatan, resistensi masyarakat, keterbatasan jaringan, cuaca dan keterlambatan dalam penerbitan petunjuk teknis juga mempengaruhi eksekusi kegiatan.
- 4) Pelaksanaan DAK Fisik yang menjadi fokus harmonisasi juga menghadapi berbagai tantangan. Terdapat tidak salur DAK Fisik bidang Sanitasi dan bidang Air Minum yang merupakan satu paket kegiatan pada Kabupaten Mesuji, penyesuaian pemda terhadap regulasi dan implementasi sistem baru, serta pergantian pejabat di OPD berdampak pada terhambatnya optimalisasi pemanfaatan DAK Fisik bagi pembangunan infrastruktur Lampung.
- 5) Pemerintah telah menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan sinkronisasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Strategi tersebut mencakup penyalarsan perencanaan anggaran untuk meningkatkan dampak sinergis, evaluasi rutin untuk memastikan target tercapai, koordinasi dengan KPPN dan Kanwil DJPb untuk menyelesaikan masalah pelaksanaan anggaran, serta penekanan pada harmonisasi kebijakan fiskal nasional dan daerah. Langkah-langkah ini

bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan dampak dari pelaksanaan program.

- 6) Belanja K/L menunjukkan pola distribusi anggaran yang merata di sektor-sektor penting seperti jalan, kesehatan, pendidikan, air minum, sanitasi, dan pertanian. Fokusnya meliputi pemeliharaan infrastruktur jalan, peningkatan mutu pendidikan, pembangunan dan pemeliharaan sistem air minum, serta peningkatan layanan sanitasi. Upaya ini mencerminkan komitmen untuk memperkuat aksesibilitas, konektivitas, dan kualitas hidup di seluruh regional Lampung.

6.1.5 Reviu Atas Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Regional Lampung

- 1) Lampung mengalami surplus beras rata-rata 724.884 ton/tahun selama 2020–2024. Namun, surplus tersebut semakin menurun dalam lima tahun terakhir, dari 767.043 ton (2020) menjadi 710.401 ton (2024), menyusut 7,38%. Selain itu, penurunan luas lahan baku sawah di dari 361.699 hektare (2019) menjadi 337.284 hektare (2024) mencerminkan tantangan serius bagi sektor pertanian Lampung jangka panjang.
- 2) Meskipun surplus beras, Lampung memiliki rantai distribusi beras cukup panjang, dengan Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPPT) rata-rata 14,48%, dengan range 5,98%- 26,31% tergantung pedagang perantara yang terlibat. Hal ini menjadikan seringnya beras menjadi faktor penyumbang inflasi di Lampung. Selain itu, inflasi beras juga diakibatkan oleh adanya pengangkutan gabah basah ke Pulau Jawa, serta lemahnya kapasitas penggilingan di Lampung.
- 3) Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Lampung meningkat pada 2019-2023, dengan kategori 'sangat tahan' pada 2023. Meskipun Indeks Keterjangkauan (IA) membaik, namun Indeks Ketersediaan (IK) tumbuh melambat. Indeks pemanfaatan (IP) juga relatif masih rendah, mencerminkan perlunya konsumsi domestik efektif bagi kesehatan di Lampung.

- 4) Pada 2024, alokasi belanja K/L di Lampung terkait Ketahanan Pangan sebesar Rp675,52 M, meningkat 0,85% (yoy), dengan porsi terbesar untuk Program Ketahanan Sumber Daya Air (43,55%) dan Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas (40,56%). Sementara itu, alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) terkait ketahanan pangan menurun 3,62% (yoy) menjadi Rp213,82 M, didominasi oleh bidang jalan, bidang irigasi, dan bidang pertanian (86,02%).
- 5) Terdapat tiga Proyek Strategis Nasional (PSN) di Lampung yang mendukung ketahanan pangan yaitu Bendungan Way Sekampung (Rp2,13 triliun), Bendungan Margatiga (Rp886,15 miliar), dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bandar Lampung (Rp1,30 triliun). Bendungan Way Sekampung berkontribusi pada irigasi dan suplai air baku, dengan perlunya optimalisasi pemanfaatan. Bendungan Margatiga berperan dalam irigasi, namun masih terdapat tantangan dalam pembebasan lahan. Sementara, SPAM Bandar Lampung berpotensi meningkatkan akses air bersih, dengan fokus pada Sambungan Rumah yang masih perlu ditingkatkan.
- 6) Pada tahun 2024, realisasi belanja APBD untuk ketahanan pangan sebesar Rp152,07 miliar, menurun 43,46% (yoy). Penurunan ini mencerminkan kapasitas fiskal daerah, dimana sebagian besar anggaran sektor pertanian dan perikanan mengalami penurunan cukup dalam.
- 7) Hasil analisis dampak Bendungan Way Sekampung terhadap akses air bersih, yaitu:
 - a) Hasil Welch's T-test menunjukkan peningkatan signifikan akses air bersih pasca pembangunan bendungan, menegaskan kontribusi infrastruktur tersebut terhadap ketahanan pangan.
 - b) Hasil analisis Propensity Score Matching (PSM) lebih lanjut menunjukkan peningkatan kualitas air rumah tangga sebesar 6,77% – 19,42%. Hasil ini

menegaskan peran Bendungan Way Sekampung.

- 8) Hasil analisis dampak Bendungan Way Sekampung terhadap produktivitas pertanian menunjukkan bahwa, berdasarkan Welch's T-test, peningkatan produktivitas pertanian setelah beroperasinya Bendungan Way Sekampung tidak signifikan secara statistik. Kendala struktural seperti penguasaan lahan di hulu yang membatasi panen, serta kerusakan sekitar 37% saluran irigasi di Lampung menghambat optimalisasi manfaat bendungan bagi produktivitas pertanian.
- 9) Hasil analisis dampak Bantuan Pangan Non Tunai terhadap Pemanfaatan Pangan dan Prevalensi Stunting, yaitu:
 - a) Analisis regresi log-linear menunjukkan bahwa peningkatan 1% jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (KPM BPNT) dapat meningkatkan Indeks Pemanfaatan Pangan (IPP) sebesar 0,03697%. BPNT terbukti berkontribusi meningkatkan akses pangan rumah tangga miskin.
 - b) Analisis regresi log-linear menunjukkan peningkatan 1% jumlah KPM BPNT dapat menurunkan Prevalensi Stunting (PST) sebesar 0,1894%. Hasil ini menegaskan kontribusi BPNT dalam penurunan stunting melalui peningkatan akses pangan.

6.2 REKOMENDASI

Berdasarkan analisis ekonomi, fiskal, harmonisasi belanja pusat-daerah, dan ketahanan pangan di Lampung, dapat disampaikan *policy responses* berikut:

- 1) Dinas Pariwisata, BPKAD, Bappeda agar memasukan sektor pariwisata sebagai sasaran prioritas pembangunan, yang diterjemahkan ke dalam penyusunan KUA-PPAS dan RKPd guna meningkatkan diversifikasi ekonomi dari sektor basis pertanian yang pertumbuhannya terus menurun. Hal ini juga dapat diperkuat dengan

sinergi perencanaan pemerintah pusat dan daerah melalui diimplementasikan dengan baik sesuai PP 1/2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (HKFN).

- 2) Bappeda Lampung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Investasi/BKPM agar membangun kawasan industri terpadu di wilayah strategis seperti Bandar Lampung dan Lampung Selatan; selain itu. membentuk klaster industri berbasis komoditas unggulan (misalnya, klaster industri makanan dan minuman berbasis kopi dan kelapa) dengan target peningkatan rata-rata kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB per tahun dari 19,69 persen menjadi di atas 25 persen dalam 5 tahun.
- 3) Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi Lampung agar meningkatkan cakupan dan alokasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), mengingat dampaknya yang signifikan dalam meningkatkan Indeks Pemanfaatan Pangan (IPP) dan menurunkan Prevalensi Stunting (PST). Serta, mengembangkan program pelengkap seperti edukasi gizi bagi penerima manfaat untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan. Hal lainnya yaitu mendorong skema penyediaan BPNT yang berbasis produk lokal guna mendukung pasar petani lokal dan memastikan distribusi pangan lebih efisien.
- 4) Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Badan Pangan Nasional agar memfasilitasi pembentukan lebih banyak *Rice Milling Unit* (RMU) dan klaster penggilingan padi di Lampung yang berbasis kawasan agar lebih efisien dan terintegrasi dengan produksi petani setempat.
- 5) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar mengalokasikan anggaran perbaikan irigasi, terutama pada 37% saluran irigasi yang rusak, untuk meningkatkan efektivitas suplai air dari Bendungan Way Sekampung dan Margatiga. Serta, memanfaatkan skema pembiayaan inovatif seperti Kerja Sama Pemerintah dengan

Badan Usaha (KPBU) untuk pengembangan infrastruktur ketahanan pangan.

- 6) Guna mendukung kapasitas sektor basis pertanian di Lampung, Dinas Perdagangan Provinsi Lampung dapat mengkaji kembali untuk menambah Gudang Skema Resi Gudang (SRG), agar akses UMKM kepada Subsidi Skema Resi Gudang (SSRG) sebagai pembiayaan bersubsidi meningkat, serta mendukung penyimpanan 22 komoditas strategis untuk produktivitas Lampung (gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan, garam, gambir, teh, kopra, timah, bawang merah, ikan, pala, ayam karkas beku, gula kristal putih, kedelai, tembakau, dan kayu manis).
- 7) Biro Perekonomian bersama dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) agar dapat mendorong perluasan skema pembiayaan dengan bunga rendah tersubsidi, serta meningkatkan sosialisasi tentang program Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Ultra Mikro (UMi), dan Fasilitas Dana Bergulir (FDB) kepada UMKM rintisan serta kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS).
- 8) Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi/Kab/Kota di Lampung perlu memitigasi penurunan kontribusi pada sektor pertanian dengan mendorong pengembangan sektor-sektor lain seperti pariwisata dan industri kreatif, guna meningkatkan basis pajak daerah khususnya Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas hotel, restoran, hiburan, listrik, dan parkir.
- 9) Guna menanggulangi keterbatasan SDM pengelola keuangan pemerintah kabupaten/kota, Badan Kepegawaian Daerah terkait dapat meningkatkan kapasitas SDM aparatur perpajakan daerah di Bapenda melalui skema kerja sama rekrutmen dan pelatihan melalui jalur pendidikan tinggi kedinasan seperti PKN-STAN.
- 10) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Pemerintah Provinsi Lampung agar

meningkatkan alokasi DAK Fisik dan DAK Non Fisik sektor pertanian untuk perbaikan irigasi, penyediaan benih unggul, dan rehabilitasi lahan sawah guna mengatasi penurunan luas lahan.

- 11) Tim Pengendali Inflasi Daerah Pusat dan Daerah agar mendorong program intervensi harga tidak hanya melalui operasi pasar, namun juga menstabilkan stok beras daerah, menguatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan, dan menekan Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPPT).
- 12) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM mendorong pemberdayaan ekonomi melalui program padat karya desa untuk menyediakan pekerjaan maupun menyediakan akses modal usaha kepada pelaku UMKM desa melalui program KUR dengan bunga rendah, serta menyediakan pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.
- 13) Pemerintah daerah Lampung agar mengoptimalkan *creative financing* melalui *Special Mission Vehicle* (SMV) Kementerian Keuangan untuk mendukung pembangunan daerah. PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan infrastruktur melalui *Project Development Facility* (PDF) dan *Regional Infrastructure Financing* (RIF), sementara PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) menyediakan skema penjaminan bagi proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF) dapat mendukung pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), sedangkan PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (PT LPEI) membantu akses pembiayaan bagi usaha ekspor, khususnya sektor pertanian dan perikanan. Pemanfaatan PT Geo Dipa Energi juga dapat dijangkau untuk pengembangan energi panas bumi. Untuk itu, Pemda perlu memperkuat kapasitas dalam menyusun studi kelayakan, membangun skema pembiayaan

berkelanjutan, dan meningkatkan koordinasi dengan SMV serta sektor swasta.

- 14) Untuk mengoptimalkan manfaat Bendungan Way Sekampung, Pemerintah provinsi dan kabupaten Pringsewu perlu segera menyelesaikan permasalahan penguasaan lahan sepihak dan perbaikan saluran irigasi yang rusak atau belum tersambung. Perlu dibentuk tim terpadu yang melibatkan Dinas PUPR, Dinas Pertanian, serta aparat desa untuk memastikan konektivitas irigasi dari bendungan hingga ke lahan pertanian.
- 15) OPD teknis dan BPKAD agar memastikan bahwa usulan DAK Fisik benar-benar selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategis (Renstra) sektor terkait, dengan mempertimbangkan aspek kesiapan lahan, desain teknis, dan kemampuan anggaran pendamping. Penguatan koordinasi antara Bappeda, OPD teknis, dan DPRD menjadi kunci agar proyek yang diusulkan memiliki justifikasi yang kuat dan siap dieksekusi tepat waktu.
- 16) BPKAD dapat mengkoordinasikan tim khusus untuk memantau dan mengevaluasi progres fisik dan keuangan proyek DAK secara berkala. Digitalisasi sistem monitoring berbasis GIS dan *dashboard real-time* dapat digunakan untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan mengidentifikasi hambatan sejak dini.
- 17) BPKAD dan dinas terkait agar menetapkan strategi pemeliharaan berkelanjutan dengan mengalokasikan anggaran pemeliharaan dalam APBD dan melibatkan pengelola kompeten dalam operasionalnya. Evaluasi manfaat proyek perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan dampak ekonomi dan sosialnya benar-benar sesuai dengan tujuan awal.
- 18) Untuk mengatasi stigma kejahatan sosial di Lampung dan meningkatkan investasi serta pariwisata, Dinas Pariwisata, Dinas Kominfo, dan Aparat Penegak Hukum perlu memperkuat keamanan serta membangun citra positif daerah. Misalnya, melalui penerapan sistem

keamanan berbasis teknologi, dan saluran aduan respons cepat terhadap tindak kriminal. Di sisi lain, kampanye media yang menonjolkan keberhasilan pembangunan, potensi wisata, serta budaya lokal perlu dioptimalkan dengan menggandeng tokoh publik dan media nasional.

- 19) Biro/Bagian Perekonomian Pemda dan BPD Lampung perlu mendorong implementasi KUR berbasis Klaster dan skema relaksasi KUR bagi petani gurem. Optimalisasi KUR Klaster dengan membantu pembentukan kelompok tani berbasis komoditas unggulan, didukung

pendampingan teknis dari Dinas Pertanian dan akses pasar melalui kerja sama dengan *offtaker*.

- 20) Kemenko perekonomian perlu meneruskan kebijakan relaksasi KUR bagi petani gurem (lahan terbatas) sebagaimana kondisi di Lampung, melalui kebijakan peningkatan frekuensi kesempatan dapat mengajukan kredit lebih dari 4 kali. Bank penyalur dapat diberikan fleksibilitas mengurangi persyaratan agunan dengan skema penjaminan, serta didorong untuk menerapkan pendekatan kredit berbasis *credit scoring* dari rekam jejak usaha petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Aplikasi MONSAKTI, <https://monsakti.kemenkeu.go.id/>
- Aplikasi OMSPAN, <https://spanint.kemenkeu.go.id/>
- Aplikasi OM-SPAN TKD, <https://spanint.kemenkeu.go.id/tkd/#/home/login>
- Aplikasi SIKD Next Generation, <https://sikd.kemenkeu.go.id/tkd/alokasi/realisasi>
- Aplikasi SINTESA, <http://sintesa.kemenkeu.go.id/>
- Aplikasi SATUDJA, <https://satudja.kemenkeu.go.id/>
- Aplikasi SIKP, <https://sikp.kemenkeu.go.id/login>
- Aplikasi SIKPUMi, <https://sikp.umi.kemenkeu.go.id/>
- Aplikasi SLIM, <https://slim-smi.kemenkeu.go.id/slim/app/login.php>
- Ahli KPBU Indonesia. (t.thn.). Diambil kembali dari Lesson learned KPBU SPAM Bandar Lampung.: <https://www.ahlikpbuindonesia.or.id/berita-dan-kegiatan/lesson-learned-kpbu-spam-bandar-lampung/>
- APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia). (2024). Laporan tahunan APJII 2024.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Lampung dalam Angka 2024*.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Perkembangan Indikator Makro Sosial Ekonomi Lampung Volume 11, Nomor 4.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Berita Resmi Statistik*. Retrieved from <https://lampung.bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Berita Resmi Statistik*. Diambil kembali dari <https://www.bps.go.id/>
- Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat. (2025). *Data dan Realisasi Penerimaan Bea Cukai di Provinsi Lampung Sampai Dengan Tahun 2024*. Bandar Lampung: Kementerian Keuangan.
- Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu. (2025). *Data dan Realisasi Penerimaan PNPB Kekayaan Negara di Provinsi Lampung sampai dengan Tahun 2024*. Bandar Lampung: Kementerian Keuangan.
- Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. (2025). *Data dan Realisasi Perpajakan di Provinsi Lampung s.d. Tahun 2024*. Bandar Lampung: Kementerian Keuangan.
- Kanwil DJPb Provinsi Lampung. (2025). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah (LKPD-TW), Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPK-TW), dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah (LSKP-TW) Provinsi Lampung 31 Desember 2024. Bandar Lampung: Kanwil DJPb Provinsi Lampung.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). (2023). Layanan Informasi dan Investasi (LINTAS) EBTKE.
- Kementerian Keuangan. (2025). Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah: <https://djpk.kemenkeu.go.id/>
- Kementerian Keuangan. (2025). *APBN Kita*. <https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita>
- Margaretha, R. (2017). Analisis klasifikasi mitos dalam tradisi lisan masyarakat Lampung. *Jurnal Pendidikan Progresif*, 7(2), 117-126.

- Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. (2017). Roadmad Peningkatan Pembangunan Manusia Provinsi Lampung Tahun 2015-2025.
- Pemerintah Lampung. (2025). *Laporan Realisasi Anggaran lingkup Lampung sampai dengan Tahun 2024*.
- Pemerintah Provinsi Lampung. (2019). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.
- Pemerintah Provinsi Lampung. (2023). Rancangan Akhir RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024.
- Pemerintah Provinsi Lampung. (2024). Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- Pemerintah Repblik Indonesia. (2019). Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar 1945*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). Peraturan Presiden 75 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rincian APBN Tahun 2023.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
- Pranoto, H. &. (2018). Identifikasi nilai kearifan lokal (local wisdom) piil pesenggiri dan perannya dalam pelayanan konseling lintas budaya. , 3(2), 36-42. *Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia*.
- Sampurna, A. F. (2018). Menuju Manual Review Desentralisasi Fiskal. Makalah. *Disajikan dalam Rapat Kerja Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (AKN V dan AKN VI) BPK di Banyuwangi*.
- Viani, P. T. (2021). Karakteristik sosial yang mempengaruhi persepsi dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan, 11(1). Tengawang: Jurnal Ilmu Kehutanan.
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Lampung. (2024).

DAFTAR ISTILAH

Andil inflasi

Sumbangan perkembangan harga suatu komoditas/kelompok barang/kota terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan.

APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR, dan ditetapkan dengan undang-undang.

BLU

Instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Bea Masuk

Pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang memasuki daerah pabean.

Bea Keluar

Pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang keluar dari daerah pabean.

BI 7 Days Reverse Repo Rate

Suku bunga referensi kebijakan moneter dan ditetapkan dalam Rapat Dewan Gubernur setiap bulannya.

BMN

Barang Milik Negara. Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan

belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BPP

Belanja Pemerintah Pusat. Bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan untuk menyelenggarakan tugas pemerintah pusat.

CTC

Cumulative to Cumulative. Perbandingan dua peristiwa yang diukur dengan basis kumulatif waktu. (Contoh: penerimaan pemerintah pada Triwulan I s.d Triwulan IV 2024 dibandingkan dengan penerimaan pemerintah pada Triwulan I s.d Triwulan IV 2023)

Cukai

Pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu, yaitu: konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan

DAK

Dana Alokasi Khusus. Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

DAU

Dana Alokasi Umum. Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

DBH

Dana Bagi Hasil. DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada

Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dana Desa

Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan dana desa ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

DTK

Dana Transfer Khusus. Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

DTU

Dana Transfer Umum. Dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Insentif fiskal

Dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah berdasarkan kinerja tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja di bidang, dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan nasional.

KPB

Kartu Petani Berjaya (KPB) merupakan program yang disalurkan oleh Provinsi Lampung untuk mendistribusikan pupuk subsidi kepada petani. Selain untuk penebusan pupuk, kartu ini juga dapat digunakan untuk: Informasi laporan keuangan usaha, Peminjaman KUR, Kepastian pemasaran hasil panen.

KPBU

Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha. Kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam

penyediaan infrastruktur dan/atau layanannya untuk kepentingan umum.

KPPN

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab menyalurkan dana dari kas negara ke berbagai satuan kerja.

LKPD-TW

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah yang mencakup Laporan Keuangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

LKPK-TW

Laporan yang disusun dengan cara mengkonsolidasikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LKPP-TW) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah (LKPD-TW).

Local Taxing Power

Salah satu pilar dalam penyusunan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD) yang memberikan panduan bagi daerah untuk meningkatkan pendapatan, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Local Tax Ratio

Perbandingan antara total penerimaan pajak maupun retribusi daerah dengan angka Produk Regional Domestik Bruto.

MTM

Month to month. Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya.

PDRB

Produk Domestik Regional Bruto. Pendapatan suatu daerah yang mencerminkan hasil kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah tertentu.

QTQ

Quarter to Quarter. Perbandingan dua peristiwa yang diukur antara satu kuartal dengan kuartal sebelumnya. Contoh: penerimaan pemerintah pada triwulan IV 2024 dibandingkan dengan penerimaan pemerintah pada triwulan III 2024).

SILPA

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA dapat digunakan kembali pada tahun berikutnya.

TKD

Transfer ke Daerah. Dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi fiskal.

TPAK

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Proporsi penduduk usia kerja yang aktif dalam pasar tenaga kerja, baik yang sedang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan.

UMKM

UMKM atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki pengertian sebagai Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang

YOY

Year on year. Perbandingan dua peristiwa yang diukur dengan basis tahunan. (Contoh: penerimaan pemerintah pada triwulan IV 2024 dibandingkan dengan penerimaan pemerintah pada triwulan IV 2023).



Terima kasih pembaca. Sampaikan kritik dan saran Anda untuk meningkatkan kualitas Kajian Fiskal Regional Lampung dengan *scan barcode* di bawah ini:



Atau klik tautan dibawah ini:

<https://forms.office.com/r/tpPLHK8ffE?origin=lprLink>





Kanwil DJPb Provinsi Lampung

Jalan Cut Mutia Nomor 23A, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung

Telepon : (0721) 471308 / (0721) 487423

Website : <https://djpbb.kemenkeu.go.id/kanwil/lampung/id/>

